



Pendataan Keluarga

Desa Cerdas Mandiri Lestari

Hasil akhir dari laporan pendataan yang berhasil diselesaikan memberikan pemahaman perlu dilakukannya sinergi atas hal-hal positif di antara pemangku kepentingan dalam mengembangkan kawasan perdesaan secara partisipatif di tengah globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi beserta ekonomi yang bersifat multi-polar dengan nilai-nilai luhur bangsa. Sinergi tersebut, dapat dilakukan melalui penekanan pada pengembangan keunggulan kompetitif yang berbasis sumber daya masyarakat desa (*knowledge based*), sehingga diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya alam di kawasan perdesaan (*resource based*) yang dimiliki bangsa ini secara lestari. Untuk itu, program DCML yang telah dan akan dilakukan oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) di berbagai kawasan perdesaan di Indonesia dengan menginisiasi pendataan merupakan proses awal yang tepat dalam rangka membangun fondasi DCML. Namun demikian, berangkat dari pengalaman pendataan yang telah dilakukan perlu kiranya memberikan ruang yang lebih besar kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap paradigma "Desa Membangun" untuk berkolaborasi secara aktif dalam proses pengembangan DCML dari awal hingga akhir.



RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwiranggang No. 112
Kl. Leuwiranggang, Kec. Nagas, Kota Depok 16956
Telp. 021-84311102
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERSA
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



9 786233 372010

Pendataan Keluarga
Desa Cerdas Mandiri Lestari

Tim LPPM Universitas Trilogi



Pendataan Keluarga

Desa Cerdas Mandiri Lestari

Desa Bantaragung, Kec. Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat
Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah
Desa Madura, Kec. Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah

Tim LPPM Universitas Trilogi

Pendataan Keluarga

Desa Cerdas Mandiri Lestari

Desa Bantaragung, Kec. Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat
Desa Cilogok, Kec. Cilogok, Banyumas, Jawa Tengah
Desa Madura, Kec. Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah

Pendataan Keluarga

Desa Cerdas Mandiri Lestari

Desa Bantaragung, Kec. Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat
Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah
Desa Madura, Kec. Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah

Dr. P. Setia Lenggono

Heny Agustin, S.P., M.Si.

Dr. Arman

Warid, S.P., M.Si.

Budhi Purwandaya, Ph.D.

Umar Al Faruq, S.Kom., M.Kom.

Dr. Zainul Kisman

Oki Kurniawan, S.Sn., M.Ds.

Ir. Yodfiatinda, M.M., Ph.D.

Homa P. Harahap, S.Si., M.M.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Tim LPPM Universitas Trilogi

Pendataan Keluarga Desa Cerdas Mandiri Lestari/Tim LPPM Universitas Trilogi
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xviii, 238 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 185

ISBN 978-623-372-010-6

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3120 RAJ

Tim LPPM Universitas Trilogi

PENDATAAN KELUARGA DESA CERDAS MANDIRI LESTARI

Desa Bantaragung, Kec. Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat

Desa Cilongok, Kec. Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah

Desa Madura, Kec. Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah

Cetakan ke-1, September 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Shara Nurachma

Setter : Eka Rinaldo

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan perkenanan-Nya buku Pendataan Keluarga Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura ini dapat diselesaikan dengan baik. Pendataan dengan menggunakan metode sensus ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi lebih valid yang dapat digunakan dalam program pengembangan Desa Cerdas Mandiri Lestari (DCML). Dalam pelaksanaan sensus, LPPM Universitas Trilogi sebagai pelaksana kegiatan berupaya melibatkan mahasiswa dan masyarakat desa (kader desa) dalam rangka pengembangan kapasitas dan praksis pembelajaran secara partisipatif. Pendataan yang dilakukan di tiga desa berhasil mengikutsertakan 60 mahasiswa Universitas Trilogi dari berbagai disiplin ilmu bersama 60 orang pemuda-pemudi desa yang dibekali pelatihan sebagai enumerator.

Proses pelaksanaan pendataan berlangsung selama 12 hari di Desa Bantaragung dengan tiga dosen pendamping yaitu Warid, S.P., M.Si., Budhi Purwandaya, Ph.D., dan Homa Harahap, S.Si., M.M. Sementara itu 17 hari di Desa Cilongok dengan tiga dosen pendamping yaitu Heny Agustin, S.P., M.Si., Dr. Arman, dan Oki Kurniawan, S.Sn., M.Ds. Serta 17 hari di Desa Madura dengan tiga dosen pendamping yaitu Umar Al Faruq, S.Kom., M.Kom., Dr. Zainul Kisman, dan Ir. Yodfiatfinda, M.M., Ph.D.

Kapasitas dan pengalaman enumerator di lapangan yang bervariasi menyebabkan pelaksanaan pendataan yang dilakukan secara konvensional tidak bisa diprediksi akurasi secara cepat dan tepat. Dalam hal ini, harus diakui bahwa penggunaan perangkat teknologi dalam input data sensus ternyata sangat fundamental bagi proses penghimpunan data yang dilakukan. Adanya jeda antara waktu penghimpunan data di lapangan dengan penginputan data yang dilakukan membuat beberapa data yang perlu dikonfirmasi di lapangan tidak bisa dilakukan secara langsung sehingga menimbulkan galat (error) data. Hal ini menjadi salah satu kelemahan pendataan konvensional yang dilakukan. Implikasinya tim membutuhkan ‘ruang’ untuk verifikasi dan validasi data sehingga menimbulkan biaya tambahan, energi, dan alokasi waktu. Sementara terdapat sejumlah data yang harus diverifikasi langsung ke lapangan.

Ketidaksiapan sistem entri data menyebabkan data-data yang telah terhimpun harus dientri secara manual ke dalam Ms. Excel yang membutuhkan ketepatan dan akurasi dalam penginputan data. Realitas ini menyebabkan terjadinya kesenjangan ketika data Ms. Excel diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi DCML yang dibuat menyusul kebutuhan *user*. Perlu diketahui bahwa pengembangan sistem aplikasi DCML yang dikembangkan oleh LPPM Universitas Trilogi merupakan program kerja tambahan di luar agenda sebagaimana tercantum dalam “Proposal Pengumpulan Data & Verifikasi *Blueprint* DCML”. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, sistem aplikasi DCML berhasil dibuat sebagai awalan untuk pengembangan sistem *big data* DCML.

Buku Pendataan Keluarga Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura yang berhasil diselesaikan oleh tim LPPM Universitas Trilogi, terbagi ke dalam tujuh bab. Bab *pertama* berisi latar belakang, yang memberikan gambaran arti penting pendataan bagi proses awal pengembangan DCML di ketiga desa tersebut. Bab *kedua* berisi waktu dan tempat, metode, serta analisis, yang memberikan landasan bagi berlangsungnya kegiatan pendataan berbasis sensus dan proses analisis yang dilakukan terhadap hasil dari pengumpulan data. Bab *ketiga* berisi tentang hasil pendataan Desa Bantaragung. Meliputi; profil, sejarah singkat, pemerintahan, potensi sumber daya lahan, topografi, uji tanah, dan pendataan kependudukan Desa Bantaragung. Bab *keempat* berisi tentang hasil pendataan Desa Cilongok. Meliputi; profil, sejarah singkat,

pemerintahan, potensi sumber daya lahan, topografi, uji tanah, dan pendataan kependudukan Desa Cilongok. Bab *kelima* berisi tentang hasil pendataan Desa Madura. Meliputi; profil, sejarah singkat, pemerintahan, potensi sumber daya lahan, topografi, uji tanah, dan pendataan kependudukan Desa Madura. Bab *keenam* berisi tentang pengembangan program DCML di tiga desa, yang menjadi poin-poin penting dari analisis terhadap hasil pendataan, berikut rekomendasi yang diajukan dalam pengembangan program DCML. Meliputi; spesifikasi program bantuan sosial, spesifikasi program bantuan ekonomi, dan spesifikasi program dukungan aksi kolaboratif. Terakhir bab *ketujuh* berisi tentang kesimpulan yang menjadi penutup dari buku ini.

Hasil akhir dari buku pendataan keluarga yang berhasil diselesaikan memberikan pemahaman perlu dilakukannya sinergi atas hal-hal positif di antara pemangku kepentingan dalam mengembangkan kawasan perdesaan secara partisipatif di tengah globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi beserta ekonomi yang bersifat multi-polar dengan nilai-nilai luhur bangsa. Sinergi tersebut, dapat dilakukan melalui penekanan pada pengembangan keunggulan kompetitif yang berbasis sumber daya masyarakat desa (*knowledge based*), sehingga diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya alam di kawasan perdesaan (*resource based*) yang dimiliki bangsa ini secara lestari. Untuk itu, program DCML yang telah dan akan dilakukan oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) di berbagai kawasan perdesaan di Indonesia dengan menginisiasi pendataan merupakan proses awal yang tepat dalam rangka membangun fondasi DCML. Namun demikian, berangkat dari pengalaman pendataan yang telah dilakukan perlu kiranya memberikan ruang yang lebih besar kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap paradigma “Desa Membangun” untuk berkolaborasi secara aktif dalam proses pengembangan DCML dari awal hingga akhir.

Semoga buku Pendataan Keluarga Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura ini bermanfaat dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengembangan program DCML. Atas nama LPPM sebagai pelaksana pendataan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi waktu dan pemikirannya selama kegiatan pendataan hingga

proses penyelesaian buku ini. Dalam hal ini, kami perlu memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada YDSM yang telah memberikan kepercayaan kepada LPPM Universitas Trilogi untuk melakukan kegiatan pendataan dimaksud. Masukan dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan buku ini sangat kami harapkan, bagi perbaikan dalam melakukan pendataan selanjutnya dan kegiatan-kegiatan kolaboratif terkait berikutnya.

Jakarta, Juni 2021
Koordinator Tim Penulis

Dr. P. Setia Lenggono



DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan | 2 |
| | |
| BAB 2 METODOLOGI | 3 |
| A. Waktu dan Tempat | 3 |
| B. Metode Pengumpulan Data | 3 |
| C. Analisis Data | 4 |
| | |
| BAB 3 HASIL PENDATAAN DESA BANTARAGUNG | 5 |
| A. Profil Desa Bantaragung | 5 |
| B. Sejarah Singkat Desa Bantaragung | 6 |
| C. Pemerintahan Desa Bantaragung | 9 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| D. | Potensi Sumber Daya Lahan Desa Bantaragung | 11 |
| E. | Topografi Desa Bantaragung | 12 |
| F. | Uji Tanah Desa Bantaragung | 13 |
| G. | Pendataan Kependudukan Desa Bantaragung | 17 |
| BAB 4 | HASIL PENDATAAN DESA CILONGOK | 43 |
| A. | Profil Desa Cilongok | 43 |
| B. | Sejarah Singkat Desa Cilongok | 44 |
| C. | Pemerintahan Desa Cilongok | 45 |
| D. | Potensi Sumber Daya Lahan Desa Cilongok | 48 |
| E. | Topografi Desa Cilongok | 48 |
| F. | Uji Tanah Desa Cilongok | 50 |
| G. | Pendataan Kependudukan Desa Cilongok | 55 |
| BAB 5 | HASIL PENDATAAN DESA MADURA | 97 |
| A. | Profil Desa Madura | 97 |
| B. | Sejarah Singkat Desa Madura | 99 |
| C. | Sejarah Pemerintahan dan Orientasi Pembangunan Desa | 104 |
| D. | Potensi Sumber Daya Lahan Desa Madura | 107 |
| E. | Topografi Desa Madura | 108 |
| F. | Uji Tanah Desa Madura | 109 |
| G. | Potensi Budidaya Pertanian di Desa Madura | 113 |
| H. | Pendataan Kependudukan Desa Madura | 116 |
| BAB 6 | PENGEMBANGAN PROGRAM DCML DI TIGA DESA | 145 |
| A. | Program Bantuan Sosial | 145 |
| B. | Program Bantuan Ekonomi | 154 |
| C. | Program Dukungan Aksi Kolaboratif | 172 |

| | |
|--------------------------|------------|
| BAB 7 PENUTUP | 183 |
| DAFTAR PUSTAKA | 185 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 189 |
| BIODATA PENULIS | 235 |

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------------|---|-----|
| Gambar 1.1 | Konsep Desa Cerdas Mandiri Lestari | 2 |
| Gambar 3.1 | Peta Rupa Bumi Desa Bantaragung | 6 |
| Gambar 3.2 | Sejarah Kepemimpinan Desa Bantaragung | 10 |
| Gambar 3.3 | Peta Desa Bantaragung | 13 |
| Gambar 3.4 | Salah Satu Bentuk Tandon Air | 27 |
| Gambar 3.5 | Pengolahan Tradisional Melinjo Menjadi Emping | 35 |
| Gambar 4.1 | Sejarah Kepemimpinan | 47 |
| Gambar 4.2 | Kit-Test Perangkat Uji Tanah Kering | 51 |
| Gambar 4.3 | Proses Pengujian Tanah dengan PUTK | 52 |
| Gambar 4.4 | Rumah Keluarga Pra KS yang Direkomendasikan untuk Dibedah | 69 |
| Gambar 4.5 | Keluarga KS1 yang Telah Menerima Bantuan Lantainisasi | 70 |
| Gambar 4.6 | Usaha Warung dan Ternak Kambing dengan Modal Sendiri | 78 |
| Gambar 4.7 | Saluran Tata Niaga Gula Kelapa | 91 |
| Gambar 5.1 | Peta Rupa Bumi Desa Madura | 108 |

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------------|--|----|
| Tabel 3.1 | Hasil Uji Tanah pada Dua Wilayah di Desa Bantaragung | 14 |
| Tabel 3.2 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | 18 |
| Tabel 3.3 | Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Kelompok Usia | 18 |
| Tabel 3.4 | Jumlah KK dan Anggota Keluarga Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan | 19 |
| Tabel 3.5 | Tingkat Pendidikan | 20 |
| Tabel 3.6 | Penduduk dan Kelompok Kesejahteraan Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 21 |
| Tabel 3.7 | Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan | 22 |
| Tabel 3.8 | Kelompok Keluarga Sejahtera dan Posyandu | 23 |
| Tabel 3.9 | Tipe Rumah yang Ditinggali Keluarga | 24 |
| Tabel 3.10 | Status Kepemilikan Rumah Tinggal | 24 |
| Tabel 3.11 | Jenis Lantai Rumah dan Status Keluarga | 25 |
| Tabel 3.12 | Tipe Sanitasi Keluarga | 25 |
| Tabel 3.13 | Sumber Air Keluarga | 26 |
| Tabel 3.14 | Sumber Dana Bagi Usaha Pertanian | 28 |

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| Tabel 3.15 | Kepemilikan Lahan Pertanian | 29 |
| Tabel 3.16 | Status Kepemilikan Lahan | 29 |
| Tabel 3.17 | Rata-Rata Pendapatan Sektor Pertanian | 30 |
| Tabel 3.18 | Pendapatan di Bawah UMK Berdasarkan Penghasilan Pertanian dan Campuran | 31 |
| Tabel 3.19 | Pendapatan per-Keluarga/Bulan | 32 |
| Tabel 3.20 | Sumber Penghasilan Penduduk | 32 |
| Tabel 3.21 | Penjualan Hasil Produksi | 33 |
| Tabel 3.22 | Jalur Pemasaran Produk | 34 |
| Tabel 3.23 | Budidaya Perikanan | 34 |
| Tabel 3.24 | Produksi Komoditi Pertanian (Kg) | 36 |
| Tabel 3.25 | Budidaya Peternakan | 37 |
| Tabel 3.26 | Keterkaitan Variabel Sosiodemografi, Ekonomi, dan Kemiskinan | 40 |
| Tabel 4.1 | Bentangan Wilayah | 49 |
| Tabel 4.2 | Hasil Uji Tanah dengan PUTK | 52 |
| Tabel 4.3 | Status Keluarga Sejahtera | 56 |
| Tabel 4.4 | Jiwa Menganggur Usia 15–64 Tahun Berdasarkan Rentang Usia | 58 |
| Tabel 4.5 | Jumlah Penduduk Menganggur Berdasarkan Rentang Usia dan Pendidikan Akhir | 60 |
| Tabel 4.6 | Penduduk Berdasarkan Rentang Usia | 61 |
| Tabel 4.7 | Penduduk Menurut Pendidikan | 62 |
| Tabel 4.8 | Jenis Pekerjaan Penduduk di Usia Produktif | 63 |
| Tabel 4.9 | Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah (SD, SMP, SMA) | 64 |
| Tabel 4.10 | Data Keluarga yang Memiliki Anak Usia 2–5 Thn | 65 |
| Tabel 4.11 | Data Keluarga yang Memiliki Balita Tetapi Tidak Ikut Posyandu | 66 |
| Tabel 4.12 | Data Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan | 67 |
| Tabel 4.13 | Tipe Rumah Keluarga Pra Sejahtera dan KS1 | 68 |

| | | |
|-------------------|---|-----|
| Tabel 4.14 | Status Kepemilikan Rumah Keluarga Pra Sejahtera dan KS1 | 69 |
| Tabel 4.15 | Lantai Rumah Keluarga Pra KS dan KS1 | 71 |
| Tabel 4.16 | Tipe Sanitasi Keluarga Pra KS dan KS 1 | 73 |
| Tabel 4.17 | Sumber Air Keluarga | 74 |
| Tabel 4.18 | Kepala Keluarga Pertanian Berdasarkan Akses Modal | 77 |
| Tabel 4.19 | Kepemilikan Lahan Pertanian | 79 |
| Tabel 4.20 | Status Kepemilikan Lahan | 81 |
| Tabel 4.21 | Keluarga Berpendapatan di Bawah UMR Desa Cilongok | 83 |
| Tabel 4.22 | Rata-Rata Pendapatan Sektor Pertanian Keluarga Desa Cilongok | 85 |
| Tabel 4.23 | Pendapatan Per Kapita Keluarga | 85 |
| Tabel 4.24 | Sumber Penghasilan Desa Cilongok | 86 |
| Tabel 4.25 | Jalur Pemasaran Produk Pertanian | 88 |
| Tabel 4.26 | Jenis Budidaya Perikanan dan Jumlah Produksi | 92 |
| Tabel 4.27 | Jenis Budidaya Pertanian dan Jumlah Produksi | 94 |
| Tabel 4.28 | Jenis Budidaya Peternakan dan Jumlah Ternak | 95 |
| Tabel 5.1 | Daftar Nama Kuwu/Kepala Desa | 105 |
| Tabel 5.2 | Hasil Uji Tanah dari Jalan Wanareja–Langensari (lokasi 7,34° LS dan 108,63° BT) | 109 |
| Tabel 5.3 | Status Keluarga Sejahtera | 117 |
| Tabel 5.4 | Jumlah Penduduk yang Menganggur Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 118 |
| Tabel 5.5 | Keluarga dengan Anak Usia 2–5 Tahun dan Tidak PAUD | 120 |
| Tabel 5.6 | Data Penduduk Berdasarkan Rentang Usia | 122 |
| Tabel 5.7 | Tipe Rumah Keluarga | 123 |
| Tabel 5.8 | Sumber Air Keluarga | 124 |
| Tabel 5.9 | Tipe Penerangan Keluarga Sejahtera | 125 |
| Tabel 5.10 | Keluarga yang Mempunyai Balita dan Mengikuti PAUD/TK | 126 |

| | | |
|-------------------|--|-----|
| Tabel 5.11 | Keluarga Mempunyai Balita | 127 |
| Tabel 5.12 | Keluarga Mempunyai Balita dan Ikut Posyandu | 128 |
| Tabel 5.13 | Jumlah Anak Usia Sekolah | 130 |
| Tabel 5.14 | Jumlah Anak yang Sekolah | 131 |
| Tabel 5.15 | Jumlah Anak Sekolah dan Bekerja | 132 |
| Tabel 5.16 | Jenis Pekerjaan yang Ditekuni Anak Sekolah | 133 |
| Tabel 5.17 | Jumlah Ibu Rumah Tangga yang Bekerja | 135 |
| Tabel 5.18 | Letak Pertanian | 137 |
| Tabel 5.19 | Kepemilikan Lahan | 138 |
| Tabel 5.20 | Kepemilikan Lahan Berdasarkan Status Keluarga Desa Madura | 139 |
| Tabel 5.21 | Status Lahan Berdasarkan Surat Kepemilikan | 139 |
| Tabel 5.22 | Jenis Komoditi yang Diusahakan Keluarga | 140 |
| Tabel 5.23 | Usaha Perikanan Air Tawar | 141 |
| Tabel 5.24 | Jenis Usaha Peternakan | 142 |
| Tabel 5.25 | Sumber Pembiayaan Usaha Tani | 142 |

PENDAHULUAN

Latar Belakang

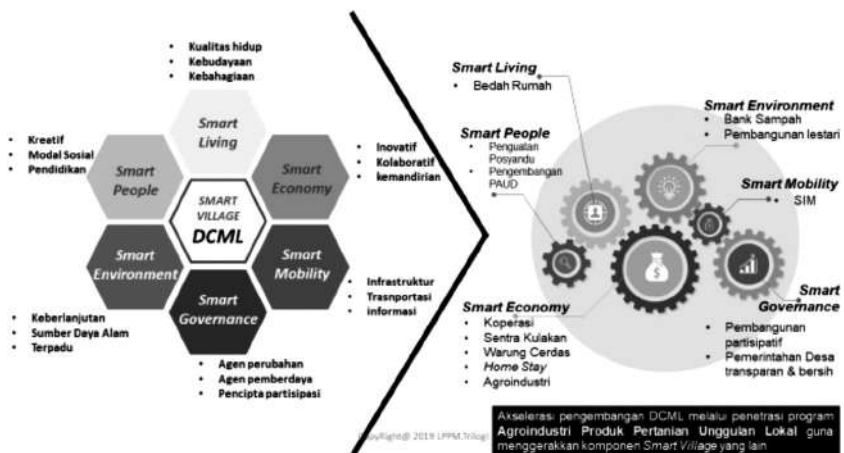
Pembangunan telah membuat kehidupan bangsa ini lebih baik dari kehidupan sebelumnya saat belenggu penjajahan. Namun harus diakui, setelah proklamasi kemerdekaan ternyata masih banyak anggota masyarakat yang tergolong miskin dan harus menghadapi persaingan global. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin masih besar di desa dan kemiskinannya bertambah dalam dan parah (BPS 2018).

Selain kemiskinan, desa pun menghadapi kesenjangan dalam hubungannya dengan kota, sekalipun desa memiliki potensi modal sosial dan ekonomi yang besar. Desa merupakan wilayah negara yang terkecil, representasi dari miniatur negara. Desa merupakan ujung tombak peradaban. Kekuatan sebuah negara sangat bergantung dari produktivitas ekonomi, kekhasan adat, dan tradisi wilayah perdesaan menjadi pilar kokoh bagi sebuah negara di era global. Oleh karena itu program pemberdayaan harus dimulai dari desa.

Dalam rangka mengurangi jumlah warga miskin dan upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta membangun desa berdaya saing global, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM) bekerja sama dengan instansi terkait (salah satunya Universitas Trilogi), menggagas dan mengajak masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan keluarga miskin di perdesaan. Program pemberdayaan keluarga miskin tersebut dilakukan secara terpadu dan menyeluruh

agar seluruh fungsi keluarga untuk hidup layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat terpenuhi.

Konsep Desa Cerdas Mandiri Lestari (DCML) diusung sebagai bentuk desa yang masyarakatnya mampu bergotong-royong, serta cerdas dalam memanfaatkan sumber daya lokalnya secara lestari guna menciptakan kesejahteraan dan kemandirian, sebagai wujud pengamalan Pancasila. Membentuk desa cerdas berarti membangun satu kesatuan secara utuh termasuk orang di dalamnya (*smart people*), lingkungannya (*smart environment*), mobilitasnya (*smart mobility*), ekonominya (*smart economic*), kehidupannya (*smart living*), serta pemerintahnya (*smart government*) (Gambar 1.1).



Gambar 1.1 Konsep Desa Cerdas Mandiri Lestari

Berkaitan dengan itu, Universitas Trilogi mengambil peran secara aktif dalam pengembangan DCML melalui pendekatan program Agroindustri dan produk unggulan lokal guna menggerakkan berbagai komponen dalam pembangunan desa. Universitas Trilogi bersama-sama YDSM, berupaya bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, industri (koperasi dan BUMN), serta kekuatan media sosial dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi masyarakat desa, khususnya di Desa Cilongok, Desa Bantaragung, dan Desa Madura.

Salah satu langkah awal untuk mewujudkan komitmen tersebut adalah dengan melakukan pendataan. Pelaksanaan proses pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan perencanaan, merupakan proses awal strategis dalam pengembangan *Big Data* yang sangat fungsional dalam mendukung program DCML pada era industri 4.0.

METODOLOGI

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2019 di tiga lokasi desa yaitu: 1) Desa Bantaragung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat; 2) Desa Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah; 3) Desa Madura, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

B. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan secara sensus pada keseluruhan rumah tangga di tiga lokasi desa melalui observasi dan wawancara dengan panduan daftar pertanyaan semi terstruktur (Lampiran 1). Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait serta studi pustaka baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini, menggunakan rumah tangga dan komunitas sebagai unit analisis. Variabel makro komunitas dianalisis dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan interviu dengan informan kunci.

Profil komunitas diperoleh melalui beberapa FGD dan interviu kelompok yang diadakan dalam komunitas, secara spontan maupun dijadwalkan, selama masa awal hingga proses pendataan berakhir. Pengumpulan data kualitatif juga dilakukan melalui wawancara

mendalam terhadap informan kunci antara lain pemimpin formal dan informal di komunitas, seperti kepala desa, pemimpin lembaga/ organisasi komunitas, tokoh masyarakat dan agama.

Sementara sensus rumah tangga dimaksudkan untuk menggeneralisasi indikator yang berdimensi struktural, sehingga mampu mengukur potensi rumah tangga dan dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif yang akan digunakan untuk mencari hubungan (korelasi). Sensus ini didesain sebagai prototipe pendataan yang akan dilakukan pada desa-desa berikutnya, sehingga untuk sampai pada hasil pendataan yang sempurna dan merepresentasikan keseluruhan data desa secara valid masih membutuhkan perbaikan instrumen/indikator dari evaluasi implementasi di lapangan.

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif terdiri dari dua bagian. Pertama, analisis deskriptif terhadap data yang dihasilkan dari pengamatan langsung (observasi) dan hasil studi pustaka baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan; dan kedua, analisis deskriptif terhadap data wawancara mendalam dengan *key person* dan hasil notulensi FGD yang telah dilakukan.

Analisis pendekatan kuantitatif dilakukan dengan terlebih dahulu membagi data menjadi dua bagian. Pertama, data kuantitatif dari sumber primer, yakni melalui sensus keluarga yang dikumpulkan untuk melengkapi bahan analisis, serta untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Kedua, data kuantitatif dari sumber-sumber sekunder yang dikumpulkan untuk melengkapi bahan analisis kuantifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk data kelompok pertama dilakukan dengan melakukan penafsiran terhadap hasil analisis sesuai dengan teori-teori yang relevan, untuk data kelompok kedua diperlukan pengujian keaslian dan kredibilitas dokumen, serta untuk mengungkapkan keterkaitan hubungan antar variabel. Secara keseluruhan, data yang telah dikumpulkan, dientri, dan diverifikasi hingga validitasnya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan Big Data yang presisi sebagai data program DCML.

HASIL PENDATAAN DESA BANTARAGUNG

A. Profil Desa Bantaragung

Luas wilayah Desa Bantaragung adalah 9,40 km², menjadikannya memiliki wilayah terluas di Kecamatan Sindangwangi, dengan tingkat kepadatan 374 jiwa/km². Sebagaimana wilayah tropis, Desa Bantaragung mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar daripada musim kemarau, dengan jumlah sembilan bulan hujan dalam setiap tahunnya dan curah hujan 1.500–2.000 mm/tahun. Hal itu disebabkan karena wilayahnya yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai (**Gambar 3.1**). Berada pada koordinat bujur (6° 48' 43"), koordinat lintang (108° 22' 40"), ketinggian 500–800 mdpl, dengan suhu rata-rata harian mencapai 18–30°C.

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 25 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi hotmix dengan kondisi rusak ringan mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 45 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 3 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak ringan

mengakibatkan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 15 menit.



Gambar 3.1 Peta Rupa Bumi Desa Bantaragung

B. Sejarah Singkat Desa Bantaragung

Sejarah Desa Bantaragung tidak bisa dipisahkan dari Desa Sindangpano sebagai desa tertua di Kecamatan Rajagaluh yang sebelumnya bernama Koleberes. Menurut cerita tetua setempat, daerah Koleberes dulunya merupakan wilayah dari Kerajaan Pajajaran, pasca disatukannya dua kerajaan bersaudara, Galuh dan Pajajaran oleh Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Jayadewata yang juga bergelar Sri Baduga Maharaja merupakan putra Dewa Niskala (Raja Galuh yang memerintah di Kawali) dan menantu Susuktunggal (Raja Pajajaran yang memerintah di Pakuan) yang berhasil menyatukan kembali kerajaan Sunda-Galuh dan berkuasa atas Kerajaan Pajajaran. Karena luasnya wilayah Kerajaan Pajajaran, pemerintahan di Galuh Kawali diserahkan Sri Baduga Maharaja pada saudaranya Ningratwangi (1428–1501).

Keberadaan Desa Bantaragung dimulai ketika terjadi kesepakatan di antara para tetua dan Kuwu Kampung Koleberes (sekarang Desa Sindangpano) yang ketika itu masih di bawah pemerintahan Kerajaan Galuh. Sekitar paruh kedua abad ke-11 tersebut, para tetua kampung dan Kuwu Kampung Koleberes tampaknya bersepakat untuk memperluas daerahnya ke sebelah timur, mengembangkan dua area pertanian baru. Kedua area pertanian yang baru dirintis tersebut, kemudian dinamakan Babakan Keboncau, karena banyak ditumbuhi pohon pisang (sekarang Desa Bantaragung) dan Kawung Luwuk, karena banyak ditumbuhi pohon kawung/aren (sekarang Dusun Malarhayu). Jika cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi dan penanggalan masa pemerintahan di Desa Bantaragung adalah benar (**Gambar 3.2**), maka diperkirakan Bantaragung sebagai

sebuah permukiman yang memiliki pemerintahan sendiri, telah ada sejak berkuasanya Rakeyan Saunggalah di Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu hingga 1297.

Singkat cerita, meningkatnya hasil pertanian di kedua area pertanian baru tersebut, telah mendorong banyak masyarakat Kampung Koleberes yang memutuskan untuk tinggal dan menetap di sana. Namun, kemakmuran yang dinikmati warga penghuni perkampungan baru tersebut, menjadi sasaran garong (maling) yang selalu mengganggu ketenteraman masyarakat, sehingga banyak mengorbankan harta/benda maupun nyawa. Selain banyaknya binatang buas (macan) yang kerap mengintai keamanan warga setempat. Untuk mengatasi keadaan yang

Menurut naskah wangsakerta, pemerintahan selanjutnya diteruskan oleh Prabu Jayaningrat (1501–1528) yang menjadi Ratu Galuh terakhir yang berkedudukan di Kawali, sebelum pusat pemerintahannya dipindahkan ke Cimaragas, Ciamis oleh keturunannya yaitu Prabu Cipta Sanghyang. Akibat terdesak oleh penetrasi Kesultanan Cirebon yang berupaya meng-Islamkan Kerajaan Galuh, hingga pusat pemerintahannya di Kawali dan sekitarnya dikuasai Kesultanan Cirebon. Selanjutnya Kesultanan Cirebon menyerahkan tampuk kekuasaan Kerajaan Galuh Kawali sejak 1528 pada Pangeran Dungkut (Lungkut), putra Lanangbuana, Raja Kuningan yang telah menjadi vasalnya, sebagai pengganti Prabu Jayaningrat. Pemerintahan selanjutnya, diteruskan oleh keturunan Pangeran Dungkut hingga berakhirnya pemerintahan Dalem Adipati Singacala pada 1718. Sementara Kerajaan Galuh benar-benar berakhir pasca ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram pada 1595 dan statusnya diturunkan menjadi kadipaten.

mengkhawatirkan tersebut, para tetua dan Kuwu Kampung Koleberes kembali berembuk untuk mencari orang yang mampu menciptakan rasa aman bagi warga setempat. Mereka bersepakat akan menunjuk orang mumpuni tersebut, sebagai kuwu pada kedua permukiman baru. Hingga akhirnya terpilih Timbang Pinayungan sebagai kuwu pertama Kampung Babakan Keboncau dan Kawung Luwuk yang kemudian berganti nama menjadi Kampung Batara Agung.

Pemerintahan bercorak Hindu di Kampung Batara Agung tampaknya mulai meredup seiring dengan masuknya pengaruh Islam yang disebarkan oleh Kesultanan Cirebon pasca tergusurnya Kerajaan Galuh. Kesultanan Cirebon yang telah memisahkan diri dari wilayah Kerajaan Pajajaran, pasca “maklumat tidak akan membayar upeti pada Kerajaan Pajajaran” oleh Syarif Hidayatullah pada 1482, menjadi kekuatan utama di pantai utara Jawa Bagian Barat yang berusaha mengislamkan Kerajaan Galuh. Puncaknya, terjadi pada 1528, ketika pusat pemerintahan Galuh di Kawali dan sekitarnya jatuh dan dikuasai Kesultanan Cirebon.

Kesultanan Cirebon sendiri mengalami kekisruhan pada 1677, akibat invasi Kerajaan Mataram yang menawan sejumlah pengeran, hingga dapat diselamatkan oleh Kesultanan Banten atas bantuan Trunojoyo. Untuk menghindari kisruh yang semakin meluas dalam keluarga besar Kesultanan Cirebon, Sultan Ageng Tirtayasa (Sultan Banten) memutuskan melantik Syamsuddin (Martawijaya) sebagai Sultan Kasesepuhan Cirebon, Badruddin (Kartawijaya) sebagai Sultan Kanoman, dan Nasiruddin (Wangsakerta) sebagai (Panembahan) Peguron Cirebon yang dikukuhkan di Keraton Pakungwati pada 1679. Namun masalah internal keluarga besar Kesultanan Cirebon tidak selesai begitu saja, situasi ini dimanfaatkan Pemerintah Kolonial Belanda yang sedang berperang dengan Kesultanan Banten, mengirimkan pasukan untuk mengagitasi Cirebon. Sampai dengan 1681, Pemerintah Kolonial Belanda berhasil memaksa Kesultanan Kasesepuhan, Kesultanan Kanoman, dan Peguron Cirebon untuk menandatangani perjanjian kerja sama persahabatan pada 7 Januari 1681 di depan Komisioner Jacob van Dijk dan Kapten Joachim Michiefs.

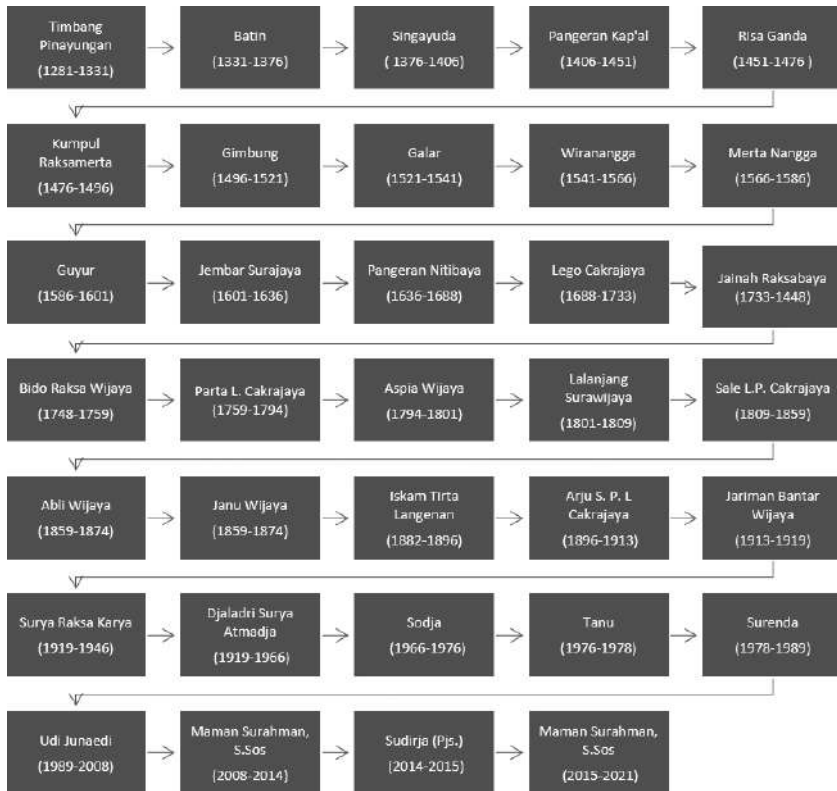
Perjanjian itu menempatkan Pemerintah Hindia Belanda sebagai pemegang monopoli perdagangan komoditas kayu, beras, gula, lada, serta Jati di wilayah Cirebon, sekaligus menjadikan penguasa-penguasa lokal di Cirebon sebagai protektoratnya. Akibatnya perekonomian di perdesaan Cirebon hampir secara keseluruhan disewakan kepada orang-orang Cina oleh para bupati dan residen yang berkuasa. Diikuti penyerahan tenaga kerja, dan pajak, serta hasil pertanian penduduk yang dibeli dengan harga sangat rendah oleh residen. Secara politis, perjanjian tersebut ternyata memberikan kompensasi pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda atas klaim Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman pada wilayah taklukannya di selatan (Gunung Ceremai), yaitu; Sumedang, Galuh, dan Sukapura. Realitas tersebut dapat menjelaskan, mengapa perlawanan terbuka Pangeran Raja Kanoman (Putera Mahkota Kesultanan Kanoman) pada pemerintah kolonial mendapatkan dukungan tidak hanya dari tokoh agama (seperti Mirsa) yang dipatahkan Belanda pada 1788, hingga tertangkapnya Pangeran Raja Kanoman pada 1793 yang diasingkan ke Ambon pada 1796. Pemberontakan kemudian dilanjutkan Bagus Rangin yang memimpin pemberontakan rakyat Cirebon pada 1802.

Bagus Rangin merupakan sosok pemimpin pemberani keturunan pembesar daerah Blandong, Rajagaluh yang terletak di kaki Gunung Ceremai. Perlawanan yang dipimpin Bagus Rangin setidaknya telah memaksa Pemerintah Hindia Belanda pada 1 September 1806 membuat perjanjian dengan Sultan Sepuh Djoharuddin dan Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin (ayah dan adik Pengeran Raja Kanoman), untuk mengembalikan Pangeran Raja Kanoman ke Cirebon guna meredakan pemberontakan yang dipimpin Bagus Rangin. Akhirnya atas dasar kesepakatan keluarga, Pangeran Raja Kanoman dibebaskan dari pengasingan di Ambon dan mendirikan Kesultannya Kacirebonan pada 1808 dengan gelar Sultan Carbon Amirul Mukminin. Namun kembalinya Pangeran Raja Kanoman di tampuk kekuasaan, tidak menyurutkan gerakan perjuangan yang sedang berlangsung. Hingga ditangkapnya Bagus Rangin dan pengikutnya pada 27 Juni 1812 dan dihukum mati di Desa Karangsembung oleh tentara Inggris Raya yang sebelumnya telah mengalahkan tentara Hindia Belanda pasca penandatanganan Kapitulasi Tuntang pada Mei 1811.

C. Pemerintahan Desa Bantaragung

Berdasarkan jejak-jejak historis yang terhimpun di atas, kawasan Gunung Ceremai di mana Desa Bantaragung berada, memiliki posisi strategis sebagai area sempadan selatan sebaran budaya Sunda Galuh, yang kemudian menjadi area proktetorat Kesultanan Cirebon yang secara politis memiliki kedudukan istimewa dalam eksistensi Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan yang mewarisinya. Proses tarik menarik “adukuat” di antara keduanya terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Dimulai sejak Kuwu Galar yang memimpin sejak 1521–1541 hingga Kuwu Pangeran Nitibaya yang memimpin pada 1636–1688,

ketika identitas perkampungan Batara Agung yang identik dengan budaya Sunda Galuh yang bercorak hindu diganti oleh Kuwu ketiga belas menjadi Bantaragung. Berarti, tempat suci nan agung/tempat bersuci orang besar/pelataran besar. Pergantian identitas, sepertinya tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan otoritas yang berkuasa di Cirebon, yang merasa berkepentingan terhadap masa depan daerah taklukan tersebut.



Gambar 3.2 Sejarah Kepemimpinan Desa Bantaragung

Sumber: Diolah dari data primer 2021

Realitas tersebut, menjadi penanda pergeseran Bantaragung atas penguasaan wilayah Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu oleh Kesultanan Cirebon yang bercorak Islam. Keberadaan Bantaragung dengan tradisi lama Sunda Galuh yang unik tetap ditradisikan sebagai adat lama dan dipertahankan, meskipun dalam penguasaan politis

kerajaan-kerajaan di Cirebon yang juga merasa berasal dari keturunan yang sama, yaitu Kerajaan Pajajaran. Tradisi seperti “Guar Bumi” atau “Bongkar Bumi”, menjadi media romantisme sejarah atau “pengingat” bagi generasi penerus. Diperingati setiap tahunnya pada bulan Rabiul Awal/Maulud, dimaksudkan sebagai ikatan yang menyatukan kedua belah pihak dalam Islam. Di mana Keraton Kesepuhan dan Keraton Kanoman, dipersepsikan menunggu kiriman cau/pisang dan gula kawung dari masyarakat Desa Bantaragung untuk sesajen pada para leluhur mereka. Sekalipun pisang dan gula kawung yang digunakan juga banyak dihasilkan oleh daerah lain, namun tidak bisa dipakai untuk sesajen kecuali dari daerah Bantaragung.

Tradisi “Guar Bumi” atau “Bongkar Bumi”, biasanya diikuti ratusan warga Desa Bantaragung, yang berbondong-bondong berkumpul di makam Buyut Nitibaya yang berada di Kompleks Pemakaman Salam Gede. Tradisi ini digelar untuk mendoakan karuhun agar senantiasa mendapatkan perlindungan dan meminta kepada Allah Swt. agar selalu memberikan kebaikan saat warga melakukan penanaman dan saat panen, sehingga diberikan hasil yang melimpah. Sekaligus untuk mengingatkan manusia di dunia ini agar tidak merusak bumi, melestarikan alam dan lingkungan.

Secara administratif pemerintahan, wilayah Desa Bantaragung terbagi ke dalam 4 (empat) wilayah Dusun, 11 (sebelas) Rukun Warga (RW), dan 21 (dua puluh satu) Rukun Tetangga (RT). Keempat lingkungan dusun tersebut, meliputi; lingkungan Dusun Lokapraja; Dusun Mertasela; Dusun Tirtawana; dan Dusun Pasir Ayu. Struktur pemerintahan Desa Bantaragung dikepalai oleh Maman Surahman, didampingi seorang sekretaris desa, yang dijabat oleh Arnedi. Secara administratif kepala desa dibantu oleh tiga orang kepala seksi, yaitu Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dijabat oleh Saehuna Cahyadi; Kepala Seksi Pemerintahan dijabat oleh Pupi Supiarto; dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dijabat oleh Ahyani. Selain itu, terdapat pula tiga orang Kepala Urusan (Kaur) dan empat Kepala Dusun (Kadus).

D. Potensi Sumber Daya Lahan Desa Bantaragung

Infrastruktur jalan di Desa Bantaragung telah terbangun dengan cukup baik. Jalan-jalan desa setidaknya telah teraspal sepanjang 42

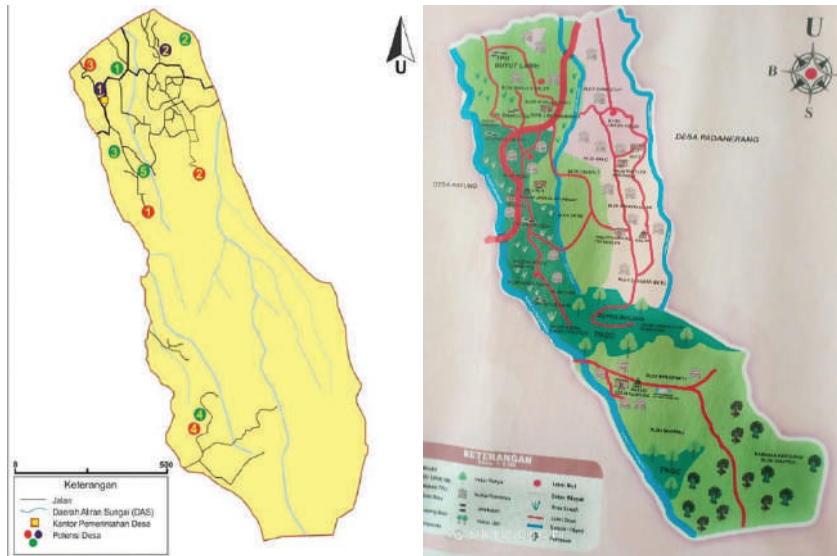
km, sedangkan jalan-jalan penghubung desa sebagian merupakan jalan sirtu sepanjang 1,5 km dan jalan tanah sepanjang 1 km. Jalan kabupaten melintasi desa sepanjang 4,5 km dalam kondisi baik, sementara jalan antar desa/kecamatan menghubungkan Desa Bantaragung dengan desa-desa lain ataupun ibukota Kecamatan Sindangwangi sepanjang 7,5 km. Meskipun tidak terdapat transportasi umum kendaraan roda empat di Desa Bantaragung, tetapi tersedia jasa ojek atau mobil sewa milik warga desa setempat yang bisa digunakan untuk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain baik di dalam ataupun keluar desa. Sementara infrastruktur penerangan, telah menjangkau hampir semua rumah, demikian halnya air bersih yang bersumber dari mata air dan didistribusikan melalui bak-bak penampungan air bersih telah bisa dinikmati oleh sebagian besar warga. Meskipun sarana komunikasi seluler sering mengalami gangguan sinyal karena posisi Desa Bantaragung yang berada di kaki Gunung Ciremai, tetapi setidaknya lebih dari 40 persen warganya telah memiliki smartphone.

Desa Bantaragung merupakan desa dataran tinggi/pegunungan yang memiliki potensi untuk usaha pertanian dan pengembangan wisata alam. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta alam yang masih hijau di kaki Gunung Ciremai. Pertanian subsektor tanaman padi masih menjadi salah satu komoditas pertanian yang banyak dijadikan usaha oleh warga Desa Bantaragung. Selain pertanian tanaman padi, komoditas pertanian yang menjadi ciri khas Desa Bantaragung lainnya adalah subsektor hortikultura, yaitu; bawang merah, durian, pisang, melinjo, dan daun sereh. Selain perkebunan cengkeh dan kopi, sektor pariwisata juga menjadi ciri khas desa ini. Desa Bantaragung memiliki enam destinasi wisata alam, di antaranya adalah; Curug Cipeuteuy, Bumi Perkemahan Awi Lega, Batu Asahan, Bukit Batu Semar, Puncak Pasir Cariu, dan Terasering Sawah Ciboer Pass.

E. Topografi Desa Bantaragung

Secara topografis, Desa Bantaragung relatif berada pada hamparan berbukit-bukit yang dialiri dua sungai yaitu Sungai Ciwaringin dan Sungai Cijejeng. Sungai ini dimanfaatkan untuk pasokan irigasi lahan persawahan. Secara administratif, wilayah Desa Bantaragung memiliki

batas sebagai berikut; sebelah utara: Desa Sindangwangi, Kecamatan Sindangwangi; sebelah selatan: Hutan Taman Nasional Gunung Ciremai; sebelah timur: Desa Padaherang, Kecamatan Sindangwangi; sebelah barat: Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh (**Gambar 3.3**).



Gambar 3.3 Peta Desa Bantaragung

Sumber: FEM IPB 2017 (kiri); dokumen penelitian 2021 (kanan)

F. Uji Tanah Desa Bantaragung

Pengujian kualitas kimia tanah di Desa Bantaragung dilakukan di dua tempat, yaitu bagian atas Dusun Malarhayu yang sering dijadikan sentra penanaman bawang merah dan bagian atas di Dusun Ciboer yang banyak dibudidayakan tanaman padi dan sebagai objek wisata Ciboer. Kontur tanah Desa Bantaragung yang berbukit-bukit membuat kualitas tanah di setiap dusun menjadi beragam. Oleh karena itu, data hasil uji tanah yang telah dilakukan tidak menggambarkan kondisi kualitas tanah satu Desa Bantaragung, melainkan hanya untuk kedua wilayah yang diambil sampel tanahnya. Kedua wilayah yang diambil sampel tanahnya memiliki kualitas kimia tanah yang berbeda (**Tabel 3.1**).

Tabel 3.1 Hasil Uji Tanah pada Dua Wilayah di Desa Bantaragung

| Kualitas Tanah | Malarhayu | Ciboer | Pembahasan |
|---|-----------|--------|--|
| Derajat kemasaman tanah (pH) dengan metode ekstraksi H ₂ O | 5,0 | 5,7 | Kedua daerah ini memiliki pH tanah cukup rendah (agak masam) sehingga membutuhkan input lain untuk menaikkan pH agar menjadi normal. Seperti penambahan kapur pertanian atau dolomit. Kondisi tanah yang demikian memang masih sangat ideal untuk budidaya bawang merah yang berkisar antara 5–6,5. |
| Kandungan C-organik | 3,18 | 1,41 | Kandungan C-organik di kedua tempat sangat berbeda. Tanah di Malarhayu memiliki kandungan C-organik yang lebih tinggi dibandingkan tanah di Ciboer. Kandungan C-organik ini dipengaruhi oleh banyaknya bahan organik yang ikut melapuk dan membentuk agregat tanah akibat letusan Gunung Ciremai di masa lalu. Tanah di Ciboer memiliki C-organik yang lebih rendah kemungkinan dikarenakan sisa jerami dari budidaya padi banyak yang dibakar sehingga semakin lama kandungan C-organik tanahnya semakin berkurang. Malarhayu dengan kandungan bahan organik yang cukup tinggi memang sangat baik untuk ditanami bawang merah karena kondisi tanah dengan bahan organik yang tinggi sangat mendukung pertumbuhan umbi di dalam tanah. Sementara untuk Ciboer dengan kandungan bahan organik yang rendah perlu dilakukan <i>treatment</i> penambahan kandungan bahan organik melalui pembenaman jerami padi yang telah dipanen atau diberikan pupuk organik dari sumber lain agar kesuburan tanah di Ciboer dapat terjaga. |
| Kandungan N-total | 0,39 | 0,17 | Kandungan N-total dalam tanah di kedua wilayah termasuk ke dalam golongan rendah sampai sedang. Kandungan nitrogen total dalam tanah sangat dipengaruhi oleh sumber bahan organik yang melapuk membentuk agregat tanah. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas kandungan c-organik. Kondisi tanah di Malarhayu memang memiliki nitrogen total yang lebih tinggi dibandingkan tanah di Ciboer. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan lahan di Malarhayu juga yang hanya sekali atau dua kali tanam dalam setahun sehingga pelapukan bahan organik di sana menjadi lebih baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kandungan nitrogen dalam tanah. Sementara tanah di Ciboer digunakan terus menerus untuk produksi padi sehingga pelapukan bahan organik menjadi tidak sempurna. |

| Kualitas Tanah | Malarhayu | Ciboer | Pembahasan |
|----------------------------------|--|---|---|
| Rasio C/N | 8,15 | 8,29 | Rasio C/N menunjukkan kecepatan proses dekomposisi bahan organik dalam tanah. Semakin tinggi rasionya berarti dekomposisi bahan organik menjadi tanah lambat. Pada hasil pengujian di kedua wilayah ini menunjukkan rasio yang tergolong rendah. Artinya kedua wilayah sangat bagus dalam mengurai bahan organik menjadi tanah. |
| Kandungan P tersedia | 83,0 | 8,4 | Kandungan fosfat pada kedua wilayah sangat berbeda. Tanah di Malarhayu memiliki kandungan fosfat yang sangat tinggi, sementara tanah di Ciboer memiliki kandungan fosfat yang rendah. Malarhayu terletak di atas bukit sehingga mayoritas bahan pembentuk tanah berasal dari batuan/mineral sehingga wajar memiliki kandungan fosfat yang sangat tinggi, sementara Ciboer berada di kaki Gunung Ciremai. Selain itu, penggunaan jenis komoditas dan praktik budidaya tanaman juga berpengaruh terhadap kandungan fosfor (P) dalam tanah. Malarhayu lebih banyak digunakan untuk budidaya bawang merah, sementara Ciboer didominasi oleh budidaya padi sawah. Bawang merah cenderung membutuhkan lebih sedikit fosfor dibandingkan padi sehingga kandungan fosfor di Malarhayu tetap tinggi dan di Ciboer cenderung rendah sehingga diperlukan pemupukan fosfor yang berimbang agar usaha produksi padi di Ciboer tetap prima. |
| Kation-kation basa dapat ditukar | Kalsium 3,88 Magnesium 0,54 Kalium 0,2 Natrium 0,14 | Kalsium 7,02 Magnesium 1,73 Kalium 0,59 Natrium 0,32 | Kation-kation basa dapat ditukar pada kedua wilayah memiliki perbedaan, yaitu pada tanah di Malarhayu memiliki kandungan kalsium yang rendah, sementara tanah di Ciboer termasuk ke dalam golongan sedang. Kandungan kalsium pada tanah sangat penting bagi tanaman karena termasuk ke dalam unsur makro sekunder yang memiliki peranan dalam siklus fisiologis tanaman, sebagai penyusun dinding sel tanaman, pengatur sintesis protein (gula), merangsang titik tumbuh pucuk baru daun dan akar, serta menghambat penuaan sel. Sama halnya dengan kalsium, kandungan magnesium dalam tanah kedua wilayah juga berbeda. Tanah di Malarhayu memiliki kation basa magnesium yang rendah, sementara di Ciboer termasuk ke dalam sedang. Magnesium adalah unsur hara makro esensial yang sangat dibutuhkan tanaman karena merupakan aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa |

| Kualitas Tanah | Malarhayu | Ciboer | Pembahasan |
|------------------------------|-----------|--------|---|
| | | | enzim dalam tanaman. Magnesium sangat berperan dalam pembentukan klorofil dan membantu metabolisme tanaman seperti fotosintesis, pembentukan sel, pembentukan protein, pembentukan pati, dan transfer energi. Kandungan kation kalium pada tanah di kedua wilayah berbeda. Sama seperti kandungan kalsium dan magnesium, kation kalium juga termasuk rendah pada tanah Malarhayu dan termasuk sedang pada tanah Ciboer. Kalium lebih mudah dipertukarkan dibandingkan kalsium dan magnesium sehingga keberadaan kalium menjadi cukup penting dalam tanah. Sementara kation natrium pada kedua wilayah termasuk ke dalam golongan rendah. |
| Kapasitas Tukar Kation (KTK) | 13,63 | 11,79 | KTK pada kedua wilayah termasuk ke dalam golongan rendah. Keadaan ini disebabkan oleh pH tanah yang cukup rendah dan adanya partikel pasir (permukaan koloid kecil) dalam tanah sehingga tanah di kedua wilayah memiliki KTK yang rendah. Sifat KTK ini sangat erat kaitannya dengan kesuburan tanah dalam hal ketersediaan hara yang dapat diserap oleh tanaman. KTK yang tinggi menggambarkan kemampuan tanah menjerat dan menyediakan unsur hara yang lebih baik dibandingkan KTK rendah. Ketersediaan fosfor bagi tanaman dipengaruhi juga oleh pH tanah, semakin rendah pH tanah maka fosfor sulit untuk diserap oleh tanaman. Melihat pH kedua wilayah yang tergolong cukup rendah, membuat keberadaan fosfor dalam tanah masih dapat diakses oleh tanaman. |
| Kejenuhan Basa | 34,90 | 81,96 | Kejenuhan basa menggambarkan proporsi nisbi basa dapat dipertukarkan pada koloid tanah. Kejenuhan basa di tanah Malarhayu tergolong rendah, sementara tanah di Ciboer tergolong sangat tinggi. Kejenuhan basa berkaitan juga dengan pH tanah. Oleh karena itu, tanah Ciboer yang memiliki kejenuhan basa yang sangat tinggi membuat pH tanah di sana menjadi lebih tinggi dibandingkan tanah di Malarhayu. Kejenuhan basa merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kesuburan tanah. Tanah dapat dikatakan subur jika kejenuhan basanya di atas 80%. |

| Kualitas Tanah | Malarhayu | Ciboer | Pembahasan |
|---------------------|---|--|--|
| Kejenuhan Aluminium | 0 | 0 | Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa kedua wilayah bebas dari aluminium artinya tanah tersebut memiliki kesuburan tanah yang baik karena kehadiran aluminium dalam tanah dapat menghambat penyerapan unsur hara lain yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama fosfat. |
| Tekstur tanah | Pasir 66,7% Debu 31,5% Liat 8% | Pasir 17,2% Debu 33,4% Liat 49,4% | Tanah di Malarhayu didominasi oleh partikel pasir dengan liat yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan posisi wilayahnya yang berada di atas bukit sehingga partikel yang lebih ringan seperti liat banyak terbawa ke wilayah yang lebih rendah ketika terjadi hujan. Oleh karena itu, tanah di Malarhayu memang cocok untuk budidaya bawang merah karena tidak membuat umbi bawang tidak mudah busuk. Sementara tanah di Ciboer didominasi oleh partikel liat dengan sedikit kandungan pasir. Oleh karena itu, tanah di Ciboer memang cocok untuk budidaya padi sawah. |

Kesimpulan sementara mengenai hasil uji tanah di kedua wilayah di Desa Bantaragung berdasarkan komoditas yang cocok dengan kualitas kimia tanah yang dimiliki memang sudah tepat ditanami bawang merah untuk wilayah Malarhayu (pada saat musim hujan) dan padi untuk wilayah Ciboer, tanpa memerlukan tambahan input pupuk kimia yang tinggi. Kendala pemanfaatan lahan di Malarhayu adalah keberadaan sumber air yang sulit dijangkau sehingga tanah di sana hanya dapat dimanfaatkan sebagai lahan tadah hujan. Oleh karena itu, pilihan menanam bawang merah atau komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi (jagung, cabai, terong, dan tomat) sangat cocok dengan kondisi lahan di sana. Untuk meningkatkan intensifikasi lahan di Malarhayu diperlukan teknologi irigasi yang dapat menyediakan air untuk budidaya tanaman sehingga komoditas yang dapat dibudidayakan di Malarhayu menjadi semakin beragam.

G. Pendataan Kependudukan Desa Bantaragung

Berdasarkan tabulasi dan pengolahan data dari hasil sensus yang telah dilakukan oleh LPPM Universitas Trilogi, dapat dilaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

| Penduduk Bantar Agung Berdasarkan Rentang | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | <-5' | 6-10' | 11-15 | 16-20' | 21-25' | 26-30' | 31-35' | 36-40' | 41-45' | 46-50' | 51-55' | 56-60' | > 60' |
| Pria | 165 | 166 | 159 | 202 | 132 | 155 | 121 | 157 | 157 | 213 | 128 | 128 | 201 |
| Wanita | 151 | 154 | 166 | 169 | 143 | 134 | 133 | 206 | 169 | 170 | 100 | 94 | 170 |

Desa Bantaragung dihuni oleh 4.065 jiwa, yang terbagi menjadi 2.098 orang pria (atau 52 persen dari jumlah penduduk) dan 1.967 orang perempuan (48 persen). Jumlah tersebut berasal dari 2.366 Kepala Keluarga (KK). Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk di Bantaragung, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas wilayah, berjumlah sekitar 90-an orang/km². Terdapat perbedaan dengan data yang dirilis oleh BPS melalui Kecamatan Sindangwangi dalam Angka 2019 (BPS 2019), di mana jumlah penduduk Desa Bantaragung dinyatakan secara resmi berjumlah 3.512 jiwa dengan komposisi 1.776 laki-laki dan 1.736 perempuan. Hasil kedua pendataan, juga relatif berbeda dengan data Potensi Desa yang dihimpun oleh aparaturnya Desa Bantaragung pada 2018, yang menyatakan bahwa jumlah penduduknya mencapai 3.937 jiwa, dengan komposisi 2.028 laki-laki dan 1.909 perempuan, berasal dari 1.281 KK. Meskipun komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam data Potensi Desa 2018 dan pendataan BPS 2019 menunjukkan perbedaan signifikan, menariknya jumlah total penduduk justru lebih besar ditunjukkan oleh pendataan Potensi Desa yang dilakukan pada 2018 dibandingkan pendataan BPS tahun 2019. Dari jumlah total penduduk di Bantaragung, mereka yang tergolong dalam kelompok angkatan kerja (usia produktif) sebesar 70 persen, ditunjukkan oleh **Tabel 3.3**.

Tabel 3.3 Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Kelompok Usia

| Penduduk Usia 15-64 Tahun Berdasarkan Rentang Usia | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Status Keluarga | Usia | | | | | | Total |
| | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-64 | |
| Pra KS | 76 | 38 | 42 | 36 | 38 | 266 | 496 |
| KS1 | 26 | 30 | 22 | 21 | 31 | 124 | 254 |
| KS2 | 92 | 54 | 62 | 57 | 70 | 274 | 609 |
| KS3 | 145 | 119 | 131 | 95 | 148 | 556 | 1194 |
| KS3+ | 28 | 31 | 36 | 30 | 41 | 132 | 298 |

Hasil sensus ini mengelompokkan kesejahteraan masyarakat menjadi 5 kelompok, masing-masing keluarga prasejahtera (Pra KS), keluarga sejahtera satu (KS1), keluarga sejahtera dua (KS2), keluarga sejahtera tiga (KS3), dan keluarga sejahtera tiga plus (KS3+). Data hasil sensus sebagaimana tergambar dalam **Tabel 3.3** menunjukkan perbedaan signifikan dengan data Potensi Desa 2018, di mana jumlah keluarga Pra KS sebanyak 256 KK, KS1 sebanyak 657 KK, KS2 sebanyak 277 KK, dan KS3 sebanyak 87 KK, sedangkan jumlah KS3+ sebanyak 4 KK. Terdapat penambahan jumlah keluarga Pra KS menjadi 496 KK, namun terjadi penurunan jumlah keluarga KS1 menjadi 254 KK dalam hasil sensus 2019. Berdasarkan pengelompokan tersebut, tingkat kesejahteraan penduduk di Bantaragung terlihat dalam **Tabel 3.4**.

Tabel 3.4 Jumlah KK dan Anggota Keluarga Berdasarkan Kelompok Kesejahteraan

| Status Keluarga Sejahtera | | | | | |
|---------------------------|-------|-----|-----|------|------|
| Keterangan | PraKS | KS1 | KS2 | KS3 | KS3+ |
| Total KK | 273 | 104 | 251 | 512 | 132 |
| | 628 | | | 644 | |
| Total Jiwa | 709 | 364 | 871 | 1687 | 434 |
| | 1944 | | | 2121 | |
| | 4065 | | | | |
| Menganggur (Usia 15-64) | 70 | 62 | 87 | 13 | 13 |
| Bekerja (Usia 15-64) | 462 | 222 | 547 | 1107 | 285 |

Apabila pengelompokan tersebut disederhanakan menjadi dua, yaitu miskin dan tidak miskin, maka mereka yang dianggap miskin adalah kelompok Pra KS dan KS1, sementara sisanya bukan kelompok miskin. Berdasarkan angka-angka tersebut, dapat diartikan bahwa sekitar 48 persen KK di Bantaragung masuk ke dalam mereka yang dianggap miskin, sementara sisanya 52 persen KK tergolong tidak miskin. Dengan demikian, di Desa Bantaragung kelompok miskin masih cukup besar proporsinya dari jumlah penduduk seluruhnya di Desa Bantaragung.

1. Kesempatan Kerja

Berdasarkan penduduk usia produktif, hasil pendataan tentang banyak orang yang bekerja dan tidak bekerja dalam angkatan kerja yang dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan keluarganya di desa tersebut,

menunjukkan hasil seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 3.4**. Dari penduduk usia produktif di Bantaragung, sekitar 91 persen mengaku bekerja dan sisanya 9 persen mengaku tidak bekerja pada saat survei dilaksanakan. Dapat dikatakan satu dari sepuluh orang di Bantaragung tergolong menganggur (tidak memiliki pekerjaan). Sekitar 47 persen warga Desa Bantaragung masih bergantung pada pekerjaan di sektor pertanian, 26 persen di antaranya merupakan buruh tani (Podes 2018). Mereka yang tidak bekerja tersebut yang terbesar proporsinya berasal dari kelompok miskin, Keluarga Sejahtera Satu (KS1). Kelompok ini perlu mendapat perhatian dan dikaji lebih lanjut, apakah karena mereka miskin, mereka tidak mendapat kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan ataukah karena tidak bekerja mereka menjadi miskin.

Meskipun pergeseran penghidupan warga Desa Bantaragung dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan industri bergerak lambat, namun terakumulasinya penguasaan tanah hanya pada sebagian kecil warga tampaknya telah memaksa 52 persen warga desa yang tidak memiliki tanah mencoba peruntungan keluar dari sektor pertanian. Banyak di antara mereka yang kemudian menjadi buruh tambang galian C, tukang batu, buruh jasa transportasi, dan buruh migran. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang terpaksa harus bekerja serabutan, menjadi pengangguran terselubung.

2. Tingkat Kesejahteraan dan Pendidikan

Secara keseluruhan penduduk yang mengenyam pendidikan yang telah dan tidak ditempuhnya disajikan dalam **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Tingkat Pendidikan

| Kepala Keluarga Menurut Pendidikan | |
|------------------------------------|--------|
| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| Universitas Tamat | 0 |
| Universitas Tidak Tamat | 12 |
| Akademik/Diploma Tidak Tamat | 0 |
| Akademik/Diploma | 6 |
| SMA Tamat | 110 |
| SMP Tamat | 196 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SMP Tidak Tamat | 5 |
| SD Tamat | 865 |
| SD Tidak Tamat | 50 |
| Baca Tulis, Tidak Sekolah | 2 |
| Buta Huruf, Tidak Sekolah | 2 |
| Tidak Menjawab | 7 |
| Total | 1.255 |

Sebagian besar penduduk Bantaragung (98 persen) telah mengikuti pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, dan atas. Hanya sedikit (2 persen) yang berhasil menamatkan pendidikannya pada tingkat diploma dan universitas. Sementara 52 persen warga hanya mampu menamatkan pendidikan SD, 26 persen tamat SMP, dan 15 persen tamat SMA.

Kaitan antara penduduk usia produktif, kelompok kesejahteraan keluarga, dengan tingkat pendidikan penduduk Bantaragung ditunjukkan oleh **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Penduduk dan Kelompok Kesejahteraan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Penduduk Usia 15-64 Tahun Berdasarkan Pendidikan Terakhir | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------|-------------------|-------|
| Status Keluarga | Pendidikan | | | | | | | | | Total |
| | Baca Tulis Tidak Sekolah | Tidak Tamat SD | Tamat SD | Tidak Tamat | Tamat SMP | Tamat SMA | Tamat Akademi | Tidak Tamat Universitas | Tamat Universitas | |
| Pra KS | 0 | 14 | 294 | 7 | 107 | 64 | 3 | 0 | 4 | 493 |
| KS1 | 1 | 12 | 142 | 0 | 60 | 35 | 2 | 0 | 2 | 254 |
| KS2 | 2 | 2 | 302 | 5 | 193 | 77 | 3 | 2 | 15 | 601 |
| KS3 | 2 | 24 | 604 | 9 | 287 | 204 | 6 | 2 | 39 | 1177 |
| KS3+ | 1 | 8 | 149 | 3 | 82 | 43 | 0 | 2 | 10 | 298 |

Data di atas menunjukkan bahwa keluarga KS2, KS3, dan KS3+ memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan kepastian bagi anggota keluarganya untuk menamatkan pendidikan dasar 9 tahun. Sebanyak 32 persen anggota keluarga KS2 mampu menyelesaikan pendidikan SMP, 27 persen anggota keluarga KS3+ mampu menyelesaikan pendidikan SMP, dan jumlah keluarga KS3 yang mampu menamatkan pendidikan SMP sebanyak 24 persen. Sedangkan

kemampuan penyelesaian jenjang pendidikan SMA, paling tinggi ditunjukkan oleh keluarga KS3 sebanyak 17 persen. Sementara lebih dari 50 persen anggota keluarga Pra KS, KS1, KS2, KS3, dan KS3+ di Desa Bantaragung Tamat SD.

3. Pekerjaan

Penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan yang dijalani di Desa Bantaragung, ditunjukkan oleh **Tabel 3.7**. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian, berdasarkan tabel di bawah ini adalah sebesar 21 persen, yang kemudian diikuti oleh mereka yang bekerja di sektor formal dengan gaji tetap, seperti pegawai negeri, TNI, wirausahawan, dan sejenisnya sebesar 20 persen. Kelompok lainnya adalah pekerja individual sebesar 4 persen, dan sisanya pekerjaan lainnya yang beraneka ragam sebesar 55 persen.

Tabel 3.7 Penduduk Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

| Penduduk Bantar Agung Usia Produktif 15-64 Tahun Berdasarkan Pekerjaan | |
|--|--------|
| | Jumlah |
| Petani | 458 |
| Petani Penggarap | 11 |
| Buruh Tani | 206 |
| Peternak | 9 |
| Buruh Peternak | 0 |
| Petambak | 1 |
| Pengrajin | 14 |
| Tukang | 52 |
| Supir/Ojek | 41 |
| Buruh Migran Internasional | 16 |
| Buruh Migran Lokal | 7 |
| PNS | 29 |
| Polisi/TNI | 3 |
| LSM | 1 |
| Pedagang | 175 |
| Wirausaha | 256 |

Realitas tersebut, kontras dengan data Podes 2018, yang menyatakan bahwa sekitar 47 persen warga Desa Bantaragung masih bergantung pada pekerjaan di sektor pertanian, 26 persen di antaranya merupakan buruh tani. Diikuti oleh pekerjaan di sektor formal dengan gaji tetap, sektor perdagangan dan warung makan, industri rumah tangga/kerajinan, dan pekerjaan di sektor informal lainnya.

4. Kesejahteraan Keluarga dengan Posyandu

Kesejahteraan keluarga terkait erat dengan kesehatan anggota keluarganya. Secara menyeluruh ternyata 36,6 persen KK di Bantaragung tidak ikut Posyandu (Tabel 3.8). Belum semua keluarga Pra KS (25,9 persen) dan KS1 (41,6 persen) yang memiliki anak balita ikut serta dalam program Posyandu. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kapasitas kesehatan keluarga prasejahtera di Desa Bantaragung.

Tabel 3.8 Kelompok Keluarga Sejahtera dan Posyandu

| Keluarga Memiliki Anak Usia 2-5 Tahun | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| Status Keluarga | Ikut Posyandu | Tidak Ikut Posyandu |
| Pra KS | 112 | 29 |
| KS 1 | 77 | 32 |
| KS 2 | 186 | 95 |
| KS 3 | 229 | 41 |
| KS 3+ | 63 | 47 |
| Total | 667 | 244 |

5. Pemukiman dan Lingkungan

Bagian terbesar keluarga di Bantaragung tinggal di rumah permanen (96 persen), 2 persen lainnya memiliki rumah dengan tipe semi permanen, dan 2 persen lainnya tidak memberikan informasi tentang rumah yang mereka miliki atau tinggal. Namun masih ada keluarga yang mengaku tinggal di gubuk sebanyak 3 keluarga. Kelompok lainnya, meskipun mereka tergolong dalam keluarga miskin, namun ternyata rumah yang mereka tinggali umumnya rumah permanen (Tabel 3.9).

Tabel 3.9 Tipe Rumah yang Ditinggali Keluarga

| Status Keluarga | Tipe Rumah | | | | Total |
|-----------------|------------|------|--------------------------|----------------|-------|
| | Permanen | Semi | Tidak Permanen/ Gubuk | Tidak Menjawab | |
| Pra KS | 252 | 10 | 3 | 8 | 273 |
| KS 1 | 98 | 5 | - | 1 | 104 |
| KS 2 | 246 | 2 | - | 3 | 251 |
| KS 3 | 492 | 7 | - | 13 | 512 |
| KS 3+ | 127 | 1 | - | 4 | 132 |

Tabel 3.10 menunjukkan status kepemilikan rumah yang ditinggali kelompok-kelompok keluarga di Desa Bantaragung. Membandingkan **Tabel 3.9** dan **Tabel 3.10**, dapat ditarik informasi lanjutan, dengan memperhatikan kolom kepemilikan rumah. Keluarga yang meninggalkan rumah permanen dan semi permanen, umumnya ditinggali dan dimiliki sendiri oleh penghuninya. Proporsi keluarga yang tempat tinggalnya dimiliki mereka sendiri besarnya 99 persen, sementara sisanya tinggal di rumah yang dipinjami/hak pakai.

Tabel 3.10 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

| Status Keluarga | Milik Pribadi | Milik Pribadi dengan Cicilan | Sewa / Kontrak | Dipinjami/ Hak Pakai | Penghuni Liar |
|-----------------|---------------|------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Pra KS | 259 | - | - | 5 | - |
| KS 1 | 101 | - | - | 2 | - |
| KS 2 | 246 | - | - | 4 | - |
| KS 3 | 499 | - | - | 2 | - |
| KS 3+ | 128 | - | - | 1 | - |

Menariknya dari aspek kepemilikan rumah, hasil survei menunjukkan bahwa bagian terbesar kelompok miskin ternyata memiliki rumah mereka sendiri dan permanen. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah warga, diperoleh informasi bahwa keberadaan rumah-rumah permanen di Desa Bantaragung tidak terlepas dari pola gotong royong dalam membangun rumah warga yang masih ditradisikan. Seorang warga yang ingin membangun atau merenovasi rumahnya, umumnya hanya cukup menyediakan bahan-bahan bangunan yang diperlukan.

Selebihnya, tenaga kerja dan sering kali juga akomodasi akan disediakan masyarakat sekitar secara sukarela. Tradisi pembangunan/renovasi rumah yang dilakukan secara bergilir tersebut telah berlangsung turun-temurun dan tetap dipertahankan hingga kini.

Tabel 3.11 Jenis Lantai Rumah dan Status Keluarga

| Lantai Rumah Keluarga | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|------|-------|--------------|-------|
| Status Keluarga | Lantai Rumah | | | | | Total |
| | Beton/Semen | Ubin, Batu Bata | Kayu | Bambu | Tanah, pasir | |
| Pra KS | 43 | 216 | - | - | 7 | 266 |
| KS 1 | 11 | 92 | - | - | - | 103 |
| KS 2 | 23 | 223 | - | - | 2 | 248 |
| KS 3 | 29 | 472 | - | - | - | 501 |
| KS 3+ | 8 | 118 | - | - | 1 | 127 |

Rumah yang ditinggali, dimiliki oleh para keluarga hampir semuanya berlantai keras, baik berupa beton/semen, ubin, atau batu bata. Sepuluh keluarga masih memiliki rumah berlantai tanah atau pasir. Namun, uniknya ternyata ada satu keluarga KS3+, yang mengaku rumahnya berlantai tanah/pasir (**Tabel 3.11**).

Tabel 3.12 Tipe Sanitasi Keluarga

| Status Keluarga | Tipe Sanitasi | | | | | | Total |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------|-------------|------------|-----------|-------|
| | Tangki Pembuangan | Kakus Tradisional | MCK Umum | Sungai/Laut | Pekarangan | Lain-Lain | |
| Pra KS | 213 | 21 | 3 | 6 | 2 | 18 | 263 |
| KS 1 | 93 | 1 | - | 5 | - | 3 | 102 |
| KS 2 | 210 | 16 | - | 2 | 2 | 10 | 240 |
| KS 3 | 476 | 14 | - | 1 | - | 16 | 507 |
| KS 3+ | 70 | 7 | - | - | - | 3 | 80 |

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bermacam tipe sanitasi limbah buangan keluarga yang terdapat di Desa Bantaragung. Hampir seluruh kelompok keluarga membuang limbah mereka ke dalam tangki pembuangan, meskipun masih ada sebagian kecil yang membuangnya di kakus tradisional, MCK umum, dan fasilitas terbuka lainnya. Informasi ini memperlihatkan bagian terbesar keluarga dari berbagai

status kesejahteraannya sudah sadar akan manfaat tempat pembuangan limbah yang tertutup demi menjaga kesehatannya. Namun, sosialisasi kesehatan melalui sanitasi yang lebih higienis dan teratur masih harus terus menerus disampaikan kepada penduduk yang belum memiliki fasilitas sanitasi demi kesehatan. Penyediaan fasilitas sanitasi ini harus diadakan melalui kegiatan bersama penduduk dengan bantuan pemerintah dan swasta. Terutama bagi kelompok masyarakat yang sangat miskin, dengan *affirmative action* khusus pada keluarga Pra KS dan KS1.

Air bersih juga mempunyai peranan vital dalam kesejahteraan masyarakat, termasuk juga bagi mereka yang bertempat tinggal di Desa Bantaragung. Karenanya informasi tentang akses terhadap air bersih, baik untuk keperluan rumah tangga, industri dan pertanian, menjadi penting untuk memahami kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Terlebih letak geografis Desa Bantaragung di kaki Gunung Ciremai, menyebabkan air sungai ataupun air dari sumber mata air akan mengalir tidak terkendali ke arah bawah (menjadi bencana), jika tidak dikelola dengan bijak mengikuti kaidah-kaidah lingkungan.

Tabel 3.13 Sumber Air Keluarga

| Status Keluarga | Sumber Air Keluarga | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| | Air Ledeng | Pompa | Sumur | Mata Air | Sungai | Lain-Lain |
| Pra KS | - | - | - | 265 | - | 8 |
| KS 1 | - | - | - | 103 | - | 1 |
| KS 2 | - | - | - | 250 | - | 1 |
| KS 3 | - | - | - | 501 | - | 11 |
| KS 3+ | - | - | - | 130 | - | 2 |

Penduduk di Desa Bantaragung seluruhnya mengandalkan mata air untuk keperluan rumah tangganya, sebagaimana layaknya pemukiman yang berada di daerah pegunungan dengan sumber-sumber mata airnya. Hampir seluruh warga desa tidak memiliki hambatan atas akses terhadap air bersih tersebut. Air dari sumber mata air tersebut dialirkan ke wilayah pemukiman melalui pipa paralon ke tempat-tempat penampungan (tandon) air, sebelum dialirkan ke masing-masing rumah

tangga (**Gambar 3.4**). Air diatur sedemikian rupa, untuk kegiatan pertanian dan untuk keperluan rumah tangga.

Pemerintah kabupaten membantu untuk membangun prasarana fisik pengaliran air bersih dari sumber mata air ke tandon-tandon penampung. Kemudian masyarakat bersama pemerintah desa secara bergotong royong menyiapkan fasilitas penyaluran air ke masing-masing rumah tangga. Untuk pengelolaan fasilitas jaringan air bersih tersebut, penduduk Desa Bantaragung membentuk suatu lembaga yang mereka sebut “Mitra Cai”. Lembaga ini bertanggung jawab atas keberlanjutan usaha jaringan air bersih ke rumah-rumah warga dan untuk keperluan pertanian secara berkesinambungan. Selain juga digunakan untuk keperluan industri kecil dan rumahan.



Gambar 3.4 Salah Satu Bentuk Tandon Air

Sumber Pendanaan

6. Sumber Pendanaan

Kegiatan ekonomi yang dikaitkan dengan status kelompok keluarga yang berusaha di bidang pertanian ditampilkan dalam **Tabel 3.14**. Sumber pembiayaan untuk kegiatan ekonomi di bidang pertanian penduduk Desa Bantaragung, yang terutama adalah dalam bentuk pembiayaan mandiri, yaitu dari diri mereka sendiri. Lembaga keuangan formal, seperti bank dan koperasi juga berperan dalam membantu penduduk Desa Bantaragung, meskipun perannya belum optimal dalam memberikan akses sumber pendanaan. Akses keuangan formal bagi peningkatan kesejahteraan penduduk Desa Bantaragung, tampaknya perlu ditingkatkan lebih besar lagi.

Tabel 3.14 Sumber Dana Bagi Usaha Pertanian

| Status Keluarga | Jumlah | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|----------|------------|-----------|-----------|------------|
| | Biaya Bagi Hasil | Biaya Sendiri | Keluarga | Koperasi | Tengkulak | Bank | Total |
| Pra KS | 1 | 62 | 3 | 1 | - | 2 | 69 |
| KS 1 | - | 11 | 1 | - | - | 5 | 17 |
| KS 2 | - | 30 | - | - | 2 | 7 | 38 |
| KS 3 | - | - | 2 | 105 | - | 10 | 118 |
| KS 3+ | - | - | - | 22 | - | - | 27 |
| Total | 1 | 230 | 6 | 128 | 2 | 29 | 269 |

Salah satu titik lemah Desa Bantaragung adalah belum memiliki koperasi yang dapat diandalkan, yang seharusnya dapat menjadi pusat penggerak aktivitas perekonomian desa baik dalam kegiatan simpan pinjam, akses bantuan permodalan, dan jual beli. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat desa untuk membentuk koperasi yang kredibel dan mampu meyakinkan seluruh warga desa bahwa dengan mengaktifkan kegiatan perekonomian melalui koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dalam pengamatan lapangan sebenarnya ditemukan keberadaan dua unit badan usaha yang menyebut dirinya koperasi. Namun badan usaha tersebut digunakan untuk menjalankan bisnis di bidang penggalian (pertambangan galian C). Sementara badan usaha yang lainnya bergerak di bidang pengelolaan pariwisata desa, sebagai pengelola Ciboer Pass. Menurut pengakuan sejumlah responden yang diwawancarai, manfaat keberadaan kedua badan usaha yang dimaksud masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Bantaragung. Selain itu, dijumpai juga sejumlah kelompok simpan-pinjam yang dikelola secara informal oleh kelompok-kelompok masyarakat, yang memiliki cukup banyak anggota.

7. Kepemilikan Lahan

Kepemilikan aset untuk produksi di sektor pertanian ditunjukkan oleh tabel-tabel pada halaman-halaman berikut. **Tabel 3.15** menunjukkan kaitan antara berbagai kelompok keluarga dengan kepemilikan lahan, yang terdiri dari lahan sendiri dan lahan sewa. Kelompok keluarga yang tergolong KS3 merupakan kelompok terbesar yang memiliki lahan untuk usaha pertaniannya. Kelompok pemilik berikutnya adalah justru mereka

yang tergolong keluarga Pra KS. Hanya proporsi ini tidak menyebutkan luas lahan yang dimiliki, sehingga mungkin kepemilikan lahan yang besar tadi, terdiri dari luas lahan yang sangat kecil, seperti umumnya kepemilikan lahan pertanian di Indonesia. Ironi tersebut tercermin dalam data Podes 2018, yang memberikan gambaran suram atas kepemilikan lahan di Desa Bantaragung. Sebanyak 52 persen warga tidak lagi memiliki lahan, 30 persen warga hanya menguasai lahan seluas <0,1–0,3 ha, dan 10 persen warga menguasai lahan seluas 0,31–0,5 ha. Sementara 7,7 persen warga menguasai lahan seluas 0,51–1 ha, sebanyak 0,3 persen warga lainnya menguasai lahan seluas >1–5 ha, sedangkan sebagian kecil warga (0,1 persen) menguasai lahan seluas >5–10 ha.

Tabel 3.15 Kepemilikan Lahan Pertanian

| Status Keluarga | Kepemilikan Lahan Pertanian | | |
|-----------------|-----------------------------|------|------------|
| | Milik Sendiri | Sewa | Buruh Tani |
| Pra KS | 113 | 8 | 17 |
| KS 1 | 40 | 4 | 4 |
| KS 2 | 91 | 13 | 7 |
| KS 3 | 266 | 19 | 13 |
| KS 3+ | 66 | 3 | 3 |

Tabel 3.16 di bawah ini, memberikan informasi tentang status kepemilikan yang dikaitkan dengan status kelompok keluarga. Meskipun amat banyak kepala keluarga dari berbagai kelompok, yang tidak menjawab tentang status kepemilikan lahan, informasi yang tersedia menunjukkan proporsi terbesar lahan dimiliki berdasarkan surat izin kepemilikan dari kepala desa dan camat. Hanya sekitar hampir 10 persen dari mereka yang menjawab, lahan yang mereka miliki didasarkan atas Sertifikat Hak Milik.

Tabel 3.16 Status Kepemilikan Lahan

| Status Keluarga | Keterangan | | | | | Total |
|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| | Tanpa Surat Izin | Dengan Surat Izin dari Kepala Desa | Dengan Surat Izin dari Kecamatan | Sertifikat Hak Milik | Tidak Menjawab | |
| Pra KS | 1 | 60 | 6 | 5 | 151 | 223 |
| KS 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 57 | 79 |
| KS 2 | 1 | 56 | 15 | 7 | 162 | 241 |
| KS 3 | 0 | 121 | 24 | 20 | 270 | 435 |
| KS 3+ | 1 | 38 | 4 | 5 | 68 | 116 |

Kecilnya warga Desa Bantaragung yang memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah-tanah yang dikuasainya, ternyata umum terjadi di kawasan pedesaan di Jawa, sebagaimana terjadi di Desa Cilongok Kabupaten Banyumas. Hal ini menguatkan sinyalemen Hernando de Soto (2006), yang menyatakan pembangunan modern gagal memahami proses pengembangan sistem hak milik yang terpadu, sehingga membuat kaum miskin tidak mungkin dapat menggunakan apa yang dimilikinya secara informal untuk digunakan sebagai kapital dalam membangun bisnis dan kewirausahaan. Sebagai akibatnya, kelompok petani di dunia berkembang selalu terperangkap dalam kemiskinan, di mana petani hanya mampu menanam untuk kebutuhan hidupnya sendiri. Untuk itu, pemerintah desa perlu menginisiasi dilakukannya sosialisasi hak kepemilikan agar seluruh pemilik lahan di Desa Bantaragung memiliki Sertifikat Hak Milik sah yang dapat melindungi hak kepemilikannya, di antaranya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Program tersebut dapat dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam menyiapkan sistem hak kepemilikan yang lebih pasti dan jelas legalitas formalnya. Menjadi aset yang dibutuhkan dalam membentuk modal untuk pengembangan usaha rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan pemiliknya. Selanjutnya yang tidak kalah penting untuk dimonitor oleh desa adalah pasca sertifikasi, mengingat keberadaan sertifikat hak milik perorangan akan memudahkan pemilik modal di perkotaan untuk bisa memiliki tanah di pedesaan. Kejelasan status kepemilikan tanah di pedesaan akan semakin mendorong pemodal masuk semakin dalam ke kawasan pedesaan, menggerus kearifan budaya seiring tumbuhnya sifat materialisme yang selalu menempel dalam setiap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.17 Rata-Rata Pendapatan Sektor Pertanian

| Jenis Pekerjaan | Rata-Rata Pendapatan | Total | PRA KS | KS 1 |
|------------------|----------------------|-------|--------|------|
| Petani | 2.666.198 | 374 | 75 | 27 |
| Petani Penggarap | 2.000.000 | 7 | 2 | 0 |
| Buruh Tani | 1.276.235 | 162 | 38 | 22 |
| Peternak | 4.433.333 | 9 | 1 | 0 |
| Buruh Peternak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petambak | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bagian terbesar penduduk Bantaragung mengandalkan sektor pertanian dan sektor-sektor lain yang terkait dengannya sebagai tempat memperoleh pendapatan mereka. **Tabel 3.17** di atas memperlihatkan pendapatan per bulan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Pertanian di desa ini mencakup pertanian pangan, hortikultura, dan peternakan. Di sub-sektor pertanian pangan dan hortikultura pendapatan rata-rata terbesar ternyata dinikmati oleh petani pemilik lahan, sementara para buruh tani menerima pendapatan yang lebih kecil. Sedangkan peternak memperoleh penghasilan rata-rata per bulan yang lebih besar, senilai Rp4,4 juta, dibandingkan dengan penghasilan petani yang berkisar Rp2,6 juta per bulan. Sayangnya jumlah peternak amat jauh lebih kecil daripada petani, selain kebutuhan modal kerja yang jauh lebih besar sebagai peternak, juga mungkin karena kepemilikan lahan yang terbatas.

Data Podes 2018 memberikan gambaran bahwa pendapatan per kapita menurut sektor usaha tertinggi di Desa Bantaragung adalah sektor jasa dan perdagangan yang mencapai Rp21.600.000,00. Dikuti oleh sektor pertambangan (khususnya galian C) sebesar Rp21.260.377,00 dan sektor pertanian yang dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp16.990.542,00. Pendapatan rata-rata per bulan penduduk Desa Bantaragung dibandingkan dengan besarnya Upah Minimum Kabupaten Majalengka ditampilkan di **Tabel 3.18**.

Tabel 3.18 Pendapatan di Bawah UMK Berdasarkan Penghasilan Pertanian dan Campuran

| Status Keluarga | Sumber Penghasilan | |
|-----------------|--------------------|----------|
| | Pertanian | Campuran |
| Pra KS | 140 | 130 |
| KS 1 | 43 | 61 |
| KS 2 | 71 | 177 |
| KS 3 | 180 | 328 |
| KS 3+ | 62 | 69 |

Berdasarkan kajian lapangan ditemukan bahwa total pendapatan Desa Bantaragung besarnya Rp2.827.478,00. Apabila jumlah tersebut dibagi dengan jumlah penduduk yang mengaku berpenghasilan (**Tabel 3.18**), akan diperoleh nilai rata-rata pendapatan penduduk per bulan di Bantaragung sebesar Rp2.327.142,00. Angka ini sebenarnya berada di

atas nilai UMK Majalengka. Namun, besaran ini belum menunjukkan distribusi sebenarnya pendapatan yang terjadi di Bantaragung.

Tabel 3.19 Pendapatan per-Keluarga/Bulan

| | |
|---|--------------------|
| Total KK | 2.366 KK |
| Total KK Berpenghasilan | 1.215 KK |
| Total Pendapatan Desa Bantaragung/bulan | Rp2.827.478.000,00 |
| Rata-rata pendapatan keluarga per bulan | Rp2.327.142,00 |

Apabila sumber pendapatan dikelompokkan menjadi dua saja, yaitu yang berasal dari sektor pertanian dan nonpertanian, maka **Tabel 3.20** menunjukkan bahwa kelompok keluarga Pra KS lebih mengandalkan sektor pertanian dibandingkan nonpertanian dan sebaliknya kelompok keluarga yang tidak miskin (KS2, KS3, dan KS3 plus) umumnya memperoleh pendapatan dari sektor nonpertanian. Data ini memperkuat dugaan bahwa kelompok miskin, terbatas pendapatannya karena keterbatasan akses mereka dalam meningkatkan keterampilan kerjanya. Justru kriteria ini yang lebih dibutuhkan untuk dapat bekerja di luar pertanian. Sementara, semakin menyusutnya luasan lahan pertanian yang digarap juga menyebabkan kegiatan usaha pertanian menjadi tidak efisien, bahkan hanya mampu memenuhi kebutuhan subsistensi keluarga para petani.

Tabel 3.20 Sumber Penghasilan Penduduk

| Status Keluarga | Sumber Penghasilan | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| | Pertanian | Non Pertanian |
| Pra KS | 142 | 131 |
| KS 1 | 43 | 61 |
| KS 2 | 73 | 178 |
| KS 3 | 181 | 331 |
| KS 3+ | 62 | 70 |

Penduduk yang berusaha di sektor pertanian, melakukan penjualan komoditas yang dihasilkan melalui beberapa sistem pembayaran. Hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa penjualan tersebut

dilakukan melalui transaksi jual beli tunai. Meskipun ada pula yang dilakukan melalui sistem ijon, kredit, dan bayar belakang. Dengan demikian transaksi tunai merupakan sistem yang umum terjadi di Desa Bantaragung, seperti lazimnya di desa-desa di sekitarnya dan di Jawa serta Indonesia pada umumnya.

Tabel 3.21 Penjualan Hasil Produksi

| Sistem Penjualan Hasil Produksi | Jumlah |
|---------------------------------|--------|
| Antar bayar kadang diutang | 1 |
| Bagi hasil padi | 1 |
| Barang laku uang dibayar | 2 |
| Ijon | 8 |
| Jangka waktu | 1 |
| Kirim bayar 1/2 | 1 |
| Kredit | 11 |
| Negosiasi | 4 |
| Tempo | 1 |
| Tunai | 815 |
| Tidak Menjawab | 3364 |

Maraknya pemakaian *electronic money*, di dunia digital dewasa ini, belum sampai penggunaannya di Desa Bantaragung, paling tidak pada saat sensus lapangan dilakukan (Tabel 3.21). Meskipun banyak yang tidak menjawab pertanyaan tentang jalur pemasaran yang dilakukan, namun dengan informasi yang terbatas, dapat dikatakan bahwa pasar tradisional masih menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli hasil-hasil pertanian di Desa Bantaragung. Proporsi terbesar penjualan produk-produk pertanian masih melewati jalur pengepul sebelum sampai ke tangan konsumen akhir. Hal tersebut mungkin yang menjadi alasan terkuat mengapa pembayaran langsung dengan sistem tunai masih mendominasi transaksi perdagangan hasil-hasil pertanian di Bantaragung.

Peran tengkulak ataupun pengepul, melalui gudang pengepulnya ternyata masih sangat mendominasi jalur pemasaran produk-produk pertanian di Desa Bantaragung (Tabel 3.22). Para responden yang bersedia menjawab pertanyaan tentang hal ini, menunjukkan hal tersebut. Sekalipun dalam praktiknya para tengkulak diketahui

melakukan kecurangan dalam menentukan harga dasar komoditi yang dibeli dari petani, selain pemberian bunga dan pengembalian pinjaman yang mengikat. Namun para petani umumnya telah terlanjur mempersiapkan mereka memberikan manfaat ganda. Tidak hanya mampu menjangkau lahan-lahan pertanian yang jauh ketika panen dan mampu membeli produksi petani dalam jumlah besar, sehingga mengurangi risiko kerusakan hasil panen.

Tetapi juga sangat fleksibel dalam melakukan pemotongan hasil produksi dari petani yang terikat utang dan “ringan tangan” dalam memberikan pinjaman pada keluarga petani ketika menghadapi kesulitan keuangan.

Tabel 3.22 Jalur Pemasaran Produk

| Jenis Pemasaran | Jumlah |
|-------------------|-------------|
| Pasar Tradisional | 112 |
| Pasar Modern | 1 |
| Gudang Pengepul | 1246 |
| Online | 0 |
| Lain-lain | 19 |
| Tidak Menjawab | 971 |
| Total | 1349 |

Budidaya perikanan tidak banyak dilakukan di Desa Bantaragung. Umumnya ikan yang dibudidayakan adalah ikan nila selain ikan lele, mas, dan gurami. Namun, jumlah pembudidayanya tidak sebanyak pembudidaya ikan nila, meskipun jumlah produksi ikan lele adalah yang tertinggi. **Tabel 3.23**, menggambarkan kondisi yang ada di desa Bantaragung di sektor perikanan.

Tabel 3.23 Budidaya Perikanan

| Perikanan | Jumlah Pembudidaya | Jumlah Produksi per Panen (kg) |
|-----------|--------------------|--------------------------------|
| Gurame | 1 | 0 |
| Lele | 2 | 200 |
| Mas | 1 | 0 |
| Nila | 5 | 63 |
| Patin | 1 | 0 |

Tabel 3.24 menunjukkan sebaran budidaya pertanian di Desa Bantaragung yang sangat dipengaruhi oleh luasan lahan yang digunakan untuk budidaya sebuah komoditi. Berdasarkan data Podes 2018, tergambar bahwa luasan lahan terbesar di Desa Bantaragung digunakan untuk budidaya padi, yaitu seluas 65 ha, dengan rata-rata produksi sebesar 6,3 ton/ha. Selanjutnya lahan terbesar digunakan untuk budidaya bawang merah dan jagung seluas 115 ha, dengan rata-rata produksi masing-masing mencapai 9,2 ton/ha dan 15 ton/ha. Diikuti budidaya durian seluas 35 ha, dengan rata-rata hasil produksi berkisar 2,5 ton/ha. Komoditi durian, khususnya Durian Sinapeul (durian lokal super khas Sindangwangi) saat ini menjadi salah satu produk hortikultura andalan bagi Desa Bantaragung, yang setiap tahunnya dilombakan dan dijajakan dalam ajang Festival Durian Sindangwangi.

Desa Bantaragung saat ini juga dikenal sebagai sentra kerajinan makanan emping melinjo, yang dipasok dari hasil budidaya pohon melinjo di lahan seluas 27 ha, dengan rata-rata produksi sebesar 20 ton/ha/tahun. Sedangkan budidaya pisang ditanam di lahan seluas 26,7 ha, dengan rata-rata hasil produksi mencapai 10 ton/ha. Sementara kebun cengkeh terhampar di lahan seluas 20,1 ha, dengan kisaran produksi sebanyak 2,5 ton/ha dan luasan kebun kopi mencapai 10,2 ha, dengan produksi sebanyak 12 ton/ha/tahun. Selain itu, terdapat sentra budidaya daun sereh yang ditanam di lahan seluas 8 ha, dengan produksi 5,3 ton/ha serta alpukat dan petai, masing-masing seluas 5,2 ha.



Gambar 3.5 Pengolahan Tradisional Melinjo Menjadi Emping

Informasi tentang produksi pertanian pangan dan hortikultura disajikan dalam **Tabel 3.24**. Padi masih menduduki peringkat pertama pada sektor pertanian. Lima besar di bawahnya adalah melinjo, cengkeh,

pisang, durian, dan bawang merah. Hal ini terlihat dari banyaknya keluarga yang bekerja di sektor pertanian. Pembudidaya tanaman lainnya seperti sayuran dan buah-buahan, sebarannya terlihat pada tabel tersebut.

Tabel 3.24 Produksi Komoditi Pertanian (Kg)

| Komoditi | Jumlah Pembudidayaan | Jumlah Produk |
|-----------|----------------------|---------------|
| Padi | 303 | 467985 |
| Melinjo | 248 | 38199 |
| Cengkeh | 149 | 21144 |
| Pisang | 144 | 236459 |
| Durian | 135 | 267220 |
| Bawang | 102 | 212622 |
| Kapundung | 46 | 210260 |
| Nangka | 27 | 400 |
| Jagung | 22 | 43900 |
| Tangkil | 21 | 7020 |
| Alpukat | 14 | 2250 |
| Kelapa | 9 | 200275 |
| Sereh | 9 | 265 |
| Mangga | 7 | 111 |
| Kopi | 5 | 137 |
| Rambutan | 5 | 50 |
| Alba | 4 | 600200 |
| Jengkol | 4 | 55 |
| Manggis | 4 | 150 |
| Singkong | 4 | 53 |
| Cabai | 3 | 1200 |
| Jenging | 3 | 62 |
| Ubi | 3 | 0 |
| Kadu | 2 | 650 |
| Pepaya | 2 | 28 |
| Pucuk | 2 | 60 |
| Sayuran | 2 | 2020 |
| Sirih | 2 | 62 |

| | | |
|-------------|-----|------|
| Delima | 1 | 33 |
| Jambu | 1 | 10 |
| Kapol | 1 | 4 |
| Kementeng | 1 | 2 |
| Kentang | 1 | 3000 |
| Lengkuas | 1 | 200 |
| Macam-macam | 1 | 2000 |
| Nuren | 1 | 0 |
| Tomat | 1 | 1600 |
| Lain-lain | 596 | 0 |

Berdasarkan **Tabel 3.25** pada sub-sektor peternakan, jumlah keluarga pembudidaya ternak terbesar adalah peternak ayam dan kambing. Ternak lainnya tidak dibudidayakan secara besar-besaran seperti kedua ternak tersebut. Dengan banyaknya jumlah ayam yang ditanakkan oleh peternak ayam, dapat diartikan bahwa peternakan ayam tersebut tidak dilakukan dalam skala rumah tangga biasa. Setidaknya mereka tergolong dalam skala peternak menengah atau paling tidak peternak kecil.

Tabel 3.25 Budidaya Peternakan

| Peternakan | Jumlah Pembudidaya | Jumlah Ternak |
|------------|--------------------|---------------|
| Ayam | 19 | 27.609 |
| Domba | - | 1 |
| Kambing | 14 | 87 |
| Kerbau | 1 | 60 |
| Sapi | 1 | 5 |

Data yang terhimpun memiliki perbedaan dengan data Podes 2018, yang memberikan gambaran lebih besar atas jumlah pemilik ayam kampung sebanyak 876 orang dengan populasi ayam kampung sebanyak 8.760 ekor, sedangkan populasi ayam broiler sebanyak 22.000 ekor dengan pembudidaya sebanyak 11 orang. Sementara populasi domba mencapai 693 ekor, dengan jumlah pemilik 231 orang, lebih besar dari populasi kambing yang hanya 92 ekor dengan 23 orang pemilik.

8. Pariwisata

Selain pertanian dan industri, sektor lain yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Bantaragung adalah sektor pariwisata. Sayangnya data tentang sektor ini belum tersedia lengkap dari survei lapangan yang dilakukan. Informasi yang didapatkan di lapangan dari aparat desa memberi gambaran sepintas tentang potensi pariwisata di Desa Bantaragung.

Setidaknya terdapat enam lokasi pariwisata di Desa Bantaragung, namun hanya dua lokasi yang menonjol, masing-masing adalah Curug Cipeuteuy dan Terasering Sawah Ciboer Pass. Menurut aparat kantor Desa Bantaragung, diperkirakan sekitar 300 ribuan pengunjung/wisatawan yang datang ke Desa Bantaragung setiap tahunnya. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata ini per tahunnya diperkirakan sebesar Rp2 miliar. Potensi besar ini, akan sangat berperan apabila dapat diwujudkan dalam program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bantaragung.

Terasering sawah Ciboer Pass. Terasering sawah Ciboer Pass jaraknya sekitar 1 km dari balai desa Bantaragung. Keadaan geografis Desa Bantaragung yang berada di ketinggian membuat sistem pertaniannya berundak-undak (terasering) dengan latar belakang Gunung Ciremai yang hijau nan asri, sehingga sangat memanjakan mata. Keistimewaan terasering sawah Desa Bantaragung didukung oleh hamparan sawahnya yang selalu hijau dikarenakan sistem irigasi desa yang mengairi sawah dengan lancar sepanjang tahun.

Curug Cipeuteuy. Curug Cipeuteuy merupakan air terjun menawan di tengah Hutan Konservasi dengan air jernih dan segar yang bersumber dari Gunung Ciremai. Konon curug ini dinamai 'Cipeuteuy', karena di sana terdapat pohon petai yang tumbuh besar. Curug Cipeuteuy mengalir dengan debit air yang lumayan deras. Meski air terjunnya tidak terlalu tinggi (hanya sekitar 5 meter), tetapi pemandangannya sangat bagus, desiran suaranya terdengar khas dan menyejukkan. Curug Cipeuteuy dikelola oleh kelompok masyarakat Mitra Pariwisata Gunung Ciremai yang bermitra dengan Badan Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC). Satu hal yang menarik dari Curug Cipeuteuy adalah keberadaan sebuah kolam renang pancuran yang cocok untuk terapi kesehatan dan dipercaya berkhasiat bagi kesehatan.

Bumi Perkemahan Awilega. Lokasi Bumi Perkemahan ini sangat dekat dari Curug Cipeuteuy, Wisatawan yang berkunjung ke Desa Bantaragung, selain bisa melakukan kegiatan travelling, mereka bisa juga camping di sebuah tempat yang bernama Bumi Perkemahan Awilega. Jarak tempuh dari jalan raya Sindangwangi ke Bumi Perkemahan Awilega hanya sekitar 4 km. Namun demikian, kondisi jalan yang memiliki banyak tanjakan, berkelok dan sempit, mengharuskan pengunjung untuk selalu waspada dan hati-hati ketika melintasi area ini.

Batu Asahan. Batu Asahan berlokasi di kaki Gunung Ciremai, berdekatan dengan Bumi Perkemahan Awilega dan Camp Fire Care Bukit Batu Semar. Pada zaman dahulu batu (situs purbakala) ini dipercaya sebagai tempat yang sakral untuk mengasah senjata tajam, banyak kisah mistis yang diriwayatkan masyarakat setempat. Salah satunya menceritakan gabungan pasukan Mataram dan Cirebon yang akan menyerbu benteng Belanda di Batavia, konon singgah hanya untuk mengasah senjata mereka di batu ini.

Bukit Batu Semar. Masih ada tempat lain yang menyajikan keindahan pemandangan alam dengan hamparan bukit, pepohonan hijau dan suasana udara yang masih segar, tepatnya di Bukit Batu Semar. Bukit Batu Semar tidak hanya menyuguhkan keindahan alam, namun juga menawarkan sensasi menginap ala camp sambil menunggu matahari terbit. Untuk menuju lokasi wisata ini, wisatawan hanya perlu berjalan kaki kurang lebih sekitar 15–20 menit dari pertigaan Bumi Perkemahan Awilega. Di sekitar Bukit Batu Semar tersedia minuman khas teh secang yang menghangatkan. Selain menawarkan kesempatan bertemu beberapa binatang liar yang berkeliaran di sekitar objek wisata, seperti; monyet, surili (monyet ekor putih), lutung atau jika beruntung bisa bertemu kukang liar.

Puncak Pasir Cariu. Puncak Pasir Cariu menyuguhkan keindahan alam yang lain, wisatawan dari perkotaan akan mendapatkan sensasi ketika mengunjungi tempat wisata bernuansa alam dengan udara yang masih segar karena hawa sejuk pengunungan ini.

Selain keenam objek wisata di atas, berdasarkan pengamatan di lapangan, Desa Bantaragung juga memiliki destinasi wisata yang sangat spektakuler lainnya, namun sayangnya belum mendapatkan perhatian serius, yaitu kawasan puncak Malarhayu. Kawasan ini menyuguhkan pemandangan yang sangat kontras dengan keenam destinasi wisata

yang lain, karena pengunjung akan langsung dihadapkan dengan kaki Gunung Ciremai yang begitu kokoh dan gagah, disuguhi hijaunya pepohonan yang tumbuh di punggungnya dengan tebaran batu-batu besar di sekelilingnya. Suasananya benar-benar menakjubkan dan eksotis, serasa berada dalam peradaban yang berbeda. Seakan dibawa mundur ke masa silam, pada periode jurassic dan cretaseus sebagaimana tergambar dalam film Jurassic Park.

9. Pemodelan Empirik Kemiskinan

Sebagai penutup disampaikan hasil estimasi keterkaitan antar variabel dalam memahami kemiskinan yang terjadi di Desa Bantaragung. Berdasarkan *preliminary* data yang diperoleh langsung pada saat survei, dilakukanlah pengujian kaitan antar variabel yang berkaitan dengan kemiskinan, dengan kasus Desa Bantaragung. Variabel-variabel *sosiodemographic* dan ekonomi digunakan sebagai faktor-faktor penentu dalam model kemiskinan (**Tabel 3.26**). Mengikuti model *Logistic* (Logit Model) yang biasa digunakan untuk mengkaji hal tersebut, maka variabel tersebut adalah usia, besarnya anggota keluarga, tingkat ketergantungan (*dependency ratio*), tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kepemilikan aset, dan pendapatan keluarga. Sebagai variabel terikatnya (*dependent variable*) adalah peluang keluarga tergolong miskin atau tidak miskin.

Tabel 3.26 Keterkaitan Variabel Sosiodemografi, Ekonomi, dan Kemiskinan

| | | |
|---|------------------|------------|
| . logic poor age famsie depratio2 educ health assets income | | |
| Iteration 0: | log likelihood = | -447.52528 |
| Iteration 1: | log likelihood = | -185.05377 |
| Iteration 2: | log likelihood = | -162.60509 |
| Iteration 3: | log likelihood = | -161.27133 |
| Iteration 4: | log likelihood = | -161.26637 |
| Iteration 5: | log likelihood = | -161.26637 |
| | | |
| Logistic regression | Number of obs = | 648 |
| | LR chi2 (7) = | 572.52 |
| | Prob > chi2 = | 0.0000 |
| Log likelihood = | Pseudo R2 = | 0.6396 |
| | | |

| Poor | Coef. | Std. Err. | .s | P> s | (95% Conf. Interval) |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------|----------------------|
| age | .0044157 | .0100835 | 0.44 | 0.661 | -.0153477 .0241791 |
| famsise | -.2893121 | .2943747 | -0.98 | 0.326 | -.8662759 .2876517 |
| depratio2 | -.0564141 | .2836078 | -0.30 | 0.761 | -.6426671 .469839 |
| educ | -.0179621 | .0876439 | -0.20 | 0.838 | -.189741 .1538168 |
| health | -.2016116 | .2956898 | -0.68 | 0.495 | -.781153 .3779299 |
| assets | -1.516271 | .2112787 | -7.18 | 0.000 | -1.93037 -1.102172 |
| income | -4.075345 | .3675679 | -11.09 | 0.000 | -4.795764 -3.354925 |
| _cons | 13.1842 | 1.485675 | 8.87 | 0.000 | 10.27243 16.09617 |

Note: 8 Failures and 0 successes completely determined

Hasil estimasi **Tabel 3.26** menunjukkan bahwa peluang satu keluarga termasuk ke dalam kelompok miskin (kelompok Pra KS dan KS1) sangatlah berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kepemilikan asetnya. Mereka yang berpendapatan tinggi, mempunyai peluang yang rendah untuk tergolong dalam kelompok miskin, dan demikian pula sebaliknya. Hal yang sama dengan kepemilikan aset, nilai koefisien dalam tabel tersebut mengartikan, bahwa keluarga yang memiliki aset yang semakin besar nilainya, maka semakin kecil peluang mereka tergolong kelompok miskin. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pintu masuk untuk membantu masyarakat Desa Bantaragung untuk meningkatkan kesejahteraannya dapat dimulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan dan kepemilikan aset.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

HASIL PENDATAAN DESA CILONGOK

A. Profil Desa Cilongok

Desa Cilongok merupakan Ibu Kota Kecamatan Cilongok yang terletak di sebelah barat Ibu Kota Kabupaten Banyumas. Jarak antara Desa Cilongok dengan pusat Kabupaten Banyumas sekitar 12 km atau dapat ditempuh dalam waktu 25 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi atau sekitar \pm 40 menit jika menggunakan transportasi umum.

Luas wilayah Desa Cilongok adalah 376,77 ha yang terbagi menjadi 6 RW dan 44 RT. Secara administratif, wilayah Desa Cilongok memiliki batas sebagai berikut; sebelah utara, Desa Pernasidi dan Rancamaya; sebelah selatan, Desa Sudimara dan Cipete; sebelah timur, Desa Pageraji; dan sebelah barat, Desa Cipete dan Pernasidi. Desa Cilongok merupakan wilayah yang relatif potensial untuk usaha pengembangan pertanian pangan/palawija, khususnya padi dan singkong, serta produk dari olahan hasil budidaya kelapa rakyat, seperti gula merah/semut/kristal dan produk turunan kelapa lainnya. Selain itu, terdapat budidaya peternakan ayam kampung dan kambing. Meskipun saat ini, proses modernisasi dan industrialisasi menunjukkan gejala yang semakin berkembang, seiring dengan tumbuhnya industri kecil, industri pengolahan rumah tangga dan sarana perdagangan ataupun jasa, serta meningkatnya angka *in-migran rate* di Desa Cilongok.

B. Sejarah Singkat Desa Cilongok

Jika cerita tutur yang diingat masyarakat setempat benar adanya, maka diperkirakan kejadian tersebut berlangsung sebelum runtuhnya Kerajaan Pajajaran pada 1579. Realitas tersebut, semakin memperkuat asumsi bahwa letak geografis Banyumas (Cilongok) yang berada di sisi timur perbatasan sebaran etnik Sunda telah memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap toponim desa berawalan “ci” di Kabupaten Banyumas (Abimanyu, 2018). Hal ini diperkirakan berlangsung sejak abad ke-9 sampai dengan abad ke-15, ketika Cilongok masih termasuk dalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Alhasil, secara linguistik melahirkan dua sub-dialek, yaitu sub-dialek wetan kali (sisi timur Sungai/DAS Serayu) dan sub-dialek kulon kali (sisi barat Sungai/DAS Serayu). Sub-dialek wetan kali cenderung dekat dengan bahasa Jawa standar yang dikembangkan di wilayah negarigung. Sedangkan sub-dialek kulon kali cenderung dekat dengan bahasa Sunda. Namun demikian, pasca pernikahan Raden Baribin, salah seorang adik Brawijaya IV (Raja Majapahit) dengan putri Pajajaran, yang kelak memiliki keturunan bernama Raden Joko Kahiman (Adipati Banyumas pertama bergelar Adipati Warga Utama II atau Adipat Mrapat). Hal ini praktis telah mendorong berlangsungnya persilangan budaya secara terus-menerus di Banyumas, hingga menguatkan percampuran Jawa-Sunda dalam ranah budaya Banyumasan. Pada aspek sosio-kultural dapat dilihat dengan jelas,

Pada masa sebelum kemerdekaan sampai dengan tahun 1950-an, Desa Cilongok merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Cilongok, kemudian pusat pemerintahan kecamatan berpindah sekitar 500 m dari kantor lama di Desa Cilongok. Tepatnya berlokasi di Desa Perna-sidi RT 03 RW 03 yang berbatasan dengan Desa Cilongok. Nama “Cilongok” sendiri, berasal dari dua suku kata, yaitu kata “ci” dan “longok”. Ci, merupakan nama generik dari toponim etnik Sunda, yang berarti “air” atau “sungai”, sedangkan longok, dalam bahasa Sunda berarti “nengok” atau dalam bahasa Jawa berarti “muncul”. Untuk itu, secara umum Cilongok dapat dimaknai sebagai “melihat air”/“keluar air”/“mata air”.

Dalam cerita tutur yang diingat masyarakat setempat, Cilongok dulunya merupakan wilayah perbatasan sebelah timur dari Kerajaan Pajajaran. Rawannya pergolakan politik di wilayah perbatasan kerajaan, menyebabkan Raja Pajajaran mencari “orang kuat” yang dapat menjaga perbatasan kerajaannya. Sayembara itupun menarik perhatian tiga pendekar yang masih bersaudara, yaitu; Ki Suramerta, Ki Candrageni, dan Ki Jambewangi. Singkat cerita, ketiga pendekar bersaudara itu bertarung,

hingga terjadi ledakan hebat yang mengakibatkan tanah di sekitar arena pertarungan menjadi cekung dan mengeluarkan air. Hingga akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Ki Jambewangi yang dalam pertarungan tidak hanya mengandalkan kesaktian (sebagaimana saudara-saudaranya

lekatnya percampuran kedua kutub etnik tersebut, khususnya dalam kaidah-kaidah Budaya Banyumasan. Sebagaimana wujud tokoh pewayangan Bagong (Jawa) dan Cepot (Sunda) yang memiliki kemiripan karakter *cablaka*. Masyarakat Banyumas melebur keduanya dalam sosok Bawor.

yang lain), tetapi juga memanfaatkan strategi. Ia berhasil menyatukan ketenangan jiwa dan menata pikirannya, sehingga ilmu kanuragan yang dikuasainya menjadi lebih digdaya. Arena bekas pertarungan itulah yang kemudian dikenal sebagai Cilongok, sebutan identik bagi Ki Jambewangi yang oleh masyarakat setempat dijuluki Ki Cilongok.

Jauhnya wilayah Banyumas dari pusat kekuasaan keraton Jawa, setidaknya membuat corak kebudayaan Banyumasan menjadi khas dan tersendiri. Berkarakter *cablaka*, sebagai identitas kebudayaan pinggiran, budaya kalangan rakyat yang jauh dari hegemoni kehidupan keraton. Kebudayaan ini tumbuh berkembang di kampung-kampung/dusun-dusun/grumbul, sebagai wujud tradisi dari kehidupan rakyat kecil. Sekalipun mendapatkan penetrasi silang budaya Banyumasan, sebagai turunan dari induk kebudayaan Jawa, masyarakat Cilongok tampaknya mendapatkan pengaruh tradisi budaya Jawa yang kuat.

C. Pemerintahan Desa Cilongok

Dalam sejarahnya Desa Cilongok memiliki 9 grumbul/dukuh, yaitu; Utara Pasar, Kali Manggis (Selatan Pasar), Kampung Baru, Kauman, Petir Barat, Petir Timur, Bentala, Dukuh Klewih, Glempang, Dalawangi, Cilongok, Bedolan. Sering kali grumbul/dukuh, menjadi sumber bagi lahirnya kepemimpinan lokal/desa. Unikny, secara resmi hanya ada 2 orang kepala dusun yang secara definitif menjabat.

Adapun daftar urutan Lurah Desa Cilongok (**Gambar 4.1**) yang berhasil diidentifikasi dari ingatan publik pernah memimpin desa, dideskripsikan berikut ini. Pertama, Nurya Sentika bertempat tinggal di Cilongok, merupakan lurah pertama yang memimpin Desa Cilongok secara formal; kedua, H. Abdur Rahim, bertempat tinggal di Petir; ketiga,

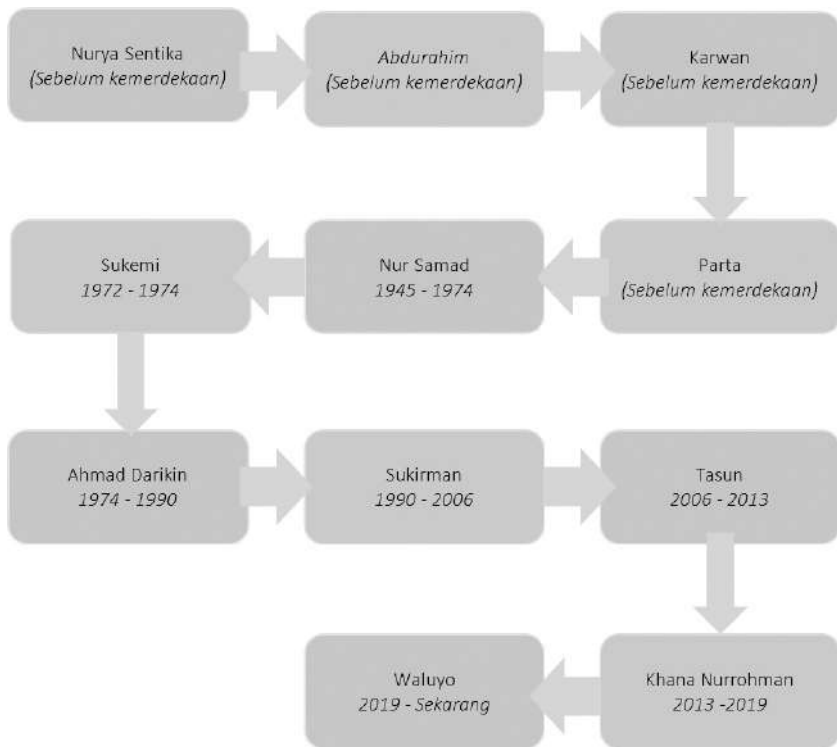
Karwan, bertempat tinggal di Cilongok; dan keempat, Parta, bertempat tinggal di Kali Manggis. Keempat tokoh perintis pemerintahan Desa Cilongok ini, tidak diketahui secara pasti masa kepemimpinannya. Namun keempatnya, diperkirakan menjadi Lurah Desa Cilongok pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terkecuali Lurah Parta yang diperkirakan menjabat pada masa transisi, dari pemerintahan Hindia Belanda dan pendudukan Jepang. Kepemimpinan formal desa yang telah berlangsung lama dan terlembaga, berimbas pada pembangunan Desa Cilongok yang menjadi lebih dinamis sejak zaman penjajahan Belanda pada awal abad-19. Hal ini ditandai dengan menggeliatnya aktivitas pendidikan dan ekonomi desa, seiring dibangunnya SD pertama di Desa Cilongok yaitu SDN 1 Cilongok pada 1933 dan pasar Cilongok pada tahun yang sama. Desa Cilongok menjadi pusat aktivitas perekonomian dan pendidikan utama di Kecamatan Cilongok.

Selanjutnya, lurah kelima adalah Nur Samad, bertempat tinggal di Kali Manggis. Beliau menjabat sebagai Lurah Cilongok setelah Indonesia Merdeka, sekitar tahun 1945. Pembangunan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya, banyak dikenang masyarakat, salah satunya adalah pembangunan Balai Desa Cilongok dan MI Ma'arif NU Cilongok. Jika penanggalan yang telah tersebar luas di masyarakat ini benar, maka bisa dipastikan bahwa Lurah Nur Samad inilah lurah dengan jabatan terlama, sekitar 29 tahun. Tidak berlebihan jika banyak program pembangunan monumental yang diinisiasi olehnya dikenang masyarakat.

Sementara Lurah Sukemi, yang menggantikan Lurah Nur Samad, ternyata hanya bertahan menjabat sebagai lurah keenam selama 2 tahun sejak 1972. Ahmad Dakirin, yang bertempat tinggal di Kauman, selanjutnya menjabat sebagai lurah ketujuh pada 1974. Beliau menjabat selama 2 periode, di mana tiap periodenya berlangsung selama 8 tahun, sehingga beliau menjabat selama 16 tahun. Visi utamanya, melanjutkan program kerja yang belum terlaksana dari lurah sebelumnya, di antaranya membangun MI dan 2 SD, yaitu SDN 2 Cilongok dan SDN 3 Cilongok, yang sampai sekarang masih ada. Sebagai bentuk kompensasi sebagai pamong desa, Dakirin mendapatkan gaji berupa tanah Bengkok seluas 6.5 ha untuk gaji, yang dimanfaatkannya untuk kebun tebu.

Sukirman, yang bertempat tinggal di Kauman, kemudian menjadi lurah kedelapan sejak tahun 1990-an. Diperkirakan beliau menjabat selama 2 periode, sebelum dilanjutkan Lurah Tasun, yang bertempat

tinggal di Bentala sebagai lurah kesembilan. Lurah Tasun diperkirakan mulai menjabat sebagai lurah sekitar tahun 2006, jika mendasarkan setiap periode jabatan lurah sebelumnya selama 8 tahun. Pada masa pemerintahan Lurah Tasun, sudah mulai bergulir berbagai bantuan dari pemerintah untuk subsidi desa dan lain-lain, sehingga infrastruktur Desa Cilongok terbangun dengan lebih baik. Namun pada 2013, terjadi suksesi kepemimpinan di Desa Cilongok yang menobatkan Khana Nurrohman, bertempat tinggal di Kali Manggis, sebagai lurah kesepuluh. Namun Lurah Khana Nurrohman harus lengser pada periode pertama, 6 tahun kepemimpinannya (terikat pemberlakuan UU No. 6/2014 tentang Desa, yang membatasi masa kepemimpinan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali selama 3 periode). Sejak 2019 hingga 2025, Lurah Waluyo yang berasal dari luar Desa Cilongok justru terpilih menjadi lurah kesebelas. Sekalipun dari luar Desa Cilongok, sosok underdog dalam Pilkades, namun didukung sejumlah tokoh terpendang ini menjadi tampak populer di mata masyarakat.



Gambar 4.1 Sejarah Kepemimpinan

D. Potensi Sumber Daya Lahan Desa Cilongok

Desa Cilongok memiliki sejumlah potensi sumber daya lahan yaitu tanah sawah yang masih menggunakan irigasi $\frac{1}{2}$ teknis seluas 7 ha dan 3 ha, lainnya berupa sawah tadah hujan yang hanya mengandalkan air hujan. Dengan luasan lahan pertanian tidak lebih dari 10 ha atau tidak sampai 10 persen dari luasan desa, ditambah aktivitas kehidupan yang cukup modern dan banyak penduduknya yang lebih memilih berdagang atau menjadi buruh, menjadikan desa ini terkesan sebagai kawasan suburban–kawasan pinggiran perkotaan yang menjadi penyangga Kota Purwokerto.

Penggunaan lahan lainnya diperuntukkan sebagai ladang/tegalan dengan luas sekitar 24,28 ha. Sebagian besar di antaranya ditanami singkong sebagai komoditi utama. Singkong menjadi tanaman yang mudah ditanam oleh kebanyakan penduduk Cilongok, selain menjadi tanaman alternatif makanan pokok (selain beras), juga menjadi bahan utama dalam olahan pangan tradisional masyarakat setempat. Lahan pekarangan yang digunakan untuk menanam kelapa secara turun temurun tercatat sebanyak 34 ha.

Penggunaan lahan lain berupa tanah bengkok milik desa seluas 23,57 ha, fasilitas jalan 7,5 ha, dan yang paling mendominasi adalah penggunaan lahan untuk pemukiman seluas 277,42 ha.

E. Topografi Desa Cilongok

Secara topografi, Desa Cilongok berada pada hamparan datar hingga berbukit dan mempunyai konfigurasi berupa daratan datar dengan ketinggian ± 225 m di atas permukaan laut (dpl), sehingga tergolong dataran sedang. Desa ini, memiliki iklim dengan suhu rata-rata 28 °C. Desa Cilongok berada pada hamparan yang relatif landai, dengan jenis tanah berwarna coklat tua dan abu-abu serta bertekstur liat. Dari pengamatan yang dilakukan, tidak ada tanah yang masuk dalam kategori lahan kritis dan lahan terlantar. Hasil pengujian tanah pada sejumlah titik di desa Cilongok akan dijelaskan secara rinci di bab selanjutnya (hasil uji tanah). Secara fisik, kondisi kesuburan tanah desa ini termasuk daerah yang memiliki tanah yang relatif subur.

Daerah ini memiliki elevasi untuk 0–100 m (54,86 persen) dan 100–500 m (45,14 persen). Sebagaimana wilayah tropis, Desa Cilongok mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya.

Curah hujan di Desa Cilongok berkisar antara 2.000-3.000 mm, dengan jumlah bulan hujan selama 5 bulan. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih pendek daripada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayahnya yang relatif kurang vegetasi serta jauh dari kawasan hutan atau pegunungan.

Desa Cilongok, berada tepat di pinggir jalan nasional antar provinsi yang menghubungkan Purwokerto-Cilacap, yang banyak dilalui kendaraan umum dan padat. Desa ini sebagian besar terletak di sisi jalan lintas utama, bagian utara (Tegal-Pemalang), bagian selatan (Cilacap), bagian barat (Cilacap-Brebes), arah timur (Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen). Letak geografis Desa Cilongok yang hanya 12 km dari sebelah barat Ibu Kota Banyumas dan dapat ditempuh sekitar 20–40 menit dengan kendaraan, menjadikan posisinya sangat strategi.

Keunggulan komparatif Desa Cilongok yang memiliki akses mudah dijangkau kendaraan umum dan keberadaan prasarana transportasi darat yang memadai, tampaknya menjadi faktor penarik utama bagi para pendatang untuk mengadu peruntungan ke desa ini. Banyak di antara mereka yang bekerja di sektor perdagangan, industri dan jasa, sehingga semakin mendorong pertumbuhan desa ini menjadi lebih modern. Hal ini ditandai dengan tingginya jumlah sarana perdagangan, seperti pasar yang telah berdiri sejak 1933, keberadaan 357 toko/kios/warung, serta 20 warung makan. Juga keberadaan sebuah industri menengah yang menyerap 20 tenaga kerja, 15 industri kecil yang menyerap 102 orang tenaga kerja, dan 705 industri rumah tangga (khususnya pengolahan gula kelapa/semut/kristal) yang menyerap 1.410 tenaga kerja. Realitas tersebut menjadikan Desa Cilongok memiliki angka *In-Migran Rate* paling tinggi di Kecamatan Cilongok sebesar 10,6 (dengan total migran masuk 97 orang/tahun).

Tabel 4.1 Bentangan Wilayah

| Bentangan Wilayah | Keberadaan (√ = Ada) | Luas (ha) |
|--|----------------------|-----------|
| Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | √ | 376,77 |
| Letak | Keberadaan (√ = Ada) | Luas (ha) |
| Desa/kelurahan kawasan perkantoran | √ | |
| Desa/kelurahan kawasan campuran | √ | |
| Desa/kelurahan bebas banjir | √ | |

| Orbitasi | |
|---|------------|
| Jarak ke ibu kota kecamatan | 0,60 (km) |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 5 (menit) |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan nonbermotor | 10 (menit) |
| Jumlah kendaraan umum ke ibu kota kecamatan ± | 100 (unit) |
| Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 15 (menit) |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 2 (jam) |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan nonbermotor | 7 (jam) |
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 30 (unit) |
| Jarak ke ibu kota provinsi | 150,1 (km) |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 5 (jam) |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan nonbermotor | 2 (hari) |
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi (Bus/Kereta Api) | 2–7 (unit) |

F. Uji Tanah Desa Cilongok

Pengujian sampel tanah di Desa Cilongok dilakukan sebanyak dua kali dengan menggunakan: 1) PUTK (Perangkat Uji Tanah Kering) yang diperoleh dari Balai Penelitian Tanah, Kementerian Pertanian RI; serta 2) pengujian tanah di Laboratorium SEAMEO BIOTROP, Tajur, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 24 September–10 Oktober 2019 (**Lampiran 1**). Kedua pengujian ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga perlu dicermati hasilnya yang agak berbeda dari sampel tanah yang sama.

Penggunaan PUTK (**Gambar 4.2**) hanya dapat digunakan untuk menetapkan status C organik, hara P, K, pH, dan kebutuhan kapur dengan hasil berupa kisaran (tinggi-sedang-rendah) bukan sama persis dengan keadaan sebenarnya. Sementara pengujian berbasis laboratorium dapat menguji variabel kandungan pH, persen C organik, persen N total, rasio C/N, jumlah P_2O_5 tersedia, kandungan kapasitas tukar kation (KTK), tingkat kejenuhan basa (KB), tipe keasaman potensial serta tekstur tanah dengan hasil yang jauh lebih valid karena kelengkapan peralatan laboratorium yang dinilai lebih memadai.



Gambar 4.2 Kit-Test Perangkat Uji Tanah Kering

Namun demikian, penggunaan uji tanah dengan kit PUTK memberikan keuntungan dalam perolehan hasil yang lebih cepat (instan) sehingga sangat tepat jika dibutuhkan dalam keadaan mendesak serta dapat menjadi alternatif untuk menentukan kebutuhan tanah di lapangan. Pengujian tanah di laboratorium tercatat memakan waktu lebih lama bahkan dapat berbulan-bulan jika kondisi laboratorium sedang penuh dengan sampel tanah. Hasil yang lebih valid, mendekati dengan keadaan sebenarnya membuat sebagian orang memaklumi waktu uji tanah yang lama agar lebih tepat dalam melakukan perlakuan tanah mereka.

Meskipun terdapat perbedaan cara uji di antara keduanya, sampel tanah yang digunakan untuk pengujian berasal dari lokasi yang sama, diambil di waktu yang sama serta dengan teknik pengambilan yang sama pula. Lokasi pengambilan sampel di Desa Cilongok dipusatkan di demplot lahan pertanian yang telah ditentukan dengan mengambil beberapa titik yang mewakili lahan kemudian contoh tanah digabung (teknik komposit). Teknik komposit merupakan pengambilan contoh tanah pada beberapa titik pengambilan, kemudian contoh-contoh tersebut disatukan dan dicampur/diaduk sampai merata, kemudian dianalisis.

Proses pengujian tanah dengan PUTK dilakukan langsung di lokasi dengan menggunakan kit yang sesuai dengan tahapan yang diinstruksikan (**Gambar 4.3**). Hasilnya pun dapat diperoleh secara cepat langsung saat itu juga.



Gambar 4.3 Proses Pengujian Tanah dengan PUTK

Tabel 4.2 Hasil Uji Tanah dengan PUTK

| Hasil yang Diperoleh | Rekomendasi |
|--|--|
| Kandungan pH berkisar 4–5 | kebutuhan kapur berkisar 700–1.500 kg/ha |
| Kandungan C organik masuk kategori sedang-tinggi | kebutuhan bahan organik/kompos tambahan sebesar 1 ton/ha |
| Status kandungan fosfat sedang | - |
| Status kandungan kalium sedang | - |

Sementara hasil uji di Laboratorium SEAMEO BIOTROP, Tajur, Bogor, Jawa Barat diperoleh sesuai lampiran 1. Dengan analisis sebagai berikut. Derajat kemasaman tanah (pH) dengan metode ekstraksi H₂O terukur sebesar 7,7. Hasil ini berbeda jauh dengan uji cepat menggunakan PUTK yang masuk pada kategori masam. Perbedaan

metode pengujian pH dengan laboratorium lebih detail dibandingkan dengan PUTK dengan indikator warna tanah. Sementara hasil uji pH dengan metode ekstraksi H₂O ini menggunakan tipe keasaman aktif atau keasaman aktual yang disebabkan oleh adanya ion H⁺ dalam larutan tanah. Keasaman ini diukur menggunakan suspensi tanah-air dengan nisbah 1:1. Sementara potensial keasaman diukur dengan menggunakan larutan tanah-elektrolit dengan menggunakan CaCl₂.

Hasil pH H₂O tanah menunjukkan nilai besaran **7,7**, yang artinya tanah ini **cenderung basa (agak basa)**. pH tanah atau tepatnya pH larutan tanah merupakan komponen sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen (N), potasium/kalium (K), dan fosfor (P) yang semuanya dibutuhkan tanaman dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan terhadap penyakit. Jika pH larutan tanah meningkat hingga di atas 5,5 maka unsur nitrogen (dalam bentuk nitrat) menjadi tersedia bagi tanaman, begitupun unsur fosfat yang akan tersedia bagi tanaman pada pH antara 6 hingga 7. Sementara itu jika larutan tanah terlalu masam maka tanaman tidak dapat memanfaatkan N, P, K dan zat hara lain yang mereka butuhkan dan mempunyai kemungkinan untuk teracuni logam berat yang menjadi toxic bagi tanaman.

Kandungan C-organik sebesar **2,02 persen**. Berbeda dengan hasil uji PUTK yang hanya bisa mengklasifikasikan dalam kategori sedang saja, uji tanah di laboratorium dapat mengetahui persentase bahan organik dalam tanah tersebut. Meskipun keduanya menunjukkan hasil yang sama. Kandungan C-organik sebetulnya menunjukkan jumlah karbon dalam tanah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang telah mengalami dekomposisi. Kandungan bahan organik tanah secara umum berkisar antar 0,5–5 persen. Sementara hasil uji tanah di Desa Cilongok menunjukkan kriteria **sedang** dengan persentase 2,02 persen, artinya jumlah bahan organik (penyubur tanah) yang terkandung di dalamnya masuk pada kriteria **cukup/sedang**.

Hasil uji persentase N-total pada sampel tanah di Desa Cilongok menunjukkan nilai 0,20 persen, yang artinya **kriteria N-totalnya rendah**. Padahal N merupakan unsur hara makro yang penting untuk memperbaiki pertumbuhan vegetatif dan pembentukan protein. Kekurangan N pada tanaman dapat menyebabkan kekerdilan, pertumbuhan akar terbatas, dan daun kuning hingga gugur. Dengan

kondisi semacam ini, maka dibutuhkan penambahan N eksternal, salah satunya dengan pemberian pupuk urea.

Rasio C/N merupakan perbandingan antara banyaknya kandungan unsur karbon terhadap banyaknya kandungan unsur nitrogen dengan nilai uji sebesar 10. Hasil ini masuk dalam kategori **rendah**. Kisaran nilai rasio C/N dianggap rendah jika nilainya 5-10. Nilai ini merupakan hasil bagi C organik (2,02 persen) dengan N total (0,2 persen).

Kandungan P tersedia sebesar 35,8 ppm. Jumlah fosfat tersedia (P_2O_5) dalam tanah pada sampel Desa Cilongok menunjukkan angka sebesar 35,8 ppm yang masuk pada kategori **rendah**. Unsur fosfor (P) merupakan unsur esensial kedua setelah N yang berperan penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan P dalam tanah jarang yang melebihi 0,01 persen atau 100 ppm dari total P. Sebagian besar bentuk P terikat oleh koloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman.

Kapasitas Tukar Kation (KTK) sebesar 24,49 cmol/kg. Kapasitas Tukar Kation (KTK) merupakan jumlah total kation yang dapat dipertukarkan dari suatu tanah, baik kation pada permukaan koloid organik (humus) maupun kation pada permukaan koloid anorganik (liat). Semakin tinggi KTK maka semakin subur tanah. Hasil uji KTK pada tanah sampel Desa Cilongok sebesar 24,49 cmol/kg yang masuk dalam kategori **sedang**, hal ini juga didasari dari komponen penyusun bahan organiknya yang sebesar 2 persen.

Kejenuhan basa 100 persen, kejenuhan basa (KB) merupakan persentase dari total kapasitas tukar kation (KTK) yang ditempati oleh kation-kation basa seperti kalium, kalsium, magnesium, dan natrium. Nilai KB erat hubungannya dengan pH dan tingkat kesuburan tanah. Kemasaman akan menurun dan kesuburan akan meningkat dengan meningkatnya KB. Hasil uji KB sampel tanah Desa Cilongok menunjukkan hasil 100 persen yang artinya **subur**.

Kejenuhan Aluminium 0, hasil uji aluminium dan hidrogen + (Al-H dd) menunjukkan bahwa **tidak ada** indikasi kejenuhan bahkan keracunan aluminium karena jumlahnya 0 untuk kandungan Al^{3+} dan H^+ **cukup rendah** karena tanah dalam kondisi tidak asam, justru cenderung agak basa. Hal ini bagus untuk kriteria tanah pertanian.

Tekstur tanah pasir 1,8 persen, debu 51,8 persen, liat 46,4 persen. Uji terakhir sampel tanah adalah melihat komponen tekstur tanah di

Desa Cilongok. Hasilnya diketahui bahwa komponen penyusun tanah di desa tersebut adalah debu dan liat, dengan sedikit sekali kandungan pasir. Kandungan liat tersebut (46,4 persen) termasuk kategori tinggi karena berkisar dari 35–78 persen.

Secara umum tanah di Desa Cilongok masuk dalam kategori **subur** dengan pH agak basa (bahkan mendekati netral) sehingga aman untuk ditanam berbagai macam komoditi tanaman. Akan tetapi tetap diperlukan penambahan melalui perlakuan seperti: 1) peningkatan unsur bahan organik yang dapat diperoleh melalui penambahan kompos; dan 2) penambahan unsur nitrogen melalui penanaman kacang-kacangan untuk menstimulus N dalam tanah secara alami atau dengan pemberian pupuk urea anorganik.

Perbedaan uji kedua cara tersebut tidak perlu menjadi perdebatan. Kembali lagi bahwa uji tanah di laboratorium dinilai jauh lebih valid dibandingkan dengan uji cepat menggunakan PUTK dengan segala kelengkapan di laboratorium yang terukur dan terkalibrasi dengan baik.

G. Pendataan Kependudukan Desa Cilongok

1. Status Keluarga Sejahtera

Salah satu indikator dalam pendataan yang dilakukan di Desa Cilongok, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah adalah tingkat kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiel yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengategorikan tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Cilongok adalah indikator yang disusun dan telah digunakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sejak awal 1990-an. Dengan indikasi; 1) makan dua kali sehari atau lebih; 2) memiliki pakaian yang berbeda; 3) rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik; 4) bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan; 5) semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Tanpa memasukkan

indikasi pasangan usia subur (PUS) ber-KB ke sarana pelayanan kontrasepsi, karena pertimbangan tertentu.

Hasil pendataan menunjukkan bahwa total kepala keluarga di desa tersebut tercatat sebanyak 2.736 dengan jumlah total jiwa 8.686 (Tabel 4.3). Jumlah kepala keluarga tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa tingkatan kesejahteraan keluarga, yaitu Pra KS sebanyak 1.623 KK; KS1 sebanyak 384 KK; KS2 sebanyak 225 KK; KS3 sebanyak 345 KK; dan KS3+ sebanyak 159 KK (Tabel 4.3). Data hasil sensus yang telah dilakukan, menjadi menarik ketika disandingkan dengan data BPS Kecamatan Cilongok dalam Angka (2019), yang merilis bahwa jumlah penduduk Desa Cilongok adalah 9.134 jiwa. Artinya hasil sensus yang telah dilakukan terdapat selisih jumlah penduduk sebanyak 448 jiwa, lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk menurut BPS. Hal ini tentu saja menjadi krusial untuk didalami lebih lanjut dan mendapatkan klarifikasi secara memadai dari berbagai *stakeholder* terkait, guna mendapatkan akurasi data yang lebih valid. Sebuah agenda berkesinambungan yang harus dilakukan secara partisipatif dalam rangka mencapai “data presisi”, bagi perencanaan pembangunan desa ke depan.

Tabel 4.3 Status Keluarga Sejahtera

| Keterangan | Tingkat Kesejahteraan Kepala Keluarga Desa Cilongok | | | | |
|----------------------|--|------|-----|------|------|
| | Pra KS | KS1 | KS2 | KS3 | KS3+ |
| Kepala Keluarga (KK) | 1623 | 384 | 225 | 345 | 159 |
| | 2736 | | | | |
| Total Jiwa | 4592 | 1359 | 843 | 1288 | 604 |
| | 8686 | | | | |

Hasil pendataan menunjukkan bahwa 18,68 persen warga Desa Cilongok masih hidup di bawah kategori sejahtera (Pra KS) dan 14,03 persen masuk kategori KS1. Jika keluarga pra-sejahtera dapat diklasifikasi hidup di bawah garis kemiskinan, maka bisa diasumsikan bahwa angka kemiskinan di Desa Cilongok jauh lebih tinggi dibanding angka kemiskinan Kabupaten Banyumas di tahun 2019 yang mencapai angka 13,5 persen. Bahkan jauh lebih tinggi, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional sebesar 9 persen (Gatra.com, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diketahui setidaknya ada dua penyebab sehingga kategori di bawah sejahtera tersebut persentasenya menjadi cukup tinggi. Pertama, kondisi rumah (atap, lantai dan dinding) yang ditempati keluarga masih jauh dari layak. Kedua, keengganan warga menggunakan alat kontrasepsi dengan alasan masih ingin menambah anak (dua anak tidak cukup) sehingga belum ada niatan untuk ber-KB. Sementara itu persentase rumah tangga yang masuk kategori keluarga sejahtera tiga dan tiga plus sebesar 12,61 persen dan 5,81 persen. Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Cilongok, umumnya keluarga dengan kategori ini terdapat di kawasan RW 01 dan 02. Wilayah ini memiliki permukiman yang padat layaknya perkotaan, penduduknya sangat sedikit yang berkecimpung di dunia pertanian dan cenderung bekerja sebagai karyawan, PNS, maupun berdagang. Data tersebut senada dengan data BPS (2019) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Desa Cilongok hanya 978 orang yang berprofesi sebagai petani atau hanya 10,7 persen dari total jumlah penduduknya.

Berbagai penelitian mensinyalir penyebab turunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian, di antaranya adalah karena citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, berisiko tinggi, kurang memberikan jaminan tingkat, stabilitas, dan kontinuitas pendapatan. Selain rata-rata penguasaan lahan yang sempit; diversifikasi usaha nonpertanian dan industri pertanian di desa yang kurang/tidak berkembang; suksesi pengelolaan usaha tani rendah; belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda/pemula; dan berubahnya cara pandang pemuda di era postmodern seperti era digital sekarang (Susilowati 2016). Untuk itu dibutuhkan strategi yang sistematis untuk menarik minat pemuda bekerja di sektor pertanian, antara lain mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh. Melakukan langkah yang lebih konkret dan praktis, dengan pengembangan agroindustri, inovasi teknologi, pemberian insentif khusus kepada petani muda, pengembangan pertanian modern (digital), pelatihan dan pemberdayaan petani muda, serta memperkenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini. Masalahnya, kerja-kerja seperti itu, membutuhkan komitmen dari *stakeholder* terkait, selain dukungan biaya yang tidak kecil untuk dioperasionalkan.

2. Pengangguran Usia Produktif

Pengangguran usia produktif merupakan salah satu masalah di Desa Cilongok. Usia produktif yang seharusnya bekerja dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga justru teridentifikasi menganggur. Menurut analisis demografi, kategori usia produktif adalah usia dengan rentang antara 15–64 tahun. Usia ini dianggap memiliki produktivitas tinggi yang nantinya dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga.

Tabel 4.4 Jiwa Menganggur Usia 15–64 Tahun Berdasarkan Rentang Usia

| Keluarga | Rentang Usia | | | | | | Total |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 64 | |
| Pra KS | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 21 | 37 |
| KS1 | 33 | 41 | 21 | 12 | 6 | 90 | 203 |
| KS2 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 17 | 53 |
| KS3 | 4 | 13 | 8 | 11 | 11 | 19 | 66 |
| KS3+ | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 26 |
| Total | 54 | 69 | 42 | 37 | 26 | 157 | 385 |

Hasil pendataan menunjukkan bahwa 4,43 persen dari total warga di Desa Cilongok tidak memiliki pekerjaan tetap dengan jumlah pengangguran terbanyak berada di usia 40–64 tahun dengan total 157 orang (**Tabel 4.4**). Jumlah ini setara dengan 40,77 persen dari total jumlah jiwa yang tercatat menganggur yaitu sebanyak 385 jiwa (**Tabel 4.4**). Kebanyakan dari mereka adalah tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga hanya mengandalkan kerja serabutan. Tentu saja, kondisi semacam ini akan menjadi beban keluarga, sehingga perlu ada perubahan dan intervensi dari pihak luar dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan.

3. Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Akhir

Hasil pendataan menunjukkan terdapat 4,43 persen jiwa yang tidak memiliki pekerjaan/menganggur akibat dari rendahnya pendidikan akhir yang ditempuh. Sebanyak 45,71 persen dari jiwa menganggur tersebut adalah mereka yang tidak menyelesaikan wajib belajar (Wajar) 9 tahun, artinya tidak sekolah, tidak tamat SD, hanya tamat SD, hingga tidak

tamat SMP (**Tabel 4.5**). Hal ini, tidak terlepas dari peran karakteristik sosial ekonomi populasi, yang menunjukkan 18,68 persen warga Desa Cilongok masih hidup di bawah kategori sejahtera (Pra-KS) dan 14,03 persen masuk kategori KS1. Sebuah kondisi yang tidak kondusif bagi pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Sebagaimana hasil evaluasi Bappenas (2009), yang menyebut rumah tangga di daerah miskin cenderung tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya, walaupun mereka memiliki akses terhadap pendidikan, karena anak-anak mereka harus membantu orang tuanya mencari nafkah (*opportunity cost* untuk bersekolah sangat tinggi).

Orientasi masa lalu pemerintah daerah setempat, juga patut dipertanyakan, khususnya dalam mendesain alokasi anggaran pendidikan yang kemungkinan masih terfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik. Sebagai konsekuensinya, anggaran yang berkaitan langsung dengan peserta didik atau layanan pendidikan umumnya akan dikorbankan. Padahal rasio murid guru di Desa Cilongok sudah relatif ideal untuk sebuah proses belajar dan mengajar yang dianggap efektif. Data BPS (2019), menunjukkan bahwa rasio murid terhadap guru SD di Desa Cilongok adalah 17, sedangkan SMP rasionya 22. Idealnya, setiap kelas diisi tidak lebih dari 15–20 anak didik untuk menjamin kualitas proses belajar mengajar yang optimal. Namun demikian, hal itu perlu didukung dengan peningkatan kualitas guru yang masih memprihatinkan. Bappenas mensinyalir, persentase guru yang layak mengajar pada jenjang SD dan MI hanyalah 15 persen, sedangkan 85 persennya tidak layak. Sedangkan untuk SMP dan MTs, sebesar 60 persen layak dan sisanya 40 persen tidak layak. Realitas semacam ini, pada akhirnya akan memengaruhi kualitas anak didik yang dihasilkan.

Minimnya pendidikan tersebut menjadi penyebab bagi mereka sulit untuk masuk ke dunia kerja karena terkendala syarat minim pendidikan formal. Sementara 49,87 persen lainnya adalah mereka yang telah menyelesaikan Wajib 9 tahun (tamat SMP), menyelesaikan bangku SMA bahkan telah merasakan bangku kuliah tetapi belum mendapatkan pekerjaan tetap (**Tabel 4.5**). Dari persentase tersebut, diperoleh data sebanyak 102 anak muda yang telah lulus SMA, D-3, bahkan S-1 yang teridentifikasi belum bekerja atau sedang dalam

pencarian pekerjaan (pengangguran sementara) dengan kualifikasi pendidikan yang memadai. Kelompok anak muda tersebut dapat menjadi target utama dalam pengembangan demplot pertanian di Desa Cilongok dalam program DCML.

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menganggur Berdasarkan Rentang Usia dan Pendidikan Akhir

| Jiwa Menganggur Usia 15-64 Tahun Berdasarkan Pendidikan Terakhir | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------|
| Status Keluarga | Pendidikan | | | | | | | | | | Total |
| | Baca Tulis, Tidak Sekolah | Tidak Tamat SD | Tamat SD | Tidak Tamat SMP | Tamat SMP | Tamat SMA | Tamat Akademi/Diploma | Tidak Tamat Universitas | Tamat Universitas | Tidak Menjawab | |
| Pra KS | 6 | 8 | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| KS1 | 10 | 11 | 77 | 2 | 48 | 40 | 0 | 1 | 3 | 11 | 203 |
| KS2 | 4 | 3 | 15 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| KS3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 19 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 66 |
| KS3+ | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| Total | 20 | 22 | 127 | 7 | 89 | 94 | 3 | 1 | 5 | 17 | 385 |

4. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Hasil pendataan menunjukkan bahwa dari jumlah jiwa penduduk Desa Cilongok sebesar 8.686 orang terbagi atas 4.394 berjenis kelamin laki-laki dan 4.392 berjenis kelamin perempuan (**Tabel 4.6**). Data tersebut relatif berbeda dengan data yang sajikan BPS (2019), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Desa Cilongok berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4.681 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 4.453 orang, sehingga rasio jenis kelamin 1:1,05. Secara keseluruhan warga Desa Cilongok memiliki jumlah komposisi perbandingan pria dan wanita dalam keadaan cukup seimbang baik di usia muda, produktif, maupun usia lansia.

Tabel 4.6 Penduduk Berdasarkan Rentang Usia

| Jenis Kelamin | Penduduk Cilongok Berdasarkan Rentang Usia | | | | | | | | | | | Total | | |
|---------------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | <=5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | | 56-60 | >60 |
| Pria | 407 | 352 | 350 | 404 | 335 | 328 | 294 | 329 | 302 | 307 | 252 | 252 | 482 | 4394 |
| Wanita | 461 | 351 | 347 | 353 | 309 | 328 | 288 | 366 | 277 | 293 | 250 | 244 | 425 | 4292 |

5. Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Cilongok cukup baik, hal ini terlihat dari ketersediaan TK hingga SMK di desa tersebut sejak zaman penjajahan Belanda. Hal tersebut berimplikasi terhadap kuantitas pendidikan warganya. Diketahui bahwa 34,37 persen warga di sana berhasil lulus SD; 21,24 persen lulus SMP; 16,41 persen lulus SMA; dan 3,32 persen sukses menyelesaikan sarjana. Meskipun demikian masih ada 548 orang (6,84 persen) penduduk Desa Cilongok yang tidak pernah merasakan bangku sekolah dan 105 orang (1,31 persen) masih dalam keadaan buta huruf (**Tabel 4.7**).

Program kejar paket A maupun berbagai bentuk intervensi literasi untuk mengajarkan baca tulis tampaknya dapat menjadi alternatif dalam memberantas buta huruf. Semakin banyak program pengembangan pendidikan yang bisa dilakukan, diharapkan membuka peluang kehidupan yang lebih baik bagi warga bersangkutan, minimal mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar yang esensial. Kemampuan dasar ini diharapkan dapat digunakan untuk melanjutkan hidup dan menghadapi kehidupan dalam masyarakat yang terus berubah. Sebagai proses emansipatif yang dilakukan dengan kesadaran sebagai warga negara, untuk mendudukkan kelompok sosial ekonomi rendah menjadi lebih baik dan memberangus nilai-nilai yang membatasi kemungkinan seseorang untuk berkembang dan maju. Melalui pelibatan partisipatif pada semua akses penghidupan yang layak dan bermartabat.

Tabel 4.7 Penduduk Menurut Pendidikan

| Penduduk Cilongok Menurut Pendidikan | |
|--------------------------------------|--------|
| Pendidikan | Jumlah |
| Universitas Tamat | 188 |
| Universitas Tidak Tamat | 29 |
| Akademik/Diploma Tidak Tamat | 5 |
| Akademik/Diploma | 78 |
| SMA Tamat | 1315 |
| SMA Tidak Tamat | 11 |
| SMP Tamat | 1702 |
| SMP Tidak Tamat | 145 |
| SD Tamat | 2755 |
| SD Tidak Tamat | 606 |
| Baca Tulis, Tidak Sekolah | 548 |
| Buta Huruf, Tidak Sekolah | 105 |
| Bersekolah (TK, SD, SMP, SMA) | 1180 |
| Tidak Menjawab | 19 |
| Total | 8686 |

6. Jenis Pekerjaan

Jenis pekerjaan pada usia produktif warga Desa Cilongok didominasi sebagai pedagang dan pegawai/karyawan (**Tabel 4.8**). Data ini memiliki relevansi yang sama dengan data BPS (2019), sebagaimana terlihat dalam Kecamatan Cilongok dalam angka yang menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Cilongok bekerja pada sektor perdagangan, yaitu sebanyak 1.874 orang (27,3 persen). Diikuti kemudian oleh mereka yang bekerja di sektor industri sebanyak 1.811 orang (26,4 persen); baru setelah itu mereka yang berprofesi sebagai petani sebanyak 978 orang (14,3 persen); di sektor jasa sebanyak 903 orang (13,2 persen); 611 orang (8,9 persen) bekerja di sektor angkutan/transportasi/komunikasi. Selanjutnya 253 (3,7 persen) menjadi buruh di sektor konstruksi; 79 (1,15 persen) bekerja di sektor listrik/gas/air; dan 64 orang (0,93 persen) bekerja di lembaga atau sektor keuangan; terakhir sebanyak 2 orang (0,03 persen) bekerja di sektor pertambangan/penggalian. Sekalipun data hasil sensus yang berhasil

dihimpun, memiliki variasi jenis pekerjaan yang lebih beragam, yakni 20 jenis pekerjaan, dibandingkan data BPS yang hanya menghimpun 9 jenis pekerjaan. Namun, keragaman data yang dihasilkan menjadi kurang bermakna, ketika sebanyak 3.061 orang responden (54,5 persen) tidak berhasil diidentifikasi pekerjaannya dan masuk kategori “pekerjaan lainnya”.

Tabel 4.8 Jenis Pekerjaan Penduduk di Usia Produktif

| Penduduk Cilongok Usia Produktif 15-64 Tahun Berdasarkan Pekerjaan | |
|--|--------|
| Pekerjaan | Jumlah |
| Petugas Kesehatan | 10 |
| Pengrajin | 6 |
| Buruh Migran Internasional | 10 |
| Buruh Migran Lokal | 159 |
| Menggangur | 385 |
| Supir/ojek | 137 |
| Pegawai/Karyawan | 620 |
| Polisi/TNI | 9 |
| PNS | 72 |
| Pedagang | 573 |
| LSM | 1 |
| Wirausaha | 193 |
| Tukang | 56 |
| Buruh Ternak | 2 |
| Peternak | 13 |
| Petambak | 1 |
| Buruh Tani | 25 |
| Petani Penggarap | 124 |
| Petani | 155 |
| Lainnya | 3061 |
| Total | 5612 |

Oleh karena itu, hasil sensus terkait dengan pekerjaan pada usia produktif warga Desa Cilongok harus dibaca dengan lebih berhati-hati. Seperti data pekerjaan pada sektor pertanian, yang berhasil dihimpun hanya terdapat 155 orang (2,7 persen) penduduk Cilongok yang bekerja

sebagai petani; 124 orang (2,17 persen) berprofesi sebagai petani penggarap. Sementara buruh tani sebanyak 25 orang (0,4 persen); peternak sebanyak 13 orang (0,2 persen); buruh ternak 2 orang (0,03 persen); dan petambak sebanyak 1 orang (0,02 persen). Artinya total penduduk yang bekerja di sektor pertanian secara umum adalah 5,52 persen, jauh lebih kecil dari data BPS (2019), sebesar 14,3 persen. Persentase pekerjaan pada usia produktif warga Desa Cilongok tersebut, tidak harus secara diametral diadu keabsahan hasil pendataannya, karena membutuhkan proses validasi data yang tidak sederhana.

7. Anak Tidak Sekolah

Hasil pendataan menunjukkan bahwa terdapat 78 anak yang harusnya bersekolah (usia aktif sekolah) justru tidak bersekolah karena beberapa alasan. Sebanyak 30,7 persen anak-anak tersebut dipekerjakan di bawah umur dan bekerja sebagai pedagang, karyawan, maupun buruh. Sementara 69,2 persen lainnya, menjawab menganggur (tidak ada aktivitas khusus yang dikerjakan). Ironisnya, 18 persen di antara anak usia sekolah yang menjawab menganggur adalah mereka yang masuk dalam kategori wajib belajar 9 tahun. Penyebab tingginya jumlah anak yang seharusnya bersekolah tetapi menganggur perlu dilakukan kajian lebih dalam. Beberapa kemungkinannya adalah karena orang tua mereka yang tidak mampu membiayai sekolah ataupun enggan menyekolahkan anaknya karena alasan tertentu, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Meskipun telah ada program sekolah gratis ataupun penyaluran bantuan operasional sekolah lewat BOS. Selain alasan anak itu sendiri yang enggan bersekolah, entah karena malas belajar atau mempunyai alasan tertentu lainnya.

Tabel 4.9 Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah (SD, SMP, SMA)

| Usia | Menganggur | Pedagang | Karyawan | Buruh | Total |
|---------------|------------|----------|----------|-------|-------|
| 16 - 18 tahun | 27 | 3 | 18 | 2 | 50 |
| 13 - 15 tahun | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 7 - 12 tahun | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Total | 54 | 3 | 19 | 2 | 78 |

8. Anak Balita (2-5 tahun)

Hasil pendataan jumlah anak usia dini (2–5 tahun) di Desa Cilongok menunjukkan jumlahnya sebanyak 376 anak (Tabel 4.10). Data anak berusia 2–5 tahun ini tersebar di tingkatan keluarga Pra KS hingga KS3+. Anak dengan usia dini (2–5 tahun atau balita) harus menjadi perhatian khusus karena masuk pada kategori *golden age*. Usia terbaik, bagi pembentukan perkembangan fisik maupun otak anak.

Tabel 4.10 Data Keluarga yang Memiliki Anak Usia 2–5 Thn

| Status Keluarga | Jumlah |
|-----------------|--------|
| Pra KS | 44 |
| KS 1 | 147 |
| KS 2 | 56 |
| KS 3 | 89 |
| KS 3+ | 40 |
| Total | 376 |

Hasil pendataan menunjukkan bahwa 44 anak berusia 2-5 tahun berada pada keluarga Pra KS dan 147 lainnya berada di keluarga KS1. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kesejahteraan keluarga akan berkaitan penting dengan pemenuhan gizi anak-anak mereka. Jika pada masa *golden age* anak tidak dapat terpenuhi gizinya maka dapat mengganggu atau memperlambat pertumbuhan serta dapat menurunkan perkembangan fisik dan mental, sel-sel otak, daya ingat, kecerdasan, dan hal psikis lainnya yang dapat berdampak pada kehidupan anak di kemudian hari. Hal-hal buruk semacam itu perlu diantisipasi dengan memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta tercatat di pusat kesehatan (Posyandu) yang ada di desa.

9. Balita Tidak Ikut Posyandu

Balita atau bayi di bawah usia 5 tahun yang telah dibahas pada tabel sebelumnya sangat dianjurkan/diwajibkan mengikuti program kegiatan rutin di Posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Mengingat hasil pendataan menunjukkan ada 242 kepala keluarga yang teridentifikasi memiliki anak balita tetapi tidak ikut Posyandu (Tabel

4.11). Dari data tersebut 107 kepala keluarga berasal dari Pra KS dan KS1 yang seharusnya memanfaatkan fasilitas kesehatan gratis ini untuk memantau kesehatan anak mereka. Di antaranya dapat menimbang berat badan anak mereka secara rutin; mendapatkan kapsul vitamin A untuk mencegah kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan sampai dengan 4 tahun; memantau tumbuh kembang anak secara rutin; dapat berinteraksi langsung dengan kader kesehatan lain; serta dapat berbagi pengalaman dan informasi dengan ibu-ibu lainnya dalam pola pengasuhan anak.

Tabel 4.11 Data Keluarga yang Memiliki Balita Tetapi Tidak Ikut Posyandu

| Status Keluarga | Jumlah |
|-----------------|--------|
| Pra KS | 22 |
| KS 1 | 85 |
| KS 2 | 39 |
| KS 3 | 73 |
| KS 3+ | 23 |
| TOTAL | 242 |

Nyatanya, manfaat yang begitu banyak dari Posyandu tidak sepadan dengan jumlah keluarga yang ikut dalam program Posyandu. Padahal anak balita yang mereka miliki butuh dipantau tumbuh kembangnya agar terhindar dari berbagai penyakit. Terutama gizi buruk yang dapat berakibat *stunting*, yang berpengaruh buruk dalam penyerapan pembelajaran di kemudian hari. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah setempat, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan desa untuk meninjau kembali apakah masalah utama keengganan warga mengikuti program Posyandu.

10. Tingkat Pendidikan Akhir Kepala Keluarga

Tingkat pendidikan kepala keluarga cukup besar berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Idealnya kepala keluarga dengan pendidikan tinggi memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak, sehingga dapat menyejahterakan keluarganya. Lebih jauh lagi, kepala keluarga dengan pendidikan tinggi cenderung memiliki komitmen lebih baik dalam menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 4.12 Data Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Kepala Keluarga Menurut Pendidikan | |
|------------------------------------|--------|
| Pendidikan | Jumlah |
| Universitas Tamat | 66 |
| Universitas Tidak Tamat | 2 |
| Akademik/Diploma Tamat | 31 |
| Akademik/Diploma Tidak Tamat | 3 |
| SMA Tamat | 425 |
| SMA Tidak Tamat | 0 |
| SMP Tamat | 565 |
| SMP Tidak Tamat | 31 |
| SD Tamat | 1233 |
| SD Tidak Tamat | 169 |
| Baca Tulis, Tidak Sekolah | 55 |
| Buta Huruf, Tidak Sekolah | 64 |
| Tidak Menjawab | 92 |
| Total | 2736 |

Hasil pendataan menunjukkan bahwa hanya 15,53 persen kepala keluarga di Desa Cilongok yang berhasil menyelesaikan pendidikan SMA dan 2,41 persen lainnya tercatat sebagai sarjana (Tabel 4.12). Kebanyakan kepala keluarga di Desa Cilongok hanya berhasil menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah dasar, tercatat sebanyak 1.233 orang atau 45 persen dari total kepala keluarga yang ada di Desa Cilongok. Data yang terhimpun meskipun tidak sepenuhnya memiliki kesamaan dengan data yang dirilis BPS (2019), namun menunjukkan kecenderungan yang relatif tidak berbeda. Menurut data Kecamatan Cilongok dalam Angka 2019, jumlah warga Desa Cilongok yang menyelesaikan pendidikan di tingkat Universitas adalah 2,4 persen; tamat SMA 13 persen; tamat SD 25 persen; dan tidak/belum tamat SD 45 persen.

11. Tipe Rumah

Hasil pendataan status keluarga di Desa Cilongok menunjukkan bahwa 2007 keluarga masuk pada status Pra KS dan KS1, dengan salah satu komponennya adalah kondisi rumah yang ditinggali. Berdasarkan

Tabel 4.13 diketahui bahwa sekitar 628 keluarga di Desa Cilongok memiliki rumah semi permanen dan 222 keluarga memiliki rumah tidak permanen. Menariknya, 56 persen atau 1.172 keluarga Pra KS dan KS1 di Desa Cilongok tinggal dalam rumah yang nyaman dan permanen. Realitas tersebut, mengindikasikan banyak keluarga yang jatuh dalam status Pra KS dan KS1, bukan karena tidak mampu secara finansial, khususnya untuk membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan dan menyekolahkan anak usia 7–15 dalam keluarga. Hal ini lebih dikarenakan ketidaksadaran orang tua terhadap arti penting kesehatan dan pendidikan dalam keluarga.

Tabel 4.13 Tipe Rumah Keluarga Pra Sejahtera dan KS1

| Tahapan Keluarga | Tipe Rumah | | | | Total |
|------------------|------------|---------------|--------------------------|----------------|------------|
| | Permanen | Semi Permanen | Tidak Permanen/ Gubuk | Tidak Menjawab | |
| Pra KS | 894 | 511 | 198 | 20 | 1623 |
| KS1 | 233 | 117 | 24 | 10 | 384 |
| Total | 1172 | 628 | 222 | 30 | 2007 |

Tipe rumah permanen dalam penelitian ini adalah rumah yang beralaskan lantai, ber dinding beton, beratap genteng serta dilengkapi dengan pembuangan akhir yang sudah permanen. Berbeda dengan kelompok masyarakat Pra KS dan KS1 pemilik rumah semi permanen dan tidak permanen/gubuk, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda dengan keluarga Pra KS dan KS1 pemilik rumah permanen. Kelompok keluarga Pra KS dan KS1 pemilik rumah tidak permanen/gubuk perlu mendapat perhatian untuk memperoleh rumah yang layak huni. Selain bantuan lantainisasi, program bedah rumah (aladin) sangat dibutuhkan kelompok keluarga tersebut. Bedah rumah dapat meningkatkan kualitas sanitasi/lingkungan yang sehat dan memberikan kesempatan keluarga memiliki rumah layak huni. Selaras dengan program *sustainable developments goals* yang dicanangkan oleh PBB dalam mengatasi persoalan kemiskinan melalui permukiman dan perumahan layak huni. Berikut adalah salah satu contoh rumah yang direkomendasikan untuk dibedah (**Gambar 4.4**).



Gambar 4.4 Rumah Keluarga Pra KS yang Direkomendasikan untuk Dibedah

12. Status Rumah Tinggal

Rumah yang ditempati oleh keluarga Pra KS dan KS1 sebagian besar tercatat sebagai milik pribadi, lainnya dipinjami/hak pakai dalam bentuk kontrakan dan sisanya menumpang dengan orang tua (Tabel 4.14).

Tabel 4.14 Status Kepemilikan Rumah Keluarga Pra Sejahtera dan KS1

| Tahapan Keluarga | Status Kepemilikan Rumah | | | | Total |
|------------------|--------------------------|---|---------------|-------------------|-------------|
| | Dipinjami/ Hak Pakai | Menumpang dengan Orang Tua/Mertua | Milik Pribadi | Tidak Menjawab | |
| Pra KS | 99 | 49 | 1460 | 15 | 1623 |
| KS1 | 31 | 12 | 334 | 7 | 383 |
| Total | 130 | 61 | 1794 | 22 | 2007 |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak rumah keluarga Pra KS dan KS1 yang menggunakan alas tanah atau pasir. Jumlah rumah milik Pra KS yang beralas tanah atau pasir sebanyak 206 KK sedangkan KS1 sebanyak 26 rumah. Meskipun rumah beralas tanah atau pasir dalam pandangan estetika sering kali dianggap tidak layak dan kurang sehat untuk ditinggali, namun pada sejumlah kebiasaan masyarakat justru dianggap nyaman oleh penghuninya. Banyak di antara rumah-rumah tersebut, sebenarnya telah memenuhi standar konstruksi, dengan

menggunakan fondasi beton, hanya saja pemiliknya menguruk dan meratakannya dengan tanah ataupun pasir. Oleh karenanya, lantainisasi ataupun program bedah rumah (aladin) yang akan dilakukan, tidak sekedar berpedoman pada aspek estetika – kesehatan semata, namun juga harus memperhitungkan kenyamanan bagi penghuni yang menempatinnya.

Bantuan dari YDSM berupa bedah rumah bagi keluarga Pra KS dan KS1 yang telah dilakukan, sangat dirasakan manfaatnya bagi kelompok masyarakat yang menerima bantuan. Salah satu contohnya adalah pemilik warung, sebagaimana terlihat pada **Gambar 4.5**. Awalnya warung yang juga berfungsi sebagai tempat tinggal tersebut, hanya berlantai tanah, YDSM melakukan intervensi dengan memberikan bantuan program bedah rumah bagi keluarga pra sejahtera yang memiliki rumah tetapi masih berlantai tanah ini.



Gambar 4.5 Keluarga KS1 yang Telah Menerima Bantuan Lantainisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kelompok penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan YDSM melalui program lantainisasi ataupun bedah rumah sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni. Program bantuan riil seperti

ini, menurut mereka sebaiknya diteruskan dengan menggerakkan keswadayaan masyarakat, agar seluruh keluarga di Desa Cilongok memiliki rumah layak huni.

13. Rumah Tempat Tinggal

Rumah yang layak adalah (1) rumah yang sesuai dengan standar kesehatan yang memiliki sistem ventilasi dan sanitasi yang baik; (2) rumah yang memiliki keamanan konstruksi yang baik (memiliki atap, dinding, dan lantai yang baik); dan (3) memiliki sumber air bersih. Sebagian besar keluarga Pra KS dan KS1 di Desa Cilongok masih banyak yang memiliki rumah yang belum layak huni. Di antara mereka ada yang memiliki rumah dengan lantai yang baik tetapi belum memiliki struktur bahan yang kokoh. Sementara rumah-rumah lainnya, semi permanen dengan dinding gedeg/bambu/kayu atau semi permanen tanpa lantai atau tidak permanen/gubuk. Selain menempati rumah yang tidak layak, banyak keluarga Pra KS dan KS1 memiliki rumah dengan kondisi permukiman yang tidak layak, karena kumuh dan tingkat kepadatan rumah yang tinggi. Secara rinci kondisi rumah tersaji pada **Tabel 4.15**.

Tabel 4.15 Lantai Rumah Keluarga Pra KS dan KS1

| Tahapan Keluarga | Tipe Rumah | | | | | | | | Total |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----------|----------------|------------|----------|------------|-------------|
| | Beton/ semen | Tanah/ pasir | Ubin/batu bata | Kayu | Tidak Menjawab | Keramik | Logam | Tegel | |
| Pra KS | 319 | 206 | 392 | 6 | 15 | 566 | 2 | 117 | 1623 |
| KS1 | 92 | 26 | 96 | 0 | 5 | 142 | 1 | 20 | 384 |
| Total | 411 | 232 | 488 | 6 | 20 | 708 | 3 | 137 | 2007 |

Kondisi rumah keluarga Pra KS dan KS1 sangat memprihatinkan. Jumlah keluarga yang memiliki rumah berlantai tanah dan pasir masih sangat besar jumlahnya yaitu 206 keluarga Pra KS dan 26 KS1. Masalah rumah yang belum layak huni memiliki korelasi yang kuat terhadap kemampuan ekonomi. Pendapatan keluarga pra sejahtera yang rendah menyebabkan alokasi pemeliharaan rumah tidak cukup. Sebagian besar pendapatan mereka lebih banyak dialokasikan pada kebutuhan sehari-hari. Rasio pendapatan terhadap kebutuhan sehari-hari sangat tinggi

sehingga alokasi untuk kebutuhan perumahan menjadi sangat kecil, bahkan tidak ada. Sumber pendapatan tidak bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah.

Oleh karena bantuan layak huni sudah selayaknya mendapat bantuan bagi pemerintah. Pemberian bantuan tersebut tidak semata-mata membuat masyarakat terlena sehingga sepenuhnya masyarakat yang belum menerima bantuan harus mendapat bantuan perumahan yang layak. Upaya pemerintah untuk memberikan ruang menjadi manusia produktif lebih utama. Wujud upaya tersebut dengan mendorong masyarakat untuk mandiri dan berwirausaha merupakan bagian yang amat penting untuk mewujudkan masyarakat mandiri. Pelatihan wirausaha dan penjaminan pendidikan bagi keluarga miskin lebih utama untuk mendorong masyarakat lebih mandiri. Desa Cilongok memiliki produk utama pertanian berupa kelapa yang dapat menjadi produk wirausaha desa. Posisi Desa Cilongok sebagai ibu kota kecamatan merupakan peluang bagi masyarakat mengembangkan wirausaha. Produk kelapa dan singkong memiliki industri turunan yang cukup beragam. Ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan wirausaha. Kemampuan dan keterampilan masyarakat berwirausaha berbasis teknososiopreneur membantu masyarakat untuk memperoleh penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun secara bertahap rumah permanen.

14. Jenis Sanitasi

Rumah-rumah di Desa Cilongok masih banyak yang belum memiliki sanitasi, terutama mereka yang berstatus Pra KS dan KS1. Sebagian besar masyarakat belum banyak yang memahami tentang pentingnya sanitasi yang baik untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Sanitasi yang baik dapat melindungi dan mencegah berbagai macam penyebaran penyakit. Keluarga miskin pada umumnya masih terkendala dengan kepemilikan sanitasi yang baik karena pertimbangan biaya. Sementara tidak sedikit kelompok keluarga yang sudah mampu, juga masih menggunakan sanitasi yang kurang memadai karena kurangnya budaya hidup bersih. Sebanyak 4,2 persen keluarga kurang mampu masih menggunakan kakus tradisional, dan 0,5 persen lainnya menggunakan MCK umum. Ironisnya masih terdapat 4,9 persen keluarga Pra KS

dan KS1 yang tidak memiliki kakus. Sebanyak 0,5 persen keluarga di antaranya membuang hajat ke MCK umum; 2,8 persen ke sungai; dan 1,5 persen ke empang (Tabel 4.16).

Tabel 4.16 Tipe Sanitasi Keluarga Pra KS dan KS 1

| Keterangan | Keterangan | | | | | | Total |
|------------|---------------------------------|-------------------|----------|-------------|--------|----------------|-------------|
| | Tersambung ke Tangki Pembuangan | Kakus Tradisional | MCK Umum | Sungai/Laut | Empang | Tidak Menjawab | |
| Pra KS | 1456 | 77 | 9 | 48 | 20 | 13 | 1623 |
| KS1 | 350 | 9 | 1 | 9 | 11 | 4 | 384 |
| Total | 1806 | 85 | 10 | 57 | 31 | 17 | 2007 |

Sanitasi tradisional menjadi tempat yang paling rentan bagi bakteri berkembang biak, apalagi pada saat musim penghujan. Pembangunan sanitasi pada keluarga tidak mampu selayaknya menjadi program wajib peningkatan kesehatan komunitas untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit muntaber dan kolera. Pemerintah bersama pihak-pihak terkait, perlu menganggarkan pembangunan kakus layak pakai memenuhi standar kesehatan pada setiap keluarga. Sementara keluarga yang tidak bisa membangun sanitasi karena pertimbangan luas areal tempat tinggal yang kecil, dapat difasilitasi dengan penggunaan sanitasi umum yang layak dan mudah diakses. Hasil pendataan sekaligus menunjukkan bahwa penciptaan lingkungan yang sehat dan nyaman masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Lingkungan keluarga yang sehat adalah lingkungan keluarga yang memiliki rumah yang layak huni dan sanitasi yang baik. Lingkungan sehat dapat menjauhkan dan mencegah penyakit menular terjangkau dalam komunitas, lebih jauh dapat menciptakan suasana lingkungan yang memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi keluarga untuk melakukan aktivitas dengan lebih produktif.

15. Sumber Air Bersih

Kebutuhan sehari-hari air untuk keluarga Pra, KS, dan KS1 sebagian besar bersumber dari sumur. Berdasarkan Tabel 4.17 jumlah keluarga

tidak mampu yang memanfaatkan sumur sebagai sumber air minum sebesar 62,9 persen, selebihnya bersumber dari pompa sebesar 120 KK (7,9 persen), mata air sebesar 54 KK (3,58 persen), sungai 29 KK (1,9 persen) dan menumpang orang lain sebanyak 9 KK (0,6 persen). Program pemerintah untuk menyediakan pelayanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum (air ledeng) baru dapat diakses oleh 346 KK (22,9 persen) keluarga Pra KS dan KS1. Peningkatan jangkauan air bersih untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pra KS, dan KS 1 di Desa Cilongok, tampaknya juga menjadi kebutuhan krusial bagi komunitas.

Tabel 4.17 Sumber Air Keluarga

| Keterangan | Pra KS | KS1 | Total |
|----------------------|--------|-----|------------|
| Air Ledeng | 425 | 81 | 346 |
| Pompa | 109 | 40 | 120 |
| Sumur | 992 | 239 | 947 |
| Mata Air | 49 | 17 | 54 |
| Sungai | 31 | 3 | 29 |
| Menumpang Orang Lain | 7 | 2 | 9 |
| Tidak Menjawab | 10 | 2 | 12 |
| Total | 1623 | 384 | 2007 |

Air bersih merupakan kebutuhan penting sekaligus sanitasi dasar bagi masyarakat, yang sangat penting artinya untuk mengatasi dan mencegah penyebaran penyakit, terutama pada anak balita. Penggunaan air yang tidak bersih dan tercemar limbah E-coli misalnya, akan memberikan dampak risiko terhadap berbagai jenis penyakit, seperti muntaber, kolera dan tifus. Anak-anak dan balita paling berisiko terkena dampak penggunaan air yang tidak bersih. Sejumlah laporan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan air tidak bersih menjadi penyebab utama kematian pada bayi. Sangat beralasan jika kemudian pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu komponen penting untuk meraih predikat *sustainable development goals* (SDGs).

Oleh karena itu pemerintah desa dan pihak-pihak terkait, perlu melakukan akselerasi kebijakan agar seluruh keluarga di Desa Cilongok dapat mengakses air bersih. Program percepatan bisa dilakukan dengan menyediakan penampungan air bersih umum yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Hanya dengan upaya-upaya praktis dan partisipatif

seperti itu, masyarakat Desa Cilongok dapat diharapkan terhindar dari berbagai jenis penyakit.

16. Sumber Modal Usaha Penduduk

Modal usaha menjadi salah satu bagian penting sekaligus menjadi kendala dalam mengembangkan usaha. Sering kali modal menjadi faktor pembatas usaha dapat berkembang, bahkan ketiadaan modal dapat menyebabkan usaha menjadi tidak berkembang, bahkan mengalami kebangkrutan. Sumber modal di Desa Cilongok relatif beragam, meskipun penggunaan modal dari berbagai lembaga penyedia modal ataupun lembaga perkreditan masih sangat kecil diakses oleh masyarakat. Ini tercermin pada data hasil penelitian yang tersaji pada **Tabel 4.18**.

Hasil pendataan di Desa Cilongok mengonfirmasi bahwa penggunaan modal sebagian besar Pra KS dan KS1 bersumber dari dana sendiri, baik dari tabungan ataupun hasil penjualan aset. Modal usaha keluarga Pra KS dan KS1 sudah tentu sangat terbatas, sementara keengganan untuk menanggung risiko di kalangan mereka juga menjadi hal pelik yang tidak mudah dihadapi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi usaha pertanian. Risiko tersebut adalah persediaan modal cadangan bila terjadi kerugian usaha. Penggunaan modal dan biaya sendiri untuk usaha, tidak hanya dipengaruhi oleh kesulitan keluarga Pra KS dan KS1 dalam mengakses modal, namun juga karena dilema, keengganan untuk menanggung risiko.

Tidak berlebihan jika keberadaan lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian pinjaman modal, seperti; 1 unit BRI dan 2 unit BPR, serta KUD di Cilongok relatif tidak dimanfaatkan secara optimal, sebagaimana ditunjukkan **Tabel 4.18**. Sebanyak 237 KK (90.5 persen) dari seluruh lapisan keluarga menggunakan modal usaha sendiri/biaya sendiri dalam mengembangkan usahanya, sementara tidak sampai 1 persen dari mereka menggunakan modal usaha yang bersumber dari koperasi. Hasil ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan secara umum belum mampu mendukung perkembangan usaha di Desa Cilongok. Untuk itu, penting artinya pembuatan skema pengembangan pinjaman modal secara informal yang lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendukung kegiatan

usaha di Desa Cilongok. Sebagaimana kelembagaan patron-klien yang dipraktikkan para pengrajin/produsen gula kelapa dengan pengepul/pedagang kecil di Desa Cilongok yang sangat fungsional, karena mampu merawat kepercayaan di antara mereka yang terlibat dalam tradisi pengolahan gula kelapa. Tidak menciptakan rasa takut, justru dianggap sebagai jaring pengaman sosial bagi kehidupan masyarakat desa yang penuh ketidakpastian.

Orientasi selalu ingin aman dan hidup tenteram, menyebabkan kebanyakan orang desa, khususnya petani takut menanggung risiko. Sebuah realitas yang disebut Scott (1994) sebagai *safety first* (dahulukan selamat), di mana petani berperilaku enggan terhadap risiko dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena kehidupan petani di perdesaan yang begitu dekat dengan batas subsistensi, serta selalu mengalami ketidakpastian cuaca dan tuntutan dari pihak luar. Sebagai sifat khas yang selalu ada pada diri petani, yaitu berusaha menghindari kegagalan-kegagalan yang dapat menghancurkan kehidupan keluarganya dan bukan berusaha memperoleh keuntungan yang besar dengan mengambil risiko. Dengan kata lain petani menemukan keuntungan subjektif dari kerugian maksimum.

Bagi para petani kecil, faktor ketidakpastian merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Terbatasnya pengetahuan petani tentang iklim, pasar dan lingkungan institusi tempat petani berusaha tani, menyebabkan petani senantiasa dihadapkan pada masalah ketidakpastian terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh (Soekartawi 1986). Padahal sesungguhnya risiko dapat diminimalisir dengan cara mengetahui risiko yang akan dihadapinya. Petani dapat meminimalisir risiko usaha taninya dengan mengetahui risiko yang akan dihadapinya saat berusaha tani dan sekaligus memperhatikan hal-hal yang menyebabkan risiko. Untuk itu diperlukan pendekatan rasional yang diwujudkan dalam bentuk fungsi utilitas, dengan menjelaskan perilaku pengambil keputusan terhadap risiko usaha tani.

Bagaimana petani memberi penekanan pada sejumlah tujuan usaha dan bagaimana tujuan-tujuan tersebut berubah urutannya kalau ada pengaruh dari luar. Suatu keadaan yang mampu menunjukkan bahwa para petani mungkin berusaha untuk memaksimalkan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak selalu harus berarti berbentuk keuntungan. Diawali dengan suatu asumsi bahwa petani yang rasional dalam menghadapi

situasi ketidakpastian akan berusaha memaksimalkan kepuasan atau utilitasnya dan bukannya jumlah rupiah yang diharapkan akan diterima.

Usaha skala kecil masyarakat Desa Cilongok relatif sama dengan berbagai kegiatan usaha di banyak desa lainnya, di antaranya; warung kelontong, rumah makan, ternak ayam dan kambing, usaha menderes-pengolahan gula merah, pedagang keliling, pedagang kue tradisional, dan industri kecil. Biasanya usaha tambahan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian, bertujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan selain dari hasil kegiatan pengolahan gula merah yang umum dilakukan masyarakat setempat.

Tabel 4.18 Kepala Keluarga Pertanian Berdasarkan Akses Modal

| Status Keluarga | Jumlah | | | | | | Total | |
|-----------------|------------------|---------------|----------|----------|------------|-----------|-------|----------------|
| | Biaya Bagi Hasil | Biaya Sendiri | Keluarga | Koperasi | Perkebunan | Tengkulak | | Tidak Menjawab |
| Pra KS | 4 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| KS 1 | 5 | 138 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| KS 2 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| KS 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| KS 3+ | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Total | 10 | 237 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 262 |

Beberapa cara digunakan masyarakat setempat dalam pengolahan nira menjadi gula kelapa, di antaranya; 1) pemilik pohon kelapa juga merangkap sebagai penderes dan pengolah gula kelapa, sehingga biaya dan hasil yang diperoleh untuk pemilik itu sendiri. Biasanya hal ini dilakukan oleh pengrajin gula kelapa yang berlahan sempit atau yang mempunyai tanaman kelapa kurang dari 10 pohon; 2) sistem bagi hasil, yaitu menderes pohon kelapa yang bukan miliknya, di mana hasilnya diperoleh secara bergilir. Pergiliran hasil dilakukan sesuai kesepakatan, jika empat harian, maka empat hari hasil sadapan nira kelapa dimiliki oleh pemilik pohon dan empat hari berikutnya barulah dimiliki penderes yang menyadap pohon kelapa; 3) sistem bagi hasil gula merah, sistemnya hampir sama pada cara kedua, tetapi yang dibagi adalah hasil yang sudah diolah menjadi gula merah. Sistem bagi hasil, khususnya sistem 3 dan 4 yang telah menjadi tradisi tersebut, ternyata sangat fungsional sebagai jaringan pengaman sosial bagi kehidupan masyarakat tidak mampu di Desa Cilongok.

Sedangkan sumber tambahan pendapatan lainnya berasal dari budidaya kambing dan ternak ayam kampung. Budidaya ternak kambing dan ayam tidak semata-mata diperuntukkan sebagai sumber tambahan pendapatan, namun menjadi tabungan yang sangat fungsional bagi; 1) biaya pendidikan anak (kambing dapat dijual pada saat anak butuh biaya pendidikan); 2) perayaan hari raya dan kegiatan syukuran dan; 3) sebagai sumber pendapatan insidental.



Gambar 4.6 Usaha Warung dan Ternak Kambing dengan Modal Sendiri

Usaha skala kecil lainnya yang menggunakan modal usaha sendiri adalah usaha warung. Usaha ini sebagian besar digerakkan oleh ibu rumah tangga. Usaha warung yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari diminati untuk dikembangkan karena relatif memiliki alur keluar masuk kas yang cukup menguntungkan, sehingga mengurangi risiko bagi ibu-ibu dari kerugian, selain modal usaha yang relatif kecil. Pengembangan usaha kecil skala rumah tangga yang telah tumbuh di Desa Cilogok (saat ini telah ada 357 toko/kios/warung dan 20 warung makan), tampaknya membutuhkan pembinaan manajemen dan dukungan pengembangan modal usaha, untuk bisa bertahan di pasar domestik yang semakin sesak dan penuh persaingan. Para pelaku usaha dan calon wirausaha pemula dari kalangan keluarga tidak mampu tidak hanya membutuhkan bantuan pengembangan modal usaha untuk warung kecil saja, tapi juga membutuhkan bantuan untuk 1) usaha ternak sapi, kambing, dan budidaya ayam kampung; juga bantuan 2) budidaya ikan lele selain bantuan; dan 3) gerobak usaha bagi para pedagang keliling.

17. Kepemilikan Lahan Pertanian

Sebaran kepemilikan lahan pertanian di Desa Cilongok relatif sangat kecil. Luas lahan yang dimiliki oleh 1.505 keluarga Pra sejahtera dan KS 1, hanyalah seluas 19,94 ha (hasil lapangan). Artinya luas lahan setiap keluarga hanya berkisar 0,02 ha atau setara dengan 200 m². Sementara rata-rata luas lahan rumah berkisar 70 – 100 m². Secara rinci luas lahan keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 tersaji pada **Tabel 4.19**.

Tabel 4.19 Kepemilikan Lahan Pertanian

| Kepemilikan Lahan Pertanian | | | |
|-----------------------------|---|--------|---------------|
| Status Keluarga | Keterangan Luas Lahan (m ²) | | Total |
| | Milik Sendiri | Sewa | |
| Pra KS | 22768 | 13720 | 36488 |
| KS1 | 176601 | 65642 | 242243 |
| KS2 | 15425 | 12300 | 27725 |
| KS3 | 12249 | 6180 | 18429 |
| KS3+ | 13220 | 11140 | 2436 |
| Total | 240263 | 108982 | 349245 |

Hasil sensus menunjukkan bahwa luas areal pertanian keluarga Pra KS dan KS1 sangat kecil. Luas lahan digarap (milik sendiri dan/atau sewa) sebagaimana terungkap di atas hanya berkisar 0,2 ha setiap keluarga. Jika terdapat petani yang memiliki sisa lahan, biasanya digunakan untuk kegiatan budidaya pekarangan seperti; kelapa, singkong, nangka, pisang ternak ayam, ternak kambing, dan lainnya. Luas lahan keluarga Pra KS dan KS1 yang sangat kecil tidak memungkinkan dilakukannya kegiatan usaha pertanian secara konvensional. Terjadinya proses transformasi yang berlangsung massif di Desa Cilongok, seiring dengan semakin menyempitnya penguasaan dan kepemilikan lahan, telah memaksa dilakukannya berbagai proses adaptasi dalam pencarian nafkah rumah tangga.

Dari pengalaman petani sawah di Jawa, pada 1970 dalam pengamatan Hardjosoediro (1982), luas sawah yang mampu dikerjakan keluarga tani adalah satu bahu (luas tanah sawah tadah hujan) dalam satu tahun untuk bisa hidup dalam keadaan tenteram. Bila anggapan tersebut benar, maka tanah milik di bawah 0,7 hektar akan mengakibatkan terjadinya

tenaga lebih dan kekurangan sumber penghidupan bagi keluarga petani bersangkutan. Tenaga berlebih dan kekurangan sumber penghidupan inilah yang mendorong petani beserta keluarganya berjuang mencari dan menggunakan kesempatan yang tersedia, salah satunya dengan menjadi penderes atau pembuat gula kelapa. Jika hal tersebut dapat digunakan sebagai acuan, maka bisa dipastikan bahwa sejak lama masyarakat pertanian di Desa Cilongok mengembangkan strategi mencari nafkah. Menciptakan kombinasi usaha pertanian alternatif, dengan menggabungkan berbagai kegiatan budidaya pertanian secara multikultur, memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami segala macam tanaman yang biasanya untuk makanan pokok (pengganti beras) seperti singkong, ubi, dan pisang. Juga tanaman keras dan segala jenis tanaman penghasil bahan makanan tambahan, seperti kelapa, nangka, mangga, durian, petai, dan seterusnya yang dapat dijual ke pasar. Selain dengan menyalurkan tenaga lebih ke sektor perdagangan dan industri yang semakin berkembang di Desa Cilongok.

Realitas tersebut, telah membekali masyarakat pertanian di Desa Cilongok yang telah lama memasuki fase tenaga berlebih, sekaligus berkurangnya sumber penghidupan, dengan mencari dan menggunakan kesempatan yang tersedia berbekal kemampuan beradaptasi mereka. Dengan asumsi seperti itu, pengembangan kegiatan usaha perikanan menggunakan bioflok di lahan sempit ataupun budidaya kambing dan ayam kampung yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat menjadi alternatif sumber penghasilan sampingan bagi keluarga Pra KS dan KS1.

18. Hak Kepemilikan Lahan

Kepastian hak kepemilikan lahan menjadi faktor penting untuk menciptakan stabilitas (keamanan berusaha) dan menghindari risiko konflik dalam masyarakat. Hak kepemilikan yang diakui oleh pemerintah memiliki beberapa tipe yaitu; 1) sertifikat hak milik; dan 2) surat izin kepala desa. Hak yang mendapat pengakuan dari pemerintah dan dari segi hukum memiliki kekuatan yang lebih tinggi adalah sertifikat lahan. Surat izin kepala desa juga memiliki legalitas, tetapi surat izin masih rentan digugat oleh masyarakat jika memiliki sejarah tumpang tindih kepemilikan. Secara rinci status kepemilikan lahan penduduk tersaji pada **Tabel 4.20**.

Tabel 4.20 Status Kepemilikan Lahan

| Status Keluarga | Keterangan (KK) | | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| | Tanpa Surat Izin | Dengan Surat Izin dari Kepala Desa | Sertifikat Hak Milik | Tidak Menjawab | Total |
| Pra KS | 0 | 13 | 7 | 6 | 26 |
| KS1 | 6 | 83 | 39 | 48 | 176 |
| KS2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 21 |
| KS3 | 0 | 7 | 8 | 3 | 18 |
| KS3+ | 0 | 5 | 9 | 2 | 16 |
| Total | 7 | 116 | 72 | 62 | 257 |

Hasil sensus (**Tabel 4.20**) menunjukkan bahwa status kepemilikan lahan sebagian besar warga Desa Cilongok masih menggunakan legalitas surat izin dari kepala desa. Jumlah keluarga yang menggunakan surat izin dari kepala desa sebanyak 116 KK. Sementara jumlah keluarga yang sudah memiliki lahan yang tersertifikasi hak milik sebanyak 72 KK. Lebih jauh terdapat kepala keluarga yang tidak memberikan jawaban pasti tentang kepemilikan lahan sebesar 62 KK. Keluarga yang tidak memiliki surat izin tapi memanfaatkan tanah sebesar 7 KK. Realitas tersebut, menguatkan sinyalemen Hernando de Soto (2006), bahwa pembangunan modern gagal memahami proses pengembangan sistem hak milik yang terpadu, sehingga membuat kaum miskin tidak mungkin dapat menggunakan apa yang dimilikinya secara informal untuk digunakan sebagai kapital dalam membangun bisnis dan kewirausahaan. Sebagai akibatnya, kelompok petani di dunia berkembang selalu terperangkap dalam kemiskinan, di mana petani hanya mampu menanam untuk kebutuhan hidupnya sendiri.

Untuk itu, pemerintah desa perlu menginisiasi dilakukannya sosialisasi hak kepemilikan agar seluruh pemilik lahan di Desa Cilongok memiliki sertifikat hak milik sah yang dapat melindungi hak kepemilikannya. Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan menghimpun; 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat hak milik; 2) surat tanah (berbentuk Letter C, A/B, Akta Hibah, atau berita acara kesaksian, dan lainnya); 3) sudah terdapat tanda batas yang terpasang dan mendapat persetujuan pemilik perbatasan tanah yang

ingin disertifikasi; 4) melampirkan bukti setor BPHTB dan PPh; dan 5) mengajukan surat permohonan pengajuan PTSL dan surat pernyataan peserta PTSL pada instansi yang berwenang. Sebagai komitmen pemerintah desa dalam membentuk sistem hak kepemilikan yang lebih pasti dan jelas legalitas formalnya. Menjadi aset yang dibutuhkan dalam membentuk modal untuk pengembangan usaha rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan pemilikinya.

Selanjutnya yang tidak kalah penting untuk dimonitor oleh desa adalah pasca sertifikasi, mengingat keberadaan sertifikat hak milik perorangan akan memudahkan pemilik modal di perkotaan untuk bisa memiliki tanah di perdesaan. Kejelasan status kepemilikan tanah di perdesaan akan semakin mendorong pemodal masuk semakin dalam ke kawasan perdesaan, menggerus kearifan budaya seiring tumbuhnya sifat materialisme yang selalu menempel dalam setiap pertumbuhan ekonomi.

19. Pendapatan Keluarga

Salah satu tujuan dari pendataan ini adalah mengidentifikasi nilai pendapatan setiap kelompok keluarga, khususnya keluarga Pra KS dan KS1 di Desa Cilongok. UMR Kabupaten Banyumas sebesar Rp1.750.000,00/bulan sebagaimana ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2019, melalui Surat Keputusan Gubernur Jateng No. 560/68 bertanggal 21 November 2018, dijadikan sebagai patokan sasaran. Yaitu, $UMR + 20 \text{ persen}$ atau setara $Rp1.750.000,00 + Rp350.000,00 = Rp2.100.000,00$ menjadi orientasi nilai pendapatan keluarga yang diperoleh atas keterlibatan mereka dalam program DCML. Jika rata-rata satu keluarga di Desa Cilongok memiliki 4 hingga 5 anggota keluarga, maka garis kemiskinan reratanya menjadi sebesar $Rp420.000.000,00/keluarga/bulan$. Artinya, pendapatan keluarga yang terlibat program DCML telah jauh melampaui batas atas Garis Kemiskinan 2019 Kabupaten Banyumas yang ditetapkan sebesar Rp385.140,00 (kapita/bulan).

Tabel 4.21 Keluarga Berpendapatan di Bawah UMR Desa Cilongok

| Jumlah Keluarga dengan Pendapatan di Bawah UMR (< Rp1.700.000) | | | |
|--|--------------------|----------|-------|
| Status Keluarga | Sumber Penghasilan | | Total |
| | Pertanian | Campuran | |
| Pra KS | 55 | 163 | 218 |
| KS 1 | 186 | 443 | 629 |
| KS 2 | 17 | 82 | 99 |
| KS 3 | 24 | 110 | 134 |
| KS 3+ | 13 | 67 | 80 |
| Total | 295 | 865 | 1160 |

Hasil identifikasi terhadap **Tabel 4.21** menunjukkan, bahwa variasi penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) di Kabupaten Banyumas menyebar ke seluruh kelompok keluarga. Namun sebagian besar pendapatan dari profesi sebagai petani di bawah UMR didominasi oleh KS1 sebanyak 186. Selanjutnya keluarga Pra KS bermata pencaharian kombinasi antar pertanian dan lainnya yang memiliki penghasilan di bawah UMR berjumlah 163 KK. Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki lebih dari 1 pekerjaan masih banyak yang memiliki gaji di bawah UMR. Jumlah tersebut sebesar 865 KK atau mencapai 35,55 persen keluarga dari 2.366 KK. Artinya sebagian besar keluarga yang bekerja di Desa Cilongok masih memiliki pendapatan yang relatif rendah. Kombinasi pekerjaan belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan untuk mencapai UMR.

Sebagian besar mereka yang memiliki lebih dari 1 pekerjaan umumnya bekerja sebagai buruh atau pekerja buruh harian lepas. Penciptaan kegiatan ekonomi atau lapangan pekerjaan baru dianggap memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan. Saat ini tenaga kerja di Desa Cilongok masih banyak terserap sebagai pekerja kasar dengan penghasilan rendah. Sebagian besar dari mereka memiliki pendidikan rendah dengan tingkat keterampilan yang juga rendah. Pembangunan sumber daya manusia terutama dalam pengembangan

keterampilan perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Ini perlu dilakukan agar investasi dan penciptaan peluang usaha baru mampu menggunakan sumber daya manusia yang terampil dari Desa Cilongok. Utamanya investasi dan penciptaan peluang usaha di sektor pertanian yang terintegrasi dan terpadu dengan industri pengolahan. Melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan dapat mendorong munculnya peluang kerja/ usaha ikutan, selain mampu mendorong pendapatan.

Di dalamnya keluarga Pra KS dan KS1 perlu dilibatkan secara aktif sejak dari tahapan proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) sampai pada *monitoring* dan evaluasi (*controlling*). Sebuah proses kerja panjang yang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya komitmen dari seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam program. Skala prioritas pelibatan anggota keluarga tidak mampu (di bawah usia 40 tahun) perlu mendapatkan motivasi dan didorong agar berpartisipasi aktif, dengan penuh kesadaran menjadi bagian dalam kegiatan tersebut. Pembangunan pertanian modern dan digital hanya mungkin diperkenalkan kepada petani muda secara partisipatif, berproses menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan rutinitas ekonomi masyarakat Desa Cilongok secara keseluruhan.

20. Penghasilan di Sektor Pertanian

Sekalipun terjadi transformasi besar-besaran dalam sektor pertanian di Desa Cilongok, namun sektor pertanian masih menjadi sumber penting bagi pendapatan keluarga Pra KS dan KS1. Secara umum pendapatan keluarga yang bekerja di sektor pertanian, penghasilannya relatif lebih besar dibandingkan UMR Kabupaten Banyumas. Sekalipun besaran pendapatan tersebut dikarenakan agregat pendapatan dihitung berdasarkan pendapatan dalam keluarga bukan pendapatan individu. Di mana pendapatan sebagai peternak menempati posisi teratas, dengan rerata sebesar Rp2.985.000,00 diikuti pekerjaan sebagai petani dengan rerata sebesar Rp2.120.336,00. Secara rinci pendapatan keluarga sebagai petani tersaji pada **Tabel 4.22**.

Tabel 4.22 Rata-Rata Pendapatan Sektor Pertanian Keluarga Desa Cilongok

| Jenis Pekerjaan | Rata-Rata Pendapatan (Rupiah) |
|------------------|-------------------------------|
| Petani | 2.120.336 |
| Petani Penggarap | 1.789.104 |
| Buruh Tani | 1.922.727 |
| Peternak | 2.985.000 |
| Buruh Ternak | 1.850.000 |
| Petambak | 1.783.333 |

21. Pendapatan Per Kapita Keluarga

Umumnya UMR dihitung berdasarkan upah individu dalam hitungan rupiah/kapita/bulan. Penelitian ini menghitung pendapatan berdasarkan pendapatan agregat dalam keluarga. Setiap anggota keluarga yang bekerja dihitung secara agregat upahnya sebagai pendapatan keluarga. Dengan demikian penelitian ini sedikit berbeda dengan perhitungan pendapatan yang sudah umum digunakan oleh lembaga resmi. Perhitungan pendapatan berbasis keluarga didasarkan oleh berbagai faktor di antaranya adalah; 1) dalam 1 rumah masih banyak ditinggali oleh beberapa rumah tangga; 2) budaya dan ikatan sosial dalam keluarga masih sangat kuat, sehingga sebagian besar kebutuhan dasar masih saling membantu; dan 3) masyarakat pedesaan memiliki kesamaan budaya dan ikatan sejarah. Hasil pendataan di Desa Cilongok berdasarkan pendapatan keluarga tersaji pada **Tabel 4.23**.

Tabel 4.23 Pendapatan Per Kapita Keluarga

| Pendapatan Per Kapita Keluarga | | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Total KK | Total KK Berpenghasilan | Total Pendapatan Cilongok | Rata-Rata |
| 2736 | 2545 | Rp 6.314.467.409,00 | Rp 2.307.919,00 |

Hasil analisis terhadap **Tabel 4.23** menunjukkan bahwa jumlah KK yang memiliki penghasilan tetap adalah sebanyak 2.545 KK. Sementara keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap adalah keluarga lansia dan janda. Menariknya jumlahnya cukup besar mencapai 191 keluarga. Umumnya mereka disubsidi dan bergantung pada anggota keluarga yang sudah bekerja dalam satu KK, keluarga dekat, maupun tetangga.

Secara agregat pendapatan per kapita rata-rata keluarga di Desa Cilongok adalah sebesar Rp2.307.919,00. Secara umum pendapatan per kapita Desa Cilongok sudah cukup tinggi, karena telah melampaui UMR Kabupaten Banyumas. Jika data ini benar, maka patokan sasaran program DCML sebesar UMR + 20 persen atau setara Rp2.100.000,00 yang menjadi orientasi nilai pendapatan keluarga di Desa Cilongok juga telah terlampaui, sehingga harus dievaluasi ulang.

22. Sumber Penghasilan

Desa Cilongok merupakan Ibu Kota Kecamatan Cilongok. Secara umum struktur ekonomi Desa Cilongok sudah mulai bergeser dari kegiatan pertanian ke sektor perdagangan, industri dan jasa. Kegiatan ekonomi relatif lebih beragam daripada desa sekelilingnya. Ini menunjukkan sumber penghasilan penduduk relatif beragam dibandingkan desa sekitar. Secara umum proporsi sumber pendapatan lebih banyak yang berasal nonpertanian, sebagaimana disajikan **Tabel 4.24**.

Tabel 4.24 Sumber Penghasilan Desa Cilongok

| Sumber Penghasilan | |
|--------------------|-----------|
| Sumber Penghasilan | Jumlah KK |
| Pertanian | 432 |
| Nonpertanian | 2296 |
| Tidak Menjawab | 8 |
| Total | 2736 |

Hasil analisis terhadap **Tabel 4.24** menunjukkan bahwa sumber pendapatan dari sektor pertanian masih memberikan kontribusi sebesar 18,75 persen. Hasil ini menunjukkan sumber utama mata pencaharian keluarga tidak lagi berasal dari sektor pertanian, sebagian besar penduduk lebih bergantung dan bekerja sebagai pekerja dalam kegiatan perdagangan dan industri, buruh bangunan, karyawan swasta, dan jasa. Kedudukan Cilongok sebagai ibu kota kecamatan telah memberikan pengaruh signifikan terhadap pergeseran aktivitas ekonomi. Pembangunan pertanian berbasis potensi lokal, utamanya kelapa, dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, perlu diinisiasi kembali untuk diwujudkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pengembangan hasil produk kelapa, seharusnya tidak hanya bertumpu pada pengolahan hasil nira tanaman

kelapa menjadi gula kelapa/semut/kristal yang telah biasa dilakukan masyarakat. Namun juga perlu membuka kemungkinan dilakukannya diversifikasi pengolahan hasil produk olahan kelapa lainnya yang lebih menguntungkan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Probowati (2011) atas 16 produk olahan primer olahan kelapa, ternyata yang paling prospektif didasarkan pada 1) daya saing produk; 2) prospek pasar produk; 3) keterkaitan dengan industri hilir; dan 4) kemudahan aplikasi teknologi, adalah minyak kelapa (VCO), nata de coco, serat sabut, dan arang tempurung. Meskipun memberikan keuntungan yang relatif lebih besar dibandingkan mengolah nira menjadi gula kelapa/semut/kristal, namun pengembangan keempat produk olahan kelapa dimaksud juga mengandung risiko, karena akan mengubah struktur dasar budidaya kelapa yang telah dilakukan masyarakat setempat. Pengembangan produk olahan minyak kelapa (VCO), nata de coco, serat sabut, dan arang tempurung, mensyaratkan tandan buah kelapa tidak dipotong untuk dideres sebagaimana dalam praktik pengumpulan nira. Sebaliknya, dalam praktik pengembangan diversifikasi keempat produk yang direkomendasikan, justru tandan buah kelapa harus dirawat hingga menghasilkan butiran buah kelapa sebagai bahan baku utama produksinya.

Kondisi tersebut, tentu saja membutuhkan proses internalisasi yang tidak sederhana, karena harus mengubah kebiasaan cara budidaya kelapa dalam masyarakat. Juga perlu mempertimbangkan potensi buah kelapa segar yang bisa dihasilkan Desa Cilongok dan sekitarnya sebagai pemasok bahan baku utama. Jika diasumsikan petani pembudidaya kelapa di Desa Cilongok enggan untuk mengubah pola budidaya kelapanya, maka perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa secara massal yang diorientasikan untuk menghasilkan buah kelapa segar yang dapat mencukupi kapasitas produksi. Dalam konteks tersebut, penyebaran bibit kelapa pada masyarakat perlu memperhatikan jenis kelapa yang akan ditanam, karena kelapa di luar jenis “kelapa dalam” akan memengaruhi kualitas nira yang dihasilkan, kecuali pohon kelapa yang dibudidayakan diorientasikan hanya untuk diambil buahnya. Menurut Melinda (2015), kualitas nira di Kabupaten Banyumas lebih unggul jika dibandingkan dengan daerah lain penghasil gula kelapa di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan kelapa yang dideres di Kabupaten

Banyumas dapat menghasilkan gula dengan kadar tingkat kemanisan mencapai 72 persen.

Selain itu juga perlu memperhitungkan faktor-faktor teknis dan nonteknis terkait dengan kelayakan usaha, tingkat persaingan usaha, pemanfaatan teknologi, regulasi dan biaya investasi yang besar, karena harus dikelola secara terpadu, sehingga lebih ekonomis. Selain resistensi dari pelaku usaha pengolahan gula kelapa/semut/kristal, khususnya para tengkulak/pengumpul yang memiliki kepentingan yang sama terhadap stabilitas pasokan bahan baku dari kegiatan budidaya kelapa rakyat. Jika berbagai hal yang menghambat pengembangan produk olahan minyak kelapa (VCO), nata de coco, serat sabut, dan arang tempurung dapat disiasati, maka terobosan revolusioner ini dipastikan tidak hanya mengubah budaya dan stuktur dalam masyarakat, namun juga bisa mengubah jalannya transformasi pertanian di Desa Cilongok.

23. Jalur Pemasaran

Warga Desa Cilongok memiliki beragam cara untuk memasarkan hasil produksinya. Jenis pasar yang digunakan, utamanya adalah gudang pengepul (64,5 persen), pasar tradisional (16 persen) dan pasar modern (0,37 persen). Gudang pengepul dan pasar tradisional adalah 2 alur pemasaran yang paling banyak digunakan oleh petani untuk memasarkan hasil produksinya. Kedua jenis pasar tersebut sudah berlangsung lama dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Hingga saat ini, kedua jalur pemasaran tersebut masih menjadi sumber utama hasil produksi pertanian ataupun pengolahan produk rumah tangga (gula merah/semut/kristal) di pasarkan. Secara rinci banyaknya jenis pasar yang digunakan oleh petani memasarkan produknya tersaji pada **Tabel 4.25**.

Tabel 4.25 Jalur Pemasaran Produk Pertanian

| Jalur Pemasaran Produk Pertanian Desa Cilongok | |
|--|-----------------|
| Jenis Pemasaran | Jumlah (petani) |
| Pasar Tradisional | 43 |
| Pasar Modern | 1 |
| Gudang Pengepul | 173 |
| Tidak Menjawab | 51 |
| Total | 268 |

Hasil analisis terhadap **Tabel 4.25** menunjukkan bahwa aktivitas pemasaran produk pertanian ataupun hasil pengolahan produk rumah tangga di Desa Cilongok masih belum berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan optimal. Sebagian besar produsen masih bergantung pada jalur pasar pengepul. Harga jual produk pada jalur pasar pengepul tentu sangat jauh berbeda (lebih rendah) jika dibandingkan dijual langsung kepada konsumen. Terutama bagi produsen yang terikat utang dengan pengepul/tengkulak, mereka akan mendapatkan pemotongan atas harga produk yang dijual sesuai dengan kesepakatan hingga utang tersebut lunas.

Dalam saluran tata niaga gula kelapa misalnya, di Desa Cilongok ditemukan 3 (tiga) saluran dengan lembaga-lembaga tata niaga seperti: pengrajin (produsen), pedagang pengepul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan konsumen. Pada ketiga pola tata niaga yang ada melibatkan 3 pedagang perantara yaitu pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer, di mana tiap-tiap saluran tata niaga melalui pengepul/pedagang kecil. Hal ini terjadi akibat adanya hubungan atau interaksi yang terjalin antara pengrajin/produsen gula kelapa dengan para pengepul dan jaringan perdagangan yang dimilikinya. Hubungan patron-klien tersebut disebabkan karena adanya pola utangan atau pinjaman berupa uang antara pengrajin/produsen gula kelapa dengan para pengepul/pedagang kecil yang dipergunakan untuk proses produksi. Mulai dari pengadaan bahan baku pembuatan gula kelapa sampai pada proses pengolahan nira kelapa menjadi gula kelapa yang siap dipasarkan.

Menariknya, pinjaman tersebut diperoleh melalui pengepul/pedagang kecil yang diberi pinjaman uang oleh pedagang besar, selanjutnya uang tersebut dipinjamkan lagi pada pengrajin/produsen dengan jumlah tertentu pada saat pengrajin membutuhkan biaya, misalnya untuk keperluan memperbaiki rumah, membayar sekolah anaknya, hajatan, dan seterusnya. Hubungan ini berlangsung cukup lama, di mana para pengrajin mengembalikan pinjaman uangnya dalam bentuk pemotongan hasil penjualan gula kelapa. Hubungan tersebut menjadi terlembaga, karena begitu utang pengrajin/produsen hampir lunas, pengepul/pedagang kecil telah siap untuk memberi pinjaman kembali. Dengan demikian, pengrajin/produsen terpaksa menjual

produk gula kelapanya kepada pengepul/pedagang yang meminjami uang kepadanya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar yang berlaku.

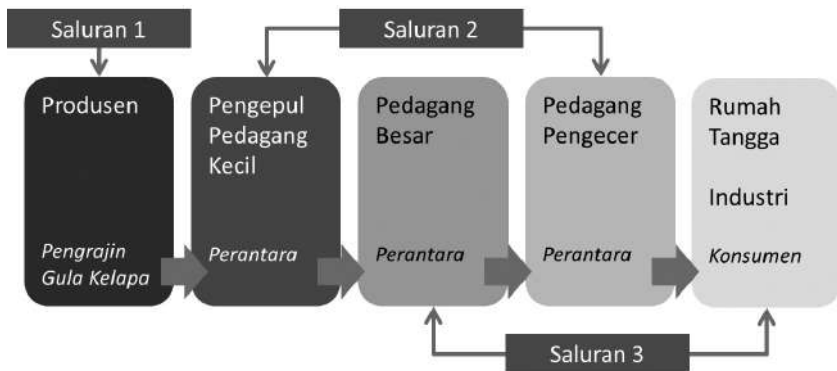
Harga gula saat pendataan dilakukan hanya berkisar Rp10.000,00–Rp11.000,00 setiap kilogramnya di tingkat pengrajin/produsen. Padahal harganya bisa mencapai Rp15.500,00–Rp18.000,00 setiap kilogramnya ketika sampai konsumen di Jakarta. Selisih harga itulah yang terdistribusi pada para pedagang perantara. Hasil produk gula kelapa dipasarkan di daerah yang berbeda-beda pada tiap saluran tata niaga, dari pasar lokal di Desa Cilongok dan sekitarnya, pasar Kecamatan Cilongok, pasar Kota Purwokerto, yaitu pada sejumlah industri pengolahan makanan dan pabrik kecap, hingga ke pasar Kota Bandung dan Jakarta. Adapun sistem pembayaran dari masing-masing lembaga tata niaga di setiap saluran hampir sama. Pada lembaga tata niaga pengepul/pedagang kecil pola pembayarannya adalah pola utangan, sedangkan pada pedagang besar dan pedagang pengecer pembayarannya dilakukan secara langsung/tunai.

Sementara margin keuntungan yang diperoleh pengrajin/produsen berbeda besarnya dengan yang diperoleh pedagang perantara. Berdasarkan kajian Astuti, *et. al.* (2007) diketahui bahwa total margin keuntungan pada saluran pertama mencapai 24,31 persen yang melibatkan 3 lembaga tata niaga, yaitu; pedagang pengepul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Pada saluran tata niaga yang kedua margin keuntungan di tingkat pedagang pengecer mengalami peningkatan sebesar 5,4 persen menjadi 8,1 persen atau naik sekitar 2,7 persen. Pada saluran kedua ini hanya melibatkan dua lembaga tata niaga yaitu pedagang pengepul dan pedagang pengecer tanpa melalui pedagang besar. Sedangkan total margin keuntungan pada saluran ketiga mencapai 30 persen, sebagai saluran tata niaga dengan nilai margin keuntungan tertinggi. Hal ini disebabkan karena harga di tingkat konsumen mengalami peningkatan, sedangkan lembaga tata niaga yang terlibat hanya pedagang pengepul dan pedagang besar tanpa melalui pedagang pengecer.

Lebih lanjut Astuti, *et. al.* (2007), menyebutkan bahwa jalur pemasaran yang paling efisien justru jalur pemasaran yang memiliki total margin terkecil, yang terdapat pada saluran tata niaga yang kedua,

dengan total margin 18,9 persen. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang diperoleh lembaga tata niaga pada saluran kedua juga rendah, yaitu sebesar 49,96 persen. Besar kecilnya margin tentu saja akan berpengaruh besar terhadap harga di tingkat pengrajin/produsen dan bagian harga yang akan diterimanya. Jika total marginnya tinggi maka akan menyebabkan harga yang diterima pengrajin/produsen rendah. Bagian yang diterima pengrajin/produsen gula kelapa dapat diketahui dengan membandingkan antara harga jual di tingkat pengrajin/produsen dengan harga jual di tingkat konsumen.

Farmer share adalah bagian yang diterima pengrajin sebagai balas jasa atas kegiatan yang dilakukan dalam agroindustri gula kelapa. Saluran pemasaran pertama dengan tiga lembaga tata niaga yang terlibat, pengrajin/produsen memperoleh *profit sharing* sebesar 75,67 persen. Saluran pemasaran kedua yang melibatkan dua lembaga tata niaga, memberikan *profit sharing* sebesar 81,08 persen kepada pengrajin/produsen. Sementara saluran pemasaran ketiga dengan dua lembaga pemasaran memberikan *profit sharing* 70,00 persen dan merupakan bagian terendah, yang diterima pengrajin/produsen dari ketiga saluran tersebut. Artinya, dari ketiga saluran tata niaga tersebut, jalur pemasaran kedua yang melibatkan dua lembaga tata niaga yaitu pedagang kecil/pengepul dan pedagang besar; dan mampu memberikan *profit sharing* terbesar yaitu 81,08 persen merupakan saluran tata niaga yang menguntungkan pengrajin/produsen gula kelapa.



Gambar 4.7 Saluran Tata Niaga Gula Kelapa

24. Budidaya Perikanan

Sektor perikanan menjadi salah satu alternatif mata pencaharian bagi masyarakat di Desa Cilongok. Meskipun jumlah keluarga yang bergantung pada kegiatan perikanan sangat kecil, tetapi sektor ini memberikan pendapatan yang cukup memadai. Sumber air yang relatif kecil menjadi salah satu sebab mengapa jumlah keluarga yang bergantung pada kegiatan perikanan sangat kecil. Pada saat musim kemarau, volume dan sumber air pada sebagian besar wilayah Desa Cilongok menjadi sangat kecil. Hal ini dikarenakan Desa Cilongok tidak memiliki wilayah dengan potensi resapan air kategori tinggi, desa ini hanya memiliki potensi resapan air kategori rendah seluas 1,36 km² dan potensi resapan air kategori sedang seluas 3,03 km² (Mardiyana, 2017).

Desa Cilongok didominasi penggunaan lahan berupa sawah, kebun/pekarangan, dan permukiman. Penggunaan lahan akan memengaruhi laju initrasi, karena penggunaan lahan kebun dan pekarangan berpotensi memiliki peresapan rendah, akibat sebagian besar tanaman berakar kecil. Sementara permukiman yang padat, dengan sawah dan sungai di sekitarnya akan memiliki tingkat kejenuhan tinggi, sehingga porositas tanahnya menjadi rendah. Daerah seperti ini, memiliki kemampuan resapan air yang kurang baik diakibatkan adanya bangunan yang menghalangi masuknya air ke dalam tanah, sehingga air akan menjadi aliran permukaan. Selain itu, permukiman padat di Desa Cilongok yang relatif jauh dari daerah pegunungan (Gunung Slamet) dan kawasan hutan, serta cenderung memiliki ruang terbuka hijau yang sempit, menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan. Secara rinci jumlah keluarga yang bergantung pada kegiatan perikanan tersaji pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26 Jenis Budidaya Perikanan dan Jumlah Produksi

| Jenis Budidaya Perikanan dan Jumlah Produksi | | | |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Perikanan | Jumlah Pembudidaya | Luas Kolam (m ²) | Jumlah Produksi (kg) |
| Gurame | 2 | 78 | 500 |
| Ikan Lele | 3 | 87 | 5041 |
| Total | 5 | 165 | 5541 |

Hasil analisis terhadap **Tabel 4.26**, menunjukkan bahwa jumlah keluarga yang terlibat pada sektor perikanan hanya berjumlah 5 keluarga. Adapun jenis ikan utama yang dibudidayakan adalah ikan gurame dan ikan lele. Jumlah produksi ikan lele berkisar 5.041 kg atau setara 60 kg/m² luas kolam, sedangkan jumlah produksi ikan gurame dapat menghasilkan 6.5 kg/m² dari luas kolam atau menghasilkan setara 500 kg pada saat panen. Sebagian besar hasil produksi diperuntukkan memenuhi permintaan pasar di Desa Cilongok dan sekitarnya. Pengembangan budidaya perikanan berbasis bioflok di lahan terbatas milik keluarga Pra KS dan KS1, tampaknya memiliki potensi besar dan peran penting untuk dikembangkan. Mengingat lebih hemat air, sederhana dan mudah dipraktikkan, serta dapat menjadi alternatif sumber pendapatan sampingan yang memadai bagi keluarga.

25. Budidaya Pertanian

Budidaya pertanian di Desa Cilongok didominasi oleh budidaya tanaman kelapa yang merupakan komoditas tanaman turun-temurun dan kental akan budaya yang membentuk karakter masyarakat setempat. Hasil budidaya kelapa dalam bentuk nira menghasilkan produksi sebesar 151.218,5 kg per bulan dengan jumlah pembudidaya sebanyak 342 orang. Umumnya warga Cilongok tidak menjual hasil budidaya kelapa mereka dalam bentuk butiran buah segar melainkan dipanen dalam bentuk nira untuk kemudian diolah menjadi gula kelapa/semut/kristal.

Kemampuan penderes menghasilkan kelapa olahan menjadi gula merah setiap sehari berkisar 3–6 kg, bila beruntung bisa mencapai 7 kg gula merah sehari. Para penderes harus memanjat kelapa yang menjulang tinggi dengan ketinggian 20–30 m. Mereka harus memanjat 2 kali dalam sehari yaitu pagi dan sore. Penderes yang ingin menghasilkan gula merah 5 kg sehari harus memanjat kelapa berjumlah 25–30 pohon kelapa. Ini artinya penderes harus memanjat sebanyak 50–60 pohon kelapa. Penderes membutuhkan keahlian dan keterampilan untuk memanjat 25 pohon kelapa di pagi hari dan 25 pohon kelapa di sore hari. Penderes membutuhkan kurang lebih 20 l air nira untuk mengonversi menjadi 5 kg gula merah setiap hari. Penderes yang memiliki kebun kelapa dan mengambil nira kelapa sendiri bisa memperoleh 90–150 kg setiap bulan. Penderes yang menggunakan buruh tani untuk mengambil nira kelapa harus berbagi dengan buruh penderes dengan sistem “maro”. Sistem maro adalah sistem bagi hasil antara pemilik kebun dengan buruh penderes. Pemilik kebun memperoleh 50 persen dari hasil dan buruh penderes memperoleh 50 persen dari hasil. Itu artinya buruh penderes menghasilkan 45–75 kg setiap bulan bila mampu menghasilkan 5 kg gula merah.

Harga setiap gula merah mencapai Rp. 11.000,- per Kg. Perkiraan penghasilan rata – rata buruh penderes berkisar Rp495.000.- – Rp825.000,- sedangkan penghasilan sebagai pemilik kebun sekaligus penderes berkisar Rp990.000,- – Rp1.650.000,-. Pendapatan tertinggi penderes masih di bawah upah minimum regional Kabupaten Banyumas yang besarnya Rp1,7 juta. Pendapatan sebagai buruh penderes masih sangat kecil. Alih – alih memikirkan pendidikan keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari masih sangat berat. Ini yang menyebabkan profesi sebagai penderes semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Tradisi ekonomi rumah tangga yang berbasis kelapa dan gula merah sudah mulai meredup di tengah perkembangan Desa Cilongok sebagai ibu kota kecamatan.

Dahulu, setiap rumah tangga memiliki minimal 2 orang penderes yaitu orang tua laki – laki dan anak laki – laki. Saat ini, penderes sudah sangat terbatas jumlahnya. Mereka yang berprofesi sebagai penderes sebagian besar sudah tua. Generasi muda saat ini tampak memilih lebih realistis. Pemuda desa sebagian besar memilih bekerja sebagai karyawan toko dan buruh pengolahan kayu. Kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Inilah yang menyebabkan generasi penderes yang tersisa adalah generasi yang umumnya berumur 40 tahun.

Pilihan menjadi buruh olahan kayu, karyawan toko dan pertukangan masih lebih menjanjikan daripada menjadi penderes. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana menjaga agar kebun kelapa dapat tetap eksis sebagai simbol kemurnian Desa Cilongok. Perubahan adalah sebuah keniscayaan oleh karena itu masyarakat tentu pasti akan berubah. Perubahan sejatinya tetap berangkat dari pijakan tradisi yang sudah lama melekat pada kehidupan masyarakat. Ini menjadi penting agar sebuah perubahan tidak datang mengubah secara total produk kebudayaan masyarakat tetapi mampu bersenyawa secara dinamis.

Tabel 4.27 Jenis Budidaya Pertanian dan Jumlah Produksi

| Jenis Budidaya Pertanian | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Komoditi | Jumlah Pembudidaya | Jumlah Produksi (Kg) |
| Duku | 24 | 580 |
| Jamur | 1 | 840 |
| Kacang Panjang | 6 | 910 |
| Kacang Tanah | 3 | 800 |
| Kelapa (nira) | 342 | 151218.5 |
| Kunyit, Temulawak | 1 | 300 |
| Padi | 29 | 37420 |
| Petai | 2 | 15 |
| Pisang | 19 | 406 |
| Singkong | 26 | 57212 |
| Total | 529 | 249701.5 |

Tanaman lainnya yang juga banyak dibudidaya adalah singkong. Tanaman dengan sumber karbohidrat ini menghasilkan 57,2 ton dalam satu siklus tanam (6-8 bulan). Tanaman ini termasuk jenis tanaman yang mudah ditanam dengan kondisi tanah yang justru relatif subur bagi komoditi lainnya. Tanaman lainnya yang teridentifikasi cukup banyak ditanam adalah padi dengan rata-rata jumlah produksi sebanyak 37,42 ton dalam satu kali periode tanam (3 bulan). Sementara komoditi lainnya yang juga ditemui di beberapa kebun dan pekarangan warga, antara lain; pohon albasia yang dipanen kayunya; pohon duku, mangga, durian, petai, dan pisang yang dipanen buahnya. Selain tanaman rimpang-rimpangan, kacang panjang, kacang tanah dan tanaman untuk bumbu dapur hingga tanaman obat. Adapun jumlah pembudidaya kayu Albasiah di Desa Cilongok ada 76 orang dengan total jumlah pohon sebanyak 463 pohon.

26. Budidaya Peternakan

Peternakan merupakan jenis mata pencaharian yang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di Desa Cilongok. Keberadaan Desa Cilongok sebagai wilayah *hinterland* dari ibu kota kabupaten sangat strategis untuk dikembangkan usaha peternakan. Saat ini, kegiatan peternakan sangat beragam di Desa Cilongok, di antaranya adalah peternak ayam kampung, ayam pedaging, peternak bebek, peternak entog, peternak kambing, dan peternak sapi. Secara rinci jumlah keluarga yang melakukan kegiatan usaha peternakan tersaji pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28 Jenis Budidaya Peternakan dan Jumlah Ternak

| Jenis Budidaya Peternakan dan Jumlah Ternak | | |
|---|-------------|----------------------|
| Peternakan | Pembudidaya | Jumlah Ternak (ekor) |
| Ayam Kampung | 13 | 146 |
| Ayam Pedaging | 2 | 4000 |
| Bebek | 1 | 25 |
| Entog | 1 | 200 |
| Kambing | 21 | 72 |
| Sapi | 9 | 21 |
| Total | 47 | 4464 |

Hasil analisis terhadap **Tabel 4.28** menunjukkan, bahwa jenis ternak yang paling banyak diminati/dibudidayakan oleh masyarakat Desa Cilongok adalah budidaya ayam kampung dan kambing. Banyak di antara masyarakat memilih berternak kambing karena masa budidayanya tidak begitu lama dan sewaktu waktu dapat dijual ketika ada kebutuhan mendesak. Aktivitas berternak kambing maupun ayam kampung, dibudidayakan secara sederhana di halaman rumah masing-masing. Umumnya mereka menjual kambing pada saat hari raya Idul Adha atau pada saat tahun ajaran baru sekolah akan dimulai. Berbeda dengan budidaya ayam kampung yang dilakukan tidak seintensif budidaya ayam pedaging, kegiatan budidaya ayam kampung memiliki kemiripan dengan budidaya kambing, yaitu sebagai sumber pendapatan alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat insidental, seperti pemenuhan kebutuhan hari raya, pendidikan, dan seterusnya. Sementara budidaya ayam pedaging sudah berorientasi bisnis, untuk memenuhi permintaan pasar domestik.

HASIL PENDATAAN DESA MADURA

A. Profil Desa Madura

Desa Madura terletak di Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Desa ini berjarak sekitar 5 km dari pusat Kecamatan Wanareja dan berjarak sekitar 85 km dari Ibu Kota Kabupaten Cilacap melalui Sidareja. Desa Madura memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi jalan negara, jalur lalu-lintas utama selatan Pulau Jawa, selain dilintasi jalan kabupaten. Letaknya yang berada di ujung bagian barat Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah menjadikan desa ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat. Menjadi titik pertemuan jalur lalu-lintas antara Bandung–Purwokerto dan jalur jalan akses jembatan Citanduy yang menghubungkan kawasan wisata Kabupaten Pangandaran. Rampungnya pembangunan jembatan Citanduy pada 2006, setidaknya telah membuka akses desa dari dan ke Kota Banjar, menjadikan Desa Madura sebagai wajah terdepan Kabupaten Cilacap, pintu utama keluar/masuk Kota Banjar Jawa Barat.

Kondisi jalan utama yang beraspal mulus dan relatif terawat, menjadikan desa ini mudah diakses melalui moda transportasi darat dari berbagai arah, sehingga jalan utama yang melintasi desa menjadi “jalur hidup” yang ramai dilalui berbagai jenis kendaraan umum. Setidaknya di desa ini melintas jalan negara kelas III sepanjang \pm 8 km,

jalan kabupaten sepanjang \pm 4 km, jalan desa beraspal sepanjang \pm 20 km, dan jalan makadam (tanah/batu yang dipadatkan) sepanjang \pm 5 km. Keadaan ini tentu mendukung dan memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas, yang pada gilirannya menunjang kelancaran kegiatan perekonomian antar desa. Meskipun Desa Madura belum memiliki prasarana pasar yang permanen, tampaknya masyarakat setempat tidak menghadapi kesulitan untuk melakukan kegiatan perekonomian/jual beli kebutuhan pokok dan penjualan hasil pertanian ke pasar-pasar tradisional yang ada di Wanareja ataupun ke Langensari (Kota Banjar) yang letaknya tidak terlampau jauh dan mudah dijangkau.

Kemajuan pembangunan di Desa Madura ditandai dengan hadirnya sarana telekomunikasi dan informasi dengan ditanamnya jaringan telepon kabel, di samping telepon nirkabel/seluler dan dibangunnya 6 tower *Base Transceiver Station* (BTS) oleh operator nasional. Imbasnya warga desa menjadi relatif lebih mudah mendapatkan akses informasi dari media elektronik radio dan televisi, baik itu TV biasa maupun TV berbayar. Sementara jaringan pengairan pertanian, melalui pengembangan irigasi, telah berjalan dengan baik dan sudah dapat mengairi sebagian kawasan persawahan, meskipun belum semua sawah di Desa Madura dapat dialiri air irigasi. Sedangkan kebutuhan air bersih, sekalipun warga Desa Madura belum dapat dilalui atau dijangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), namun pemenuhan air bersih telah dapat dilakukan secara swadaya.

Di bidang pendidikan, desa ini memiliki 4 unit TK/PAUD, 7 unit sekolah dasar, 1 unit SMP Negeri, 1 unit SMK Swasta, serta sejumlah tempat pendidikan nonformal, berupa 3 Pondok Pesantren dan 3 TPQ. Sementara fasilitas ibadah yang terdapat di desa ini, di antaranya 17 masjid, 27 mushola, dan 1 gereja. Sedangkan fasilitas olahraga, terdapat 6 buah lapangan sepak bola dan 1 GOR bulutangkis milik perorangan. Di bidang kesehatan, di desa ini telah terbangun satu unit Puskesmas Pembantu dan satu unit Balai Pengobatan, selain memiliki 1 kelompok Posyandu Lansia dan 13 kelompok Posyandu yang digerakkan ibu-ibu kader PKK.

B. Sejarah Singkat Desa Madura

Jika mendasarkan pada tahun penanggalan masa jabatan kuwu/ kepala desa yang pernah memimpin Desa Madura, maka diperoleh kesan bahwa Kuwu Natapradja yang memerintah pada 1860–1890 merupakan kuwu pertama Desa Madura, sekaligus menjadi penanda awal berdirinya Desa Madura (Tabel 5.1). Padahal dalam catatan sejarah, daerah Madura telah tercatat dalam perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang ditandatangani di Kartasura pada 5 Oktober 1705. Setelah Sunan Puger kembali ke Kartasura sebagai penguasa Mataram dengan bantuan VOC berhasil menumpas pemberontakan Trunojoyo yang meletus sejak 1675 dan bertahta dengan gelar Pakubuwono I. Sebagai kompensasinya sebagian wilayah Pulau Jawa diserahkan pada VOC.

Merujuk pada isi perjanjian tersebut, maka Desa Madura bisa dipastikan telah ada jauh sebelum tahun 1705. Sebagaimana tersebut dalam cerita tutur masyarakat setempat yang mengatakan bahwa

Desa Madura menurut legenda berasal dari cerita perang antara Kerajaan Galuh dengan Kerajaan Mataram. Konon terjadi pertempuran di kawasan perbukitan/pegunungan, di mana bala tentara Kerajaan Galuh berhenti di bukit “Pasir Nagog” untuk membuat benteng pertahanan. Dalam masa penantian menghadang tentara Kerajaan Mataram itulah, tentara

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa batas timur daerah kekuasaan VOC berpindah dari Ci Pamanukan (Karawang) ke Sungai Losari (Brebes) di utara dan Sungai Donan (Banyumas) di selatan, melewati Sungai Donan ke arah Laut Selatan. Sepanjang sungai tersebut ke arah barat sampai Segara Anakan ke arah utara hingga sampai muara Sungai Tsiborom (Cibereum). Sepanjang tepi timur dan utara dari rawa yang tidak dapat dilalui sampai Tsisatia (Cisatia) sekitar Desa Madura, ke arah utara sebelah timur melalui Kaduomas dan Pegunungan Dailoer (Dayaluhur), Kabuyutan Aria sampai Gunung Sumana setelah Subang. Sebelah Tenggara Gunung Bongkok ke arah utara sampai Sungai Lassarij (Losari). Disebutkan dalam perjanjian tersebut, jika yurisdiksi dan kepemilikan tanah di sebelah barat dari gunung-gunung dan sungai-sungai tersebut diserahkan kepada Kompeni. Daerah Dayaluhur (sekarang dikenal Dayeuhluhur) menjadi bagian kekuasaan VOC, dan untuk kemudian dibentuk menjadi Distrik Madura, Kabupaten Galuh Imbanegara, dan Karesidenan Cirebon. Menjelang pelaksanaan perjanjian pada 6 April 1706, VOC bahkan memindahkan pos militernya dari Pamotan ke Distrik Madura dipimpin Vaandrig Egbert Jansz.

Galuh menemukan cecekan jejak pengembara yang mencari madu. Dari situlah kawasan itu kemudian dikenal sebagai madura, yang berasal dari kata Cimadu/Cai Madu/Air Madu.

Jika cerita tutur tersebut benar, maka kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada zaman pengembangan kekuasaan Kesultanan Mataram di Tanah Jawa oleh Panembahan Senopati di tahun 1595. Ketika Kadipaten Dayaluhur yang wilayahnya, (saat ini melingkupi bagian barat Kabupaten Cilacap, meliputi; Kecamatan Dayeuhluhur termasuk Desa Madura, Kecamatan Majenang hingga Kecamatan Sidareja), menjadi daerah protektorat Kerajaan Galuh Salawe Pangauban yang berpusat di Cimaragas Ciamis. Secara bersama-sama mereka mengalami kekalahan telak pada pertempuran Salebu yang membuat Istana Salangkuning (pusat pemerintahan Dayaluhur) habis dibakar menjadi abu (salebu maksudnya habis menjadi abu). Hingga akhirnya Dayaluhur dan Kerajaan Galuh Salawe Pangauban statusnya diturunkan menjadi sebuah Kadipaten taklukan di bawah Mataram.

Dayaluhur (sekarang terletak di Kecamatan Dayeuhluhur), pada awalnya merupakan wilayah otonom yang diperintah oleh Banyak Ngampar yang berkedudukan di Astana Salangkuning. Sebagai hasil pemekaran dari Kadipaten Pasirluhur (terletak di Karanglewas, Purwokerto). Kedua wilayah otonom ini, didirikan oleh kakak beradik keturunan Raja Padjajaran. Alkisah, tiga orang anak Prabu Jaya Dewata (Raja Padjajaran) dengan Dewi Ambetkasih, yaitu; Banyak Cotro, Banyak Ngampar dan Dewi Ratna Pamekas diungsikan dari istana karena intrik politik, dengan tuduhan Dewi Ratna Pamekas melakukan pelanggaran adat atas pamali (dampak perang Bubat), menikah dengan pelarian bangsawan Kerajaan Majapahit pada 1482. Ketiganya meninggalkan Pajajaran menuju Kadipaten Pasirluhur yang diperintah oleh Kandadaha, mertua dari Banyak Cotro. Ketika Banyak Cotro (Arya Kamandaka) diangkat menjadi Adipati Pasirluhur, ia mengangkat adiknya, Banyak Ngampar (Arya Gagak Ngampar) menjadi Adipati Dayaluhur atas sebagian wilayah Pasir Luhur di Barat dan memosisikan Dewi Ratna Pamekas dan suaminya Arya Baribin (adik Brawijaya IV) yang kemudian melahirkan Adipati Mrapat (Joko Kaiman) sebagai leluhur para adipati Banyumas. Ketiga kakak beradik inilah yang kelak menurunkan para leluhur pemimpin lokal di wilayah Banyumas, Dayeuhluhur, dan Cilacap melalui perkawinan antar saudara di antara mereka.

Pada masa pemerintahan Adipati Banyak Belanak, Kesultanan Demak pernah mengutus Pangeran Makdum Wali untuk menundukkan Pasirluhur dengan memeluk Islam di bawah kekuasaan Demak. Akibat penundukan tersebut, Dayaluhur yang ketika itu diperintah Candilaras pun berada dalam kekuasaan koalisi Demak dan Cirebon. Sebuah fase yang menandai terjadinya peralihan keyakinan agama Hindu Buddha menjadi Islam bagi para penguasa maupun masyarakat Dayaluhur. Di akhir masa kepemimpinan Candilaras, Kerajaan Demak setelah Sultan Trenggono wafat pada 1546, mengalami kemunduran akibat perselisihan saudara, sehingga daerah bawahannya banyak yang memberontak dan melakukan ekspansi. Dalam hal ini, Kerajaan Galuh Salawe Pangauban melepaskan diri dari Demak dan mengekspansi Dayaluhur, sehingga Kadipaten Dayaluhur dibubarkan dan wilayahnya sebagian besar dimasukkan ke dalam wilayah Galuh.

Pada masa keruntuhan Demak, berganti menjadi Pajang wilayah kekuasaannya hanya sampai Banyumas dan tidak sampai ke Dayaluhur. Baru ketika Pajang runtuh dan berdiri kerajaan Mataram di bawah Panembahan Senopati (seperti diceritakan di atas), Mataram melakukan ekspansi ke Priangan dan meruntuhkan Galuh Salawe Pangauban pada 1595. Karena terkesima oleh kemampuan kanuragan dan kefasihan berbahasa Jawa dan Sunda dari Kiai Arsagati (keturunan Arya Banyak Ngampar), Panembahan Senopati berkenan menghidupkan kembali Kadipaten Dayaluhur menjadi wilayah Mataram mancanegara kilen, dengan wilayah yang lebih kecil dari sebelumnya.

Setelah Kiai Ngabehi Raksagati menggantikan ayahnya Kiai Arsagati menjadi Adipati Dayaluhur ke 5. Pada 1681, putra Kiai Ngabehi Raksagati, Kiai Ngabehi Reksapraja diangkat oleh Sunat Amangkurat II sebagai adipati Dayaluhur dan kemudian mendapat anugerah selir Amangkurat II yang sedang hamil 5 bulan untuk diperistri. Anak yang kemudian diberi nama Ngabehi Wirapraja dan setelah berumur 7 tahun diminta untuk menuntut ilmu di Kraton Kartasura ini, kemudian menggantikan ayah tirinya yang masih hidup menjadi Bupati Dayaluhur sejak 1698. Pada pemerintahan Ngabehi Wirapraja (tahun 1705), wilayah Dayaluhur berkurang luasannya (dikurangi Distrik Madura), sebagai kompensasi bagi VOC yang telah membantu Sunan Puger (Pakubuwono I) menyelesaikan masalah perebutan kekuasaan di lingkungan Kerajaan Mataram.

Lepasnya sejumlah wilayah Mataram mancanegara kilen dan tunduknya wilayah Priangan pada VOC menjadi pemicu amarah Pakubuwono II, sehingga mengutus Bupati Banyumas (Yudanegara II) dan Bupati Dayaluhur (Ngabehi Wirapraja) untuk menyerang Priangan dan Cirebon Selatan. Hingga terjadi Tragedi Ciancang yang porak poranda dan banjir darah oleh serangan Banyumas dan Dayaluhur, orang Jawa menyebutnya sebagai peristiwa banjir darah yang berbau amis, sehingga daerah itu dikenal sebagai Ciamis. Serangan tersebut memaksa Galuh meminta bantuan VOC untuk mengusir pasukan Banyumas dan Dayaluhur, hingga dapat dikalahkan dan Ngabehi Wirapraja gugur di Ciancang tahun 1740.

Pada 11 Desember 1749 Pakubuwono II menandatangani perjanjian penyerahan Kedaulatan Kerajaan (*Act of Cession*) kepada VOC. Sejak itu secara *de jure* Surakarta menjadi vassal VOC, termasuk wilayah Mataram mancanegara kilen, seperti Kadipaten Dayaluhur juga tunduk di bawah kekuasaan VOC. Setelah Perjanjian Gianti pada 13 Februari 1755, VOC menyerahkan separuh Kerajaan Mataram kepada Pangeran Mangkubumi dengan nama dan gelar Sultan Hamengkubuwono I, sebagai Sultan Yogyakarta. Kerajaan Mataram sendiri menjadi Kerajaan Surakarta, meliputi sebagian besar daerah mancanegara dan masing-masing setengah dari daerah agung. Setelah Perjanjian Giyanti, secara *de facto* Kabupaten Dayaluhur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Surakarta, meskipun secara geografis terletak di sebelah barat Kerajaan Yogyakarta. Rajanya adalah Susuhunan Pakubuwono III beribu kota di Surakarta. Sehingga para pejabat mancanegara kilen termasuk Ngabehi Dayaluhur bila menghadap Raja Surakarta tiap tahun, berangkat sebelum Gerebeg Mulud dan pulang sesudah Grebeg Siyam, harus berkali-kali melintasi perbatasan ke dua kerajaan.

Pada masa Raden Temenggung Wiraguna (kakak beda ibu dari Bupati Banyumas, Ngabehi Cakrawedana I) yang memerintah pada 1799–1812, ibu kota Kadipaten Dayaluhur dipindahkan ke Majenang (menjadi Kadipaten Majenang), sehingga Dayaluhur berstatus desa biasa. Setelah dipatahkannya perang Diponegoro pada 28 Maret 1830 dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dalam perundingan dengan Jendral de Kock di rumah Residen Kedu, Mr. Valck, perlawanan terakhir Pasukan Diponegoro terjadi di perbatasan daerah Dayaluhur dan Banyumas dipimpin oleh Demang Ajibarang Singadipa. Walaupun Kerajaan Surakarta tidak turut melawan, pemerintah Hindia Belanda meminta ganti rugi atas biaya perang yang ditimbulkannya. Hingga pada 22 Juni 1830, pemerintah Hindia Belanda mengadakan perjanjian dengan Susuhunan Pakubuwono VII, di mana wilayah Surakarta mancanegara diserahkan pada pemerintah Hindia Belanda yang akan membayar sebesar f. 204.000/tahun sebagai ganti rugi dan Susuhunan akan dimintai pendapat dalam hal pengangkatan para bupati. Sejak itu kekuasaan Kerajaan Surakarta secara *de jure* benar-benar telah tamat di daerah mancanegara termasuk Dayaluhur.

Pada 14 Oktober 1830 diusulkan agar Distrik Madura digabungkan dengan Kadipaten Dayaluhur yang akan dihidupkan kembali dengan ibu kota Majenang yang berjarak hanya 12 pal (sekitar 18 km). Sementara batas Kadipaten Dayaluhur dimekarkan ke arah barat sampai Sungai Cijulang untuk kepentingan ekspor pemasaran komoditas pertanian, sehingga menemukan jalan keluar melalui sungai tersebut daripada

melalui Cirebon yang bergunung gunung dan berjarak 81 pal (sekitar 121,5 km). Salah satunya melalui Sungai Ciboganjing yang dapat dilayari dari Desa Madura sampai ke Sungai Citanduy. Menurut Kontrolir Vitalis, di sebelah barat Kadipaten Dayaluhur berbatasan dengan Karesidenan Cirebon, utara Karesidenan Tegal, timur Tanah Tayem, selatan Sungai Cikawung yaitu berbatasan dengan Babakan, Panjaran, dan Pegadingan. Pembentukan Kadipaten Dayaluhur merupakan hasil pemekaran dari daerah seluas 144 bau (1 bau = 7.000 m²), menjadi meluas ke segala penjuru, meliputi daerah-daerah yang dikuasai pemerintah Hindia Belanda, yaitu Distrik Madura, sebagian Kepatihan Imbanegara, sebagian Kadipaten Galuh, sebagian Karesidenan Cirebon, dan sebagian bekas wilayah mancanegara Kerajaan Surakarta.

Ironisnya, Kadipaten Dayaluhur dibubarkan pemerintah Hindia Belanda pada 1831 karena keterlibatan adipati terakhir Tumenggung Prawiranegara dalam Perang Jawa mendukung Pangeran Diponegoro. Bupati Dayaluhur dipecat dari kedudukannya dan kemudian dibuang ke Pulau Banda (meskipun dalam Babat Banyumas, Temanggung Prawiranegara diberitakan sakit jiwa dan dibuang ke Padang). Menyusul surat Asisten Residen Ajibarang pada 24 Oktober 1831 No. 184, Bupati Ajibarang diberi kuasa atas Kadipaten Dayaluhur. Lowongan jabatan Bupati Dayaluhur ditiadakan, akibatnya Kadipaten Dayaluhur yang baru 2 bulan dikukuhkan, merosot statusnya menjadi Kepatihan (*Pattehschap*) Dayaluhur, Kadipaten Ajibarang, yang dipimpin oleh Mas Kramayuda.

Bekas Kadipaten Dayaluhur inilah yang kelak menjadi daerah cikal bakal pendirian Kabupaten Cilacap di sebelah barat Sungai Serayu, sedangkan daerah cikal bakal sebelah timur Sungai Serayu (Kawedanan Kroya) masih termasuk Kabupaten Banyumas. Atas usul Mr. Vitalis berdasar kepentingan ekonomi Pemerintah Hindia Belanda, maka batas barat Kabupaten Cilacap yang akan dibentuk tersebut, tidak lagi merupakan batas alamiah etnis seperti diutarakan ahli bahasa Mr. Kern tentang batas Kerajaan Mataram dan VOC berdasar perjanjian tahun 1705 di Kartasura. Oleh karena itu sampai sekarang bagian barat Kabupaten Cilacap dihuni oleh penduduk berbahasa Sunda. Namun demikian, keberadaan Cilacap yang secara geografis berada di antara dua wilayah politik, yaitu Sunda Galuh dan Mataram Jawa (Zuhdi, 2002), menyebabkan wilayah di bagian barat Cilacap (termasuk

Desa Madura) secara sosiologis dan kultural menjadi daerah frontier, “batas” pertemuan dua kekuatan, baik budaya maupun politik. Tidak mengherankan jika masyarakatnya memiliki identitas budaya (*cultural identity*) tersendiri, sebagai proses panjang dalam mengadaptasi diri dengan lingkungannya.

C. Sejarah Pemerintahan dan Orientasi Pembangunan Desa

Realitas sebagai daerah frontier telah menjadikan Desa Madura memiliki kekhasan, tidak hanya sebagai tempat bertemunya dua budaya besar Sunda dan Jawa, yang mewujud dalam percampuran/asimilasi dalam tradisi lokal setempat, sebagai hasil adaptasi selektif atas pertemuan kedua budaya yang telah berlangsung lama. Ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan di antara kedua kelompok kebudayaan, disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Seperti kegiatan gotongroyong yang masih ditradisikan masyarakat setempat yang secara bersama-sama dilakukan oleh kedua suku, sehingga menambah kuatnya kesatuan di antara mereka. Juga keberadaan organisasi pemuda Karang Taruna “Manunggal” yang dapat merepresentasikan kehadiran seluruh pemuda dari kedua etnis. Selain digunakannya bahasa dengan dialek khusus sebagai pencilan bahasa (*enklave*) Desa Madura, meliputi aspek; leksikon, fonologis, dan morfologis. Terutama penggunaan leksikon bahasa Sunda yang sangat dipengaruhi leksikon yang ada di daerah Cilacap dan Brebes, selain pengaruh fonetis perubahan bunyi yang terjadi pada fonem, sementara secara morfologi juga terjadi proses duplikasi dan afiksasi (Ellyawati, 2015).

Menariknya, proses asimilasi budaya yang telah berlangsung lama tersebut, tidak lantas melucuti identitas yang melekat pada kedua suku, hal ini tercermin dari tetap berkembangnya kesenian tradisional dari budaya Sunda dan Jawa, berupa wayang golek, calung, terbang/hadroh, jaran kepeng, pencak silat, dan seterusnya. Realitas tersebut menjadi penjelaras berlangsungnya proses akulturasi, sekaligus proses asimilasi yang berlangsung secara bersamaan dalam masyarakat setempat. Suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari

suatu kebudayaan berbeda (asing), di mana kebudayaan asing lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan asli kelompok itu sendiri.

Sebuah proses asosiatif yang ternyata juga menyisakan masalah pelik (residu) terkait dengan persaingan yang cukup laten di antara kedua suku, sebagai akibat tidak langsung dari perbedaan dalam kebudayaan, sejarah masa lalu, tingkat ekonomi, penguasaan terhadap sumber daya, kedudukan, dan peranan dalam masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan orang Sunda di Desa Madura yang sebagian besar tinggal dan menetap di pinggir-pinggir jalan utama, dibandingkan orang Jawa yang justru lebih banyak tinggal dan menetap di pelosok desa yang dekat dengan kawasan pertanian. Hal ini sekaligus menjelaskan, mengapa sektor pertanian di Desa Madura lebih dominan ditekuni oleh orang Jawa?

Secara administratif, Desa Madura terbagi menjadi 7 dusun, yaitu: 1) Dusun Mangunjaya; 2) Dusun Ciopat; 3) Dusun Karang Sari Babakan; dan 4) Dusun Madura, selain tiga dusun pemekaran, yaitu: 5) Dusun Purwasari; 6) Dusun Karanganyar; dan 7) Dusun Margasari yang terbagi dalam 18 RW dan 66 RT. Adapun jumlah penduduk Desa Madura adalah sebanyak 11.217 jiwa (5.613 Laki-laki dan 5.604 perempuan) terdiri dari 3.241 KK. Sebagian besar penduduknya beragama Islam sebanyak 10.862 jiwa, Kristen 14 jiwa, dan Katolik 34 jiwa.

Pada masa Pemerintahan Kepala Desa Warsito Udjang, Desa Madura dimekarkan menjadi Desa (induk) Madura dan Desa (pemekaran) Madusari. Desa Madusari melingkupi Dusun Cimalati, Dusun Ciupas, Dusun Banjarwaru, dan Dusun Copicung. Seiring dengan perkembangan zaman, Desa Madura dituntut untuk maju dalam segala bidang, seiring dengan semakin terbukanya akses dari dan ke Desa Madura sebagai Pintu Gerbang Barat dari Kabupaten Cilacap dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5.1 Daftar Nama Kuwu/Kepala Desa

| No. | Nama Kuwu/Kepala Desa | Masa Jabatan |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1 | NATAPRADJA | 1860 – 1890 |
| 2 | SURAMEDJA | 1890 – 1915 |
| 3 | DARWAN | 1916 – 1944 |
| 4 | SOEWARDJO | 1945 – 1960 |

| | | |
|----|----------------------|-------------|
| 5 | OTONG | 1961 – 1965 |
| 6 | SOEKARDJO | 1966 – 1989 |
| 7 | WARSITO UDJANG | 1989 – 1998 |
| 8 | DEWONG HAMID (Pjs) | 1998 |
| 9 | SUPARDI | 1999 – 2006 |
| 10 | SETIAJIT, S.H. | 2007 - 2012 |
| 11 | ANDI HERMAWAN, A.Md. | 2013 - 2019 |

Saat ini, desa ini mulai melaksanakan strategi pembangunan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Desa Madura, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani dan rohani dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan dinamis, dengan mengedepankan pengimplementasian pembangunan yang mengakar pada budaya masyarakat setempat secara gotong royong, serta penguatan partisipasi swadaya masyarakat.

Salah satu kebutuhan mendesak untuk dikembangkan adalah pembangunan infrastruktur irigasi pertanian, jalan pertanian dan jalan komunitas dalam rangka memperlancar kegiatan operasional pertanian dan pemerataan akses perekonomian, membuka keterisolasian wilayah-wilayah dusun yang letaknya berjauhan. Selain meningkatkan ketersediaannya sarana listrik dan telekomunikasi, hingga ke pelosok desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga. Hal tersebut, mustahil diwujudkan tanpa melibatkan peran aktif dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya, mengingat masih besarnya ketergantungan pendanaan pembangunan desa ini pada pihak luar desa (negara). Meskipun pada 2016, dari PBB, desa ini mampu berkontribusi sebesar Rp221.599.451,00, namun potensi APBD yang mencapai Rp1.780.388.000,00, utamanya berasal dari Pendapatan Transfer dari APBN sebesar Rp1.746.858.000,00, sisanya dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp27.680.000,00, dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah sebesar Rp5.850.000,00. Oleh karenanya, masih membutuhkan upaya-upaya serius dari *stakeholders* terkait dalam menciptakan sinergi dan akselerasi kebijakan yang mampu meningkatkan APBD.

D. Potensi Sumber Daya Lahan Desa Madura

Potensi lahan pertanian di Desa Madura, khususnya tanaman padi, menjadikan pengembangan sarana dan prasarana irigasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi kebutuhan mendesak. Keadaan ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan di Desa Madura yang umumnya memiliki pH tanah 5–7, dengan drainase terbatas dan kesuburan tanah pada level rendah hingga sedang. Luas lahan sawah di Desa Madura diperkirakan seluas 318 ha, terdiri atas 225 ha lahan sawah beririgasi dan 93 ha lahan sawah tadah hujan (Sularno dan Supriyanto 2012). Lahan sawah beririgasi seluas 225 ha tersebut, dikelola oleh 120 kepala keluarga (KK) tani (belum termasuk buruh tani yang dipekerjakan), mampu menghasilkan padi sebanyak 2.525 ton/tahun/gabah kering giling. Sementara potensi lahan kering di Desa Madura adalah seluas 1.002 ha dan telah digunakan untuk usaha tani mencapai 820 ha. Umumnya lahan kering yang telah dimanfaatkan, sebagian besar digunakan untuk budidaya tanaman ketela pohon (singkong) sepanjang tahun, dengan rata-rata hasil produksi singkong mencapai 22 ton/ha. Hasil produksi tanaman singkong yang mampu dipertahankan secara kontinu sepanjang tahun, setidaknya telah menjadikan komoditas ini dapat diandalkan menjadi pengganti sebagian bahan pangan pokok dari beras.

Sektor lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah kegiatan usaha peternakan yang saat ini telah ditekuni secara tradisional oleh masyarakat setempat. Di antaranya kegiatan usaha ternak ayam broiler yang telah mencapai 32.881 ekor; budidaya kambing yang mencapai 1.234 ekor; budidaya bebek sebanyak 400 ekor; budidaya domba sebanyak 231 ekor; kerbau dan sapi yang masing-masing berjumlah 18 ekor dan 8 ekor (Sularno dan Supriyanto 2012). Kegiatan usaha pertanian yang telah diupayakan masyarakat Desa Madura, tentu saja masih membutuhkan intervensi modal serta dukungan tenaga penyuluh yang andal, yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, khususnya peningkatan kapasitas teknis dan manajemen usaha pemanfaatan lahan sempit secara efisien.



Gambar 5.1 Peta Rupa Bumi Desa Madura

Hal lain yang perlu dicatat di sini adalah keberadaan kawasan vegetasi yang khas yang terdapat di Desa Madura, berupa rawa-rawa abadi, yaitu “Rawa Keris” yang tak pernah kering dan saat ini dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar dengan sistem jaring apung. Selain keberadaan kawasan hutan jati milik Perum Perhutani yang membelah desa dan kawasan perkebunan karet PTPN IX yang berada di barat laut desa, sehingga membuat wilayah desa ini menjadi cukup sejuk. Lahan-lahan milik negara tersebut, memiliki potensi untuk dikelola secara kolaboratif bersama pihak Inhutani (Kementerian Kehutanan) dan PTPN IX, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, melalui program hutan kemasyarakatan, tumpang sari, reboisasi tanaman hutan, dan seterusnya.

E. Topografi Desa Madura

Desa Madura memiliki luas wilayah 1.499 ha dan berada di ketinggian lebih kurang 15 m di atas permukaan air laut (DPL). Secara geografis, wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Madusari, sebelah selatan dengan Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat (Sungai Citanduy), sebelah barat dengan Desa Panulisan Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Sidamulya dan Desa Wanareja.

Topografi wilayah selatan Desa Madura merupakan dataran rendah yang melandai di sepanjang aliran sungai Citanduy, sedangkan di sebelah utara merupakan kawasan perbukitan yang memanjang. Curah

hujan di desa ini tergolong sedang sepanjang tahun dan terdiri dari dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Keberadaan Sungai Citanduy dan anak sungainya (Sungai Cibaganjing) yang melalui Desa Madura, menyebabkan desa ini pada musim penghujan sangat rawan mengalami bencana banjir, akibat luapan kedua sungai tersebut.

F. Uji Tanah Desa Madura

Pengujian sampel tanah dari Desa Madura dilakukan di Laboratorium SEAMEO BIOTROP, Tajur, Bogor, Jawa Barat pada 24 September-10 Oktober 2019 (Lampiran 1). Pengujian tanah dilakukan pada beberapa variabel, seperti: kandungan pH, persen C organik, persen N total, rasio C/N, jumlah P_2O_5 tersedia, kandungan kapasitas tukar kation (KTK), tingkat kejenuhan basa (KB), tipe keasaman potensial serta tekstur tanah.

Tabel 5.2 Hasil Uji Tanah dari Jalan Wanareja–Langensari (lokasi 7,34° LS dan 108,63° BT)

| Kualitas Tanah | Nilai Pengukuran | Pembahasan |
|---|------------------|--|
| Derajat kemasaman tanah (pH) dengan metode ekstraksi H_2O | 5,3 | Tanah di Desa Madura memiliki pH tanah cukup rendah yaitu 5,3 (agak masam). Sementara tingkat kemasaman tanah yang baik untuk budidaya pertanian adalah 5,5–6,5. Kondisi tanah dengan pH di bawah atau di atas <i>range</i> tersebut akan membutuhkan tambahan input pertanian sehingga menambah biaya berupa kapur pertanian untuk meningkatkan tingkat kemasaman tanah. Tanah di Indonesia kebanyakan memang bersifat masam, apalagi ditambah dengan praktik pertanian yang berlebihan dan penggunaan pupuk kimia utamanya urea sehingga tanah semakin masam. Tanah dengan kondisi demikian memang masih cocok untuk padi dan kelapa, tetapi jika ingin dijadikan budidaya melon masih kurang cocok karena melon membutuhkan kondisi tanah yang netral (pH 6,0–6,8). |
| Kandungan C-organik | 1,07 persen | Kesuburan tanah sangat tergantung pada kandungan organik di dalam tanah itu sendiri, sehingga ukuran kesuburan tanah dapat diukur melalui kadar organik dalam tanah yang dengan istilah C-Organik. C-Organik merupakan salah satu faktor penting dalam memengaruhi hasil produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kadar C-Organik dalam tanah agar diketahui langkah untuk meningkatkan kesuburan tanah. |

| Kualitas Tanah | Nilai Pengukuran | Pembahasan |
|----------------------|------------------|--|
| | | Kandungan C-Organik ini dipengaruhi oleh banyaknya bahan organik yang terdekomposisi. Hasil pengukuran C-Organik di lahan yang terdapat di Desa Madura masuk dalam kategori rendah yaitu 1,07 persen. Hal ini diduga karena petani di Desa Madura jarang menambahkan bahan organik untuk meningkatkan kesuburan tanah. |
| Kandungan N-total | 0,16 | Kandungan N-total di Desa Madura juga tergolong rendah. Kandungan nitrogen total dalam total sangat dipengaruhi oleh sumber bahan organik yang melapuk membentuk agregat tanah. Tanah yang demikian kurang baik untuk budidaya komoditas sayuran yang membutuhkan nitrogen tinggi seperti sayuran daun. Oleh karena itu, agar tanah ini dapat menyediakan unsur hara yang baik terutama nitrogen perlu ditambahkan bahan organik yang kaya nitrogen atau diberi pupuk kaya nitrogen dengan seimbang, tidak berlebihan. |
| Rasio C/N | 7 | C/N rasio merupakan perbandingan masa karbon dengan nitrogen. Hasil analisis tanah di Desa Madura menunjukkan angka 7 di mana ini tergolong rendah. Rasio C/N ini menunjukkan kecepatan proses dekomposisi bahan organik dalam tanah. Semakin tinggi rasionya berarti dekomposisi bahan organik menjadi tanah lambat. Rendahnya nilai C/N rasio pada tanah Madura menyiratkan bahwa proses penguraian bahan organik di dalam tanah berjalan dengan baik. |
| Kandungan P tersedia | 16,0 | Kandungan fosfor pada sampel tanah Desa Madura termasuk golongan rendah (10-20). Unsur fosfor (P) bagi tanaman berguna untuk merangsang pertumbuhan akar. Selain itu, fosfor berfungsi sebagai bahan untuk pembentukan jaringan tanaman. Penggunaan jenis komoditas dan praktik budidaya tanaman juga berpengaruh terhadap kandungan P dalam tanah. Kandungan P tidak bisa dilihat sebagai faktor tunggal melainkan harus seimbang dengan keberadaan unsur lainnya seperti N dan K. Kondisi tanah dengan kandungan P yang rendah akan lebih baik jika yang ditanam komoditas dengan kebutuhan P yang sedikit sehingga kandungan P ini tidak menjadi pembatas. Jika ingin dijadikan tempat budidaya kelapa dan melon maka diperlukan tambahan pupuk P agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. |

| Kualitas Tanah | Nilai Pengukuran | Pembahasan |
|----------------------------------|---|---|
| Kation-kation basa dapat ditukar | Kalsium 18,71 Magnesium 5,27 Kalium 0,9 Natrium 0,24 | <p>Fungsi utama kalium (K) bagi tanaman ialah membantu pembentukan protein dan karbohidrat. Kalium juga berperan dalam memperkuat daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur.</p> <p>Kalsium (Ca) bertugas untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji.</p> <p>Kalsium yang terdapat pada batang dan daun ini berkhasiat untuk menetralkan senyawa atau suasana yang tidak menguntungkan pada tanah.</p> <p>Magnesium berfungsi membentuk klorofil, karbohidrat, lemak, dan minyak-minyak.</p> <p>Magnesium (Mg) memegang peranan penting dalam transportasi fosfat dalam tanaman.</p> <p>Tanah di Desa Madura memiliki kation basa magnesium yang sedang. Magnesium adalah unsur hara makro esensial yang sangat dibutuhkan tanaman karena merupakan aktivator yang berperan dalam transportasi energi beberapa enzim dalam tanaman. Magnesium sangat berperan dalam pembentukan klorofil dan membantu metabolisme tanaman seperti fotosintesis, pembentukan sel, pembentukan protein, pembentukan pati, dan transfer energi.</p> <p>Sama seperti kandungan kalsium dan magnesium, kation kalium juga termasuk sedang pada tanah pertanian di Desa Madura.</p> |
| Kapasitas Tukar Kation (KTK) | 25,12 | <p>Hasil pengukuran KTK di Desa Madura termasuk ke dalam golongan rendah. Keadaan ini disebabkan oleh pH tanah yang cukup rendah dan adanya partikel pasir (permukaan koloid kecil) dalam tanah, sehingga tanah di kedua wilayah memiliki KTK yang rendah. Sifat KTK ini sangat erat kaitannya dengan kesuburan tanah dalam hal ketersediaan hara yang dapat diserap oleh tanaman. KTK yang tinggi menggambarkan kemampuan tanah menjerat dan menyediakan unsur hara yang lebih baik dibandingkan KTK rendah.</p> <p>Ketersediaan P bagi tanaman dipengaruhi juga oleh pH tanah, semakin rendah pH tanah maka P sulit untuk diserap oleh tanaman. Melihat pH yang tergolong cukup rendah, meskipun keberadaan P dalam tanah masih dapat diakses oleh tanaman.</p> |

| Kualitas Tanah | Nilai Pengukuran | Pembahasan |
|---------------------|---|--|
| Kejenuhan Basa | 96,74 persen | <p>Kejenuhan basa adalah jumlah basa-basa yang dapat dipertukarkan per kapasitas tukar kation tanah dan dinyatakan dalam satuan persen. Basa-basa yang dapat dipertukarkan adalah total kation-kation basa dari ion Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺, dan Na.</p> <p>Jika kejenuhan basa tinggi, maka pH tanah tinggi, artinya tanah didominasi oleh kation basa dan semakin sedikit jumlah kation-kation masam. Jika kejenuhan basa rendah berarti banyak terdapat kation-kation masam yang terserap kuat di koloid tanah.</p> <p>Nilai kejenuhan basa berhubungan erat dengan pH dan tingkat kesuburan tanah. Kemasaman akan menurun dan kesuburan akan meningkat dengan meningkatnya kejenuhan basa.</p> <p>Kejenuhan basa merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kesuburan tanah. Tanah dapat dikatakan subur jika kejenuhan basanya di atas 80 persen.</p> |
| Kejenuhan Aluminium | 0 | <p>Hasil analisis kimia lahan di Desa Madura menunjukkan tidak adanya kandungan aluminium. Kehadiran aluminium dalam tanah dapat menghambat penyerapan unsur hara lain yang sangat dibutuhkan oleh tanaman, terutama phosphat. Sehingga tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik.</p> |
| Tekstur tanah | Pasir 11,5% Debu 28,1% Liat 60,4% | <p>Fraksi tanah di Desa Madura didominasi oleh tanah liat. Fraksi pasir dan debu masing-masing hanya 28 dan 11 persen. Komposisi fraksi seperti ini umum ditemukan pada kawasan dataran rendah yang telah mengalami sedimentasi dalam waktu yang lama. Hal ini dikarenakan posisi wilayahnya yang berada di atas bukit sehingga partikel yang lebih ringan seperti liat banyak terbawa ke wilayah yang lebih rendah ketika terjadi hujan. Oleh karena itu, ada sebagian tanah di Desa Madura yang cocok untuk budidaya tanaman seperti melon, kacang-kacangan dan tanaman sayuran lainnya. Sementara tanah yang didominasi oleh partikel liat dengan sedikit kandungan pasir cocok untuk budidaya padi sawah. Jadi sebagian lahan di Desa Madura memang cocok untuk ditanami padi, khususnya di Dusun Karanganyar, Dusun Ciopat, dan Dusun Mangunjaya.</p> |

G. Potensi Budidaya Pertanian di Desa Madura

Hasil uji fisika dan kimia tanah di Desa Madura sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa kondisi tanah didominasi oleh fraksi liat. Sementara kandungan hara dari semua parameter yang diuji hanya kandungan fosfor yang cukup tinggi. Sebagaimana tipikal tanah di daerah dataran rendah, maka kondisi tanah yang didominasi fraksi liat cocok untuk dijadikan sawah untuk ditanami padi. Tetapi masalahnya adalah tidak ada sungai yang mengalir dengan debit air yang cukup untuk mengairi sawah sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat musim kemarau, komoditi yang tepat ditanam ialah hortikultura yang tidak memerlukan air terlalu banyak. Beberapa komoditas yang memang telah dibudidayakan oleh petani di desa Madura ialah padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, melon, semangka, cabe, terong, kangkung, dan ketimun. Komoditas perkebunan terdiri dari kelapa, kopi, cengkeh, karet, dan kakao. Secara umum tanah di Desa Madura dapat ditanami berbagai macam jenis tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan. Faktor input usaha tani yang penting adalah lahan dan sinar matahari.

Berikut ini akan dibahas beberapa komoditas yang potensial dijadikan komoditas unggulan di Desa Madura.

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

a. Padi

Luas area yang dapat ditanam adalah 328,5 ha dengan produksi rata-rata produktivitas adalah 7,2 ton per hektar (hanya satu kali musim tanam, saat musim hujan). Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi $\frac{1}{2}$ teknis seluas 150 ha, lahan sawah irigasi sederhana seluas 75,5 ha, lahan sawah tadah hujan seluas 93 ha dan lahan sawah lain-lain (kemungkinan tegalan) seluas 10 ha.

Kondisi pH optimum untuk tanaman padi adalah 5–6,5, artinya hasil pengukuran pH tanah di Desa Madura menunjukkan nilai yang optimum untuk kegiatan usaha budidaya tanaman padi. Sementara

kesuburan tanah yang dilihat berdasarkan kandungan C-Organik nilainya 1,07. Angka ini termasuk rendah, mengingat sampel tanah yang diukur diambil dari tanah tegalan yang telah ditanami singkong secara terus menerus. Sementara performa tanaman padi di lahan sawah memiliki tingkat produktivitas yang cukup baik.

b. Jagung

Luas tanaman jagung di Desa Madura menurut data BPS adalah 6 hektare dengan produksi 11,40 ton. Sebenarnya jagung masih cocok ditanam di Desa Madura dilihat dari kondisi pH tanah 5,3. Nilai pH optimum untuk tanaman jagung adalah 5–6,5. Rendahnya produksi jagung disebabkan petani lebih memilih singkong yang terlihat dari luas tanaman singkong mencapai 20 hektare. Pada saat musim hujan, tanah tegalan (tanah kering) yang tidak biasa diairi akan lebih menguntungkan ditanam jagung karena umur panen jagung hanya 2 bulan sementara singkong mencapai 8–10 bulan.

c. Semangka

Semangka adalah tanaman yang umum dijadikan selingan setelah menanam padi. Biasanya sawah yang telah dipanen, dimanfaatkan untuk ditanami semangka. Nilai C-Organik di tanah bekas menanam padi diprediksi lebih tinggi karena dilakukannya aktivitas pemupukan. Sementara nilai pH untuk tanaman semangka adalah antara 5–6. Berdasarkan analisis teknis usaha budidaya semangka, hasil yang diperoleh petani lebih besar daripada tanaman padi. Satu hektare lahan bisa memproduksi 25–30 ton buah semangka.

Untuk meningkatkan pH tanah, agar lebih sesuai dengan nilai optimum tanaman semangka maka dapat ditambahkan kapur. Tidak adanya irigasi teknis di Desa Madura, menjadikan semangka menjadi pilihan utama petani untuk memanfaatkan lahan sambil menunggu musim tanam berikutnya. Pada kawasan dataran rendah di Desa Madura, buah semangka dapat dipanen sekitar 65–70 hari setelah ditanam.

d. Melon

Menanam melon juga merupakan kegiatan usaha selingan setelah menanam padi. Selain untuk memanfaatkan unsur hara bekas pemupukan padi, juga untuk menghindari serangan hama. Fraksi tanah liat bercampur pasir cocok untuk ditanami melon. Namun demikian, tanaman melon membutuhkan zat hara yang tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan pemupukan agar mikro nutrient tercukupi dalam jumlah seimbang. Umumnya penanaman melon dilakukan di atas bedengan tanah agar batang tidak tergenang air. Namun demikian tanah tempat tumbuh tanaman melon tidak boleh kering terlalu lama, sehingga sewaktu-waktu harus diairi. Biasanya petani mempersiapkan pompa air saat menanam melon ketika musim kemarau. Untuk kondisi lahan seperti ini bisa diintegrasikan dengan introduksi melon golden SH1 hibrida dari Mekarsari.

e. Kacang-kacangan

Penduduk Desa Madura menanam kacang tanah pada area seluas 8 ha dengan produksi 26,2 ton dan kacang kedelai pada area seluas 8 ha dengan produksi 18,8 ton. Hal ini menunjukkan produktivitas lahan untuk jenis tanaman kacang-kacangan cukup baik. Selain itu juga terdapat komoditas kacang panjang pada area seluas 3 ha dengan produksi 18 ton.

f. Cabai

Tanaman cabai juga cocok ditanam pada sejumlah lahan di Desa Madura, karena tanaman ini tumbuh baik pada pH relatif rendah. Meskipun demikian, tanaman cabai sangat rentan terhadap perubahan cuaca, selain membutuhkan kecocokan lahan yang sesuai. Salah satu metode untuk mengatasi masalah cuaca dan hama ialah dengan menanam cabai dalam *green house*. Metode ini akan menambah biaya produksi, sehingga kelayakan usaha harus dihitung dengan cermat. Masalahnya harga cabai di pasar sangat fluktuatif. Jika sedang mahal tentu biaya membuat *green house* tidak jadi masalah. Sebaliknya ketika harga murah, maka petani akan menderita kerugian lebih besar akibat pengeluaran komponen biaya investasi *green house* yang cukup

besar. Untuk itu perlu dipikirkan mengintroduksi model inovasi pengembangan *green house* yang lebih murah dan mudah untuk diaplikasikan petani.

Dari beberapa jenis komoditi yang disebutkan di atas, untuk mencapai skala usaha yang sesuai syarat keekonomian, maka perlu difokuskan ke beberapa komoditi terpilih. Dengan tetap mempertimbangkan usaha pertanian sebagai sebuah entitas bisnis yang harus tetap mengedepankan orientasi pada keuntungan. Selain kecocokan lahan dan cuaca, yang perlu diperhatikan adalah faktor pemasaran, harga dan biaya pasca panen lainnya.

2. Tanaman Perkebunan

a. Karet

Tanaman karet dapat tumbuh dengan baik pada pH 3,5–8, sehingga lahan di Desa Madura cocok dijadikan perkebunan karet. Perkebunan karet di Desa Madura merupakan perusahaan BUMN, yakni PTPN IX. Sebagaimana jenis komoditas perkebunan lainnya, mengusahakan tanaman karet tidak mencapai nilai ekonomi jika hanya dibudidayakan pada lahan yang relatif kecil.

b. Kakao

Kakao tumbuh subur di lahan kering yang kaya humus, dengan kelembaban tinggi. Penduduk Desa Madura ada yang menanam kakao tetapi dalam jumlah terbatas karena total lahan perkebunan yang tersedia hanya 148 ha.

Tanaman perkebunan selain kakao dan karet sebenarnya masih bisa tumbuh di lahan kering/tegalan di Desa Madura, seperti kopi dan tebu, namun tidak dapat dilakukan secara optimal karena kondisi tanah dan jumlah lahan yang terbatas.

H. Pendataan Kependudukan Desa Madura

Hasil pendataan yang dilaksanakan LPPM Universitas Trilogi pada bulan Agustus 2019 tercatat di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah total kepala keluarga di desa tersebut

tercatat sebanyak 3.400 KK. Jumlah kepala keluarga tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa tingkatan kesejahteraan keluarga, yaitu Pra KS sebanyak 1.235 KK; KS1 sebanyak 228 KK; KS2 sebanyak 562 KK; KS3 sebanyak 1.190 KK; dan KS3+ sebanyak 185 KK (**Tabel 5.3**).

1. Status Keluarga Sejahtera

Hasil pendataan yang tercatat pada **Tabel 5.3** menunjukkan bahwa 36,3 persen warga di Desa Madura hidupnya masih berada pada status Pra KS dan 6,7 persen masuk dalam kategori KS1. Tingginya persentase keluarga Pra KS sebesar 36,3 persen, ketika dikonfirmasi dengan hasil wawancara dan data hasil survei yang diperoleh diketahui salah satu penyebabnya adalah tingginya jumlah KK Pra KS yang tinggal pada tipe rumah tidak permanen yakni 2 persen dari jumlah KK 3.400 (lihat **Tabel 5.7**). Rumah tidak permanen artinya rumah yang ditinggali tidak memiliki atap, lantai dan dinding yang layak. Penyebab lain adalah rendahnya keluarga sejahtera Pra KS yang terlibat di Posyandu hanya 17 persen (lihat **Tabel 5.12**) serta masih banyaknya anak umur 7–15 tahun dalam keluarga Pra KS yang belum bersekolah (lihat penjelasan **Tabel 5.14**).

Tabel 5.3 Status Keluarga Sejahtera

| Keterangan | Pra KS | KS1 | KS2 | KS3 | KS3+ |
|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Total KK | 1235 (36.3 persen) | 228 (6.7persen) | 562 (16.5 persen) | 1190 (35 persen) | 185 (5.4 persen) |
| | 2025 | | | 1375 | |
| | 3400 (100 persen) | | | | |
| Total Jiwa | 3913 | 765 | 1977 | 3970 | 630 |
| | 6655 | | | 4600 | |
| | 11225 | | | | |

2. Penduduk yang Menganggur

Tabel 5.4 menunjukkan persentasi jumlah angkatan kerja usia produktif 15–64 tahun yang menganggur berdasarkan tingkat pendidikan untuk masing-masing tingkatan keluarga sejahtera.

Tabel 5.4 Jumlah Penduduk yang Mengganggu Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Status Keluarga | Jawa Mengganggu Usia 15-54 Tahun Berdasarkan Pendidikan Terakhir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baca Tulis Tidak Sekolah | % | Tidak Tamat SD | % | Tamat SD | % | Tidak Tamat SMP | % | Tamat SMP | % | Tamat SMA | % | Tamat Sma Akademi /Diploma | % | Tidak Tamat Universitas | % | Tamat Universitas | % | Total | % |
| KS1 | 5 | 0.17 | 2 | 0.07 | 305 | 3.55 | 3 | 0.10 | 55 | 1.86 | 38 | 1.29 | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 210 | 7.11 |
| KS2 | 9 | 0.30 | 28 | 1.95 | 210 | 7.11 | 7 | 0.24 | 173 | 6.06 | 74 | 2.50 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 | 3 | 0.10 | 512 | 17.33 |
| KS3 | 23 | 0.78 | 34 | 1.15 | 433 | 14.65 | 15 | 0.51 | 284 | 9.61 | 245 | 8.29 | 9 | 0.30 | 1 | 0.03 | 14 | 0.47 | 1068 | 35.80 |
| KS3+ | 2 | 0.07 | 9 | 0.30 | 80 | 2.71 | 1 | 0.03 | 44 | 1.49 | 46 | 1.56 | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 3 | 0.10 | 187 | 6.33 |
| Pra KS | 17 | 0.58 | 41 | 1.39 | 478 | 16.18 | 18 | 0.61 | 250 | 8.46 | 169 | 5.72 | 3 | 0.10 | 4 | 0.14 | 8 | 0.27 | 983 | 33.43 |
| Total | 56 | 1.90 | 114 | 3.86 | 1306 | 3.86 | 44 | 1.49 | 812 | 27.48 | 572 | 19.36 | 17 | 0.58 | 6 | 0.20 | 28 | 0.95 | 2955 | 100.00 |

Bila dilihat berdasarkan status keluarga maka jumlah jiwa yang menganggur pada usia 15–64 tahun (angkatan kerja) tertinggi terdapat pada keluarga Pra KS (33,43 persen) dan keluarga KS3 (35,80 persen). Bagi keluarga KS3 persentase yang tinggi menganggur diduga tidak menjadi terlalu bermasalah bagi keluarga ini. Menurut definisi dan indikator BKKBN 2016, keluarga KS3 ini umumnya memiliki tabungan dari penghasilannya serta lebih mudah memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah. Sehingga diduga lebih bisa bertahan ketika menganggur dan menciptakan peluang kerja bagi dirinya melalui informasi di atas. Untuk mengisi waktunya karena menganggur, keluarga KS3 ini umumnya mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti olah raga sepak bola serta meningkatkan pengetahuan agama. Di desa ini terdapat enam lapangan sepak bola dan satu gedung olah raga milik swasta. Sedangkan bagi keluarga Pra KS persentase 33,4 persen adalah angka yang cukup tinggi dan sangat bermasalah karena akan berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ini artinya setiap 3 jiwa yang menganggur di Desa Madura 1 orangnya berasal dari keluarga Pra KS.

Dari keluarga Pra KS yang menganggur di atas, terbanyak hanya berpendidikan tamat SD (16,18 persen), SMP (8,46 persen), dan tamat SMA sebesar 5,72 persen. Bila pengangguran di Desa Madura dilihat dari kualitasnya, maka kualitasnya juga rendah karena sebagian besar pengangguran di atas pendidikannya rendah yakni SD, SMP, dan SMA. Kualitas yang rendah mengakibatkan penguasaan IPTEK-nya juga rendah dan ini berakibat rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja di desa tersebut, sehingga akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Untuk mengatasi hal tersebut bisa diantisipasi dengan introduksi teknologi tepat guna yang mudah diaplikasikan dan dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Masalah ini akan bertambah rumit bila jumlah angkatan kerja bertambah tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada di Desa Madura.

Disarankan kepada YDSM bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di sana yakni: (1) memberikan penanaman jiwa tekhnososiopreneur kepada siswa-siswa sekolah. Apabila program ini berhasil maka siswa akan memiliki jiwa berwirausaha dan dipastikan akan mendirikan usaha sendiri dan menciptakan lapangan usaha bagi orang lain. Caranya antara lain dengan memberikan praktik-praktik

keteknososiopreneuran di sekolah-sekolah atau pelatihan-pelatihan di desa bekerja sama dengan aparat desa atau koperasi. Maka jumlah pengangguran di atas dapat diperkecil; (2) memberikan pelatihan kerja untuk siswa-siswa yang ingin mengembangkan keterampilan di balai kerja desa sesuai dengan potensi ekonomi yang tersedia di desa Madura. Program pelatihan ini diharapkan dapat mencetak siswa-siswa menjadi pekerja-pekerja yang memadai baik kualitas maupun kuantitas. Untuk ini YDSM dapat bekerja sama dengan Balai Pelatihan Tenaga Kerja; (3) meskipun meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di desa Madura adalah tugas pemerintah tetapi sebaiknya YDSM ikut memberikan kontribusinya agar tingkat kualitas pendidikan di desa tersebut dapat dipercepat. Mutu yang tinggi maka akan menciptakan kualitas sumber daya manusia desa yang lebih baik dan kompetitif; (4) memberikan informasi lowongan kerja melalui kantor desa memperkuat informasi yang diperoleh melalui media seperti surat kabar, radio, tv dan majalah. Informasi ini penting terutama untuk keluarga Pra KS bagi pengembangan diri keluarga Pra KS.

3. Keluarga yang Memiliki Anak Usia 2–5 Tahun dan Tidak Ikut PAUD

Tabel 5.5 menunjukkan data anak berusia 2-5 tahun yang tersebar di keluarga sesuai dengan status kesejahteraannya. Usia 2–5 tahun atau balita merupakan masa-masa *golden age* pada anak-anak, sebagai fase perkembangan terbaik untuk fisik maupun otak anak, sehingga membutuhkan perhatian khusus.

Tabel 5.5 Keluarga dengan Anak Usia 2–5 Tahun dan Tidak PAUD

| Keluarga dengan Anak Usia 2–5 Tahun dan Tidak PAUD | | |
|--|--------|--------|
| Status Keluarga | Jumlah | Persen |
| Pra KS | 93 | 19,25 |
| KS 1 | 62 | 12,84 |
| KS 2 | 127 | 26,29 |
| KS 3 | 164 | 33,95 |
| KS 3+ | 37 | 7,66 |
| Total | 483 | 100,00 |

Hasil pendataan menunjukkan bahwa persentase terbesar anak usia balita 2–5 tahun yang tidak ikut PAUD berada pada keluarga Pra KS (19,25 persen), KS2 (26,29 persen), dan KS3 (33,95 persen). Untuk keluarga KS2 dan KS3 persentase tidak ikut PAUD tinggi, karena keluarga ini memiliki penghasilan yang cukup untuk menyekolahkan anaknya di sekolah formal TK bukan di PAUD.

Sedangkan persentase yang tinggi untuk keluarga Pra KS tidak ikut PAUD dapat dianggap menjadi masalah yang besar di desa. Karena keberadaan PAUD di desa adalah untuk membantu pendidikan dini serta pemenuhan gizi anak. Jika pada masa *golden age* anak tidak dapat terpenuhi gizinya maka dapat mengganggu atau memperlambat pertumbuhan serta dapat menurunkan perkembangan fisik dan mental, sel-sel otak, daya ingat, kecerdasan, dan lainnya yang dapat berdampak pada kehidupan anak di kemudian hari.

Untuk memastikan terjadinya peningkatan persentase keluarga yang memiliki anak usia 2–5 tahun yang ikut PAUD, maka disarankan mekanisme pembelajaran PAUD dibuat menjadi lebih menarik, dengan: (1) meningkatkan standarisasi profesionalitas dan kualitas akademik guru-guru PAUD sehingga mutu pembelajaran dapat lebih dipastikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya tarik PAUD di mata orang tua murid; (2) membantu sekolah PAUD di dalam pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini pada era digital seperti sekarang ini; (3) membantu sarana dan prasarana sekolah PAUD yang lebih layak; (4) melakukan sosialisasi kepada orang tua akan arti penting sekolah PAUD.

4. Data Penduduk dan Rentang Usia

Tabel 5.6 menjelaskan data penduduk di Desa Madura berdasarkan rentang usia 5 tahun dari usia 15–64 (usia produktif) untuk masing-masing status keluarga. Persentase usia produktif di Desa Madura yang terbesar adalah pada keluarga Pra KS (33,50 persen) dan keluarga KS3 (35,58 persen). Tetapi bila dikaitkan dengan jumlah jiwa yang menganggur (**Tabel 5.4**) maka pada kelompok tersebut juga tercatat jumlah jiwa yang menganggur paling tinggi yakni pada keluarga Pra KS (33,43 persen) dan keluarga KS3 (35,80 persen).

Tabel 5.6 Data Penduduk Berdasarkan Rentang Usia

| Status Keluarga | Usia | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|---------------|
| | 15-19 | % | 20-24 | % | 25-29 | % | 30-34 | % | 35-39 | % | 40-64 | % | Total | % |
| KS 1 | 71 | 1.45 | 68 | 1.38 | 68 | 1.38 | 57 | 1.38 | 60 | 1.22 | 27 | 0.55 | 351 | 7.14 |
| KS 2 | 185 | 3.77 | 156 | 3.18 | 164 | 3.34 | 139 | 3.34 | 177 | 3.60 | 81 | 1.65 | 902 | 18.36 |
| KS 3 | 361 | 7.35 | 337 | 6.86 | 290 | 5.90 | 278 | 5.90 | 270 | 5.50 | 212 | 4.32 | 1748 | 35.58 |
| KS 3+ | 61 | 1.24 | 59 | 1.20 | 49 | 1.00 | 33 | 1.00 | 38 | 0.77 | 26 | 0.53 | 266 | 5.41 |
| Pra KS | 418 | 8.51 | 290 | 5.90 | 189 | 3.85 | 197 | 3.85 | 295 | 6.00 | 257 | 5.23 | 1646 | 35.50 |
| Total | 1096 | 22.31 | 910 | 18.52 | 760 | 15.47 | 704 | 15.47 | 840 | 17.10 | 603 | 12.27 | 4913 | 100.00 |

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bagi keluarga KS3 persentase yang tinggi mengganggu tidaklah menjadi terlalu bermasalah tetapi bagi keluarga Pra KS ini adalah masalah besar yang perlu dicari penyelesaiannya. Seandainya kurang mendapat perhatian maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerawanan di desa akibat pengangguran yang tinggi. Kerawanan bentuknya bisa berupa hilangnya rasa aman, meningkatnya rasa takut, kerusakan lingkungan, pencurian harta benda, dan korban jiwa. Untuk mengatasi hal tersebut antara lain caranya dengan program perluasan kesempatan kerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penduduk desa berwirausaha.

5. Tipe Rumah Keluarga

Tabel 5.7 menjelaskan persentase tipe rumah yang dihuni dari masing-masing keluarga. Hasil pendataan status tipe rumah keluarga di Desa Madura menunjukkan bahwa 75,1 persen dari total 3.400 KK memiliki rumah permanen diikuti dengan semi permanen 18,3 persen, dan tidak permanen sebesar 4 persen.

Tabel 5.7 Tipe Rumah Keluarga

| Tahapan Keluarga | Tipe Rumah | | | | | | | | Total | |
|------------------|------------|------|---------------|------|----------------|-----|-------------|-----|-----------|-------|
| | Permanen | | Semi Permanen | | Tidak Permanen | | Tidak Jawab | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Jumlah KK | % | Jumlah KK | % | Jumlah KK | % | Jumlah KK | % | Jumlah KK | % |
| Pra KS | 918 | 27.0 | 207 | 6.1 | 69 | 2.0 | 41 | 1.2 | 1235 | 36.3 |
| KS1 | 158 | 4.6 | 48 | 1.4 | 14 | 0.4 | 8 | 0.2 | 228 | 6.7 |
| KS2 | 434 | 12.8 | 104 | 3.1 | 17 | 0.5 | 7 | 0.2 | 562 | 16.5 |
| KS3 | 900 | 26.5 | 231 | 6.8 | 33 | 1.0 | 26 | 0.8 | 1190 | 35.0 |
| KS3+ | 143 | 4.2 | 32 | 0.9 | 3 | 0.1 | 7 | 0.2 | 185 | 5.4 |
| Total | 2553 | 75.1 | 622 | 18.3 | 136 | 4.0 | 89 | 2.6 | 3400 | 100.0 |

Sedangkan dari yang tidak permanen 4 persen tersebut paling besar persentasenya dimiliki keluarga Pra KS yakni 2 persen dari total 3.400 KK. Tidak permanen berarti rumah yang ditempati sebagian keluarga Pra KS di Desa Madura memiliki atap, lantai, dan dinding yang tidak layak. Setiap warga negara berhak mendapatkan rumah yang layak termasuk

lingkungan hidup yang sehat, karena hal itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Rumah yang layak akan memberikan efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga maupun pengentasan kemiskinan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan tahapan keluarga Pra KS menjadi keluarga KS1, KS2 dan selanjutnya maka perlu diupayakan secara sinergis pengembangan perumahan yang layak huni, dengan; (1) terus membantu program “bedah rumah” layak dan sehat terutama untuk keluarga Pra KS; (2) mendorong masyarakat menjadi anggota koperasi yang mampu memberikan kredit rumah sehat desa berbunga rendah bagi keluarga Pra KS yang menjadi anggota koperasi.

6. Sumber Air Keluarga

Hasil pendataan sumber air keluarga di Desa Madura terdapat pada **Tabel 5.8**. Pada tabel tersebut tampak bahwa 3.179 KK dari 3.400 KK atau sekitar 93,5 persen dari total keluarga yang ada memiliki sumber air dari sumur, dari pompa air sebesar 1,7 persen, dan dari air ledeng sebesar 0,2 persen.

Tabel 5.8 Sumber Air Keluarga

| Status | Air Ledeng | Pompa | Sumur | Mata Air | Sungai | Lain-Lain |
|--------|------------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| Pra KS | 4 | 15 | 1150 | 3 | - | 8 |
| KS1 | - | 1 | 217 | - | - | 1 |
| KS2 | - | 8 | 534 | 3 | - | 1 |
| KS3 | 3 | 30 | 1106 | 5 | - | 11 |
| KS3+ | 1 | 3 | 172 | - | - | 2 |
| Total | 8 | 57 | 3179 | 11 | - | 23 |

Tingginya keluarga di Desa Madura dalam mengandalkan air sumur, akan menjadi masalah ketika memasuki musim kemarau. Karena pada saat itu Sungai Citanduy yang menjadi alternatif kebutuhan air di desa tersebut juga ikut kering. Maka ketika musim kemarau akan menyulitkan keluarga Pra KS dalam memenuhi kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan peternakannya. Tercatat keluarga Pra KS yang menggunakan air sumur sebanyak 1.150 KK dari total 3.400 KK atau sekitar 33,8 persen.

7. Tipe Penerangan Keluarga

Berdasarkan **Tabel 5.9**, di Desa Madura tercatat sudah banyak keluarga yang menggunakan tipe penerangan listrik PLN. Setidaknya terdapat 3.257 KK dari total KK 3.400 yakni sekitar 96 persen yang telah mendapatkan akses penerangan dari PLN. Meskipun angka ini lebih tinggi dari angka nasional elektrifikasi sebesar 86 persen (PLN, per September 2019), namun masih terdapat sejumlah rumah di Desa Madura yang belum dialiri listrik PLN sebanyak 4 persen dari total KK.

Tabel 5.9 Tipe Penerangan Keluarga Sejahtera

| Status | PLN | Genset Umum | Pribadi | Minyak Tanah | Obor/Lililin | Lain-Lain | Total |
|--------|------|-------------|---------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| Pra KS | 1163 | - | - | - | - | 72 | 1235 |
| KS1 | 222 | - | - | - | - | 6 | 228 |
| KS2 | 538 | - | - | - | - | 24 | 562 |
| KS3 | 1160 | - | - | 1 | - | 29 | 1190 |
| KS3+ | 174 | - | - | - | - | 11 | 185 |
| Total | 3257 | - | - | 1 | - | 142 | 3400 |

Sebanyak 4 persen KK yang belum menggunakan listrik PLN, tampaknya perlu didorong untuk menggunakan, karena dapat menekan pengeluaran rumah tangga, yang sebagian besar berasal dari keluarga Pra KS. Elektrifikasi pada rumah tangga Pra KS diharapkan akan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Pra KS. Hal ini perlu mendapat perhatian karena di Desa Madura, kelompok KK Pra KS jumlahnya lebih besar dibandingkan kelompok KS yang lain yakni sekitar 36,3 persen (**Tabel 5.3**).

Peningkatan elektrifikasi di desa, baik kuantitas maupun kualitas akan menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan perekonomian desa, meningkatkan produktivitas desa pada sektor pertanian maupun industri kerajinan rakyat, industri rumah tangga, bahkan dalam peningkatan kegiatan sosial seperti; penyuluhan KB; pelatihan keterampilan; kegiatan keagamaan dan olahraga. Pada akhirnya akan meningkatkan tahapan atau status keluarga Pra KS, artinya peningkatan elektrifikasi pada keluarga Pra KS akan memberikan kontribusi dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong peningkatan status keluarga Pra KS menjadi lebih baik.

8. PAUD/TK dalam Keluarga

Tabel 5.10, menerangkan berapa jumlah anak di Desa Madura dan persentasenya yang mengikuti PAUD/TK untuk masing-masing status atau tahapan keluarga sejahtera. Secara berurutan, persentase terbesar yang mengikuti PAUD/TK adalah sebagai berikut keluarga Pra KS, KS2 dan KS3 yakni sebanyak 24 persen, 25 persen dan 33 persen. Besarnya persentase keluarga KS2 dan KS3 yang menyekolahkan anaknya untuk mengikuti pendidikan PAUD dapat dimengerti, karena umumnya dalam keluarga ini, terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap. Serta memiliki persentase jumlah balita paling tinggi yakni sekitar 25 persen untuk KS2 dan 40 persen untuk KS3 dari jumlah KK (**Tabel 5.11**).

Tabel 5.10 Keluarga yang Mempunyai Balita dan Mengikuti PAUD/TK

| Status | Jumlah Keluarga | |
|--------|-----------------|------|
| Pra KS | 32 | 24% |
| KS1 | 18 | 14% |
| KS2 | 33 | 25% |
| KS3 | 44 | 33% |
| KS3+ | 6 | 4% |
| Total | 133 | 100% |

Jumlah persentase keluarga Pra KS dalam mengikutsertakan anaknya untuk mengenyam pendidikan PAUD/TK mencapai 24 persen, tampaknya perlu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak, mengingat secara ekonomi dan sosial keluarga Pra KS umumnya masih perlu bantuan karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Hal ini penting artinya dalam menjembatani orientasi keluarga Pra KS dalam memastikan anak-anak mereka untuk dapat mengenyam pendidikan dasar pada usia 7–15. Bila ini bisa dilakukan maka akan meningkatkan *literacy rate* di Desa Madura.

Hal itu perlu ditunjang dengan peningkatan fasilitas dan sarana-prasarana pendidikan nonformal PAUD di Desa Madura, untuk melayani dusun-dusun yang menjadi kantung-kantung keluarga Pra KS. Mengingat besarnya persentase keluarga Pra KS yang mencapai 36,3 persen dari total KK di Desa Madura. Perhatian yang besar dari

semua pihak terhadap PAUD menjadi sangat strategis dalam meletakkan fondasi dasar bagi pendidikan pada jenjang selanjutnya. Utamanya dalam mempersiapkan pembangunan karakter anak, menanamkan kemampuan sosial dan emosi, kognitif dan berkomunikasi/bahasa.

Meskipun pengguliran Program Dana Desa untuk memajukan pendidikan PAUD telah dilakukan oleh pihak desa, namun dukungan dari berbagai pihak terkait masih sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas PAUD. Khususnya dalam mendorong kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak usia dini mereka di PAUD serta bantuan untuk meningkatkan kompetensi pengajar PAUD di desa.

9. Balita dalam Keluarga

Berdasarkan Tabel 5.11 terlihat di Desa Madura persentase terbesar keluarga yang mempunyai balita 1–6 tahun tercatat paling banyak pada KS2 dan KS3 yakni 25 persen dan 40 persen. Angka persentase ini terbesar untuk KS2 dan KS3 dapat dimengerti karena secara ekonomi ada anggota keluarga ini yang bekerja dan memiliki penghasilan.

Tabel 5.11 Keluarga Mempunyai Balita

| Status | Umur | | | | | |
|--------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| | 0-1 Tahun | | 1-6 tahun | | Lain-lain | |
| Pra KS | 22 | 25% | 50 | 19% | 1437 | 44% |
| KS1 | 6 | 7% | 19 | 7% | 159 | 5% |
| KS2 | 22 | 25% | 67 | 25% | 438 | 13% |
| KS3 | 33 | 38% | 106 | 40% | 1086 | 33% |
| KS3+ | 4 | 5% | 22 | 8% | 154 | 5% |
| Total | 87 | 100% | 264 | 100% | 3274 | 100% |

Tabel 5.11 mengonfirmasikan pada semua pihak untuk mulai memikirkan pentingnya pembangunan dan pengembangan PAUD/TK ke depan, dalam kapasitas yang lebih memadai. Persentase anak balita usia 0–1 tahun yang cukup besar akan mendorong peningkatan peserta didik kelompok usia 1–6 tahun pada tahun yang akan datang. Peningkatan tersebut terutama berasal dari keluarga Pra KS, KS2 dan KS3 yang memiliki jumlah balita dengan persentasenya terbesar. Seandainya tidak mendapat perhatian yang serius, dikhawatirkan akan

banyak anak usia balita 1–6 tahun yang tidak tertampung pada PAUD/TK, dengan kualitas pendidikan yang belum tentu menjadi lebih baik.

Persoalan balita tidak hanya terkait dengan masalah kepedulian terhadap pendidikan (PAUD) saja tetapi juga terkait dengan masalah bagaimana membangun fasilitas kesehatan. Membangun fasilitas kesehatan akan menurunkan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita (*Under-Five Mortality Rate*). Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena semakin buruknya kondisi lingkungan serta penurunan asupan gizi dan imunitas balita dapat berakibat fatal bagi kualitas kehidupan mereka. Terkait hal ini, program ASI, program imunisasi dasar gratis, program pemberian makanan bergizi kepada balita maupun ibu hamil seperti yang pernah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan imunitas balita dan penurunan *stunting* tampaknya perlu kembali digalakkan.

10. Balita dalam Keluarga dan Posyandu

Tabel 5.12 menjelaskan banyaknya balita Keluarga Sejahtera di Desa Madura yang mengikuti Posyandu. Persentase terbesar yakni 40 persen berasal dari keluarga KS3 dan 26 persen dari KS2. Sedangkan terendah dari keluarga KS1 8 persen, KS3+ 9 persen, dan Pra KS 17 persen. Rendahnya persentase keluarga KS1 dan KS3+ ke Posyandu lebih dikarenakan jumlah balita pada kelompok keluarga ini yang juga rendah (**Tabel 5.11**). Sementara rendahnya partisipasi keluarga Pra KS dalam kegiatan Posyandu, tampaknya perlu mendapat perhatian serius, mengingat keluarga Pra KS memiliki kerentanan ekonomi, yang dapat berdampak serius ketika tidak memiliki rujukan saat anak balitanya sakit.

Tabel 5.12 Keluarga Mempunyai Balita dan Ikut Posyandu

| Status | Jumlah Keluarga | |
|--------|-----------------|------|
| Pra KS | 44 | 17% |
| KS1 | 19 | 8% |
| KS2 | 65 | 26% |
| KS3 | 102 | 40% |
| KS3+ | 22 | 9% |
| Total | 252 | 100% |

Tampaknya salah satu penyebab keluarga Pra KS sulit untuk naik ke tahapan KS1 dan KS2 karena minimnya pemahaman anggota keluarga ini dalam mengatasi masalah kesehatan balitanya ke Posyandu. Selain disebabkan tingginya jumlah usia subur tidak ikut KB, masih banyaknya persalinan yang hanya dibantu oleh tenaga nonmedis, jarak yang jauh menuju fasilitas kesehatan, serta fasilitas dan tenaga kesehatan yang tidak memadai. Kesemuanya, menyebabkan keluarga Pra KS yang mempunyai balita enggan untuk berpartisipasi aktif ke Posyandu. Pada akhirnya hal tersebut akan menyulitkan semua pihak untuk meningkatkan status ekonomi dan pendidikan keluarga Pra KS yang selalu beririsan dengan masalah kesehatan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan keluarga Pra KS dalam program Posyandu, di antaranya dengan menurunkan petugas Posyandu untuk mendatangi/berkunjung ke rumah-rumah keluarga Pra KS. Selain perlunya melakukan revitalisasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk mempromosikan Posyandu sebagai wadah perwujudan “keluarga sehat”. Upaya ini, dapat dikombinasikan dengan pemberian makanan tambahan, sekaligus sosialisasi tentang gizi dan kesehatan serta tentang pentingnya PAUD. Program revitalisasi ini juga bisa diarahkan dalam rangka meningkatkan kompetensi para kader tentang kesehatan anak dan gizi maupun cara pembuatan makanan sehat anak balita yang bahannya berasal dari bahan lokal di Desa Madura.

11. Keluarga dan Anak Usia Sekolah

Tabel 5.13 menjelaskan jumlah anak usia sekolah untuk tiap-tiap status pada Keluarga Sejahtera. Pada usia 6-12 tahun (tingkatan SD) persentase terbesar adalah pada keluarga Pra KS sebesar 34 persen. Persentase yang besar ini perlu mendapat perhatian, khususnya dalam memastikan anak-anak SD dari keluarga Pra KS tidak putus sekolah. Mengingat orientasi keluarga Pra KS yang umumnya lebih tertuju dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Permasalahan ini akan berlanjut pada jenjang pendidikan berikutnya, hal ini terlihat dari jumlah anak SD, SMP, dan SMA dari keluarga Pra KS yang secara kuantitas cenderung menurun jumlahnya, meskipun persentasenya lebih tinggi dibandingkan kelompok keluarga yang lain. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan adalah kapasitas daya tampung

sekolah, karena jika tidak dipersiapkan dengan baik akan menambah beban permasalahan pendidikan dasar di Desa Madura.

Tabel 5.13 Jumlah Anak Usia Sekolah

| Status | 6-12 Thn | | 13-15 Thn | | 16-19 Thn | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase |
| Pra KS | 367 | 34% | 274 | 45% | 235 | 41% |
| KS1 | 89 | 8% | 37 | 6% | 33 | 6% |
| KS2 | 241 | 22% | 103 | 17% | 99 | 17% |
| KS3 | 336 | 31% | 161 | 27% | 181 | 31% |
| KS3+ | 50 | 5% | 32 | 5% | 29 | 5% |
| Total | 1083 | 100% | 607 | 100% | 577 | 100% |

Besarnya persentase jumlah anak usia sekolah untuk setiap jenjang pendidikan di Desa Madura tentu saja memberikan harapan perbaikan masa depan masyarakat Desa Madura, namun realitas tersebut juga menyisakan permasalahan yang tidak mudah. Salah satu permasalahan yang harus segera diupayakan jalan keluarnya adalah mempersiapkan pengembangan jumlah sekolah atau ruang-ruang kelas, kualitas dan jumlah guru yang memadai, serta memiliki kapasitas untuk merespons permasalahan anak murid dari keluarga Pra KS. Mengingat besarnya jumlah anak usia sekolah keluarga Pra KS yang tidak bisa bersekolah atau tertampung serta putus sekolah. Dalam kaitan itu, pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga Pra KS untuk kebutuhan sekolah seperti seragam, sepatu, dan buku pelajaran menjadi penting untuk mendorong semangat belajar siswa menjadi strategis untuk dilakukan, tentu saja dengan mempertimbangkan aspek pemerataan sampai ke dusun terpencil di mana jumlah keluarga Pra KS besar.

12. Keluarga dan Jumlah Anak yang Sekolah

Tabel 5.14 menerangkan tentang jumlah anak yang sekolah pada usia sekolah untuk masing-masing tahapan keluarga sejahtera. Jika Tabel 5.14 dihubungkan dengan Tabel 5.13 di atas maka diperoleh Angka Partisipasi Sekolah (*school enrollment ratio*) atau biasa disingkat dengan APS. Angka ini merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan suatu daerah. Semakin tinggi angka ini maka semakin baik dan semakin besar jumlah penduduk yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

Tabel 5.14 Jumlah Anak yang Sekolah

| Status | 6-12 Thn | | 13-15 Thn | | 16-19 Thn | |
|--------|----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Pra KS | 321 | 37% | 233 | 47% | 212 | 48% |
| KS1 | 74 | 9% | 26 | 5% | 24 | 5% |
| KS2 | 175 | 20% | 75 | 15% | 62 | 14% |
| KS3 | 256 | 30% | 131 | 27% | 130 | 29% |
| KS3+ | 39 | 5% | 28 | 6% | 17 | 4% |
| Total | 865 | 100% | 493 | 100% | 445 | 100% |

Hasil survei pada keluarga Pra KS di Desa Madura menunjukkan bahwa terdapat anak usia 6–12 tahun (SD) sebanyak 367 anak (**Tabel 5.13**), sementara yang bisa bersekolah hanya 321 anak, sehingga APS-nya adalah 87 persen. Usia 13–15 tahun (SMP) yang bisa bersekolah hanya 233 dari 274 (85 persen). Sedangkan usia 16–19 tahun (SMU) yang bisa bersekolah SMU hanya 212 dari 235 anak (90 persen). Berdasarkan data pada setiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMU maka bisa dinyatakan bahwa banyak anak usia sekolah dari keluarga Pra KS yang tidak dapat bersekolah. Meskipun APS keluarga Pra KS di Desa Madura pada umumnya relatif baik, namun keberadaan anak usia 7–15 tahun dalam keluarga yang tidak bersekolah. Sebuah keluarga “terperangkap” dalam kategori Pra KS. Ini berarti menurunkan persentase jumlah keluarga Pra KS di Desa Madura dari sisi pendidikan adalah dengan meningkatkan APS minimal untuk usia 7–15 tahun (usia wajib belajar 9 tahun) mendekati angka 100 persen.

Hasil pengamatan di Desa Madura banyak penyebab lain di luar pendidikan yang menyebabkan anak Pra KS tidak bisa bersekolah. Misalnya karena keadaan ekonomi keluarga yang memaksa anak tidak bersekolah (**Tabel 5.15** dan **Tabel 5.16**). **Tabel 5.15** menunjukkan jumlah anak dari keluarga Pra KS 48 persen yang bersekolah sekaligus bekerja di Desa Madura. Fakta ini harus menjadi perhatian semua pihak yang tertarik terhadap pengembangan pendidikan terutama dalam rangka memperbaiki kuantitas maupun kualitas pendidikan keluarga Pra KS. Betapa masih banyak anak usia sekolah yang harus berbagi waktu dengan melakukan pekerjaan orang dewasa di dalam keluarga.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan APS (pendidikan) di Desa Madura, di antaranya adalah: (1) memberikan bantuan untuk meningkatkan daya tampung peserta didik dengan mengembangkan

ketersediaan jumlah ruang kelas (prioritas SD) yang layak pakai; (2) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru yang berkualitas; (3) membantu peningkatan penghasilan orang tua; (4) memberikan beasiswa pendidikan bagi keluarga Pra KS; dan (5) meningkatkan motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan.

13. Jumlah Anak Sekolah yang Bekerja

Tabel 5.15 menjelaskan persentase jumlah anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah tetapi harus bekerja karena kesulitan ekonomi. Tingginya persentase jumlah anak usia sekolah dari keluarga Pra KS tetapi harus bekerja, pada tahun 2019 mencapai 48 persen. Tingginya angka ini menyebabkan rendahnya anak usia sekolah yang bersekolah (APS) di keluarga Pra KS untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di Desa Madura. Untuk mengatasi hal ini tampaknya perlu diupayakan penyesuaian jam sekolah yang lebih fleksibel dengan jam kerja anak yang membantu ekonomi orang tuanya.

Tabel 5.15 Jumlah Anak Sekolah dan Bekerja

| Status | Jumlah | |
|--------|--------|------|
| Pra KS | 47 | 48% |
| KS1 | 4 | 4% |
| KS2 | 20 | 20% |
| KS3 | 23 | 23% |
| KS3+ | 4 | 4% |
| Total | 98 | 100% |

Ketika dilakukan wawancara dengan anak usia sekolah, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat tentang hal ini, diperoleh jawaban beragam antara lain: (1) tidak mau sekolah, karena sudah bekerja dan mampu mencari uang; (2) karena faktor kemiskinan ekonomi dan minimnya pendidikan; (3) faktor lingkungan pengaruh teman-temannya; (4) rendahnya latar belakang pendidikan orang tua, sekolah tidak penting karena sudah bisa mendapatkan uang; (5) fasilitas belajar di sekolah kurang memadai.

Untuk mengatasi tingginya jumlah anak sekolah yang harus bekerja, bahkan putus sekolah di Desa Madura, sejumlah upaya perlu dilakukan,

di antaranya; (1) memberikan bantuan pendidikan (beasiswa) kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah namun terpaksa bekerja; (2) perbaikan kualitas pendidikan, fasilitas, kurikulum dan guru, agar orang tua merasakan manfaat menyekolahkan anak; (3) mendirikan bengkel latihan kerja, seperti praktik pertukangan dan permesinan, kursus komputer dan bahasa Inggris, serta masak-memasak; (4) mendirikan perpustakaan desa gratis untuk peminjaman buku; (5) memastikan anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar, dengan memberikan pengertian pada orang tua dan anak didik, serta lingkungan sekitar.

14. Jenis Pekerjaan Anak Sekolah yang Bekerja

Tabel 5.16 memperjelas ke mana anak usia sekolah pada **Tabel 5.15** melakukan pekerjaan dalam membantu ekonomi keluarga. Sebanyak 42 persen di antaranya, bekerja pada bidang pekerjaan yang tidak diketahui (lain-lain), tanpa ikatan kerja dengan gaji yang jelas. Kondisi kerja seperti ini, tentu saja merugikan pekerja anak usia sekolah, namun karena keterbatasan pilihan pekerjaan di desa, serta kebutuhan ekonomi, telah memaksa mereka melakukan pekerjaan dengan risiko apa pun sambil bersekolah. Sedangkan kedua terbesar sebanyak 19 persen menjadi buruh, umumnya sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak memadai. **Tabel 5.16** memberikan bukti bahwa banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah dikarenakan tuntutan membantu ekonomi keluarga.

Tabel 5.16 Jenis Pekerjaan yang Ditekuni Anak Sekolah

| Jenis | Jumlah | Persentase |
|---------------------|--------|------------|
| Lain-Lain | 40 | 42% |
| Apoteker | 2 | 2% |
| ART | 4 | 4% |
| Baby sitter | 2 | 2% |
| Bangunan/Proyek | 1 | 1% |
| Bisnis migran lokal | 1 | 1% |
| Buruh | 19 | 19% |
| Buruh bengkel | 1 | 1% |
| Buruh harian lepas | 3 | 3% |
| Pegawai restoran | 3 | 3% |

| Jenis | Jumlah | Persentase |
|---------------------|--------|------------|
| Pegawai toko | 3 | 3% |
| Pegawai kost-an | 1 | 1% |
| Pegawai apotek | 2 | 2% |
| Karyawan | 2 | 2% |
| Karyawan kafe | 2 | 2% |
| Karyawan pabrik | 1 | 1% |
| Karyawan swasta | 1 | 1% |
| Konveksi perorangan | 1 | 1% |
| Pengasuh | 3 | 3% |
| Perantauan | 1 | 1% |
| Proyek | 1 | 1% |
| Sales | 2 | 2% |
| Warung | 1 | 1% |
| Total | 98 | 100% |

Tabel 5.16 mencatat adanya 48 persen anak usia sekolah yang bekerja sambil sekolah ini berasal dari keluarga Pra KS dan persentase ini lebih besar dibandingkan yang berasal dari keluarga KS1, KS2, KS3 dan KS3+. Bila situasi seperti ini kurang mendapat perhatian, maka sulit diharapkan kualitas anak Desa Madura dari keluarga Pra KS bisa ditingkatkan dan dipacu kemampuan akademiknya untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi.

15. Jumlah Ibu Rumah Tangga yang Bekerja

Tabel 5.17 menjelaskan jumlah ibu rumah tangga yang bekerja di Desa Madura pada tahun 2019. Banyak ibu RT yang bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, sekitar 98,4 persen menjadi pekerja lain-lain yang tidak jelas ikatannya (serabutan). Kemudian terbesar berikutnya adalah sebagai petani (0,6 persen) dan karyawan (0,2 persen). **Tabel 5.17** sekaligus menegaskan bahwa untuk menopang ekonomi RT pada keluarga Pra KS di Desa Madura, membutuhkan dukungan tidak saja dari kepala keluarga namun juga perlu bantuan dari anggota keluarga yang lain, khususnya ibu RT, bahkan dari anak usia sekolah.

Tabel 5.17 Jumlah Ibu Rumah Tangga yang Bekerja

| Jenis | Jumlah | Persentase |
|-------------------------|--------|------------|
| Lain-Lain | 3329 | 98.4 |
| Baby sister | 1 | 0.0 |
| Buruh | 1 | 0.0 |
| Buruh harian | 1 | 0.0 |
| Buruh kupas pisang | 1 | 0.0 |
| Buruh tani | 2 | 0.1 |
| Dagang | 5 | 0.1 |
| Jualan online | 1 | 0.0 |
| Guru Swasta | 1 | 0.0 |
| Ibu rumah tangga | 1 | 0.0 |
| Karyawan | 7 | 0.2 |
| Karyawan BUMN (PT) | 1 | 0.0 |
| Karyawan KUD | 1 | 0.0 |
| Konveksi | 1 | 0.0 |
| Pedagang | 1 | 0.0 |
| Pengupas pisang | 1 | 0.0 |
| PNS | 1 | 0.0 |
| Penyadap pohon karet | 1 | 0.0 |
| Produksi keripik pisang | 1 | 0.0 |
| Serabutan | 1 | 0.0 |
| Tani | 19 | 0.6 |
| Tani dan menjahit | 1 | 0.0 |
| Tani dan warung | 1 | 0.0 |
| Warung | 2 | 0.1 |
| Warung makan | 1 | 0.0 |
| Wirausaha | 1 | 0.0 |
| Total | 3384 | 100 |

Berdasarkan profil Keluarga Sejahtera Desa Madura (Tabel 5.3), diperoleh gambaran jika melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa tersebut, 36,3 persen merupakan masyarakat miskin yang masuk kategori Pra KS. Pada umumnya kepala keluarga Pra KS tidak memiliki pekerjaan tetap, memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang tidak luas. Dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan, umumnya

kaum perempuan di Desa Madura ikut menopang ekonomi rumah tangga, dengan menjadi buruh tani, berjualan, bekerja serabutan di samping mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang rutin. Akibatnya, perhatian terhadap pendidikan anak dan kesehatan keluarga menjadi relatif berkurang. Realitas seperti inilah yang menjadi awal mata rantai kemiskinan keluarga (ketimpangan ekonomi) di desa terutama pada keluarga Pra KS. Sebagaimana disinyalir Konferensi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada 2015, bahwa ketimpangan pendapatan berjalan seiring dengan ketimpangan kesempatan (pendidikan dan kesehatan). Dengan kata lain, jika ketimpangan dalam hal akses pendidikan dan kesehatan diperbaiki secara menyeluruh, ketimpangan pendapatan akan juga jauh mengecil.

Untuk itu, usulan yang disampaikan berikut juga menyangkut dua hal yaitu perluasan-kemudahan akses atas pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan. Dalam rangka pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga di Desa Madura, beberapa agenda berikut perlu diprioritaskan, antara lain (1) meningkatkan peran serta ibu rumah tangga dalam koperasi KUD Mandiri di Desa Madura di dalam peningkatan kualitas kesehatan dan sanitasi keluarga, sekaligus pendidikan anggota keluarga (anak usia sekolah) melalui pengembangan ekonomi keluarga, terutama usaha-usaha yang dijalankan ibu-ibu Pra KS yang dapat bersinergi dengan kedua agenda tersebut; (2) mendorong upaya-upaya yang dapat memperkuat semangat gotong royong terutama kepedulian dari keluarga KS3 dan KS3+ terhadap keluarga Pra KS dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga Pra KS. Upaya ini sebaiknya melibatkan Tokoh Masyarakat dan Pemuka Agama; (3) meningkatkan keterampilan ibu-ibu RT di Desa Madura dengan memberikan pelatihan atau pemberdayaan ekonomi keluarga berorientasi "*home industry*" yang dapat memotivasi munculnya kegiatan usaha yang sehat dan menghargai pendidikan dalam keluarga Pra KS.

16. Potensi Pertanian

Berdasarkan **Tabel 5.18** hasil survei LPPM Univ Trilogi pada 2019, terlihat bahwa letak lahan pertanian di Desa Madura sebanyak 18 persen berada di sekitar rumah tinggal pemiliknya dan 18 persen jauh dari rumah tinggal. Sedangkan lain-lain sebanyak 64 persen menggambarkan banyaknya jumlah petani di Desa Madura yang enggan menjawab. Hal

ini bisa mengindikasikan ketidakpedulian mereka atas tanah-tanah garapan yang bukan milik mereka, karena status mereka yang hanya bertindak sebagai buruh tani, penyewa/penggarap dengan bagi hasil atau dalam ikatan kerja sama lainnya.

Tabel 5.18 Letak Pertanian

| Jenis | Jumlah | |
|--------------------------|--------|------|
| Di sekitar rumah tinggal | 833 | 18% |
| Jauh dari rumah tinggal | 799 | 18% |
| Lain-lain | 2887 | 64% |
| Total | 4519 | 100% |

Data di atas memperkuat sinyalemen kemiskinan di Desa Madura disebabkan oleh minimnya penguasaan/kepemilikan lahan garapan yang bisa dikelola oleh keluarga petani Pra KS. Hal itu, telah menyebabkan petani tanpa lahan (tuna kisma), hanya mampu menjadi penggarap atau buruh tani. Kalaupun memiliki tanah, umumnya dengan luas lahan yang terbatas sebagai warisan orang tua yang kelak akan dibagikan kembali pada anak-anaknya. Sebuah realitas sosial yang dihadapi masyarakat pertanian di Jawa yang oleh Clifford Geertz disebutnya sebagai *share of poverty*.

Minimnya penghasilan dari para penggarap atau buruh tani yang kurang memadai dan tidak menentu inilah yang mengakibatkan ekonomi, khususnya keluarga Pra KS tidak mampu berkembang, hanya pas-pasan untuk memenuhi subsistensi keluarganya. Realitas ini telah mendorong kaum perempuan untuk keluar dari ranah domestiknya, dengan ikut membantu ekonomi keluarga, bahkan telah memaksa anak usia sekolah dalam keluarga untuk bekerja paruh waktu. Pendapatan yang kecil, selanjutnya menjadikan keluarga Pra KS menjadi terjerat utang pada patron atau tengkulak dan semakin tidak berdaya ketika harus membiayai kesehatannya dan keluarga, sehingga mereka harus melakukan kalkulasi yang tidak sederhana untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Untuk itu, agenda penting yang harus diupayakan dalam rangka mengatasi hal tersebut adalah, dengan (1) meningkatkan peran koperasi KUD Mandiri dalam membantu petani tanpa lahan (tuna kisma) dan berlahan kecil dari jeratan utang yang dapat berimplikasi pada hilangnya

lahan-lahan pertanian milik mereka. Justru yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produktivitas lahan-lahan sempit yang dimiliki petani, selain memfasilitasi sewa lahan secara berkelompok atas tanah-tanah yang tidak produktif di desa, jika redistribusi lahan untuk petani-petani tanpa lahan (tuna kisma) tidak dapat dilakukan karena ketidakterediaan lahan; (2) mendorong petani untuk berkelompok melalui klasterisasi usaha dengan masuk menjadi anggota koperasi; (3) reorientasi usaha pertanian dengan menetapkan produk unggulan secara kelompok dalam koperasi, sehingga lebih fokus dan mampu lebih meningkatkan posisi tawar para petani.

17. Kepemilikan Lahan

Tabel 5.19 Kepemilikan Lahan

| Kepemilikan Lahan Pertanian | |
|--|--------|
| Jenis | Jumlah |
| Lain-Lain | 2885 |
| Buruh Tani | 10 |
| Digadaikan | 4 |
| Milik orang tua | 2 |
| Perikanan | 3 |
| Petani | 34 |
| Petani Pemilik | 1343 |
| Petani pemilik, Digarap orang lain | 5 |
| petani pemilik, disewakan ke orang lain | 9 |
| Petani pemilik, Petani penyewa/penggarap | 17 |
| Petani Penggarap | 5 |
| Petani Penyewa | 4 |
| Petani Penyewa/Penggarap | 180 |
| Petani warisan | 1 |
| Peternakan | 1 |
| Peternakan pemilik | 2 |
| Perikanan | 2 |
| PT | 4 |
| Tanah Bengkok Desa | 1 |
| Warisan | 1 |

Sebagaimana ditunjukkan **Tabel 5.19**, status kepemilikan lahan di Desa Madura sangat beragam. Sebagian besar (82,5 persen) merupakan lahan milik sendiri dan 11 persen merupakan lahan garapan yang disewa dari pihak lain. Jenis kepemilikan yang lain di antaranya ialah warisan, memanfaatkan tanah bengkok, tanah gadai dan sebagainya. Status kepemilikan lahan sangat penting dalam usaha pertanian, karena dapat memengaruhi orientasi pemanfaatannya, selain penghasilan yang diperoleh atas pengusaha lahan dimaksud.

Tabel 5.20 Kepemilikan Lahan Berdasarkan Status Keluarga Desa Madura

| Kepemilikan Lahan Pertanian | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------|
| Status Keluarga | Keterangan Luas Lahan | |
| | Milik Sendiri | Sewa |
| Pra KS | 1304185 | 167403 |
| KS1 | 164526 | 49528 |
| KS2 | 344119 | 84838 |
| KS3 | 2236417 | 181564 |
| KS3+ | 946003 | 22200 |

Tabel 5.20 menunjukkan kepemilikan lahan berdasarkan status keluarga. Total luas lahan berdasarkan status keluarga diketahui bahwa kepemilikan lahan oleh KS3 mencapai 2.236 ha (milik sendiri) dan 181 ha (lahan sewa). Kemudian keluarga Pra KS memiliki lahan 1.304 ha milik sendiri dan 167 ha lahan sewa. KS3+ memiliki 946 ha lahan milik sendiri dan 22,2 ha lahan sewa. Sementara keluarga KS2 mempunyai 344 ha lahan milik sendiri dan 84,8 ha lahan sewa. Sedangkan keluarga KS1 mempunyai lahan milik sendiri 164,5 ha dan 49,52 ha lahan sewa.

Tabel 5.21 Status Lahan Berdasarkan Surat Kepemilikan

| Status Keluarga | Keterangan | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------------|
| | Tanpa Surat Izin | Dengan Surat Izin dari Kepala Desa | Sertifikat Hak Milik |
| Pra KS | 13 | 205 | 61 |
| KS1 | 0 | 48 | 10 |
| KS2 | 5 | 109 | 17 |
| KS3 | 7 | 264 | 95 |
| KS3+ | 1 | 59 | 21 |

Surat kepemilikan lahan di Desa Madura sebagian besar masih didasarkan pada Surat Keterangan Kepala Desa (74,86 persen), Sertifikat Hak Milik (22,3 persen) dan sisanya tanpa surat (2,84 persen). Masih rendahnya keluarga yang memegang Sertifikat Hak Milik seharusnya menjadi program prioritas bagi pemerintahan Desa Madura dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Mengingat kegiatan usaha pertanian dengan kelayakan ekonomi secara produksi, membutuhkan biaya yang tidak kecil dan membutuhkan dukungan pembiayaan dari pihak lain, khususnya perbankan. Legalitas kepemilikan atas lahan yang jelas yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, akan memberikan peluang bagi petani kecil untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari pihak bank atau pihak lainnya dengan lebih mudah. Namun demikian, monitoring terhadap pelepasan lahan pada pihak-pihak elite desa atau pemodal luar desa juga patut mendapatkan perhatian serius dari aparat desa setempat pasca sertifikasi. Mengingat sejumlah laporan menunjukkan bahwa program sertifikasi berpotensi mempermudah tanah-tanah desa beralih tangan pada pihak-pihak luar desa.

Tabel 5.22 Jenis Komoditi yang Diusahakan Keluarga

| Jenis (Hortikultura/Tanaman Pangan/Perkebunan) | Jumlah |
|--|--------|
| Lain-lain | 2468 |
| Perkebunan | 158 |
| Hortikultura | 130 |
| Tanaman pangan | 781 |

Tanaman pangan yang diusahakan di Desa Madura terdiri dari padi, jagung, dan kedelai. Jumlah keluarga yang mengusahakan tanaman pangan mencapai 781 keluarga. Sementara untuk komoditas hortikultura (buah dan sayuran serta tanaman biofarmaka) berjumlah 130 keluarga dan perkebunan 158 keluarga. Usaha hortikultura yang cocok dibudidayakan lahan pertanian Desa Madura, di antaranya ialah semangka, melon, sayuran, seperti kacang-kacangan dan timun. Semangka dan melon sudah lama menjadi andalan petani Desa Madura. Terutama saat kemarau, semangka dan melon cocok untuk dibudidayakan. Hasil menanam semangka lebih besar dari komoditas lainnya. Setiap hektare lahan bisa panen 40 ton dengan harga jual antara Rp3.000,00– Rp5.000,00/kg untuk kualitas bagus. Modal yang

dibutuhkan adalah Rp50–60 juta/ha. Namun jika kualitas buah yang dihasilkan tidak baik karena hama atau cuaca yang kurang mendukung, harga bisa turun menjadi Rp1.000,00 atau kurang per kg. Sedangkan komoditas perkebunan yang dibudidayakan meliputi coklat, kopi, dan pisang.

Tabel 5.23 Usaha Perikanan Air Tawar

| Jenis (Perikanan Darat/Perikanan Laut/ Perikanan Unggulan Desa) | Jumlah |
|--|--------|
| Lain-Lain | 3486 |
| Perikanan Darat | 10 |

Perikanan air tawar membutuhkan sumber daya air yang cukup banyak, sementara letak Desa Madura cukup jauh dari pegunungan menjadikan sumber mata air tetap untuk kegiatan budidaya perikanan terkendala. Hal ini juga menjadi hambatan dalam pengairan kawasan persawahan di Desa Madura yang cukup luas dan membutuhkan air sepanjang musim, padahal sumber daya air di Desa Madura mudah kering ketika musim kemarau karena tidak adanya sungai yang mengalir dengan debit yang besar. Ketika survei dilakukan, sedang terjadi musim kemarau panjang, hampir 4 bulan tidak turun hujan sehingga sawah menjadi kering dan ratusan hektar tanaman pertanian menjadi puso. Demikian pula usaha perikanan air tawar. Hanya sebanyak 10 keluarga yang mengusahakan budidaya ikan lele dan nila di tempat yang posisinya agak di lembah yang masih bisa bertahan, karena masih mendapatkan air walaupun musim kemarau berkepanjangan. Ada satu peternakan ikan lele di RT 12 yang membudidayakan ikan di bawah kandang ayam atau lebih dikenal dengan istilah longyam (palong ayam). Usaha ini terlihat cukup efisien, karena kotoran ayam jatuh ke kolam dan dimakan oleh ikan lele. Selain hemat pakan untuk lele juga mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kotoran ayam. Namun dari aspek status halal, sebagian pakar mengatakan kotoran ayam tidak boleh dijadikan makanan ikan secara langsung. Namun ada juga pendapat yang mengatakan diperbolehkan dengan sejumlah persyaratan, sebelum dipanen ikan harus dipindahkan ke kolam lain yang airnya bersih dan diberi pakan pelet sekurang-kurangnya 3 hari dengan maksud kotoran ayam dalam perut ikan sudah tidak ada lagi.

Tabel 5.24 Jenis Usaha Peternakan

| Jenis Peternakan | Jumlah |
|-------------------------------|--------|
| Lain Lain | 3396 |
| peternak unggas (ayam potong) | 24 |
| Peternak sapi pedaging | 13 |

Sementara jumlah unit usaha unggas yang ada di Desa Madura adalah sebanyak 24 unit terdiri dari usaha ayam ras pedaging dan bukan ras. Usaha ini merupakan usaha ternak rakyat skala kecil (di bawah 5.000 ekor). Banyak keluarga yang memelihara ayam buras namun tidak dapat dikatakan sebagai unit usaha, karena hanya dipelihara di pekarangan rumah tanpa mengeluarkan modal khusus dan jumlah ayam yang dipelihara hanya beberapa ekor tanpa diberi pakan.

Sedangkan peternakan sapi pedaging juga belum dapat dikatakan sebagai unit usaha khusus, karena petani hanya memelihara paling banyak 2–3 ekor/keluarga, yang kadang-kadang digunakan untuk membantu mengolah sawah. Umumnya memelihara sapi dianggap masyarakat Desa Madura sebagai tabungan bagi keluarga ketika menghadapi kebutuhan darurat, seperti untuk pernikahan anak, sunatan anak, menyekolahkan anak, dan memperbaiki rumah hingga biaya berobat. Mereka membeli sapi yang masih berumur 4 bulan dengan berat 80–100 kg lalu dipelihara di kandang dekat rumah, setelah dipelihara setahun dan bobot sapi naik menjadi 200 kg sampai 300 kg, mereka akan menjualnya. Biasanya permintaan sapi akan melonjak tajam dengan harga yang sangat bagus pada saat hari raya Idul Adha, saat terbaik bagi petani untuk menjual ternaknya.

Tabel 5.25 Sumber Pembiayaan Usaha Tani

| Status Keluarga | Jumlah | | | | | | | Total |
|-----------------|------------------|---------------|----------|----------|-------------|------------|------|------------|
| | Biaya bagi hasil | Biaya Sendiri | Keluarga | Koperasi | Per-kebunan | Teng-kulak | Bank | |
| Pra KS | 1 | 166 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 184 |
| KS 1 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 45 |
| KS 2 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 76 |
| KS 3 | 2 | 217 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 233 |
| KS 3+ | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| Total | 4 | 524 | 7 | 3 | 0 | 5 | 40 | 583 |

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa usaha tani dengan biaya sendiri lebih dominan dilakukan oleh keluarga KS3 41,4 persen (sebanyak 217 keluarga) dan sisanya terjadi pada keluarga pra sejahtera 31,6 persen (166 keluarga). Usaha pertanian dengan sistem bagi hasil tidak banyak dilakukan, hanya ditemukan pada 4 keluarga. Sementara modal kerja yang diperoleh dari keluarga sendiri ada 7 keluarga, dari koperasi 3 keluarga, dari tengkulak 5 keluarga, dan dari bank 583 keluarga.

Meskipun masalah pembiayaan usaha tani sudah cukup maju di Desa Madura, di mana peran tengkulak sebagaimana terlihat dalam **Tabel 5.25** tidak lagi dominan, sehingga petani sudah terbiasa berhubungan dengan bank untuk memperoleh pembiayaan usaha tani. Namun karena pihak bank selalu memberikan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian dengan meminta jaminan yang nilainya memadai, menyebabkan tidak semua petani mampu memenuhi persyaratan. Realitas ini, tentu saja tidak berlaku bagi petani yang tidak memiliki agunan. Masalah yang akan muncul berikutnya adalah ketika usaha tani mengalami kegagalan. Seperti diketahui, risiko usaha di sektor pertanian lebih tinggi dari risiko pada sektor manufaktur ataupun jasa. Oleh karena itu, petani harus berhati-hati memilih skema yang ditawarkan perbankan. Dalam ketidakpastian seperti ini, keberadaan kelompok petani menjadi penting artinya sebagai “ruang publik” dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman yang dapat menciptakan rasa aman bagi para petani.

Saat ini pemerintah telah mendorong penyerapan skema kredit usaha rakyat (KUR), dengan bunga KUR yang cukup rendah, yaitu 9 persen setahun. Jika nominal pinjaman maksimal Rp25 juta bahkan tidak diperlukan agunan, melalui kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Berbagai kesempatan tersebut, seharusnya dapat diakses oleh para petani, jika berbagai informasi mampu “dikelola” secara positif dalam kelompok-kelompok petani, sehingga menghasilkan informasi yang tidak asimetris bagi para petani.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

PENGEMBANGAN PROGRAM DCML DI TIGA DESA

A. Program Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial, merupakan program bantuan yang bersifat sementara (*affirmative action*) untuk mendukung Keluarga Pra Sejahtera dan KS1 (keluarga miskin) yang memerlukan bantuan sosial sesegara mungkin agar mereka dapat hidup layak dan bermartabat. Bantuan sosial tersebut hanya diberikan sampai dengan kelompok sasaran telah mempunyai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan bagi keluarga untuk dapat hidup layak. Program bantuan sosial berupa hibah dapat disalurkan melalui Koperasi Bantaragung, Koperasi Utama Sejahtera Mandiri Cilongok, dan KUD MLS Madura dalam rangka memperkuat organisasi dan manajemen koperasi. Sementara bantuan langsung dapat ditujukan pada kelompok sasaran, yakni keluarga Pra KS dan keluarga KS1 di Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu. Program bantuan sosial yang dibutuhkan bagi kelompok masyarakat sasaran yang dapat dirasakan langsung manfaatnya bagi keluarga miskin dan dibutuhkan masyarakat luas.

1. Bedah Rumah, Lantainisasi, dan Jambanisasi

Program bedah rumah dan sanitasi bagi kalangan masyarakat miskin yang rumahnya belum layak huni perlu menjadi prioritas. Mereka akan

merasakan manfaatnya secara langsung dengan tinggal di rumah yang memenuhi syarat, meningkatkan kesehatan dan produktivitasnya, sehingga pada akhirnya mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program sosial lainnya yang juga akan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah program-program peningkatan kapasitas masyarakat dan organisasi melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan studi banding masyarakat.

Bantuan bedah rumah oleh YDSM masih patut diberikan di ketiga desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pra KS di Desa Bantaragung yang mencapai 496 KK, di Desa Cilongok yang mencapai 1.623 KK, dan di Desa Madura yang mencapai 1.235 KK. Demikian halnya dengan keluarga KS1 di Desa Bantaragung yang berjumlah 254 KK, Desa Cilongok yang berjumlah 384 KK, dan di Desa Madura yang berjumlah 228 KK, juga patut dipertimbangkan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah. Bantuan bedah rumah, dapat dilakukan secara bertahap pada kedua kelompok keluarga Pra KS dan KS1 di ketiga desa.

Kegiatan bedah rumah ini dapat meliputi perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga Pra KS dan KS1, serta pembuatan warung untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga pada kedua kelompok tersebut. Pada 2020/2021 program bantuan bedah rumah dan pembuatan warung direkomendasikan dapat dilakukan pada 10 persen keluarga Pra KS dan KS1 yang terdata dan dipilih berdasarkan tingkat urgensinya oleh KUD DCML bersama aparat desa yang berwenang. Berbeda dengan Desa Madura yang telah menerima bantuan bedah rumah dan warung sebanyak 15 unit pada 2017 dan 2018, maka Desa Bantaragung dan Desa Cilongok belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah dan pembuatan warung, sehingga membutuhkan mekanisme yang berbeda jika ingin dilakukan pada kedua desa tersebut. Desa Bantaragung misalnya memiliki mekanisme gotong-royong yang kuat dalam pembangunan rumah warga secara kolektif, sehingga mekanisme tersebut dapat dimanfaatkan karena sangat fungsional dalam mendukung program tersebut.

Berbeda dengan kondisi rumah-rumah di Desa Cilongok yang didominasi oleh rumah nonpermanen yang jumlahnya mencapai 628. Di mana 232 di antaranya, ditinggali oleh keluarga Pra KS dan KS1 yang menempati rumah nonpermanen yang umumnya hanya memiliki lantai

berpasir. Meskipun lantai berpasir tidak bisa menjadi tolak ukur dalam mengklasifikasi kesejahteraan keluarga yang tinggal di dalamnya, namun realitas tersebut menyisakan masalah higienitas bagi penghuninya. Untuk itu program bedah rumah yang akan digulirkan dalam rangka mengatasi rumah tidak layak huni (hanya berlantai pasir) bagi keluarga miskin menjadi lebih higienis patut untuk diperhatikan.

Sementara bantuan lantainisasi dan jambanisasi yang telah digulirkan sejak Januari tahun 2019/2020 di ketiga desa juga patut dipertahankan dan dilanjutkan, sehingga meningkatkan standar higienitas dan sanitasi hunian, khususnya pada keluarga Pra KS dan KS1. Di Desa Bantaragung setidaknya telah disalurkan bantuan lantainisasi sebanyak 23 unit rumah, sementara di Desa Cilongok sebanyak 160 unit rumah, dan di Desa Madura sebanyak 220 unit rumah. Sedangkan penyaluran bantuan jambanisasi telah diberikan kepada 69 unit rumah di Desa Bantaragung, 65 unit rumah di Desa Cilongok, dan 283 unit rumah di Desa Madura. Program lantainisasi dan jambanisasi telah dirasakan memberikan manfaat secara mendasar bagi masyarakat setempat, terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan komunitas.

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitasnya, proses pengintegrasian berbagai program DCML dengan kegiatan pelayanan publik yang diinisiasi oleh instansi-instansi terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat setempat mendesak untuk diorganisasi dengan lebih baik. Mengingat masyarakat kelompok miskin membelanjakan 2/3 pendapatannya untuk kesehatan dan pendidikan, realitas ini menunjukkan bahwa intervensi pelayanan publik memberikan kontribusi signifikan dalam menurunkan ketimpangan pendapatan. Padahal banyak di antara mereka yang menganggur di Desa Madura misalnya 30 persen di antaranya berasal dari keluarga Pra KS. Mereka yang berusia produktif tetapi tidak bekerja, akibatnya tingkat produktivitas desa menjadi cenderung rendah. Untuk itu model-model penerapan jaminan kesehatan seperti Posyandu yang berupaya secara langsung dalam meningkatkan kesehatan anak usia dini dan ibu harus dipastikan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat di Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura. Mengingat masih banyak anak usia 2–5 tahun yang belum memperoleh layanan Posyandu.

Kurangnya partisipasi keluarga Pra KS dalam kegiatan Posyandu menunjukkan rendahnya kepedulian keluarga Pra KS terhadap kesehatan. Hal itu dikarenakan keluarga Pra KS umumnya sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, sehingga sering melewatkan jadwal kegiatan di Posyandu. Untuk meningkatkan keterlibatan keluarga Pra KS dalam program Posyandu, maka secara berkala petugas Posyandu perlu mengagendakan kunjungan ke rumah-rumah keluarga Pra KS. Selain itu perlu dilakukannya revitalisasi melalui pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk menyosialisasikan pentingnya Posyandu sebagai wadah perwujudan “keluarga sehat”. Upaya ini dapat dikombinasikan dengan pemberian makanan tambahan, sekaligus sosialisasi tentang gizi dan kesehatan secara rutin.

Jumlah keluarga yang belum berpartisipasi dan mendapatkan akses terhadap Posyandu di Desa Cilongok setidaknya terdapat 242 keluarga, 107 di antaranya merupakan keluarga Pra KS dan KS 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan yang sering kali berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan sebuah keluarga, maka perlu upaya yang lebih serius dalam mendorong peran aktif keluarga Pra KS dan KS1 untuk memeriksakan perkembangan kesehatan anak balitanya (berat badan, imunisasi wajib, vitamin) di Posyandu. Posyandu juga dapat diperankan untuk meningkatkan kesehatan lansia. Program seperti olahraga bersama dan pengukuran tensi darah secara berkala perlu dilanjutkan dalam rangka mengantisipasi banyaknya penyakit hipertensi dan penyakit lain akibat usia lanjut di Desa Cilongok.

Dalam kaitan tersebut, keberadaan tenaga medis dari dalam masyarakat desa itu sendiri menjadi penting untuk diinisiasi keberadaannya, mengingat keterbatasan tenaga kesehatan. Di Desa Cilongok, jumlah tenaga kesehatan yang hanya berjumlah 10 orang dirasakan masih belum mampu melayani masyarakat desa secara keseluruhan. Untuk itu, agenda menambah jumlah tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas serta kualifikasi mereka menjadi penting untuk diupayakan secara sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa ataupun melalui dukungan dari pihak ketiga. Diharapkan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada akhirnya dapat ikut mengurangi pengeluaran rumah tangga keluarga miskin dan meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga mereka.

2. Bantuan Renovasi Ruang PAUD dan APE *Indoor* PAUD

Sebagaimana bantuan renovasi sekolah PAUD yang pernah diberikan YDSM pada 2018 di Desa Samiran Boyolali dan renovasi sekolah PAUD di Desa Pasarean Bogor yang rencananya akan dialokasikan pada 2020, bantuan renovasi ruang PAUD Tunas Harapan di Desa Bantaragung, ruang PAUD Muslimat NU Misbachul Awwal di Desa Cilongok, dan ruang PAUD An Nisa dan TK Tunas Harapan di Desa Madura, tampaknya juga sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar. Sementara bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) *Indoor* sebanyak 6 unit di Desa Madura pada 2019, sepertinya juga dibutuhkan sejumlah PAUD di Desa Bantaragung dan Desa Cilongok dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengembangan motorik peserta didik.

3. Beasiswa Pendidikan

Bantuan beasiswa PAUD yang telah disalurkan YDSM di tahun 2019 kepada 71 anak di Desa Cilongok dan 29 anak di Desa Madura dari keluarga Pra KS dan KSI sedikitnya telah memberikan support pada para orang tua dengan penghasilan pas-pasan dalam menekan pengeluaran keluarga. Pada 2020/2021, bantuan beasiswa PAUD masih sangat relevan untuk dilanjutkan dan disalurkan pada keluarga Pra KS dan KSI yang memiliki anak sedang mengenyam PAUD. Di Desa Bantaragung setidaknya tercatat sebanyak 316 anak berusia di bawah lima tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan usia dini, sedangkan di Desa Cilongok tercatat sebanyak 191 anak berusia 2–5 tahun yang seharusnya juga layak bersekolah PAUD. Sementara di Desa Madura tercatat sebanyak 50 anak yang layak mendapatkan bantuan beasiswa PAUD.

Santunan Beasiswa Sarjana (S-1) ataupun Diploma (D-3) yang diberikan tahun 2019 kepada anak-anak dari Keluarga Pra Sejahtera dan KSI sebanyak 3 siswa dari Desa Cilongok tampaknya juga sangat dibutuhkan dan perlu dipastikan keberlanjutannya. Di Desa Bantaragung setidaknya terdapat 99 anak dari keluarga Pra KS dan KSI yang telah merampungkan pendidikan menengah atas, sementara di Desa Cilongok terdapat 44 anak dari keluarga Pra KS dan KSI yang menganggur, sehingga patut diperhitungkan untuk mendapatkan

santunan beasiswa serupa. Sementara di Desa Madura terdapat 207 anak yang dapat menjadi sasaran program beasiswa Sarjana (S-1) ataupun Diploma (D-3).

Meskipun program beasiswa pendidikan tidak secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga Pra KS dan KS1, namun dalam jangka panjang program seperti ini akan memberikan kesempatan pada keluarga miskin untuk melakukan mobilitas vertikal melalui perantara anak-anak mereka yang telah meraih gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Keberlanjutan program beasiswa secara berkala oleh YDSM tampaknya masih sangat dibutuhkan pada fase-fase tertentu (seperti pada masa dampak pandemi/wabah yang berkepanjangannya), yang mengurangi pendapatan orang tua murid, sehingga peserta didik rentan untuk putus sekolah.

Bentuk program beasiswa dalam bidang pendidikan dapat meringankan beban masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Sekalipun program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial seperti ini umumnya mempunyai dampak jangka panjang. Sementara program penguatan kapasitas dan kompetensi guru yang nantinya dapat meningkatkan keterampilan peserta didik (khususnya dalam praktik-praktik kerajinan tangan berbasis produk/keunggulan lokal), sehingga ikut berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan keluarga juga perlu dikembangkan. Bantuan di bidang pendidikan yang belum banyak tersentuh adalah pendidikan anak usia dini (PAUD). Bantuan keuangan langsung di tingkat PAUD tampaknya perlu diberikan tidak saja kepada para siswa, tetapi juga kepada para guru yang memiliki pendapatan relatif rendah.

Hambatan kultural di dalam keluarga dan lingkungan terkait dengan program pendidikan juga patut mendapat perhatian. Mengingat bantuan pendidikan 9 tahun bagi keluarga miskin yang belum berjalan optimal, karena anak usia sekolah sebagian besar membantu orang tua bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karenanya, dalam bantuan pendidikan 9 tahun perlu disertakan bantuan operasional peralatan sekolah, sehingga anak keluarga miskin tidak lagi mengeluarkan biaya tambahan.

Minimnya pendapatan keluarga Pra KS, umumnya terjadi karena kepala keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap dan memiliki lahan yang terbatas. Akibatnya untuk menopang pendapatan keluarga, ibu

rumah tangga dan anak ikut bekerja. Umumnya kaum perempuan di Desa Madura misalnya, ikut menopang ekonomi rumah tangga, dengan menjadi buruh tani, berjualan, bekerja serabutan di samping mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang rutin.

Tingginya persentase jumlah anak usia sekolah yang seharusnya bersekolah tetapi bekerja, menyebabkan rendahnya anak usia sekolah yang bersekolah khususnya pada keluarga Pra KS untuk semua jenjang pendidikan. Peningkatan persentase keterlibatan anak usia sekolah dari keluarga Pra KS, dapat mulai diinisiasi sejak PAUD, dengan menerapkan pola pendidikan yang lebih menarik. Strategi ini juga dapat diterapkan pada jenjang pendidikan selanjutnya, dengan meningkatkan muatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi sumber daya alam di ketiga desa. Isu krusial terkait rendahnya partisipasi anak usia sekolah perlu diatasi dengan penyesuaian jam sekolah yang lebih fleksibel dengan jam kerja anak yang membantu ekonomi orang tuanya.

Berbagai upaya tersebut perlu dilakukan dengan lebih sistematis, mengingat realitas ketimpangan pendapatan berjalan seiring dengan ketimpangan kesempatan (pendidikan dan kesehatan). Jika ketimpangan dalam hal akses pendidikan dan kesehatan diperbaiki secara menyeluruh, ketimpangan pendapatan diperkirakan akan jauh lebih mengecil. Skala prioritas lainnya adalah masih banyaknya warga di ketiga desa yang buta huruf (tidak mengenyam pendidikan sekolah formal). Program literasi untuk mengentaskan buta aksara perlu digerakkan melalui “kejar paket A” yang dimediasi oleh kader-kader penggerak pembangunan desa dan KUD, sehingga mampu meningkatkan kemampuan dan kapabilitas kelompok sasaran.

4. Bantuan Bencana Alam dan Dampak Pandemi/Wabah Penyakit

Bantuan korban banjir dalam bentuk sembako yang diberikan tahun 2018 oleh YDSM pada 89 KK serta tahun 2020 yang akan dialokasikan pada 42 KK di Dusun Margasari dan Dusun Purwasari Desa Madura tampaknya dapat menjadi *benchmark* program penyaluran bantuan bencana alam. Mengingat Desa Madura dan Desa Cilongok termasuk kawasan rawan banjir, serta Desa Bantaragung yang rawan longsor

setiap tahunnya, perlu kiranya di ketiga desa diinisiasi pengembangan pranata lokal di tingkat dusun untuk menggerakkan “jaring pengaman sosial” berbasis kekeluargaan dan gotong royong dalam mengantisipasi berbagai bencana alam secara swadaya.

Pranata lokal tersebut, juga dapat dioperasionalkan dalam rangka menanggulangi dampak sosial akibat pandemi/wabah penyakit. Hal ini akan sangat fungsional di dalam menyalurkan bantuan sembilan bahan pokok (Sembako) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagaimana direncanakan oleh YDSM, sehingga peruntukannya dapat sesuai dan tepat sasaran. Melalui pranata lokal berbasis keswadayaan seperti ini diharapkan ke depannya masyarakat dapat lebih siap dalam mengantisipasi permasalahan yang dihadapi secara partisipatif, sehingga tidak harus bergantung pada pihak-pihak luar desa.

Adapun penyaluran bantuan dampak pandemi/wabah penyakit ataupun bencana alam bagi warga di ketiga desa dapat dialokasikan melalui sejumlah agenda darurat. Pertama, pemberian subsidi bunga ketika meminjam bantuan Program Penguatan Sektor Keuangan, dengan memberikan pembebasan atau penghapusan/penurunan bunga kepada peminjam Modal Kita Mikro dan Modal Kita Kecil yang tidak mampu membayar bunga. Utamanya kepada para peminjam dari keluarga Pra KS dan KS1 di ketiga desa. Sebagai upaya meringankan angsuran anggota dan untuk menopang ekonomi keluarga Pra KS dan KS1 di masa bencana ataupun pandemi/wabah. Bantuan tersebut dapat dikaitkan dengan pemberian subsidi sembako murah yang disalurkan melalui program Warung Kita untuk bahan kebutuhan pokok keluarga, khususnya melalui penurunan harga pasokan beras dan telur yang umumnya menjadi konsumsi utama warga tidak mampu sampai berakhirnya fase bencana alam ataupun pandemi/wabah penyakit.

Sementara agenda kedua, memberikan subsidi pengurangan/pembebasan bunga untuk peminjam Program Pengembangan Sektor Riil, utamanya peminjam program Warung Kita dan Usaha Tani Kita. Mengingat kedua sektor riil tersebut yang akan mendapatkan imbas langsung dan cukup berat atas dampak bencana alam ataupun pandemi/wabah. Untuk itu peminjam modal dari Warung Kita dari keluarga Pra KS dan KS1 di ketiga desa patut dipertimbangkan diberikan subsidi jika terjadi bencana alam ataupun pandemi/wabah penyakit.

Demikian halnya dengan peminjam Usaha Tani Kita, yang banyak dimanfaatkan oleh sebagai besar keluarga Pra KS dan KS1 yang umumnya berprofesi sebagai petani, juga perlu mendapatkan subsidi. Setidaknya para petani dari keluarga Pra KS dan KS1 yang menjadi peminjam program usaha Tani Kita yang sewaktu-waktu dapat terdampak bencana alam ataupun pandemi/wabah penyakit mendapatkan dukungan relaksasi dan pemberian subsidi. Hal ini sangat krusial pada masa pemulihan pasca bencana ataupun pada masa pandemi/wabah, dalam rangka menopang orientasi kewirausahaan yang sudah mulai tumbuh pada keluarga Pra KS dan KS1 di ketiga desa.

5. Pengembangan Organisasi dan Percepatan Keanggotaan Koperasi DCML

Sejak tahun 2016 hingga saat ini di Desa Cilongok dan Desa Madura telah berdiri masing-masing satu koperasi DCML. Jumlah anggota Koperasi Utama Sejahtera Mandiri berjumlah 965 anggota dari 2.736 KK Desa Cilongok, sehingga 35,3 persen warga desa telah menjadi anggota Koperasi DCML. Sementara jumlah anggota KUD MLS Madura telah mencapai 1.543 orang anggota dari 3.400 KK Desa Madura, sehingga 45,4 persen warga desa telah tergabung sebagai anggota Koperasi DCML. Ke depannya perlu dipastikan pendirian koperasi DCML di Desa Bantaragung.

Secara sederhana keanggotaan koperasi secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan modal yang dikelola koperasi. Untuk itu kegiatan percepatan keanggotaan koperasi menjadi hal penting dalam pengembangan sebuah koperasi. Berbagai kegiatan sosialisasi yang lebih menarik dan mampu memberikan kesadaran kolektif akan arti penting Koperasi DCML dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di ketiga desa tampaknya perlu dikembangkan secara partisipatif dalam rangka menjaring keanggotaan baru. Arti penting keberadaan keluarga Pra KS dan KS1 di Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura yang telah menjadi anggota Koperasi DCML dapat menjadi acuan dalam program percepatan keanggotaan Koperasi DCML, sehingga secara optimal dapat terlayani.

Untuk itu, penargetan 80 persen dari keluarga Pra KS dan KS1 di Desa Bantaragung yang masing-masing mencapai 496 KK Pra KS

dan 254 KK KS1 untuk dapat segera dilayani Koperasi Bantaragung patut menjadi bahan pertimbangan. Begitupun dengan penargetan 80 persen keluarga Pra KS dan KS1 di Desa Cilongok yang masing-masing mencapai 1.623 KK Pra KS dan 384 KK KS1 untuk sedapat mungkin terlayani oleh Koperasi Utama Sejahtera Mandiri. Juga 80 persen keluarga Pra KS dan KS1 di Desa Madura yang mencapai 1.235 KK Pra KS dan 228 KK KS1 harus menjadi skala prioritas dalam program percepatan keanggotaan KUD MLS Madura di tahun-tahun mendatang.

Jika hal tersebut dapat direalisasi maka pada 2020/2021 diharapkan akselerasi dan percepatan keanggotaan koperasi di ketiga desa sasaran Program DCML akan dapat menysasar 4.220 keluarga dengan sasaran prioritas 3.354 keluarga Pra KS dan 866 keluarga KS1, sehingga memiliki kesempatan untuk didorong menjadi keluarga sejahtera dan mandiri. Tentu dengan tetap membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kelompok-kelompok keluarga lainnya di ketiga desa untuk menjadi anggota Koperasi DCML, sehingga semakin banyak warga desa yang terlayani.

Selain melakukan sosialisasi, Koperasi DCML di ketiga desa juga perlu mempertimbangkan dilakukannya sejumlah pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas SDM (pengurus dan anggota koperasi), serta penguatan manajemen dalam organisasi. Utamanya kegiatan pendampingan teknis terkait dengan aktivitas anggota koperasi yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dalam menampung dan memasarkan produk pertanian keluarga Pra KS dan KS1 ke Koperasi DCML. Juga menggerakkan pemuda-pemudi dari keluarga Pra KS dan KS1 untuk dilatih dan diberdayakan oleh koperasi, sehingga mampu bekerja dengan memanfaatkan teknologi tepat guna di bidang pertanian, perikanan, dan perkebunan secara berkelanjutan.

B. Program Bantuan Ekonomi

Program Bantuan Ekonomi merupakan bantuan yang sifatnya berkelanjutan dalam bentuk bantuan inisiasi dan fasilitasi kegiatan ekonomi yang bersumber dari pihak-pihak terkait yang memiliki komitmen sama dan sumber daya lokal yang ada di desa. Program bantuan ekonomi meliputi 1) Pengembangan Sektor Keuangan, di antaranya pinjaman Modal Kita Mikro dan pinjaman Modal Kita Kecil;

serta 2) Pengembangan Sektor Riil, di antaranya melalui dukungan modal pada Warung Kita, Tani Kita, dan Desa Kita.

1. Program Modal Kita untuk Penguatan Sektor Keuangan

Penguatan sektor keuangan dilakukan melalui Program Modal Kita. Program Modal Kita adalah program kegiatan usaha simpan-pinjam sebagai basis dari sistem ekonomi produktif di kawasan perdesaan. Program ini, ditujukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Pra KS dan KS1 dengan cara memberikan pelayanan pinjaman modal usaha produktif yang terdiri dari pinjaman Modal Kita Mikro dan Modal Kita Kecil untuk mendukung sektor riil, seperti: Warung Kita, Tani Kita dan Desa Kita. Penempatan dana di ketiga Koperasi DCML dapat disesuaikan dengan banyaknya jumlah anggota kelompok-kelompok di dalam Koperasi DCML di Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura, dengan tetap memperhatikan omset dan nilai NPL pada setiap koperasi. Hal ini penting untuk dipastikan keberlanjutannya, mengingat peran lembaga keuangan yang masih relatif terbatas dalam kegiatan perekonomian masyarakat di ketiga desa, sehingga banyak masyarakat yang masih menggunakan lembaga keuangan informal dengan bunga relatif besar.

Program Kerja Modal Kita secara umum diarahkan untuk; 1) meningkatkan produktivitas dan keefektivitas layanan usaha Modal Kita; 2) mendukung dan melayani kebutuhan sektor riil (Warung Kita dan Tani Kita); 3) meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan pengurus koperasi dan kelompok; 4) melakukan pelatihan dengan sertifikasi Modal Kita; 5) mengembangkan etos teknososiopreneur bagi seluruh anggota Koperasi DCML terutama keluarga Pra KS dan KS1 agar memiliki usaha produktif dengan pendapatan yang layak; dan 6) menjaga tingkat kesehatan Modal Kita.

a. Modal Kita Mikro

Modal Kita Mikro adalah pinjaman yang diberikan kepada keluarga Pra KS dan KS1 dengan plafon antara Rp2.000.000,00–Rp5.000.000,00. Adapun sasaran penerima manfaat program akan mendapatkan modal untuk kegiatan berdagang atau kegiatan ekonomi produktif kecil lainnya. Keberadaan Modal Kita Mikro setidaknya akan dapat dimanfaatkan oleh

273 keluarga Pra KS dan 104 keluarga KS1 (yang berpotensi menjadi anggota koperasi) jika koperasi DCML di Desa Bantaragung dapat didirikan. Juga 965 keluarga yang sudah menjadi anggota Koperasi Utama Sejahtera Mandiri di Desa Cilongok. Demikian halnya sebanyak 1.543 keluarga yang sudah menjadi anggota KUD MLS Madura.

b. Modal Kita Kecil

Modal Kita Kecil adalah pinjaman yang diberikan kepada kelompok KS2 dengan plafon antara Rp5.000.000,00–Rp25.000.000,00. Sasaran Program Modal Kita Kecil adalah pedagang kecil atau usaha ekonomi produktif kecil lainnya yang telah berkembang dan ingin meningkatkan usahanya. Di Desa Bantaragung setidaknya terdapat 251 KK keluarga KS2 yang potensial untuk mendapatkan bantuan Modal Kita Kecil. Sementara di Desa Cilongok terdapat 225 KK keluarga KS2, sedangkan di Desa Madura terdapat 562 KK keluarga KS2 yang juga potensial untuk mendapatkan bantuan Modal Kita Kecil.

2. Program Pengembangan Sektor Riil

Sektor riil merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi di masyarakat (anggota Koperasi DCML) yang sangat memengaruhi atau keberadaannya dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi sebuah desa. Program kerja sektor riil terdiri dari program kerja Warung Kita, Tani Kita, dan Desa Kita, serta berbagai program inisiatif lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa bersangkutan.

a. Warung Kita

Warung Kita adalah pinjaman dengan plafon Rp150 Juta. Program yang telah diluncurkan sejak 2017 hingga sekarang, telah menginisiasi terbangunnya sejumlah Warung Kita pada sejumlah Koperasi DCML dan Non-DCML. Tujuan dari program Warung Kita adalah 1) menyediakan kebutuhan sembako dan saprotan dengan harga terjangkau yang disalurkan melalui kelompok-kelompok usaha perdagangan serta menjual produk lokal unggulan hasil produksi anggota melalui Koperasi DCML; 2) menjadikan warung retail milik anggota berkembang pesat dan mampu melayani kebutuhan masyarakat sekitar; 3) menjadikan

Koperasi DCML sebagai sub grosir yang tangguh dan berdaya saing; 4) memasarkan produk anggota, utamanya produk-produk pertanian unggulan lokal, dari para petani, peternak, petambak, pengerajin, dan seterusnya yang dapat memenuhi kebutuhan pangan (pokok) desa dalam rangka membangun kemandirian pangan.

Adapun sasaran programnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sembako terjangkau bagi 2.366 KK di Desa Bantaragung melalui 16 warung sembako (Kecamatan Sindangwangi dalam Angka 2019), 2.736 KK di Desa Cilongok melalui 90 warung sembako (Kecamatan Cilongok dalam Angka 2019), dan 3.400 KK di Desa Madura melalui 15 warung sembako (Kecamatan Wanareja dalam Angka 2019). Juga memenuhi kebutuhan saprotan bagi 685 petani di Desa Bantaragung, 1.066 petani di Desa Cilongok (Kecamatan Cilongok dalam Angka 2019), dan 3.056 petani di Desa Madura (Kecamatan Wanareja dalam Angka 2019).

Selain diorientasikan untuk menginisiasi lahirnya teknososiopreneur-teknososiopreneur baru di kawasan perdesaan, program kerja Warung Kita juga difokuskan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan mitra usaha warung cerdas yang diharapkan mampu mendorong terjadinya akselerasi pertumbuhan perekonomian desa. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja sektor perdagangan yang secara umum akan memberikan pendapatan per kapita yang lebih baik bagi sektor lainnya. Sekaligus memberikan penguatan sektor perdagangan yang lebih berpihak pada perekonomian desa yang masih dikuasai/dimonopoli oleh para tengkulak, sebagaimana terlihat dari masih sangat dominannya peran mereka dalam pemasaran hasil produksi masyarakat. Seperti komoditas unggulan; olahan nira, bawang merah, padi, melinjo (olahan emping), semangka, dan singkong yang masih dipasarkan melalui pasar tradisional dan mekanisme ijon yang digerakan oleh para tengkulak.

Dalam kaitan tersebut, pemerintahan desa perlu memberikan ruang yang lebih besar kepada koperasi untuk berperan aktif menjembatani berbagai kepentingan kegiatan perdagangan baik di dalam dan luar desa. Keberadaan koperasi menjadi sangat fungsional dalam meningkatkan posisi tawar petani dan memberikan alternatif pilihan pengembangan kapasitas usaha sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pengembangan Warung Kita yang dilakukan secara *bottom up* berdasarkan aspirasi kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai

setempat (lokal) tampaknya perlu dikedepankan untuk meminimalisir kegagalan usaha.

b. Tani Kita

Tani Kita merupakan program di bidang usaha agribisnis yang dikembangkan dengan memperhatikan kebaruan, baik input teknologi tepat guna, metode budidaya baru, dan pengembangan varietas unggul yang dapat meningkatkan hasil produksi anggota Koperasi DCML. Program ini diberikan dalam bentuk pinjaman dari Koperasi DCML kepada anggotanya secara berkelompok dengan sistem tanggung-renteng. Adapun sarasannya adalah keluarga Pra KS dan KS1 anggota Koperasi DCML yang berprofesi di bidang usaha pertanian, perikanan, peternakan dan kerajinan. Program ini diharapkan akan dapat menginisiasi kelahiran teknososiopreneur-teknososiopreneur lokal dari keluarga tidak mampu.

Rencana pengembangan program Tani Kita pada 2020 yang akan menyasar di lima DCML, yaitu: Desa Cilongok, Desa Pesantunan, Desa Argomulyo, Desa Krambilawit, dan Desa Madura, tampaknya perlu dipertimbangkan untuk juga menyasar Desa Bantaragung yang memiliki potensi pertanian sangat besar. Hal ini relevan dengan tujuan program kerja Tani Kita yang diorientasikan untuk mendorong terwujudnya usaha Tani Kita melalui sistem agribisnis terpadu yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan dalam rangka menyejahterakan masyarakat miskin secara berkelompok.

Dalam kaitan itu, peningkatan kesejahteraan 685 petani di Desa Bantaragung, 1.066 petani di Desa Cilongok, serta 3.056 petani di Desa Madura menjadi penting untuk mendapatkan skala prioritas. Utamanya dalam memfasilitasi kegiatan usaha yang menghasilkan produk-produk pertanian berskala kecil yang menjadi profesi utama para petani di ketiga desa. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung suplai bahan baku pengolahan produk-produk unggulan desa sehingga keberlanjutannya dapat lebih dipastikan. Selain mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian kelompok petani miskin. Melalui penyediaan modal bagi para petani yang telah tergabung dalam kelompok-kelompok sasaran melalui skema pinjaman berdurasi panjang dengan tingkat bunga yang terjangkau.

Di Desa Bantaragung, sektor pertanian dan turunannya berperan vital dalam kegiatan perekonomian desa. Melihat potensi alam yang dimiliki Desa Bantaragung yang memiliki karakteristik geografis yang khas, maka kawasan di sekitar pusat pemerintahan yang saat ini secara eksisting dimanfaatkan untuk budidaya padi sawah, melinjo (olahan emping), dan durian dapat diprioritaskan untuk dibiayai melalui program Tani Kita. Demikian juga dengan kawasan Dusun Malarhayu yang lebih banyak dimanfaatkan untuk budidaya bawang merah, jagung manis, cabai, tomat, dan terong di kawasan yang relatif lebih tinggi dan kering, sehingga hanya mengandalkan air hujan tampaknya juga perlu mendapatkan dukungan pengembangan sarana pengairan yang memadai. Dengan tetap mengupayakan dilakukannya terobosan dalam mengantisipasi tingkat kekeringan ekstrem di Dusun Malarhayu, yang sepertinya membutuhkan intervensi teknologi yang mampu menarik air dari bawah untuk ditampung di dalam embung yang disiapkan di perbukitan Malarhayu, sehingga kegiatan usaha pertanian dapat dilakukan sepanjang tahun dengan lebih optimal.

Sumber daya air yang besar di Desa Bantaragung dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian, selain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan berpotensi sebagai sumber air bersih komersial (air minum kemasan), sehingga mampu menjadi pendapatan asli desa. Sementara komoditas hortikultura durian khas Majalengka yang telah dikenal luas oleh masyarakat luar dan melinjo lokal yang masih dibudidayakan secara konvensional perlu mendapat perhatian pendanaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Hal ini sangat strategis dikembangkan dalam rangka mengoneksikan berbagai produk unggulan desa dalam menunjang pertumbuhan sektor pariwisata yang sedang dikembangkan oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat. Wisata Curug Cipeuteuy dan bentangan terasering budidaya padi di Ciboer Pass yang merupakan andalan wisata alam setempat akan menjadi semakin menarik apabila tersedia oleh-oleh hasil bumi khas desa setempat, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan berkunjung ke Desa Bantaragung.

Sementara Desa Cilongok yang sumber penghidupan masyarakatnya didominasi oleh sektor nonpertanian terutama sebagai pedagang, buruh, karyawan swasta dan jasa, sisanya bergerak di sektor pertanian terutama pada komoditi kelapa (pengolahan nira menjadi gula), singkong dan padi

perlu mendapatkan perhatian yang berbeda. Meskipun desa ini telah tumbuh menjadi kawasan sub urban dengan kegiatan industri yang pesat. Namun demikian, budidaya kelapa merupakan usaha pertanian yang dominan di Desa Cilongok yang dilakukan secara turun-temurun tetapi mulai ditinggalkan, karena kurang bisa menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan berisiko jatuh saat menderes. Jumlah petani kelapa saat ini tercatat 342 dari total 2.736 keluarga. Jumlah tersebut berpotensi terus menurun jika tidak ada campur tangan dari pemerintah, dalam melakukan intervensi teknologi penderesan.

Sebagaimana diketahui salah satu penyebab menurunnya minat pertanian kelapa adalah risiko terjadinya kecelakaan karena ukuran pohon kelapa lokal yang mencapai 30 m bahkan lebih. Untuk itu introduksi alat penyadap nira (ALYA) yang lebih aman sebagaimana temuan Universitas Gajah Mada yang memanfaatkan kamera dengan tablet android dalam proses penderesan nira kelapa penting untuk dijajaki. Selain perlunya memperbaiki tata perdagangan gula kelapa yang lebih adil.

Dahulu, setiap rumah tangga memiliki minimal 2 orang penderes yaitu orang tua laki – laki dan anak laki-laki. Saat ini, penderes sudah sangat terbatas jumlahnya karena generasi muda menjadi lebih realistis dalam memilih pekerjaan. Pemuda desa sebagian besar memilih bekerja sebagai karyawan toko dan buruh pengolahan kayu atau buruh serabutan. Inilah yang menyebabkan generasi penderes yang tersisa adalah generasi usia 40 tahun ke atas. Sementara komoditi pertanian lain yang perlu menjadi perhatian untuk mendapatkan pendanaan Program Tani Kita adalah budidaya komoditi singkong dan padi. Singkong berkontribusi sebanyak 57 ton dalam satu siklus tanam (6–12 bulan) di Desa Cilongok, sehingga berpotensi sebagai penghasil tambahan apalagi jika diusahakan secara intensif. Sedangkan budidaya padi rata-rata setiap pembudidaya menghasilkan 1,3 ton setiap periode tanam dengan luasan lahan yang digarap kurang lebih 0,2 ha.

Program ekstensifikasi kelapa genjah yang telah diinisiasi oleh YDSM dengan memberikan bibit kelapa genjah (usia tanam 3–4 tahun sudah dapat berbuah dan memiliki batang pendek) kepada masing-masing keluarga dapat diteruskan. Namun demikian, program tersebut sebaiknya diorientasikan dalam rangka diversifikasi olahan kelapa di luar produk nira, utamanya daging kelapa untuk VCO, air kelapa untuk nata de coco, tempurung kelapa untuk arang atau briket, dan

sabut kelapa untuk serat sabut. Untuk itu, pengembangan hasil produk kelapa ke depannya sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pengolahan hasil nira menjadi gula kelapa/semut/kristal yang telah biasa dilakukan masyarakat setempat. Namun juga membuka kemungkinan dilakukannya diversifikasi pengolahan hasil produk olahan kelapa lainnya yang lebih menguntungkan bagi masyarakat.

Pengembangan produk olahan minyak kelapa (VCO), nata de coco, serat sabut dan arang tempurung, mensyaratkan dilakukannya pengembangan produk turunan kelapa yang lebih terintegrasi dalam kegiatan agroindustri. Kondisi tersebut, tentu saja membutuhkan proses internalisasi yang tidak sederhana, karena harus mengubah kebiasaan cara budidaya kelapa dalam masyarakat. Selain perlu mempertimbangkan potensi buah kelapa segar yang bisa dihasilkan Desa Cilongok dan sekitarnya sebagai pemasok bahan baku produk.

Meskipun berdasarkan pendataan yang telah dilakukan, sumber modal sebagian besar keluarga petani, penderes, dan pengrajin gula merah berasal dari modal sendiri. Hanya dua keluarga yang mendapatkan pinjaman dana dari koperasi dan tiga keluarga mendapatkan pinjaman dana dari tengkulak. Namun demikian, permasalahan umum yang dihadapi petani kelapa atau penderes sejak lampau adalah ketergantungan mereka yang sangat besar terhadap para tengkulak yang telah mengikat mereka dengan “jebakan” utang berlapis, sehingga produksi air nira mereka harus diserahkan dengan harga yang telah ditentukan oleh para tengkulak. Selain semakin terbatasnya pohon kelapa yang dapat dederes di sekitar mereka.

Sebagian besar keluarga petani dan penderes masih memiliki kekhawatiran terhadap risiko kegagalan produksi bila menggunakan sumber modal lain untuk berusaha. Oleh karena itu, pengembangan permodalan Tani Kita bagi petani dan penderes dapat dilakukan dengan upaya meminimalkan risiko kegagalan produksi, misalnya dengan sistem bagi hasil ataupun sistem tanggung renteng. Di mana risiko bertani dan menderes tidak semata-mata ditanggung sepenuhnya oleh petani ataupun penderes, tetapi sekaligus juga ditanggung oleh lembaga peminjam, sehingga perlu dibuat mekanisme yang mampu menciptakan “rasa aman” atas tanggungan risiko usaha secara bersama. Juga pengembangan mekanisme pengelolaan keuangan sederhana bagi debitur yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Program Tani Kita,

sehingga mereka dapat mengelola pinjaman pendanaan dengan lebih prudent.

Sedangkan di Desa Madura, sumber modal utama bagi usaha pertanian berskala kecil didominasi oleh modal sendiri yang berasal dari tabungan, pinjaman tetangga, maupun sanak saudara. Modal yang terbatas menjadikan hasil pertanian menjadi kurang optimal. Hanya petani yang memiliki lahan luas yang memiliki kesempatan lebih baik untuk mengakses modal dari pinjaman bank dengan mengagunkan sertifikat tanah miliknya. Meskipun program pendanaan yang ditawarkan koperasi masih menempati posisi ketiga sebagai sumber modal bagi kegiatan usaha pertanian. Akibat minimnya jumlah nominal pinjaman yang bisa diakses oleh para petani kecil, sehingga banyak di antara mereka yang mencari alternatif sumber pinjaman lain.

Meskipun saat ini, pembiayaan usaha tani di Desa Madura oleh tengkulak tidak lagi dominan, petani sudah terbiasa berhubungan dengan bank untuk memperoleh pembiayaan usaha tani. Namun karena pihak bank selalu memberikan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian ekstra dengan meminta jaminan yang nilainya memadai, menyebabkan tidak semua petani mampu memenuhi persyaratan. Realitas inilah yang dimanfaatkan oleh sejumlah tengkulak untuk mempertahankan eksistensinya, sebagaimana terjadi dalam kegiatan budidaya pepaya di desa ini. Akibatnya, mekanisme panen dan jalur distribusi perdagangan pepaya di desa ini dikendalikan oleh bandar (tengkulak) yang telah membiayai kegiatan produksi para petani. Untuk itu, penyediaan kebutuhan modal sebagaimana ditawarkan Program Tani Kita yang menawarkan berbagai pinjaman modal yang dapat disesuaikan dengan keperluan petani dengan dukungan bunga, fasilitas, dan berbagai kemudahan yang lebih kompetitif sangat strategis untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan posisi tawar para petani.

Sekalipun sektor pertanian masih menjadi sumber penghasilan utama bagi 43 persen warga Desa Madura. Eksistensi sektor pertanian di desa ini sangat dipengaruhi keberadaan Sungai Citanduy sebagai sumber air irigasi bagi kegiatan pertanian, khususnya padi. Padahal sumber air irigasinya selalu mengalami kekeringan pada saat musim kemarau, sehingga budidaya tanaman padi tidak dapat dilakukan sepanjang tahun. Hal ini disiasati petani setempat dengan beralih menanam palawija maupun tanaman hortikultura yang tidak membutuhkan banyak air

seperti, jagung, kedelai, kacang-kacangan, melon, semangka, pepaya, cabai, terong, kangkung, dan ketimun.

Kendala air yang terjadi di Desa Madura pada musim kemarau perlu menjadi perhatian, sehingga program pembuatan embung dapat menjadi pilihan alternatif mengatasi hal tersebut. Potensi lahan pertanian di Desa Madura, khususnya tanaman padi, menjadikan pengembangan sarana dan prasarana irigasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi kebutuhan mendesak. Keadaan ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan di Desa Madura yang umumnya memiliki pH tanah 5–7, dengan drainase terbatas dan kesuburan tanah pada level rendah hingga sedang. Luas lahan sawah di Desa Madura diperkirakan seluas 318 ha, terdiri atas 225 ha lahan sawah beririgasi dan 93 ha lahan sawah tadah hujan (Sularno dan Supriyanto, 2012). Lahan sawah beririgasi seluas 225 ha tersebut, dikelola oleh 120 kepala keluarga (KK) tani (belum termasuk buruh tani yang dipekerjakan), sehingga mampu menghasilkan padi sebanyak 2.525 ton/tahun/gabah kering giling.

Semangka adalah tanaman yang umum dijadikan selingan setelah menanam padi. Biasanya sawah yang telah dipanen, dimanfaatkan untuk ditanami semangka. Berdasarkan analisis teknis usaha budidaya semangka, hasil yang diperoleh petani lebih besar daripada tanaman padi. Satu hektar lahan bisa memproduksi 25–30 ton buah semangka. Selain itu, menanam melon juga merupakan kegiatan usaha selingan setelah menanam padi. Selain memanfaatkan unsur hara bekas pemupukan padi, juga untuk menghindari serangan hama. Umumnya penanaman melon dilakukan di atas bedengan tanah agar batang tidak tergenang air. Namun demikian tanah tempat tumbuh tanaman melon tidak boleh kering terlalu lama, sehingga sewaktu-waktu harus diairi. Biasanya petani mempersiapkan pompa air saat menanam melon ketika musim kemarau. Untuk kondisi lahan seperti ini bisa diintegrasikan dengan introduksi melon golden SH1 hibrida dari Mekarsari.

Sementara potensi lahan kering di Desa Madura adalah seluas 1.002 ha dan 820 ha di antaranya telah digunakan untuk usaha tani. Umumnya lahan kering yang telah dimanfaatkan, sebagian besar digunakan untuk budidaya tanaman ketela pohon sepanjang tahun, dengan rata-rata hasil produksi ketela pohon mencapai 22 ton/ha. Hasil produksi tanaman ketela pohon yang mampu dipertahankan secara kontinu sepanjang

tahun, setidaknya telah menjadikan komoditas ini dapat diandalkan menjadi pengganti sebagian bahan pangan pokok dari beras. Rendahnya produksi jagung disebabkan petani lebih memilih singkong. Padahal saat musim hujan, tanah tegalan (tanah kering) yang tidak biasa diairi akan lebih menguntungkan ditanam jagung karena umur panen jagung hanya 2 bulan sementara singkong mencapai 8–10 bulan.

Sektor lain yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah kegiatan usaha peternakan yang saat ini telah ditekuni secara tradisional oleh masyarakat setempat. Diantaranya kegiatan usaha ternak ayam broiler yang telah mencapai 32.881 ekor; budidaya kambing yang mencapai 1.234 ekor; budidaya bebek sebanyak 400 ekor, budidaya domba sebanyak 231 ekor, kerbau dan sapi yang masing-masing berjumlah 18 ekor dan 8 ekor (Sularno dan Supriyanto, 2012). Kegiatan usaha pertanian yang telah diupayakan masyarakat Desa Madura, tentu saja masih membutuhkan intervensi modal serta dukungan tenaga penyuluh yang andal, yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan produksi pertanian dan peternakan, khususnya peningkatan kapasitas teknis dan manajemen usaha pemanfaatan lahan sempit secara efisien.

Hal lain yang perlu diperhatikan di Desa Madura adalah keberadaan kawasan vegetasi khas yang terdapat di Desa Madura, berupa rawa-rawa abadi, yaitu “Rawa Keris” yang tak pernah kering dan saat ini dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar dengan sistem jaring apung. Selain keberadaan kawasan hutan jati milik Perum Perhutani yang membelah desa dan kawasan perkebunan karet PTPN IX yang berada di barat laut desa, sehingga membuat wilayah desa ini menjadi cukup sejuk. Lahan-lahan milik negara tersebut, memiliki potensi untuk dikelola secara kolaboratif bersama pihak Inhutani (Kementerian Kehutanan) dan PTPN IX, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, melalui program hutan desa ataupun hutan kemasyarakatan dengan sistem tumpang sari, reboisasi tanaman hutan, dan seterusnya. Sejumlah komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, cengkeh, karet, dan kakao yang telah diusahakan masyarakat tampaknya juga dapat dibudidayakan secara tumpang sari.

c. Sarana Usaha dan Gerobak Rakyat

Bantuan Sarana Usaha dan warung Gerobak Rakyat yang telah dikembangkan sejak tahun 2017 dan sampai dengan akhir tahun 2018

telah mencapai 150 unit, tampaknya perlu lebih banyak disalurkan pada keluarga miskin di lokasi DCML dengan melakukan sejumlah evaluasi. Perlu mekanisme yang lebih transparan, dengan skala prioritas berbasis komunitas dukuh atau RW dalam menetapkan penerima bantuan sarana usaha dan warung gerobak rakyat bagi keluarga Pra KS dan KS1 di Desa Bantaragung yang berjumlah 377 KK, di Desa Cilongok sebanyak 2.007 KK, dan di Desa Madura sebanyak 1.463 KK. Jumlah penerima manfaat yang sangat besar tersebut, tentu harus diklasifikasi sedemikian rupa, sehingga tepat sasaran dan fungsional dalam meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga tidak mampu. Mengingat tidak semua keluarga memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas dalam mengelola keuangan dan etos kewirausahaan yang memadai tanpa diiringi proses advokasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

d. Rumah Kemas

Pada tahun 2018 telah berhasil diinisiasi pembangunan “Rumah Kemas” bagi para pengusaha kecil di 3 DCML yaitu; Desa Samiran, Desa Pesantunan, dan Desa Argomulyo, sebagai upaya peningkatan kualitas produk agar lebih laku dijual dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Meskipun rumah kemas memiliki potensi untuk meningkatkan nilai tambah dari sejumlah produk pertanian petani setempat yang sangat besar pada musim panen raya, sehingga menyebabkan harganya menjadi anjlok karena tidak terserap semua ke pasar, sebagaimana produk budidaya hortikultura, seperti; wortel, kubis, dan bawang merah. Namun demikian, kegagalan rumah kemas di Desa Samiran yang tidak bisa berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga terpaksa dialihkan ke Desa Cilongok, tampaknya perlu menjadi bahan evaluasi untuk keberlanjutan program tersebut. Dengan potensi olahan gula kelapa yang sangat besar, seharusnya rumah kemas yang mampu mengemas gula merah batok/batangan, gula merah semut, dan gula merah kristal sangat bermanfaat dan fungsional dalam meningkatkan nilai tambah olahan gula kelapa yang ditekuni 342 pengrajin di Desa Cilongok.

Sedangkan Desa Bantaragung yang memiliki potensi besar dalam memproduksi bawang merah segar, dengan kapasitas 212,63 ton/panen dan pengolahan melinjo, dengan kapasitas melinjo olahan 20 ton/ha/tahun, sangat layak untuk mendapatkan dukungan rumah

kemas dalam meningkatkan nilai tambah kedua produk tersebut. Hal ini tentu akan sangat fungsional dalam ikut mendukung pengembangan potensi pariwisata Desa Bantaragung yang memiliki sumber daya alam menakjubkan dengan beragam oleh-oleh khas. Sekaligus meningkatkan nilai tambah produksi bawang merah segar yang belum sepenuhnya mampu diolah menjadi bawang merah goreng ataupun bawang merah pasta oleh 102 petani setempat dan 248 pengerajin yang telah mengolah emping melinjo. Sementara bagi Desa Madura yang memiliki potensi besar dalam memproduksi beras premium yang mencapai 2.365 ton/ha/tahun dan singkong yang mencapai 360 ton/ha/tahun, serta pepaya, juga sangat potensial untuk ditingkatkan nilai tambahnya dengan melakukan pengemasan yang layak dan menarik atas produk beras dan olahan singkong (tapioka, keripik singkong, tape, dan seterusnya), serta olahan pepaya (manisan atau keripik pepaya) yang belum banyak dikembangkan masyarakat setempat.

e. Budidaya Pertanian

Pengembangan program Budidaya Pertanian diupayakan dengan membangun demplot terintegrasi dan layak secara ekonomi untuk kegiatan percontohan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan di DCM. Setidaknya sampai dengan pendataan dilakukan telah dibangun sejumlah demplot di Desa Argomulyo dengan kegiatan peternakan sapi komunal dan tanaman cabe, Desa Pesantunan dengan bawang merah, terong Jepang, dan cabai merah, serta Desa Krambilsawit dengan budidaya maggot BSF.

Sementara pengembangan demplot pertanian Desa Madura yang mengalokasikan lahan seluas 1,1 ha untuk membudidayakan melon HMS meskipun keberlanjutannya belum sepenuhnya berhasil. Kedelapan orang petani yang mendapatkan pendampingan secara intensif dari PT Mekarsari, telah berhasil memanen produknya untuk kemudian dijual kepada PT Mekarsari. Sekalipun mekanisme pemasaran dengan model seperti ini sangat membantu petani, namun mekanisme tersebut dapat berdampak buruk jika tidak dapat dilakukan secara konsisten. Oleh karenanya, perlu upaya yang lebih strategis untuk memasarkan Melon HMS yang memiliki harga relatif tinggi dan sulit dijangkau pasar lokal.

Sedangkan terobosan demplot pertanian Desa Cilongok yang berupaya untuk mengembangkan budidaya vanili, melon, semangka,

pakcoy, pembibitan lele, dan pembesaran lele, serta budidaya Kambing Saanen secara terintegrasi dalam satu area patut diapresiasi, sekaligus perlu diperhatikan keberlanjutannya. Mengingat berbagai komoditi yang diusahakan oleh sembilan orang petani anggota Koperasi DCML Desa Cilongok tersebut, merupakan produk-produk yang membutuhkan proses adaptasi dalam pembudidayaannya. Selain pentingnya mengembangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan petani dalam demplot, selain perlunya memastikan pasar yang akan menampung produk-produk yang relatif baru dibudidayakan tersebut. Jika dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan, model kegiatan usaha seperti ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani (khususnya para penderes kelapa sebagai komoditas tradisional utama Desa Cilongok), terhadap tengkulak.

Sementara demplot Desa Bantaragung yang belum terbangun, tampaknya dapat diorientasikan untuk pengembangan budidaya bawang merah sebagai komoditas utama desa dengan lebih intensif memanfaatkan teknologi tepat guna. Pemanfaatan lahan desa yang telah mendapatkan isyarat positif dari pimpinan desa setempat, dapat ditindaklanjuti dengan membangun komitmen pengembangan demplot pertanian budidaya bawang merah secara partisipatif berikutan industri olahan padat karya di level rumah tangga.

f. Industri Pengolahan Hasil Pertanian

Kegiatan industri pengolahan hasil pertanian yang telah diintodisir pembangunannya di Desa Cilongok, dapat menjadi contoh yang baik bagi desa-desa DCML yang lain. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di Desa Cilongok didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif atas komoditas unggulan utama desa, yaitu singkong dan gula kelapa. Pabrik tapioka kemudian dirancang untuk dibangun di Desa Cilongok dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi singkong petani dengan mengolahnya menjadi tepung tapioka berkapasitas 1 ton/hari. Adapun produksi singkong petani di Cilongok ditaksir mencapai 238,33 kg perhari dengan pembudidaya sebanyak 30 orang, kekurangan bahan baku akan dipasok oleh para petani dari desa-desa sekitar, sehingga tidak hanya menjamin stabilitas harga dan meningkatkan daya serap produksi singkong petani di Desa Cilongok. Namun juga akan memberdayakan petani yang membudidayakan

singkong dari desa-desa sekitar untuk dapat dibeli dengan harga layak oleh Koperasi DCML Desa Cilongok.

Sementara pengembangan dapur komunal gula kelapa, diharapkan dapat memberikan alternatif pilihan bagi para penderes kelapa di Desa Cilongok yang jumlahnya mencapai 342 orang dengan kapasitas produksi nira 720 l perhari, untuk mendapatkan harga jual nira kelapa yang lebih baik. Selain dalam jangka panjang, diharapkan mengurangi ketergantungan para penderes terhadap tengkulak ataupun pengrajin gula merah yang selama ini menjalin hubungan produksi dengan pola *patron-client* yang cenderung mengikat dan kurang fair.

Namun demikian, sejumlah catatan perlu dikemukakan di sini, bahwa ketersediaan bahan baku singkong untuk menutupi kebutuhan pabrik tapioka tampaknya masih belum mampu mencukupi kapasitas produksi. Guna menyasiasi hal tersebut, dibutuhkan upaya-upaya sistematis dalam memberdayakan para petani yang menjadi anggota koperasi DCML untuk ikut berpartisipasi membudidayakan ketela pohon dengan bibit unggul di lahan-lahan pekarangan ataupun lahan-lahan tidak produktif. Penyediaan bibit unggul dan pengembangan pupuk organik di tingkat komunitas menjadi agenda penting dalam rangka memastikan hasil produksi yang lebih optimal, sehingga lebih banyak petani yang berminat membudidayakan ketela pohon sebagai kegiatan ekonomi sampingan yang kemanfaatannya benar-benar dirasakan masyarakat. Yang pada gilirannya dapat menjamin pasokan singkong bagi pabrik tapioka.

Sedangkan dapur komunal gula kelapa yang dirancang dengan kapasitas 1,2 ton gula cetak per hari, tampaknya juga menghadapi kendala pasokan bahan baku nira kelapa. Orientasi keberadaan dapur komunal, yang diharapkan dapat menjadi wadah alternatif bagi penderes untuk menyetorkan niranya ke dapur komunal tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Harapan untuk membuka pekerjaan sampingan bagi para penderes yang berjumlah 342 orang dalam kegiatan usaha lainnya di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi mereka secara berkelompok tampaknya belum berjalan efektif. Hal ini tidak terlepas dari “budaya kelapa” di kalangan penderes yang begitu melekat dalam kehidupan mereka.

Saat ini, petani dan penderes di Desa Cilongok telah terhubung dengan budaya pasar yang sudah berlangsung lintas generasi, antara petani, penderes, pengolah gula merah, dengan penampung gula merah (tengkulak ataupun pedagang besar). Petani dan penderes terikat oleh relasi tersebut, sehingga mereka “terjebak” dalam relasi produksi yang kompleks dan berbalut hubungan emosional dalam mengembangkan produk turunan kelapa. Sementara pengembangan industri skala rumah tangga yang telah menghasilkan beragam produk dengan jangkauan dan pilihan pasar yang lebih banyak perlu dijajaki untuk memperoleh alternatif harga yang lebih kompetitif. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan petani pada pihak ketiga (yang kerap kali mendapatkan keuntungan lebih besar) menjadikan saling ketergantungan antar produsen dan konsumen. Sementara informasi tentang jaringan pasar dan kerja sama dalam kegiatan perdagangan dapat diupayakan oleh koperasi dalam rangka mendapatkan harga kebutuhan pokok yang lebih murah sekaligus fungsional dalam memasarkan produk-produk lokal dengan harga lebih baik dan jangkauan yang lebih luas.

g. Desa Kita

Program kerja Desa Kita difokuskan dalam rangka memberikan stimulus kesejahteraan Pra KS dan KS1 melalui pengembangan kegiatan ekonomi unggulan di perdesaan yang dikelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan, akan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa dengan sejumlah isu strategis berikut.

- 1) Kerajinan tangan; Potensi bambu alam yang melimpah di Desa Bantaragung dapat digunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan yang cukup potensial. Sejumlah ibu rumah tangga di Desa Bantaragung yang telah terbiasa menjadi buruh upahan di sentra-sentra kerajinan rotan (milik pengusaha asal Cirebon) di Desa Bantaragung dapat dikoordinir oleh Koperasi Bantaragung sebagai tenaga terampil dalam rangka pengembangan kerajinan tangan berbahan baku bambu. Hasil produk kerajinan tersebut, sangat prospektif untuk dipasarkan sebagai souvenir dalam kegiatan pariwisata yang memiliki potensi besar di desa ini. Sementara banyaknya tegakan pohon kelapa di Desa Cilongok cukup potensial dimanfaatkan Koperasi Utama Sejahtera Mandiri

Cilongok untuk mengembangkan berbagai produk kerajinan tangan. Mengingat budidaya kelapa di desa ini sebagian besarnya dideres untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pengolahan gula merah, sehingga tidak menghasilkan butiran kelapa segar ataupun tua, maka kerajinan tangan yang dapat kembangkan adalah yang menggunakan bahan baku mulai dari daun, lidi, pelepah hingga pohon dan bonggol akar kelapa. Sedangkan kerajinan tangan yang dapat dikembangkan oleh KUD MLS Madura adalah kerajinan berbahan baku kayu sengon dan jenis-jenis kayu lokal lainnya yang banyak dibudidayakan di Desa Madura untuk kebutuhan industri.

- 2) Industri olahan; Koperasi Bantaragung dapat menginisiasi dilakukannya pengembangan produk olahan emping melinjo skala rumah tangga yang telah berkembang di Desa Bantaragung, sehingga lebih terintegrasi. Selain melakukan peningkatan nilai tambah produk bawang merah segar yang sangat potensial di desa ini untuk diolah menjadi bawang merah goreng atau pasta bawang merah, sebagai oleh-oleh panganan lokal bagi wisatawan yang berkunjung di desa ini. Sementara Koperasi Utama Sejahtera Mandiri Cilongok memiliki kesempatan besar untuk mengoordinir para pengerajin olahan gula merah yang menjadi produk unggulan Desa Cilongok. Meskipun hal ini tidak mudah untuk dilakukan mengingat para tengkulak gula merah telah “mencengkeram secara kultural” kehidupan para pengerajin gula merah untuk kurun waktu yang sangat panjang. Oleh karenanya berbagai inovasi pengolahan lebih lanjut gula merah yang dihasilkan Desa Cilongok dalam meningkatkan nilai tambahnya menjadi strategis untuk dilakukan. Kerajinan tangan lain yang potensial dikembangkan adalah pengolahan panganan lokal berbahan baku singkong. Budidaya kelapa dan singkong yang begitu lekat dengan budaya masyarakat Desa Cilongok (Banyumasan), telah banyak menciptakan panganan lokal berbahan baku dari olahan kedua jenis tanaman tersebut, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan. Koperasi Utama Sejahtera Mandiri Cilongok dapat berperan strategis dalam mengoordinasi ibu rumah tangga dan kaum perempuan yang menjadi anggotanya untuk memproduksi panganan lokal berbahan baku gula merah dan singkong sebagai oleh-oleh khas banyumasan, seperti gethuk goreng, jenang jaket,

nopia, lanting, jalabia, intil, combro, cenil, lupis, dan seterusnya. Demikian halnya KUD MLS Madura juga dapat mengembangkan olahan panganan berbahan baku singkong dan pepaya yang banyak dibudidayakan oleh petani setempat. Berbagai olahan pangan lokal tampaknya sangat potensial untuk dikembangkan dan dipasarkan pada konsumen yang melintasi jalur utama selatan Pulau Jawa.

- 3) Kebudayaan dan produk unggulan desa; sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya ketiga desa dalam studi ini memiliki karakteristik kebudayaan yang sangat khas dan menarik. Desa Bantaragung merupakan desa dengan tradisi budaya Sunda yang kuat namun juga mendapatkan pengaruh politik kekuasaan yang sangat besar dari tradisi Cirebon-Jawa, sehingga menghasilkan karakter kebudayaan yang unik. Dengan potensi pertanian sangat besar, dilengkapi *landscape* pegunungan yang sangat indah dengan sejumlah destinasi menarik, menjadikan Desa Bantaragung memiliki daya pikat pariwisata paripurna jika mampu dipadukan dengan berbagai atraksi budaya unik yang dimilikinya. Sekalipun Desa Cilongok tidak memiliki keragaman destinasi sebanyak Desa Bantaragung, namun desa yang terletak di jalur utama yang menghubungkan kota Purwokerto dengan berbagai destinasi wisata di wilayah selatan karesidenan Banyumas ini dapat menjadi area transit yang strategis bagi wisatawan. Wilayah yang menjadi ruang pertemuan antara budaya Jawa dan Sunda ini juga memiliki karakteristik kebudayaan khas yang merepresentasikan budaya Jawa dengan balutan budaya Sunda yang unik. Sementara ruang pertemuan budaya Jawa dan budaya Sunda yang lebih tegas dapat ditemui di Desa Madura. Di desa ini kita dapat menjumpai budaya Jawa dan budaya Sunda dipraktikkan pada waktu yang bersamaan, di mana berbagai tradisi dari kedua kebudayaan saling berakulturasi. Proses penyatuan kebudayaan tersebut telah berlangsung sangat panjang, di mana masing-masing budaya mempertahankan jati dirinya, dengan mewujudkan kemajemukan (diversitas kebudayaan masing-masing). Jika orang Jawa di Desa Madura umumnya berprofesi di sektor pertanian, maka orang Sunda lebih banyak berprofesi di sektor nonpertanian.

Berbagai isu strategis yang telah disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa tersebut, dapat diakselerasi guna mempercepat

pengembangan kegiatan ekonomi unggulan di setiap desa dengan mengacu pada sejumlah program kerja yang telah dikembangkan di desa-desa DCML lainnya, sebagaimana:

1) **Homestay**

Sebanyak 45 homestay yang telah dibangun sejak 2017 di Desa Samiran, Argomulyo, dan Tamanmartani dapat menjadi prototipe pengembangan homestay untuk mendukung kegiatan pariwisata di Desa Bantaragung yang saat ini semakin banyak dikunjungi wisatawan. Keberadaan Desa Cilongok dan Desa Madura yang berada di jalur utama perlintasan moda transportasi darat antar kota juga perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan menjadi area transit (*rest area*) terpadu oleh koperasi bagi wisatawan/traveler, mulai dari tempat makan/restoran, outlet souvenir, mini market, tempat pengisian BBM, toilet dan sarana ibadah, hingga homestay/hotel transit.

2) **Taman Bunga dan Kuliner**

Taman bunga yang telah dirintis pengembangannya di Ciboer Pass Desa Bantaragung perlu ditingkatkan performanya, sehingga menjadi spot swafoto yang lebih menarik. Letak dan suasana Ciboer Pass yang sangat memanjakan mata dapat dikembangkan menjadi area kuliner tradisional yang berpadu dengan nuansa modern berkelas, sehingga mampu mendongkrak reputasinya. Pengembangan taman bunga serupa tampaknya juga perlu diinisiasi untuk dikembangkan pada destinasi wisata lain di Desa Bantaragung, seperti Curug Cipeuteuy, Bumi Perkemahan Awilega, Batu Asahan, Bukit Batu Semar, dan Puncak Pasir Cariu. Pengembangan taman bunga sekaligus area kuliner di Desa Cilongok dan Desa Madura dapat dilakukan oleh koperasi di pinggir jalan utama yang melintasi kedua desa. Pengembangannya dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan area transit (*rest area*) terpadu di kedua desa.

C. Program Dukungan Aksi Kolaboratif

Program dukungan aksi kolaborasi merupakan bantuan yang sifatnya berkelanjutan dalam bentuk dukungan inisiasi dan fasilitasi program kegiatan yang berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap

agenda penguatan ekonomi masyarakat (baik yang akan dijalankan maupun yang telah berjalan). Alokasi sumber dayanya bersumber dari pihak-pihak terkait secara swadaya, dapat berupa pinjaman lunak berjangka panjang, hibah, bantuan tanpa ikatan lainnya, dan dari berbagai kegiatan swakelola prakarsa pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pemerintah desa, BUMN/ BUMD/BUMDES, hingga swasta, yayasan/LSM, dan perguruan tinggi, serta berbagai komponen masyarakat yang memiliki komitmen sama dalam mendukung “kemandirian desa” secara partisipatif dan kolaboratif (melibatkan berbagai *stakeholders*) dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia di desa. Program dukungan kolaborasi yang sangat dinamis ini harus berbasis pada kebutuhan desa dan diperuntukkan bagi terbangunnya penguatan jejaring “desa membangun”.

1. Program Penguatan Data Desa

Pentingnya data desa dalam proses perencanaan pembangunan desa membuat berbagai pihak yang berkepentingan berupaya untuk menyediakan data terkait karakteristik spesifik sebuah desa. Data desa yang dikumpulkan secara akurat, terukur dan kompatibel akan sangat fungsional untuk digunakan dalam proses analisis dan penyusunan program dalam merencanakan pembangunan desa yang efektif dan tepat sasaran. Untuk itu penguatan data desa presisi dalam pembangunan desa menjadi prasyarat kunci dari sebuah perencanaan program yang akuntabel, transparan, dan responsif, sehingga dapat diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Penguatan data desa dapat melingkupi Pendataan DCML dan Pemetaan Desa Presisi serta Penyusunan Masterplan Pertanian Terpadu Berbasis Kemandirian Pangan Lokal.

Program kerja penguatan data desa yang dimulai dari kegiatan pendataan dan pemetaan, dapat diikuti dengan pengembangan data neraca pangan desa untuk membentuk bigdata spasial, kemudian dibuat dalam lingkup manajemen desa dengan memperhitungkan kearifan dan keunggulan lokal. Hingga selanjutnya dapat dirancang dan dibangun sistem integral *smart farming* untuk mencapai Desa Cerdas Mandiri Lestari dengan menggunakan lembaga koperasi sebagai penggeraknya.

a. Pendataan DCML

Pendataan DCML memperhitungkan jumlah penduduk dan potensi yang dimiliki desa sasaran secara periodik. Data yang dihimpun, tidak hanya meliputi jumlah orang yang akan menjadi target sasaran program kegiatan DCML, tetapi juga fakta mengenai jenis kelamin, usia, bahasa, dan hal-hal lain yang dianggap perlu. Data dan fakta yang terkumpul diharapkan menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan perencanaan dan indikator program kegiatan yang diukur secara presisi. Sekaligus menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk (khususnya keluarga Pra KS dan KS1) di setiap desa sasaran menuju satu data kependudukan DCML.

Pendataan ini dilaksanakan untuk mendapatkan jumlah penduduk sesuai dengan nama dan domisili mereka tinggal. Hal ini diharapkan akan membantu pemerintah desa dan Koperasi DCML dalam menyusun berbagai program kegiatan sosial dan ekonomi yang layak dan tepat sasaran. Sebagaimana pendataan yang dilakukan pada 2019 di Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura ini dilakukan secara sensus dengan pengayaan melalui komparasi data BPS dan data-data sekunder yang relevan lainnya oleh tim LPPM Universitas Trilogi. Adapun hasil pendataan secara detail dari setiap desa telah disajikan dalam Bab III, Bab IV, dan Bab V dalam buku laporan ini.

b. Pemetaan Desa Presisi Secara Terintegrasi

Pemetaan desa presisi secara terintegrasi yang dilakukan akan didahului dengan kegiatan pengumpulan data desa presisi tinggi melalui pendekatan digital berbasis partisipasi warga desa. Pendekatan *Drone Participatory Mapping* (DPM) yang akan dilakukan oleh Karang Taruna desa yang telah dilatih oleh Universitas Trilogi dengan didampingi tenaga-tenaga profesional dari Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) IPB Bogor ini diharapkan menjadi arena pembelajaran secara partisipatif bagi para pemuda-pemudi desa. Agenda kegiatan pemetaan desa presisi di Desa Bantaragung, Desa Cilongok dan Desa Madura ke depannya, diharapkan dapat dilakukan oleh Karang Taruna di ketiga desa dengan pendampingan secara mandiri oleh Karang Taruna Desa Bantaragung yang telah mendapatkan pembekalan sebagai pelaksana *pilot project* di awal kegiatan pemetaan desa presisi.

c. Penyusunan *Master Plan* Pertanian Terpadu

Kegiatan penyusunan *Master Plan* perencanaan pertanian terpadu dilakukan setelah hasil Pendataan DCML dan Pemetaan Desa Presisi telah dirampungkan sebagai alas bagi penyusunan *master plan* pembangunan di setiap desa. Dokumen *master plan* desa berguna untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan. Sehingga lahan-lahan yang ada di desa dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. *Master plan* desa akan menjadi benteng pertahanan ketika terjadi permasalahan terkait lahan, seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun atau hal-hal yang perlu dipertahankan untuk menghindari terjadinya pergeseran tatanan dan struktur pertanian desa secara drastis. Mengingat desa memiliki peran vital dalam menjaga ketersediaan bahan pangan lokal, sumber air bersih serta suplai udara bersih.

Agenda utama pengembangan *master plan* desa diorientasikan untuk menyusun perencanaan dan prioritas program, serta menghimpun pengetahuan mengenai langkah dalam mendesain kawasan desa. Mengelola potensi sumber daya desa yang diwujudkan dalam pembangunan desa secara terpadu serta optimalisasi pemanfaatan lahan untuk kepentingan bersama, demi tercapainya ketahanan pangan, dalam pemenuhan kebutuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menekankan keberlanjutan ekologi desa dan pengurangan dampak negatif dari adanya pembangunan desa yang menjadi bagian penting dari konsep substansial *master plan* desa, sebagai penentu arah pengembangan desa secara berkelanjutan. Produknya dapat berupa profil desa, dokumen tata desa, *road map*, *branding* produk unggulan desa, regulasi dan sistem informasi desa melalui e-desa, melalui pelibatan warga desa secara swadaya. Termasuk data-data awal terkait kemandirian pangan (surplus pangan) serta neraca pangan (tingkat defisit karbohidrat, protein dan lemak) di setiap desa.

Dalam kaitan tersebut proses inisiasi pelibatan perwakilan warga secara partisipatif dapat mulai dilakukan melalui Musyawarah Desa (MUSDES). Untuk itu, proses fasilitasi pemerintah desa yang bermitra dengan Koperasi DCML dalam proses pengarusutamaan program Kemandirian Pangan melalui Musrenbangdes yang telah dirintis di Desa Cilongok dan Desa Madura perlu dikawal lebih lanjut, sementara di Desa Bantaragung perlu diinisiasi sedari awal.

Proses tersebut harus diiringi dengan pilihan strategi yang tepat, sesuai dengan potensi produk unggulan desa yang akan menjadi spesifikasi program kemandirian pangan yang akan diwujudkan (dapat berupa produk unggulan *existing* berbasis pertanian ataupun produk-produk pertanian yang potensial untuk dikembangkan sesuai karakteristik desa), sebagai proses antisipatif terjadinya krisis pangan di DCML. Melalui proses kolaboratif seperti itu, program DCML yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dapat menjadi program bersama oleh pemerintah desa dan Koperasi DCML, khususnya dalam bidang pertanian (termasuk peternakan, perikanan, serta perkebunan) dan perdagangan.

Kegiatan penyusunan *Master Plan* pembangunan dan perencanaan pertanian terpadu di Desa Bantaragung yang akan dilakukan oleh Universitas Trilogi dengan pendampingan dari Pusat Studi Arsitektur Lanskap (PSAL) Fakultas Pertanian IPB Bogor, diharapkan menghasilkan dokumen *Master Plan* Desa Bantaragung yang siap untuk dioperasionalkan secara praktis oleh *stakeholders* terkait.

2. Inisiasi Program Kemandirian Pangan DCML

Program kemandirian pangan desa perlu diinisiasi menjadi skala prioritas pengembangan pembangunan desa. Program aksi ini diorientasikan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi buruk melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal perdesaan. Untuk itu perlu diupayakan 1) peningkatan ketersediaan pangan desa dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan; 2) peningkatan distribusi dan akses pangan seluruh warga desa; 3) peningkatan mutu dan keamanan pangan desa; 4) peningkatan kualitas konsumsi pangan warga desa; dan (5) peningkatan kualitas penanganan masalah pangan. Adapun skala prioritas utama yang harus dilakukan adalah memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat lokal terlebih dahulu, sehingga tidak kelaparan, dapat makan secara bergizi, selanjutnya baru melakukan penguatan kelembagaan untuk memberikan *multiplier effect* kepada desa lainnya.

Untuk memulainya, YDSM melalui koperasi DCML perlu melakukan proses fasilitasi pada pemerintah desa DCML untuk kegiatan Kemandirian Pangan melalui Musrenbangdes. Kegiatan ini

dapat mulai diinisiasi melalui penyelenggaraan PraMusdes di tiap desa. Strategi sesuai pola kemandirian pangan spesifik produk unggulan desa, seperti produk ikan, sayur (hortikultura) dan pangan unggulan desa (yang layak dikembangkan), dalam rangka mengatasi krisis pangan di DCML perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu Program DCML yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai hasil Musrenbang yang dilaksanakan oleh Koperasi, dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan harus menjadi *platform* program dimaksud. Hasil musyawarah desa terkait program kemandirian pangan tersebut, perlu memperhatikan data-data terkait surplus pangan, defisit karbohidrat, defisit protein, dan defisit lemak pada tiap-tiap DCML.

Terkait pencapaian kemandirian pangan di tiap DCML setidaknya membutuhkan beberapa tahapan strategis, di antaranya tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan akhirnya tahap kemandirian. Di mana program yang dilaksanakan dapat berlangsung secara berkelanjutan, baik berkelanjutan dalam aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Yang pada gilirannya mampu memberikan *multiplier effect* bagi pembangunan desa dalam memfasilitasi kesejahteraan masyarakatnya. Keberlanjutan dari aspek lingkungannya berkaitan dengan bagaimana daya dukung lingkungan kawasan budidaya pertanian dapat terus menghasilkan kemandirian pangan desa. Bagaimana masyarakat setempat dapat mempertahankan kawasan lumbung pangannya? Juga bagaimana dalam kegiatan produksi pangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan meminimalisir buangan limbah hasil produksi (*zero waste*)?

Sistem ketahanan pangan yang terbangun tidak hanya diorientasikan pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada peningkatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Bagaimana masyarakat desa dapat terus berkembang tidak hanya mampu untuk menghasilkan produk bahan baku pangan saja, melainkan juga dapat berdaya saing melalui pemberdayaan dan perubahan pola pikir, hingga dapat mengurangi kemiskinan dengan memberdayakan rumah tangga miskin. Berdampak positif terhadap kepercayaan diri, penguatan aspek gender, dan kewirausahaan yang selanjutnya berkontribusi positif terhadap pemanfaatan kapital (bantuan pemodalangan/tabungan/

pendapatan) dalam adopsi teknologi terkait dengan pengembangan usaha produktif keluarga.

Sementara pada aspek kelembagaan, diharapkan terjadi aktivitas pemberdayaan masyarakat dan kelompok melalui pelatihan, pendampingan dan peningkatan akses dalam berkerja sama. Selain kemampuan mengelola berbagai program kemandirian pangan desa, baik secara administratif maupun teknis, serta peran mengelola sumber keuangan secara transparan dan akuntabel.

3. Pelatihan dan Sertifikasi Anggota Kelompok Usaha

Tantangan di era globalisasi dan pasar yang kompetitif menuntut daya tahan dan daya saing sebuah kelompok, komunitas, dan organisasi masyarakat hingga di level desa dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia sebagai “*intellectual asset*”. Hal ini perlu mendapat perhatian sebagai salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas dan keunggulan kompetitif kegiatan usaha apa pun dan di manapun. Pengembangan SDM desa merupakan tuntutan bagi setiap organisasi kemasyarakatan untuk menyelaraskan program *training* dengan strategi organisasi, melalui pengembangan SDM yang terpadu dan sinergik di antara aspek pembelajaran (*learning*) dan aspek kinerja (*performance*).

Di dalam merealisasikan upaya peningkatan pembelajaran dan kinerja, diperlukan suatu standar kompetensi profesi dalam suatu organisasi, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembinaan profesi baik pendidikan, kesehatan, keuangan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Isu sertifikasi saat ini menjadi salah satu cara yang digunakan dalam membangun struktur karier profesional dan pengembangan kualitas atau mutu SDM.

Dengan telah ditetapkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012, maka pengembangan kompetensi SDM diorientasikan untuk dapat memberikan kepastian *link and match* antara dunia kerja dengan dunia industri, di mana kerangka kualifikasi akan memberikan pedoman penyetaraan proses pembelajaran dari dunia pendidikan, pelatihan dan pembelajaran di tempat kerja, sehingga mampu mengatasi hambatan atas lemahnya *employability* (kecakapan bekerja) di dunia

kerja. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui penerbitan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Program sertifikasi kompetensi merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia hingga ke pelosok desa, baik untuk skala domestik maupun internasional.

Kualitas pekerja di kawasan perdesaan yang masih cukup rendah, membutuhkan proses *upgrade* secara sistematis dan terstruktur, salah satunya melalui sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Lisensi diberikan melalui proses akreditasi oleh BNSP yang menyatakan bahwa LSP bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Oleh karenanya, menjadi penting untuk menggandeng LSP yang telah berlisensi untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja SDM DCML. Sebagaimana pelatihan yang telah banyak diinisiasi oleh YDSM kepada anggota kelompok usaha yang terlibat dalam kegiatan budidaya dan industri olahan yang dikembangkan di desa-desa Program DCML. Jenis-jenis pelatihan budidaya vanili, pembesaran dan pembibitan lele, budidaya kambing saanen (perah), serta pengolahan tapioka dan gula yang akan dilakukan di Desa Cilongok misalnya, akan menjadi lebih fungsional jika diintegrasikan ke dalam proses sertifikasi profesi bagi para anggota kelompok usaha dimaksud.

4. Fasilitasi Bantuan Pemerintah

Perlunya dikembangkan inisiasi-inisiasi kolaboratif dengan berbagai *stakeholders* terkait dalam memfasilitasi berbagai program bantuan sosial-ekonomi yang disalurkan pemerintah ataupun pihak ketiga. Sebagaimana pada 2019 Koperasi DCML dan sejumlah koperasi non-DCML yang difasilitasi oleh YDSM memperoleh hibah bantuan Presiden

Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk 25.522 pelaku usaha anggota koperasi. Di dalam realisasinya, koperasi mendapatkan BPUM sebanyak 2.790 pelaku usaha perorangan yang terdiri dari 14 Koperasi DCML yang mendapatkan BPUM sebanyak 1.433 pelaku usaha dan 10 Koperasi Non-DCML pada 1.357 pelaku usaha yang menjadi anggotanya.

Berkat hibah bantuan BPUM, setidaknya 294 pelaku usaha anggota Koperasi Bantaragung, 459 pelaku usaha anggota Koperasi Utama Sejahtera Mandiri Cilongok dan 625 pelaku usaha anggota KUD MLS Madura mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut. Untuk itu, inisiatif-inisiatif lokal Koperasi DCML sehingga mendorong terjadinya kolaborasi dengan *stakeholders* yang mampu memberi manfaat bagi sebesar-besarnya anggota perlu didorong guna mengakselerasi pengembangan jejaring, keswadayaan di tingkat masyarakat dan menerobos kebuntuan pengembangan organisasi.

Program pemerintah yang berupaya mendorong penyerapan skema kredit usaha rakyat (KUR), dengan bunga KUR yang cukup rendah, yaitu 9 persen setahun, juga patut dipertimbangkan untuk difasilitasi oleh YDSM melalui Koperasi DCML. Keberadaan nominal pinjaman maksimal sebesar Rp25 juta tanpa agunan, melalui kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, perlu dipelajari lebih lanjut untuk diintegrasikan dengan program DCML. Berbagai kesempatan yang ada, sepertinya dapat diakses oleh para petani, jika berbagai informasi mampu “dikelola” secara positif dalam kelompok-kelompok petani melalui media edukatif DCML, sehingga menghasilkan informasi yang tidak asimetris bagi para petani.

5. Program Kerja Sama Edukasi dan Penyebarluasan Informasi Desa

Sejalan dengan perkembangan teknologi, peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, serta menjalankan fungsi-fungsi pembangunan secara demokratis. Kegiatan komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui berbagai media berbasis teknologi informasi diyakini dapat menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Hal ini menjadi prasyarat

dalam pembangunan desa yang mengedepankan peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat.

Dalam upaya tersebut, peningkatan ketercukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi yang lancar dan informasi transparan – terpercaya yang mampu mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan desa yang emansipatif menjadi penting dikembangkan. Untuk itu ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas, serta dapat diakses secara mudah dan cepat merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar. Dalam program pengembangan informasi publik, tampaknya pemerintah desa perlu didorong sebagai eksekutor, untuk mampu berfungsi sebagai regulator yang memungkinkan *stakeholders* terkait memperoleh ruang publik yang memadai dalam penyebaran informasi, *sharing* pendanaan yang memadai untuk menjalankan fungsi penyebaran, pembelajaran, pemberdayaan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa melalui regulasi yang dibuatnya perlu didorong untuk menjaga ruang privat masyarakat, sehingga tidak dipergunakan untuk lalu lintas informasi yang tidak dikehendaki masyarakatnya.

Dalam kaitan tersebut, YDSM dapat berperan strategis dalam rangka pengembangan kerja sama lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait yang selama ini telah bersinergi, seperti; Gatra, Cendana News, dan Radio DFM untuk penyebarluasan informasi dan edukasi tentang kegiatan-kegiatan program yang telah dilaksanakan YDSM dalam Program DCML. Informasi tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut keberhasilan hingga kekurangan dan kelemahannya perlu dimuat secara berimbang dalam berbagai media, sebagai bahan pembelajaran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Selain perlunya menginisiasi pengembangan sebuah media edukatif yang dapat menyebarluaskan informasi dari desa-desa yang terlibat dalam Program DCML secara berkala.

Sementara untuk mengantisipasi adanya perbedaan masyarakat dalam berinformasi dan berkomunikasi, perlu diakukannya penyediaan, fasilitasi, dan pengembangan kemitraan dengan semua pihak agar berbagai sumber daya informasi dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Dengan mengembangkan layanan informasi yang memberikan perhatian terhadap upaya pemenuhan hak tahu publik,

khususnya masyarakat di kawasan pedesaan yang sulit memperoleh informasi, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan.

Arah pengembangan penyebarluasan informasi desa tersebut, harus diupayakan untuk mengurangi kesenjangan hasil pembangunan dan memberikan kesempatan dan akses yang sama antara masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu secara ekonomis, antara masyarakat berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan, maupun di antara seluruh komponen masyarakat pedesaan itu sendiri. Untuk itu perlu dilakukannya peningkatan layanan informasi publik, dengan memanfaatkan dan mengembangkan media massa dan media komunikasi sosial (media tradisional), sehingga dapat mengembangkan akses komunikasi publik melalui pemanfaatan kearifan lokal maupun sinergi antar *stakeholders* terkait dalam kerangka melayani informasi publik.

PENUTUP

Berangkat dari pengalaman pendataan yang telah dilakukan, perlu kiranya memberikan ruang yang lebih besar kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan terhadap paradigma “Desa Membangun” untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pendataan dalam pengembangan dan perencanaan DCML sedari awal program digagas. Dalam kaitan tersebut, hasil akhir dari laporan pendataan yang telah diselesaikan ini, memberikan pemahaman akan arti penting dilakukannya sinergi atas hal-hal positif di antara pemangku kepentingan dalam mengembangkan kawasan perdesaan secara partisipatif di tengah globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi beserta ekonomi yang bersifat multipolar dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, hasil pendataan yang telah dilakukan kiranya dapat semakin dilengkapi dan diperkaya dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti pemanfaatan *Drone Mapping* oleh masyarakat lokal (khususnya dari kalangan pemuda desa) yang dilatih secara gotong-royong (partisipatif) untuk menghasilkan peta desa presisi.

Meskipun kegiatan pendataan di Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura telah dilakukan, namun pembaruan data tetap diperlukan untuk *updating* dan dilakukannya kalibrasi data BPS melalui sensus yang dilakukan secara berkala oleh organisasi pemuda karang taruna desa. Proses *transfer of knowledge* dalam kegiatan tersebut

diharapkan dapat mendorong lahirnya *agent of change* yang mampu melakukan pendataan secara mandiri dan mampu mengolahnya menjadi pisau analitik dalam pembangunan desa secara partisipatif.

Melalui pendataan yang telah dilakukan ini, setidaknya Universitas Trilogi sebagaimana dikemukakan pada awal bab (Pendahuluan) setidaknya telah menunjukkan komitmennya, mengambil peran secara aktif dalam pengembangan Program DCML. Universitas Trilogi dengan segala kekurangan dan kelemahannya bersama-sama YDSM, telah berupaya bersinergi dengan pemerintah desa, masyarakat desa, industri (koperasi), serta kekuatan media sosial untuk ikut mengakselerasi pembangunan desa, melalui penguatan data desa, khususnya di Desa Bantaragung, Desa Cilongok, dan Desa Madura. Sebuah langkah awal yang penting artinya untuk mempersiapkan kebutuhan perencanaan “Desa Membangun”, proses awal strategis dalam pengembangan Big Data yang kami yakini sangat fungsional dalam mendukung program DCML pada era industri 4.0.



DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu TL. 2018. Identifikasi toponimi desa di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam perspektif keruangan. *Jantra*. 13(1): 11-23.
- Astuti W., Dumasari, Watemin. 2017. Tataniaga gula kelapa di Desa Sikapat Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Agritech*. 9(1): 53-78.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Hasil Pendataan Potensi Desa (PODES) Tahun 2018. [Internet]. [diunduh 2020 Juni 16]. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/12/10/1536/hasil-pendataan-potensi-desa--podes--2018.html>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018. [Internet]. [diunduh 2020 Juni 21]. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/publication/2019/04/09/169913d55c823a84bc52fdb3/data-dan-informasi-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2018.html>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Cilongok dalam Angka 2019. [Internet]. [diunduh 2020 Juni 16]. Tersedia pada: <https://banyumaskab.bps.go.id/publication/2019/09/26/8a8efa8b8daf731220ca5f7c/kecamatan-cilongok-dalam-angka-2019.html>.

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Sindangwangi dalam Angka 2019. [Internet]. [diunduh 2020 Juni 16]. Tersedia pada: <https://majalengkakab.bps.go.id/publication/2019/09/26/dd51f8e8e2a0794a9a4a01cf/kecamatan-sindangwangi-dalam-angka-2019.html>.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2019. Kecamatan Wanareja dalam Angka 2019. [Internet]. [diunduh 2020 Juni 16]. Tersedia pada: <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/5b049bebf4e821a055c926a/kecamatan-wanareja-dalam-angka-2019.html>.
- Ellyawati HC. 2015. Pengaruh bahasa jawa Cilacap dan bahasa sunda Brebes terhadap pencilan bahasa (*enklave*) di Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Culture*. 2(1): 71-85.
- Fakultas Ekonomi Masyarakat IPB. 2017. Potensi Wilayah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Bogor (ID): FEM Institut Pertanian Bogor.
- Hernando, De Soto. 2006. *The Mystery of Capital: Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat*. Jakarta: Qalam.
- Gatra.com. 2019. Entaskan Kemiskinan, Yayasan Damandiri Sasar Generasi Muda. [Internet]. [diunduh 2020 Juni 16]. Tersedia pada: <https://www.gatra.com/detail/news/450462/ekonomi/entaskan-kemiskinan-yayasan-damandiri-sasar-generasi-muda>.
- Hardjosoediro S. 1982. Beberapa Segi Usaha Kelapa di Kabupaten Banyumas. IN: Sajogyo, ed., *Ekologi Pedesaan*, 223-256. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiyana ID. 2017. Analisis Spasial Potensi Resapan (*Recharge*) Air Tanah untuk Kebutuhan Air Domestik dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. [skripsi]. Surakarta (ID): Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Melinda F. 2015. Efisiensi produksi usaha pengolahan gula kelapa Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah [thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Probowati, BD. 2011. *Perancangan Model Rantai Pasokan untuk Agroindustri Kelapa Terpadu dalam Skala Usaha Kecil*. Bogor: IPB Press.

- Scott, JC. 1994. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta (ID): LP3ES.
- Soekartawi. 1986. Ilmu Usaha Tani, dan Penelitian untuk Pengembangan Petani Kecil. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Susilowati, SH. 2016. Fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agroekonomi*. 34(1): 35-55.
- Sularno, Supriyanto B. 2012. Partisipasi kelompok tani dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Optimalisasi Pekarangan; 2012 November 6; Semarang, Indonesia*. Universitas Diponegoro. Hlm: 265-270.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009. 2009. *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. [Internet]. [diunduh 2020 Januari 16]. Tersedia pada: <https://jdih.kemennpppa.go.id/peraturan/uu%20no%2052%20tahun%202009.pdf>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014. 2014. *Desa*. [Internet]. [diunduh 2020 Januari 16]. Tersedia pada: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/6TAHUN2014UU.htm>.
- Zuhdi, S. 2002. *Cilacap (1830-1942) Bangkit dan Runtuhnya Suatu Pelabuhan di Jawa*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 18. 205 halaman.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Pengujian Tanah di Laboratorium Seameo Biotrop



**SEAMEO BIOTROP
SERVICES LABORATORY**

Jl. Raya Telur Km. 6, P.O. Box 116, Bogor, Indonesia
Phone : 62-251-8357175 Fax : 62-251-8357175

Website : <http://www.seameo.org> email : services@seameo.org



LAPORAN HASIL PENGUJIAN TEST RESULT

x. Order / Request Number : 1522/TTVIX/2018
y. Contoh / Sample Number : 3737-3740
z. Halaman / Page : 2 dari 2

| Kode Contoh | *pH (1:1) | | *C Org | | *N Total | | *P ₂ O ₅ Tersedia | | Kation-kation dapat ditukar dan KTK (SU-MU-TT-07 c (E) Saraf Prasyang SU-PAc (0.8, pH 7.0) | | | | | Kation-kation | | U ₂ & U ₃ (U ₂ & U ₃) | | Telstur 3 Fraksi SU-MU-TT-10 (Bdrometer) | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|------|------------------------|------|---|------|---|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|--|---------|---|---------|---------|---------|
| | SNI 4729-1998 (Water & Black) | | SNI 4729-1998 (Water & Black) | | SNI 4721-1998 (Berdah) | | SNI 4721-1998 (III) | | *Ca *Mg *K *Na Total KTK | | | | | *K | | *U ₂ *U ₃ | | Pasir (50-200) % Debu (20-50) % Liat (0.2-20) % | | | |
| | H ₂ O | CaCl ₂ | % | % | % | % | ppm | ppm | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg | cmol/kg |
| Madura | 5.3 | 4.7 | 1.07 | 0.16 | 7 | 16.0 | 18.71 | 5.27 | 0.90 | 0.24 | 25.12 | 25.96 | 96.74 | 0.00 | 0.12 | 11.5 | 28.1 | 60.4 | | | |
| Cilongok | 7.7 | 7.1 | 2.02 | 0.20 | 10 | 35.8 | 24.85 | 1.20 | 1.63 | 0.34 | 28.02 | 24.49 | 100 | 0.00 | 0.12 | 1.8 | 51.8 | 46.4 | | | |
| Bantaragung, 1 | 5.0 | 4.8 | 3.18 | 0.39 | 8 | 83.0 | 3.88 | 0.54 | 0.20 | 0.14 | 4.76 | 13.63 | 34.90 | 0.00 | 0.21 | 66.7 | 31.5 | 1.8 | | | |
| Bantaragung, 2 (Cibero) | 5.7 | 5.2 | 1.41 | 0.17 | 8 | 8.4 | 7.02 | 1.73 | 0.59 | 0.32 | 9.66 | 11.79 | 81.96 | 0.00 | 0.22 | 17.2 | 33.4 | 49.4 | | | |

seamio
 - Crouch (pH) menggunakan termokop beku 105°C
 - erodok = me/100g
 - * Telur nilai standar oleh KAN dengan No. LP-221-IDN
 - * Arif Nuradin - Tanah

Bogor, 11 Oktober 2019
 Supervisor Lab. Tanah & Tanaman

Arif Nuradin

Arif Nuradin, BSc
 N.P. 196711172007011001

Hasil Pengujian ini tidak untuk digunakan dan hanya berlaku untuk contoh-contoh di atas. Pengambilan contoh bertanggung jawab atas kebenaran/tanding/buang

Lampiran 2. Kuesioner Sensus Pendataan



Universitas Trilogi

Desa Cerdas Mandiri- Lestari -DCML
Instrumen-DCML-Agroindustri

No:

Instrumen

Karakteristik Rumah Tangga

Prosedur wawancara

Mulai : _____
Selesai : _____
Pewawancara : _____

1. Identifikasi Rumah Tangga

11.1 Kabupaten : _____
11.2 Kecamatan : _____
11.3 Desa : _____
11.4 Dusun : _____
11.5 RT/RW : _____

11.6 Tipe pemukiman : Terpusat dalam pemukiman

Tersebar sepanjang jalan

Berkelompok dalam keluarga besar

Terisolir/akses sulit

11.7 Lokasi : _____

11.8 Alamat Rumah : Komunitas : Heterogen/Homogen
*(coret yang tidak perlu)

Jalan : _____

No. Rumah : _____

Luas rumah/
pekarangan : _____

Keterangan
Lain : _____

11.9 Suku Bangsa : _____

11.10 Agama : _____

2. Karakteristik Rumah Tangga

11.11 Status rumah:

Milik pribadi 5

Milik pribadi dengan cicilan 4

Sewa/kontrak 3

Dipinjami/hak pakai 2

Penghuni liar 1

11.12 Tipe rumah:

Permanen 4

Semi Permanen 3

Tidak permanen/Gubuk 2

Lainnya (sebutkan) 1

11.13 Material konstruksi dinding rumah?

Bata/batu/beton/semen 1

Playwood 2

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| Kayu | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Anyaman daun nipah/kelapa/bambu | <input type="checkbox"/> | 4 |
| Lainnya (sebutkan) | <input type="checkbox"/> | 5 |

11.14 Material konstruksi atap rumah?

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Beton/semen | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Genteng | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Logam (seng, aluminium) | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Kayu/sirap | <input type="checkbox"/> | 4 |
| Daun nipah/kelapa | <input type="checkbox"/> | 5 |
| Lainnya (sebutkan) | <input type="checkbox"/> | 6 |

11.15 Material konstruksi lantai rumah?

| | | |
|--------------------|--------------------------|---|
| Beton/semen | <input type="checkbox"/> | 1 |
| Ubin, batu bata | <input type="checkbox"/> | 2 |
| Kayu | <input type="checkbox"/> | 3 |
| Bambu | <input type="checkbox"/> | 4 |
| Tanah, pasir | <input type="checkbox"/> | 5 |
| Lainnya (sebutkan) | <input type="checkbox"/> | 6 |

11.16 Apa tipe peralatan sanitasi/tempat pembuangan kotoran yang digunakan?

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Tersambung ke tangki pembuangan | 1 |
| <input type="checkbox"/> Kakus tradisional | 2 |
| <input type="checkbox"/> MCK Umum | 3 |
| <input type="checkbox"/> Sungai/laut | 4 |
| <input type="checkbox"/> Pekarangan | 5 |
| <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) | 6 |

11.17 Apakah sumber air utama rumah tangga ini?

- Air ledeng 1
 - Pompa 2
 - Sumur 3
 - Mata air 4
 - Sungai 5
 - Lainnya (sebutkan) 6
-

11.18 Jika sumber air utama adalah air ledeng, sebutkan peruntukannya?

11.19 Bagaimana rumah tangga membuang sampah?

- Pembuangan sampah umum 1
 - Pembuangan sampah pribadi 2
 - Dibakar atau dikubur 3
 - Buang ke tanah kosong/sungai/laut 4
 - Lainnya (sebutkan) 5
-

11.20 Apa tipe penerangan yang digunakan rumah tangga?

- Listrik (PLN) 1
 - Listrik genset umum 2
 - Listrik genset pribadi 3
 - Lampu minyak tanah 4
 - Obor/lilin 5
 - Lainnya (sebutkan) 6
-

NOTE: • daftar nama anggota keluarga dalam kartu keluarga (KK)

| No. | 2.13. Daftar nama individu dalam KK (Nama) | 2.14. hubungan dengan kepala keluarga (Kode) | 2.15. Sex Pria 1 Wanita ... 2 | 2.16. Umur Dalam tahun | 2.17. Status perkawinan Menikah 1 Menikah agama 2 Bercerai 3 Janda/duda .. 4 Belum menikah 5 | 2.18. Pekerjaan utama (Kode) | 2.19. Pekerjaan sampingan | 2.20. Sekarang bekerja Ya 1 Tidak 2 | 2.21. Tingkat pendidikan yang terakhir (Tahun) | 2.21. Berapa lama tinggal di desa | 2.22. Apakah ada anggota keluarga yang merantau, sebutkan (1) sekolah (2) bekerja |
|-----|---|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 01 | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

| Kode Untuk Pertanyaan 2.13 dan 2.14 | Kode Untuk Pertanyaan 2.18 dan 2.19 | | Kode Untuk Pertanyaan 2.19 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Kepala rumah tangga ^a 01 | Menantu 13 | Pedagang 15 | Buta huruf, tidak sekolah2 |
| Istri/suami ⁰² | Ipar 14 | PNS 16 | Baca-tulis, tidak sekolah2 |
| Putra/putri ⁰³ | Keponakan 15 | Polisi/TNI 17 | SD, tidak tamat3 |
| Ayah/ibu 04 | Paman/bibi 16 | Pegawai/karyawan 18 | SD tamat 4 |
| Kakak/adik ⁰⁵ | Sepupu 17 | Supir/Ojek 19 | SMP tidak tamat 5 |
| Anak tiri 06 | Famili 18 | Menganggur 20 | SMP tamat 6 |
| Bapak/ibu tiri 07 | Keluarga jauh 19 | Buruh Migran Lokal 21 | SMA tamat 8 |
| Cucu 08 | Kerabat keluarga 20 | Buruh Migran Internasional 22 | Akademi/Diploma ⁹ |
| Kakek/nenek 09 | Bukan famili/keluarga 21 | Pengrajin 23 | Akademi tidak tamat ¹⁰ |
| Mertua 10 | Penyewa 22 | Petugas kesehatan 24 | Univ. tidak tamat ¹¹ |
| Menantu 11 | Lainnya 23 | Petugas kesehatan 25 | Univ. Tamat 12 |
| Ipar 12 | | Lainnya (sebutkan) 26 | |
| | Wirasaha 13 | | |
| | LSM 14 | | |

3. Lahan dan Sarana Produksi

11.1 Letak lahan pertanian

- Di sekitar rumah tinggal
- Jauh dari rumah tinggal

11.2 Jika jauh dari rumah tinggal

- Terisolir di dalam desa, sebutkan jaraknya _____
- Mudah dijangkau di dalam desa, sebutkan jaraknya _____
- Terisolir di luar desa, sebutkan jaraknya _____
- Mudah dijangkau di luar desa, sebutkan jaraknya _____

11.3 Status lahan pertanian

- Petani pemilik
- Petani penyewa/penggarap
- Buruh tani
- Lainnya _____

11.4 Jika menyewa/menggarap lahan bagaimana sistem bagi hasilnya

11.5 Apakah menggunakan tenaga kerja dari luar desa?

- Ya
- Tidak

11.6 Jika Ya, sebutkan jumlahnya

- 11.7 Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan:
- Borongan
 - Harian
 - Lainnya (sebutkan) _____
- 11.8 Luas lahan milik yang digarap: _____ (ha)
- Pertanian: _____ (ha)
 - Perikanan: _____ (ha)
 - Peternakan: _____ (ha)
- 11.9 Luas lahan sewa yang digarap: _____ (ha)
- Pertanian: _____ (ha)
 - Perikanan: _____ (ha)
 - Peternakan: _____ (ha)
- 11.10 Luas lahan yang dimiliki:
- Saat ini: _____ (ha)
 - 3 (tiga) tahun yang lalu: _____ (ha)
- 11.11 Status kepemilikan lahan:
- Tanpa surat izin
 - Dengan surat izin dari Kepala Desa
 - Dengan surat izin dari Kecamatan
 - Memiliki sertifikat hak milik
 - Lainnya (sebutkan) _____

4. Budidaya

a. Jenis Budidaya Pertanian

- Hortikultura, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Luas tanam | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Tanaman pangan, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Luas tanam | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Perkebunan, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Luas tanam | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

b. Jenis Budidaya Perikanan

- Perikanan darat, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Luas kolam (M2) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Perikanan laut, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Luas kolam (M2) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Perikanan unggulan desa, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Luas kolam (M2) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|-----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

c. Jenis Budidaya Peternakan

- Peternak pedaging, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Jumlah ternak (ekor) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Peternak perah, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Jumlah ternak (ekor) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Peternak unggas, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Jumlah ternak (ekor) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg atau Butir) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3.4. Jenis budidaya peternakan:

- Tradisional
- Semi intensif
- Sistem terbuka
 - Sistem terbuka sebutkan luas _____
 - Sistem tertutup sebutkan luas _____
 - intensif _____
 - Sistem terbuka sebutkan luas _____
 - Sistem tertutup sebutkan luas _____
- Lainnya (sebutkan)

3.5. Teknik budidaya perikanan:

- Sungai/waduk/embung/danau
- Kolam/empang/bioflok/keramba
- Sistem terbuka
 - Tradisional sebutkan luas _____
 - Semi intensif sebutkan luas _____
 - Intensif _____
- Lainnya (sebutkan)

3.6. Penyediaan bahan baku:

- Beli
- Buat sendiri
- Lainnya, sebutkan _____

3.7. Jika Buat sendiri, bagaimana bahan baku diperoleh dan berapa besar kapasitas produksi?

3.8. Teknik budidaya peternakan:

- Kandang komunal jumlah ternak _____
- Kandang pribadi jumlah ternak _____
- Lepas liar jumlah ternak _____
- Lainnya, sebutkan

3.9. Apakah memiliki tanaman pakan ternak (hijauan)?

- Ya
- Tidak

3.10. Jika Ya, sebutkan jenis hijauan, berapa kapasitas produksinya dan apakah dijual?

3.11. Jika Tidak, sumber mendapatkan hijauan?

- Beli
- beli luar desa
- Lahan komunal

3.12. Apakah budidaya pertanian/perikanan/peternakan sering diserang hama dan penyakit?

- Ya
- Tidak

3.13. Jika Ya, sebutkan hama dan penyakit yang menyerang?

1) Jenis Hama dan Penyakit Budidaya Pertanian

- Hortikultura, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Tanaman pangan, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Perkebunan, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2) Jenis Hama dan Penyakit Budidaya Perikanan

- Perikanan darat, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Perikanan laut, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Perikanan unggulan desa, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3) Jenis Hama dan Penyakit Budidaya Peternakan

- Peternak pedaging, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Peternak perah, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- Peternak unggas, sebutkan 4 hama dan penyakit komoditas utama

| Komoditi | Nama Hama | Nama Penyakit | Pencegahan hama/ penyakit | Nama Obat | Biaya Pencegahan (Rp) |
|----------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- 3.14. Sebutkan tiga kendala/masalah utama dalam budidaya

Budidaya pertanian _____

Budidaya perikanan _____

Budidaya peternakan _____

5. Pengolahan

a. Jenis Pengolahan Hasil Pertanian

- Hortikultura, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Tanaman pangan, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Perkebunan, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

b. Jenis Pengolahan Hasil Perikanan

- Perikanan darat, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Perikanan laut, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Perikanan unggulan desa, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

c. Jenis Pengolahan Hasil Peternakan

- Peternak pedaging, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Peternak perah, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Peternak unggas, sebutkan 4 komoditas utama

| Komoditi | Produk olahan | Teknik Pengolahan (Konvensional/ Modern) | Jumlah Investasi (Rp) | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran |
|----------|---------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4.7. Sebutkan tiga kendala/masalah utama dalam pengolahan

- Pertanian

Hortikultura _____

Tanaman pangan _____

Perkebunan _____

- Perikanan

Perikanan darat _____

Perikanan laut _____

Perikanan unggulan desa _____

- Peternakan

Pedaging _____

Perah _____

Unggas _____

6. Kelayakan Usaha Tani

5.1. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya pertanian?

Budidaya pertanian hortikultura

Ya

Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas tanam | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.2. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya pertanian?

Budidaya pertanian tanaman pangan

Ya

Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas tanam | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

5.3. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya pertanian?

Budidaya pertanian perkebunan

Ya

Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas tanam | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.4. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya perikanan?

Budidaya perikanan darat

Ya

Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas budidaya | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|---------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.5. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya perikanan?

Budidaya perikanan laut

Ya

Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas budidaya | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|---------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.6. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya perikanan?

Budidaya perikanan unggulan desa

- Ya
 Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas budidaya | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|---------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.7. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya peternakan?

Budidaya peternak pedaging

- Ya
 Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas budidaya | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|---------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.8. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya peternakan?

Budidaya peternak perah

- Ya
 Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas budidaya | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|---------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.9. Apakah pernah mengalami kerugian dalam budidaya peternakan?

Budidaya peternak unggas

- Ya
 Tidak

Jika Ya, sebutkan komoditasnya

| Komoditi | Luas budidaya | Jumlah Kerugian (Rp) | Penyebab kerugian | Sumber dana penanganan (Bank/Koperasi/Tengkulak/Keluarga/Tetangga/Pribadi) | Bunga pinjaman |
|----------|---------------|----------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.10. Menurut anda hasil budidaya apa yang mudah dipasarkan

Pertanian

Hortikultura

sebutkan jenis komoditas _____

jumlah produksinya (Kg) _____

Tanaman pangan

sebutkan jenis komoditas _____

jumlah produksinya (Kg) _____

Perkebunan

sebutkan jenis komoditas _____

jumlah produksinya (Kg) _____

- Perikanan
 - Perikanan darat
 sebutkan jenis komoditas _____
 jumlah produksinya (Kg) _____
 - Perikanan laut
 sebutkan jenis komoditas _____
 jumlah produksinya (Kg) _____
 - Perikanan darat unggulan desa
 sebutkan jenis komoditas _____
 jumlah produksinya (Kg) _____
- Peternakan
 - Peternak pedaging
 sebutkan jenis komoditas _____
 jumlah produksinya (Kg) _____
 - Peternak perah
 sebutkan jenis komoditas _____
 jumlah produksinya (Kg) _____
 - Peternak unggas
 sebutkan jenis komoditas _____
 jumlah produksinya (Kg) _____

5.11. Sebutkan tiga (3) kendala utama dalam pemasaran?

- Pertanian
 - Hortikultura _____
 - Tanaman pangan _____
 - Perkebunan _____

- Perikanan
 - Perikanan darat _____
 - Perikanan laut _____
 - Perikanan unggulan desa _____
- Peternakan
 - Pedaging _____
 - Perah _____
 - Unggas _____

5.12. Bagaimana jalur pemasaran dilakukan?

- pasar tradisional
- pasar modern
- gudang pengumpul
- Online
- Lainnya, sebutkan

5.13. Bagaimana sistem pembayaran hasil produksi?

- Tunai
- Kredit
- ijon/*down payment*
- Lainnya, sebutkan _____

5.14. Bagaimana mekanisme penentuan harga produk?

- harga pasar
- ditentukan pembeli
- ditentukan penjual
- negosiasi

5.15. Bagaimana memperoleh informasi harga produk?

harga pasar _____

5.16. Sarana transportasi yang digunakan dalam pemasaran?

- Motor pribadi
- Mobil pribadi
- Motor sewa
- Mobil sewa
- Lainnya, sebutkan _____

5.17. Apakah memiliki tanaman pekarangan yang bernilai ekonomi?

- Ya
- Tidak

5.18. Bila Ya, jenis tanaman pekarangan (buah-buahan/tanaman obat, dan lain-lain) apa yang dimiliki?

| Komoditi | Jumlah tanaman | Jumlah produksi (Kg) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran | Tingkat kesulitan pemasaran (Sulit/Mudah) |
|----------|----------------|----------------------|---------------------|-----------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

5.19. Apakah memiliki hewan peliharaan yang bernilai ekonomi?

- Ya
- Tidak

5.20. Bila Ya, jenis hewan peliharaan (ikan/unggas/ternak/hewan lain) apa yang dimiliki?

| Komoditi | Jumlah hewan peliharaan | Jumlah produksi (Kg atau ekor) | Nilai produksi (Rp) | Pemasaran | Tingkat kesulitan pemasaran (Sulit/Mudah) |
|----------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

7. Biaya Produksi dan Tenaga Kerja

6.1. Berapa biaya produksi yang dibutuhkan dalam usaha budidaya yang dilakukan?

- Pertanian
 - Hortikultura

| Komoditi | Biaya produksi (Rp) | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan | Bibit | Pupuk | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

- Tanaman pangan

| Komoditi | Biaya produksi (Rp) | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan | Bibit | Pupuk | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Perkebunan

| Komoditi | Biaya produksi (Rp) | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan | Bibit | Pupuk | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Perikanan

Perikanan darat

| Komoditi | Biaya produksi (Rp.) | | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------------|-------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan | Pupuk pra tanam | Bibit | Pakan | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Perikanan laut

| Komoditi | Biaya produksi (Rp) | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan | Pupuk pra tanam | Bibit | Pakan | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Perikanan unggulan desa

| Komoditi | Biaya produksi (Rp) | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|-------|-------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan | Pupuk pra tanam | Bibit | Pakan | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- Peternakan
 - Peternak pedaging

| Komoditi | Biaya produksi (Rp) | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|----------------|------------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan /kandang | Bibit | Pakan /hijauan | konsentrat | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- Peternak perah

| Komoditi | Biaya produksi (Rp) | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|----------------|------------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan /kandang | Bibit | Pakan /hijauan | konsentrat | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- Peternak unggas

| Komoditi | Biaya produksi (Rp) | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|----------------|------------|------|--------------|-----------|--------------|
| | Lahan /kandang | Bibit | Pakan /hijauan | konsentrat | Obat | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6.2. Biaya produksi budidaya pertanian saat ini diperoleh dari:

- Biaya Sendiri
- Tengkulak
- Bank
- Biaya bagi hasil
- Koperasi
- Keluarga
- Lainnya, sebutkan _____

- 6.3. Jika bukan Biaya Sendiri, bagaimana cara memperolehnya:
- Mudah
 - Sulit
- 6.4. Jika sulit, apakah anda ingin mendapatkan pinjaman modal produksi budidaya pertanian dari pihak lain? Jelaskan alasannya!
-

6.5. Tiga tahun terakhir biaya produksi budidaya pertanian diperoleh dari:

- Biaya Sendiri
- Tengkulak
- Bank
- Biaya bagi hasil
- Koperasi
- Keluarga
- Lainnya, sebutkan

6.6. Investasi pengolahan produk pertanian per bulan

- Hortikultura

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- Tanaman pangan

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Perkebunan

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6.7. Investasi pengolahan hasil perikanan per bulan

Perikanan darat

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Perikanan laut

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Perikanan unggulan desa

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6.8. Investasi pengolahan hasil peternakan per bulan

- Peternak pedaging

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- Peternak perah

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- Peternak unggas

| Komoditi | Biaya pengolahan (Rp) | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------|---------|-----|--------------|-----------|--------------|
| | Tempat | Bahan baku | Bahan pendukung | listrik | air | Tenaga kerja | Peralatan | Transportasi |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

6.9. Biaya produksi pengolahan hasil pertanian saat ini diperoleh dari:

- Biaya Sendiri
 Tengkulak
 Bank
 Biaya bagi hasil
 Koperasi
 Keluarga
 Lainnya, sebutkan _____

- 6.10. Jika bukan Biaya Sendiri, bagaimana cara memperolehnya:
- Mudah
 - Sulit
- 6.11. Jika sulit, apakah anda ingin mendapatkan pinjaman modal produksi hasil pengolahan pertanian dari pihak lain? Jelaskan alasannya!
-

8. Infrastruktur

- 7.1. Biaya produksi pengolahan hasil pertanian saat ini diperoleh dari:
- Ya
 - Tidak
- 7.2. Jika Ya, bagaimana pembangunan jalan usaha tani dikerjakan?
- swadaya
 - swakelola
 - pemerintah
 - swasta
- 7.3. Bagaimana kondisi permukaan jalan usaha tani?
- Aspal/beton
 - Pengerasan kerikil/batu
 - Tanah
 - Lainnya, Sebutkan
- 7.4. Bagaimana sistem irigasi yang digunakan?
- Primer
 - Sekunder
 - Tersier:
 - selang
 - bambu
 - pipa
 - parit
 - Lainnya, Sebutkan

7.5. Apakah anda berpartisipasi dalam perawatan sistem irigasi?

- Ya
- Tidak

7.6. Jika Ya, seberapa aktif keterlibatan anda?

- Sebulan sekali
- Seminggu sekali
- Seperlunya
- Lainnya, sebutkan _____

7.7. Asal sumber air irigasi yang digunakan?

- sungai
- sumur
- mata air
- waduk
- embung
- air hujan

7.8. Apakah ada masalah dalam penggunaan irigasi?

- Ya
- Tidak

7.9. Jika Ya, sebutkan?

7.10. Apakah di antara keluarga ada yang memiliki HP/Smart-phone?

- Ya
- Tidak

7.11. Jika Ya, berapa orang dalam keluarga yang menggunakan HP/ Smart-phone?

7.12. Apakah sering mengalami kendala sinyal dalam menggunakan HP/Smart-phone?

- Ya
- Tidak

7.13. Apakah keluarga memanfaatkan teknologi internet dalam kegiatan ekonomi?

- Ya
- Tidak

7.14. Jika Ya, seberapa aktif keterlibatan anda?

- Pemasaran produk
- Informasi harga sarana produksi
- Informasi harga komoditas
- Informasi teknologi
- Informasi penyuluhan
- Lainnya, sebutkan

7.15. Apakah pernah dilakukan penyuluhan dalam 3 tahun terakhir?

- Ya
- Tidak

7.16. Jika Ya, penyuluhan tentang apa dan siapa yang melakukan?

7.17. Apa dampak penyuluhan tersebut?

9. Kegiatan Ekonomi Nonpertanian

8.1. Apakah anda memiliki kegiatan ekonomi di luar bidang pertanian?

- Ya
- Tidak

8.2. Jika Ya, sebutkan jenis usaha?

8.3. Apakah anda menjual produk lokal?

- Ya
- Tidak

8.4. Jika Ya, sebutkan produk lokal yang dijual?

8.5. Jika Tidak, apakah alasan anda tidak menjual produk lokal?

8.6. Apakah sebagai pemilik atau karyawan?

- Ya
- Tidak

8.7. Jika Ya, berapa jumlah tenaga kerja?

8.8. Berapa rata-rata omset dalam sebulan?

10. Keamanan Masyarakat dan Kearifan Lokal

9.1. Apakah keluarga pernah mengalami tindakan kriminal?

- Ya
- Tidak

9.2. Jika Ya, apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya?

9.3. Siapa yang terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut?

- Kepolisian
- pemuka agama
- kekeluargaan
- aparat desa
- Lainnya, sebutkan _____

9.4. Apakah lahan anda pernah mengalami bencana alam?

- Banjir
- Longsor
- Kekeringan
- patahan/gempa
- Terkena abu vulkanik
- Kebakaran
- Angin puting beliung
- Tsunami/gelombang pasang
- Lainnya, sebutkan _____

9.5. Bagaimana upaya antisipasi terhadap bencana dilakukan?

9.6. Apakah anggota keluarga terlibat dalam kegiatan keamanan lingkungan?

- Ya
- Tidak

9.7. Jika Ya, seberapa sering

9.8. Apakah keluarga masih sering terlibat dalam kegiatan gotong royong?

- Ya
- Tidak

9.9. Jika Ya, Sebutkan 3 jenis kegiatan gotong royong yang diikuti

9.10. Apakah dalam setiap musim panen menyisakan hasil panen ke lumbung?

- Ya
- Tidak

9.11. Jika Tidak, bagaimana anda menghadapi musim paceklik?

9.12. Apakah masih ada tradisi tanam dan panen bersama?

- Ya
- Tidak

9.13. Jika Ya, bagaimana mekanismenya?

9.14. Apakah anda berpartisipasi dalam tradisi tanam dan panen bersama?

- Ya
- Tidak

9.15. Jika Ya, seberapa sering?

9.16. Di mana keluarga biasanya membeli kebutuhan sandang, pangan dan papan?

- Pasar desa
- Pasar kecamatan

- Pasar kota/kabupaten
- Pedagang keliling
- Secara online

9.17. Berapa besar pengeluaran sandang, pangan dan papan

9.18. Apakah masih mengeluarkan biaya pendidikan?

- Ya
- Tidak

9.19. Bila Ya, berapa jumlahnya?

9.20. Apakah mengalokasikan biaya untuk rekreasi keluarga?

- Ya
- Tidak

9.21. Bila Ya, berapa biaya yang dibutuhkan?

9.22. Ke mana lokasi rekreasi yang utama dikunjungi?

- Mall
 - Bioskop
 - Alun-alun/lapangan terbuka
 - Lainnya, sebutkan
-

11. Kelembagaan dan Sosial Budaya

10.1. Apakah anda aktif dalam organisasi kemasyarakatan?

- Ya
- Tidak

10.2. Bila Ya, sebutkan apa nama organisasinya?

- 10.3. Apakah anggota organisasi berasal dari lingkungan seasal/
geografis yang sama?
- Ya
 - Tidak
- 10.4. Bila Tidak, berapa banyak anggota organisasi yang berasal dari
luar desa?
-
- 10.5. Apakah organisasi memiliki pengaruh dalam setiap keputusan
yang akan anda ambil?
- Ya
 - Tidak
- 10.6. Bila Ya, seberapa besar pengaruhnya?
-
- 10.7. Seberapa sering anda pergi keluar kota?
- Sering
 - Kadang-kadang
 - Tidak pernah
 - Lainnya, sebutkan
- 10.8. Seberapa sering berinteraksi/berkomunikasi dengan orang
yang anda tidak kenal?
- Sering
 - Kadang-kadang
 - Tidak pernah
 - Lainnya, sebutkan
-
- 10.9. Seberapa aktif mencari informasi terkini untuk meningkatkan
kemampuan pertanian anda?
- Aktif
 - Kurang aktif

- Tidak aktif
 - Lainnya, sebutkan
-

10.10. Dari mana informasi tersebut anda dapatkan?

10.11. Apakah anda pernah mencoba hal baru yang mampu meningkatkan produksi?

- Ya
- Tidak

10.12. Apakah uji coba tersebut berhasil?

- Ya
- Tidak

10.13. Bila Ya, bagaimana anda melakukannya?

10.14. Bila Tidak, risiko apa yang harus anda tanggung dan bagaimana mengatasinya?

10.15. Apakah anda melakukan kalkulasi dalam mengatur ekonomi rumah tangga?

- Ya
- Tidak

10.16. Bila Ya, bagaimana anda melakukannya?

10.17. Apakah anda melakukan perhitungan pembiayaan usaha tani?

- Ya
- Tidak

10.18. Bila Ya, bagaimana anda melakukan perhitungan?

- 10.19. Apakah menyiapkan investasi (tabungan) untuk meningkatkan usaha anda?
- Ya
 - Tidak
- 10.20. Bila Ya, bagaimana anda menggunakan investasi (tabungan) tersebut?
-
- 10.21. Apakah anggota keluarga terlibat dalam kegiatan usaha pertanian yang anda tekuni?
- Ya
 - Tidak
- 10.22. Bila Ya, bagaimana peran anggota keluarga dalam kegiatan tersebut?
-
- 10.23. Apakah kegiatan usaha pertanian yang anda tekuni memanfaatkan teknologi?
- Ya
 - Tidak
- 10.24. Bila Ya, teknologi seperti apa yang digunakan dalam usaha pertanian anda?
-
- 10.25. Bagaimana mendistribusikan produksi pertanian anda?
- Hanya untuk konsumsi keluarga
 - Ditampung oleh tengkulak
 - Dijual ke pasar
 - Lainnya, sebutkan
-
- 10.26. Puaskah anda dengan keadaan hidup (nasib) anda saat ini?
- Ya
 - Tidak

10.27. Bila Tidak, bagaimana mengatasi keadaan hidup (nasib) yang kurang berpihak pada anda?

10.28. Apakah anda masih percaya, bahwa masyarakat di desa ini akan membantu kesulitan hidup anda?

- Ya
- Tidak

10.29. Bila Tidak, apa yang menjadi penyebab anda tidak percaya terhadap hal itu?

10.30. Apakah anda masih percaya, terhadap program pemberdayaan dari pihak luar desa?

- Ya
- Tidak

10.31. Bila Tidak, apa yang menjadi penyebab anda tidak percaya terhadap hal itu?

10.32. Seberapa sering anda berhubungan dengan pemerintah/ aparat pemerintah?

- Sering
 - Kadang-kadang
 - Tidak pernah
 - Lainnya, sebutkan
-

10.33. Apakah anda sering terlibat dalam kegiatan mobilitas politik/ politik praktis?

- Sering
 - Kadang-kadang
 - Tidak pernah
 - Lainnya, sebutkan
-

10.34. Bagaimana anda menyalurkan aspirasi?

- Pemerintah
- Aparat desa
- Partai politik
- Tokoh masyarakat
- Organisasi masyarakat
- Sesepeuh dalam keluarga
- Lainnya, sebutkan

10.35. Apakah aspirasi tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan keinginan anda?

- Ya
- Tidak

10.36. Bila Tidak, apa yang menjadi penyebab aspirasi anda tidak ditindaklanjuti?

10.37. Apakah anda ingin mendapatkan pelatihan/penyuluhan yang mampu meningkatkan produktivitas usaha?

- Ya
- Tidak

10.38. Bila Ya, program pelatihan/penyuluhan seperti apa yang anda harapkan?

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BIODATA PENULIS



P. Setia Lenggono, menyelesaikan pendidikan Doktoralnya pada 2011 di Program Studi Sosiologi Pedesaan, IPB. Dari 2017 sampai dengan 2021 dipercaya sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), sekaligus Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) Universitas Trilogi. Saat ini aktif sebagai pendidik di Program Studi Agribisnis Universitas Trilogi dan peneliti di Pusat Studi Agraria IPB.

--- 000 ---



Heny Agustin lahir di Jakarta pada 16 Agustus 1988. Ia menamatkan pendidikan S-1 pada Program Studi Agronomi dan Hortikultura di Institut Pertanian Bogor kemudian melanjutkan S-2 pada Program Studi Ilmu dan Teknologi Benih di perguruan tinggi yang sama. Saat ini Ia menjadi dosen di Program Studi Agroekoteknologi

Universitas Trilogi. Selain mengajar, Ia juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan telah menerbitkan tulisan di berbagai jurnal.

--- 000 ---



Arman saat ini bekerja sebagai dosen di Prodi Agribisnis Universitas Trilogi. Ia meraih gelar Sarjana Pertanian dari Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin (2004) yang dilanjutkan dengan pendidikan S-2 pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor (IPB) (2009). Ia juga telah menyelesaikan program doktoral di IPB pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah dan Pedesaan IPB (2015).

--- 000 ---



Warid adalah seorang dosen dan penggerak *urban farming* di JABODETABEK, yang sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini mendapat amanah sebagai Ketua Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi. Lahir di Cirebon, 7 Maret 1985. Ia mendapat gelar Sarjana Pertanian (S.P) pada 2009 dan *Master of Science* (M.Si) pada 2015 dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Ia juga tercatat aktif dalam organisasi mahasiswa daerah Ikatan Kekeluargaan Cirebon (IKC IPB) yang menjadi ajang silaturahmi bagi mahasiswa IPB yang berasal dari Cirebon.

--- 000 ---



Budhi Purwandaya, menyelesaikan pendidikan M.Sc dan Ph.D dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Trilogi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan dosen tidak tetap di Pascasarjana S-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.

--- 000 ---



Umar Al Faruq, menyelesaikan pendidikan Magister Komputer pada 2005 di Jurusan Ilmu Komputer FMIPA UGM Yogyakarta. Saat ini aktif sebagai pendidik di Program Studi Sistem Informasi Universitas Trilogi.

--- 000 ---



Zainul Kisman menyelesaikan pendidikan doktoralnya tahun 2016 pada Program Doktor Manajemen (Konsentrasi Manajemen Keuangan), Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini aktif sebagai pendidik di Program Studi Manajemen Universitas Trilogi dan peneliti di LPPM Universitas Trilogi.

--- 000 ---



Oki Kurniawan, berprofesi sebagai Dosen Program Studi Desain Produk Universitas Trilogi sejak 2014. Ia lahir di Bandung, 20 Oktober 1977. Ia merupakan lulusan Desain FSRD Institut Teknologi Bandung untuk program S-1 dan S-2.

--- 000 ---



Yodfiatfinda, lahir di Maninjau, (Sumbar) pada 6 September 1967. Menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Perikanan, IPB, Bogor tahun 1991; Program Magister dari Sekolah Manajemen dan Bisnis IPB (*Major: International Trade*) tahun 2008; dan program Doktorat diselesaikan di *Department of Agribusiness and Information System, Faculty of Agriculture* Universiti Putra Malaysia pada tahun 2012. Ia mengikuti program pendidikan reguler angkatan (PPRA) ke 57 LEMHANNAS RI tahun 2018. Saat ini Ia bekerja sebagai Dosen Tetap Prodi Agribisnis Fakultas Bioindustri, Universitas Trilogi.

--- 000 ---



Homa P. Harahap, lahir di P. Siantar pada 27 Desember 1970, adalah dosen pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Trilogi. Ia pernah menempuh pendidikan S-1 *Computer Science* di Universitas Padjadjaran dan kemudian melanjutkan studinya di S-2 Magister Manajemen STEKPI.